

# Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon

PROGRAM SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN (SNPK)

TIM SNPK-THC:

Mohammad Hasan Ansori  
Rudi Sukandar  
Sopar Peranto  
Fathun Karib  
Sofyan Cholid  
Imron Rasyid



# **SEGREGASI, KEKERASAN DAN KEBIJAKAN REKONSTRUKSI PASCA KONFLIK DI AMBON**

Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan

**Tim SNPK-THC**

Mohammad Hasan Ansori

Rudi Sukandar

Sopar Peranto

Fathun Karib

Sofyan Cholid

Imron Rasyid

Diterbitkan dengan kerja sama antara

**THE HABIBIE CENTER**

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan 12560, Indonesia

Telp. 62 21 780 8125/62 21 781 7211 | Fax. 62 21 780 8125/62 21 781 7212

E-mail: [nvms@habibiecenter.or.id](mailto:nvms@habibiecenter.or.id) | [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)

[@habibiecenter](https://facebook.com/habibiecenter)

**SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN**

Cetakan pertama Februari, 2014

Hak cipta dilindungi undang-undang

**Tim SNPK-THC**

*Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon*

*Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan*

Depok, SNPK-THC 2014

xx + 308 hlm.; 14 cm x 21 cm

ISBN: 978-602-99608-3-9

# Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Daftar Singkatan dan Akronim	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Konsep dan Kajian Literatur	6
1. Konsep Segregasi	6
2. Segregasi dan Kekerasan di Wilayah Pasca-Konflik	10
3. Segregasi dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca-Konflik Pemerintah	11
C. Metodologi Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	15
2. Strategi Sampling	16
BAB II	
GAMBARAN UMUM KOTA AMBON	19
A. Gambaran Demografis Kota Ambon	19
1. Gambaran Wilayah Kota Ambon	19
2. Gambaran Kependudukan Kota Ambon	21
B. Situasi Terkini Kota Ambon	25
1. Situasi Sosial	25
2. Situasi Politik	26
3. Situasi Ekonomi	29
BAB III	
PENGUNGSI, RELOKASI, DAN TERBENTUKNYA SEGREGASI PASCA-KONFLIK	32
A. Sejarah Singkat Segregasi dan Pola Segregasi Pasca-Konflik di Ambon	32
1. Sejarah Singkat Segregasi di Kota Ambon	32
2. Pola Segregasi Pasca-Konflik	35

B. Proses Relokasi/Perpindahan	37
1. Penanganan, Pendataan, dan Verifikasi Pengungsi Pasca-konflik	37
2. Opsi dan Skema Relokasi	43
3. Relokasi dan Konsentrasi Komunitas	46
C. Alasan-Alasan Relokasi	48
1. Kelompok Minoritas	48
2. Keamanan	49
3. Gagal Kembali ke Daerah Asal	51
D. Kondisi Masyarakat Pengungsi dan Relokasi	52
1. Pemberdayaan Masyarakat Pengungsi/Relokasi	52
2. Kondisi Fisik-Kesehatan dan Masalah Kependudukan	54
3. Distribusi Bantuan	55
E. Masalah Hak dan Keperdataan Pengungsi	57
1. Hak-Hak Perdata atas Rumah dan Aset yang Ditinggalkan	57
2. Sengketa Tanah	58
3. Sertifikasi Tanah	59

#### BAB IV

SEGREGASI, RELASI ANTAR-KOMUNITAS, DAN KEBIJAKAN REKONSTRUKSI PASCA-KONFLIK	61
A. Program Pembangunan dan Penanganan Segregasi Pasca-Konflik	61
1. Rekonsiliasi dan Pengembalian Tali Persaudaraan	61
2. Pembukaan Permukiman Baru yang Plural dan Heterogen	62
3. Bimbingan Anak-Anak, Penanganan Trauma, dan Sarasehan	64
4. Keresasian Sosial	65
5. Pembangunan Hubungan Orang <i>Basudara</i> (Bersaudara)	68
B. Realisasi Program Pembangunan dalam Penanganan Segregasi Pasca-Konflik	71
1. Program-Program yang Sudah Terealisasi	71
2. Program-Program yang Belum Terealisasi	74
C. Diskriminasi dalam Bidang Sosial, Ekonomi, dan Politik	77
D. Hubungan Antar-Komunitas Sesudah Konflik	82
1. Membaiknya Kembali Hubungan Antarmasyarakat	82
2. Menguatnya Kesadaran Masyarakat akan Konflik	84
3. Kerja Sama dan Komunikasi Antar-Komunitas	86

4. Beberapa Hambatan Interaksi Antar-Komunitas	87
5. Dekonstruksi Sosial-Ekonomi Pasca-Konflik	89
E. Perasaan Aman: Berbagai Perspektif Segmen Masyarakat	90
1. Perspektif Ibu-Ibu	90
2. Perspektif Mahasiswa/Pelajar	91
3. Perspektif Tukang Becak/Ojek	92
4. Perspektif Pedagang Kecil	93
5. Perspektif Pengusaha	94
F. Faktor Pemersatu dan Pemecah	94
1. Faktor Pemersatu	94
2. Faktor Pemecah	97

## BAB V

SEGREGASI, KEKERASAN, DAN PERAN APARAT KEAMANAN SERTA KEPEMIMPINAN PASCA-KONFLIK	100
A. Segregasi dan Munculnya Kekerasan Pasca-Konflik	100
1. Latar Belakang Segregasi	100
2. Segregasi Pasca-Konflik dan Kekerasan yang Muncul	103
3. Peristiwa Kekerasan Pasca-Konflik	105
B. Peran Aparat Keamanan dalam Menangani Kekerasan Pasca-Konflik	110
1. Peran Aparat dalam Kerusuhan 11 September 2011	110
2. Penugasan Aparat	112
3. Keterlibatan dan Keberpihakan Para Aparat	114
4. Evaluasi terhadap Kinerja Aparat dalam Proses Pengungkapan Kasus-Kasus Kekerasan	116
5. Masalah Pembangunan Pos Perbatasan dan Tentara BKO	118
C. Faktor Kepemimpinan, Kerukunan, dan Kekerasan Pasca-Konflik	121
1. Kepemimpinan Tokoh-Tokoh Agama	121
2. Kepemimpinan Tokoh-Tokoh Pimpinan Daerah dan Adat	125

## BAB VI

PERAN BERBAGAI UNSUR MASYARAKAT DALAM MENANGANI SEGREGASI DAN KEKERASAN PASCA-KONFLIK	130
A. Berbagai Upaya Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Pasca-Konflik	130

1. Aspek Sosial, Kultural, dan Religius	130
2. Aspek Politik	134
3. Aspek Ekonomi	135
B. Berbagai Upaya Lembaga Kemasyarakatan dan LSM Menangani Segregasi dan Kekerasan Pasca-Konflik	136
1. Keagamaan	145
2. Sosial/Pendidikan	148
3. Ekonomi	151
C. Peran Perempuan dalam Mencegah Kekerasan dan Menekan Segregasi	153
D. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Program Rekonstruksi Pasca-Konflik: Pendekatan Evaluatif	155
1. Persepsi terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Lain	155
E. Persepsi atas Program Perdamaian yang Dilakukan LSM-LSM	157
BAB VII	
SIMPULAN DAN REKOMENDASI	159
A. Simpulan	159
B. Rekomendasi	164
1. Penanganan Segregasi Pasca-Konflik	164
2. Penanganan dan Penyelesaian Pengungsi/Relokasi	167
3. Aparat Keamanan dan Penanganan Kekerasan Pasca-Konflik	168
Daftar Pustaka	170
Buku dan Artikel	170
Dokumen, Laporan, Surat Kabar, dan Majalah	175
Indeks	178
Lampiran-lampiran	182
Profil The Habibie Center dan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)	188

# Kata Pengantar

Di tengah kekhawatiran bahwa Indonesia akan terpecah belah karena konflik kekerasan di beberapa provinsi pasca-runtuhnya rezim Orde Baru, beberapa perjanjian damai berhasil dicapai dan menghentikan kekerasan yang telah menelan ribuan korban jiwa dan harta benda. Salah satu perjanjian tersebut adalah Perjanjian Damai Malino II, yang dipandang sebagai tonggak berakhirnya konflik berkepanjangan di Provinsi Maluku.

Namun demikian, kekerasan-kekerasan dalam skala yang lebih kecil dan bersifat sporadis masih terus terjadi di Maluku, khususnya di Kota Ambon. Peneliti dan penggiat perdamaian telah mengidentifikasi bahwa salah satu persoalan yang dihadapi Kota Ambon adalah segregasi pasca-konflik. Akan tetapi, belum ada studi yang berfokus pada hubungan antara segregasi pasca-konflik, munculnya kekerasan, dan kebijakan pembangunan pasca-konflik. Oleh karena itu, studi ini dirancang untuk mengisi kekosongan informasi tersebut.

Studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), kerja sama antara The Habibie Center dengan Kediputian I Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan didukung oleh The World Bank. Program ini didanai oleh hibah dari The Korea Economic Transitions and Peace Building Trust Fund.

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan besar dalam studi ini, di antaranya Sana Jaffrey, Wahyu Handoyo, Adrian Morrel dari The World Bank yang telah memberikan masukan besar sejak penyusunan konsep awal penelitian hingga penulisan laporan akhir; Bapak Willem Rampangilei, Bapak Nelwan Harahap, dan Ibu Zuraini dari Kediputian I Kemendiknas yang telah memberikan masukan dalam penyusunan konsep penelitian dan memberikan bantuan selama penelitian lapangan dilaksanakan di Kota Ambon; Prof. Kamanto Sunarto (FISIP-UI) dan Dr. Thung Ju Lan (LIPI) yang telah memberikan catatan kritis atas draf pertama konsep penelitian; Najib Azca (PSKP-UGM) dan Jacky

Manuputty (penggiat perdamaian di Ambon) yang telah memberikan masukan besar dalam penyempurnaan draf laporan awal studi ini. Tim peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Tifa Damai Maluku, khususnya Hilda, Loury, dan Jamal atas kerja sama yang hangat selama penelitian dilaksanakan; kepada semua informan/responden yang telah memberikan informasi selama penelitian ini dilaksanakan; kepada pengurus harian dan staf The Habibie Center yang telah mendukung penuh penelitian ini, khususnya kepada Mbak Ima, Pak Ghazali, Pak Kun, Vivi, dan Tasha.

Akhirnya, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi usaha kita bersama membangun perdamaian di Indonesia.

Salam damai,  
Tim SNPK-THC



# Daftar Singkatan dan Akronim

Amplaz	: Ambon Plaza
Angkot	: Angkutan Kota
Bappekot Ambon	: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Ambon
BBR	: Bahan Bangunan Rumah
BKO	: Bawah Kendali Operasi
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
Depag	: Departemen Agama
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FISIP	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
Golkar	: Golongan Karya
GPM	: Gereja Protestan Maluku
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Inpres	: Instruksi Presiden
ITDM	: Institut Tifa Damai Maluku
JICA	: Japan International Cooperation Agency
Kemenko Kesra	: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KNIL	: Koninklijk Nederlands-Indische Leger (Royal Netherlands East Indies Army)
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPM	: Koalisi Pengungsi Maluku
LAIM	: Lembaga Antar Iman Maluku
LAPPAN	: Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
MTQ	: Musabaqah Tilawatil Quran
MoU Malino	: Memorandum of Understanding (Butir-Butir Perjanjian) Malino
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NGO	: Non-Governmental Organization
OKP	: Organisasi Kepemudaan
Pesparawi	: Pesta Paduan Suara Gerejawi
Pemkot	: Pemerintahan Kota

PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PK	: Peninjauan Kembali
Purek	: Pembantu Rektor
RMS	: Republik Maluku Selatan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
SBB	: Seram Bagian Barat
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri
SNPK	: Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan
SWPP	: Sub Wilayah Pusat Pertumbuhan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNICEF	: The United Nations Children's Fund
UNDP	: United Nations Development Programme
Unpatti	: Universitas Pattimura

# Ringkasan Eksekutif

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada akhir 1990-an berdampak besar secara ekonomi, politik, dan sosial. Kombinasi dari dampak-dampak tersebut memicu timbulnya berbagai konflik kekerasan (*violent conflict*) yang terjadi hampir secara bersamaan di beberapa wilayah Indonesia. Konflik kekerasan dengan eskalasi tinggi cepat terjadi, di antaranya di Aceh, Papua, Timor Timur (Sekarang Republik Demokratik Timor Leste), Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Dalam perjalanannya, hampir semua konflik tersebut mengalami de-eskalasi, dan/atau telah diselesaikan secara signifikan pada akhir tahun 2002, kecuali konflik Aceh, yang baru dapat diselesaikan tahun 2005 melalui Perjanjian Helsinki. Namun demikian, meskipun konflik berskala besar telah secara politis diselesaikan, kekerasan tidak serta-merta berhenti. Di beberapa wilayah pasca-konflik, kekerasan bahkan masih menjadi isu, potensinya pun serius, sehingga harus diantisipasi.

Berdasarkan data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) (2002-2012), di antara lima provinsi yang pernah mengalami konflik komunal (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah), Maluku cenderung memiliki intensitas konflik kekerasan yang cukup tinggi. Secara khusus, menurut data SNPK, Kota Ambon masih menjadi wilayah dengan akumulasi angka konflik kekerasan tertinggi pada periode Februari 2002 hingga Desember 2012. Selain itu, berbeda dengan daerah pasca-konflik lain, di mana konflik kekerasan telah mengalami transformasi ke bentuk yang baru, di Ambon konflik berbasis identitas (*identity-based conflict*) tetap dominan. Penguatan identitas ini dirasakan semakin nyata apabila dilihat dari fenomena segregasi secara fisik dan sosial di antara pihak-pihak yang berlainan identitas.

Berdasarkan data dan dinamika kondisi tersebut, tim SNPK dari The Habibie Center melakukan penelitian yang secara khusus bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses terbentuknya segregasi di Ambon pasca-konflik; (2) mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah terhadap segregasi pasca-konflik di Ambon; (3)

menjelaskan efek segregasi terhadap timbulnya kekerasan di Ambon pasca-konflik; (4) memahami keikutsertaan lembaga-lembaga dalam mengatasi dampak segregasi terkait kekerasan di Ambon. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dengan memakai teknik wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dan observasi. Adapun data sekunder mencakup dokumen, laporan, publikasi akademis, majalah, dan media massa, baik cetak maupun *online*.

Kota Ambon dari dulu telah dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan ciri segregasi yang kuat, baik secara sosial maupun spasial, antara komunitas Kristen dan Islam. Pasca-konflik sosial tahun 1999, penyelesaiannya dilakukan melalui kebijakan rekonstruksi pasca-konflik oleh pemerintah setempat. Kebijakan ini telah berperan menciptakan akibat tidak langsung dan tidak disengaja (*unintended consequence*), berupa segregasi sosio-spasial baru. Kemunculan segregasi pasca-konflik ini banyak bersumber dari proses pengungsian masyarakat dan mekanisme penyelesaian masalah pengungsi, khususnya melalui program relokasi. Saat konflik sosial antara komunitas Muslim dan Kristen meletus di Ambon (1999-2002), ribuan warga kedua komunitas tersebut mengungsi ke wilayah-wilayah yang penduduknya memiliki kesamaan identitas secara etno-religius dengan mereka untuk mendapatkan rasa aman. Ketika konflik mereda, para pengungsi tersebut enggan kembali lagi ke daerah asalnya. Konsekuensinya, daerah-daerah yang sebelum konflik relatif heterogen, secara etno-religius menjadi semakin homogen.

Di samping itu, tugas berat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dan secara umum Pemerintah Provinsi Maluku, adalah menangani masalah-masalah pengungsi yang sampai saat ini masih menjadi persoalan, di antaranya berupa validitas data pengungsi, tidak adanya pemberdayaan pengungsi, tidak meratanya bantuan, kondisi fisik-kesehatan pengungsi yang masih memprihatinkan, sengketa lahan yang ditinggali, masalah kependudukan, pengembalian hak-hak perdata atas aset yang ditinggalkan, sertifikasi tanah, dan eksekusi dari klaim pemerintah bahwa penanganan pengungsi sudah selesai pada tahun 2009 sehingga upaya penanganan dihentikan.

Mekanisme relokasi pengungsi berawal dari beberapa opsi kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai bagian dari solusi, yaitu kembali ke daerah asal, relokasi, atau menetap di pengungsian. Di antara

opsi-opsi tersebut, relokasi merupakan pilihan utama para pengungsi pada saat itu. Relokasi-relokasi tersebut secara tidak disengaja dan tidak langsung telah berkontribusi pada konstruksi konsentrasi-konsentrasi komunitas baru yang tersegregasi karena pengungsi cenderung memilih tempat relokasi yang berdekatan dengan, atau berada di sekitar, komunitas yang memiliki identitas yang sama dengan mereka. Tiga alasan penting para pengungsi cenderung memilih tempat-tempat relokasi tersebut adalah status mereka sebagai kelompok minoritas di daerah asal, absennya jaminan keamanan jika kembali ke daerah asal, dan gagalnya proses permintaan untuk kembali ke daerah asal.

Pemkot Ambon telah menetapkan dan melaksanakan beberapa prioritas pembangunan pasca-konflik. Secara umum, kebijakan dalam prioritas pembangunan tersebut adalah membangun kembali Ambon baik secara fisik-infrastruktural maupun secara psikis, mencakup penanganan pengungsi secara tuntas, rekonsiliasi dan pemulihan kembali tali persaudaraan, pembukaan permukiman baru yang heterogen, penanganan trauma, bimbingan bagi anak-anak, sarasehan, Keserasian Sosial, dan pembangunan kurikulum *Orang Basudara* (bersaudara). Program-program tersebut sebagian besar telah secara jelas tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ambon tahun 2006-2011 dan tahun 2011-2016 serta, khususnya, Rencana Pembangunan Jangkah Panjang (RPJP) Kota Ambon tahun 2006-2026.

Secara evaluatif-kualitatif, beberapa program kebijakan rekonstruksi pasca-konflik yang sejauh ini dapat dianggap relatif terealisasi adalah rekonsiliasi dan pengembalian tali persaudaraan, baik melalui sarasehan, pelaksanaan bersama berbagai *event* keagamaan, maupun dialog dan kerja sama antar-agama; pembangunan dan pengembangan wilayah-wilayah baru yang heterogen; pembangunan ruang-ruang publik untuk perjumpaan, seperti pembangunan kembali Lapangan Mardika; Keserasian Sosial; pembangunan kurikulum *Orang Basudara* (bersaudara); pembangunan daerah perbatasan; penanganan trauma.

Berdasarkan analisis data penelitian, ada beberapa catatan kritis-evaluatif yang ditujukan kepada program-program pembangunan tersebut dan program lain yang belum terlaksana sama sekali. *Pertama*, Program Keserasian Sosial tahun 2006 banyak mengalami kebocoran dana dan tidak sesuai dengan target masyarakat, serta banyak hasil proyeknya yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. *Kedua*, pena-

nganan trauma tidak berjalan maksimal, bahkan *Center for Trauma* yang sudah dibangun tidak difungsikan. *Ketiga*, pembangunan ruang publik untuk pertemuan antar-komunitas hanya berfokus pada Lapangan Mardika, dan hampir tidak ada pembangunan ruang publik lain. *Keempat*, pembangunan kurikulum *Orang Basudara* (bersaudara) masih pada tataran konsep/gagasan dan belum terlihat implementasinya secara nyata. *Kelima*, pembangunan/renovasi pasar-pasar tradisional yang sangat strategis untuk ruang pertemuan belum sepenuhnya terlaksana. *Keenam*, pembangunan daerah perbatasan yang sering kali menjadi *hot spot* munculnya kekerasan sama sekali belum tergarap, baik secara ekonomi maupun sosiokultural. *Ketujuh*, bimbingan untuk anak-anak pasca-konflik cenderung bersifat sporadis-seremonial. *Kedelapan*, frekuensi pelaksanaan bersama *event* keagamaan masih kurang. Selanjutnya, dua masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah perbedaan persepsi antar-segmen masyarakat mengenai urgensi pembangunan pos-pos permanen di perbatasan dan kehadiran pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang termasuk dalam Bawah Kendali Operasi (BKO) di Ambon. Di samping itu, persepsi umum tentang adanya diskriminasi terhadap akses pendidikan, terutama pendidikan tinggi, dan pekerjaan juga perlu mendapat perhatian khusus.

Secara umum, kondisi dan situasi pasca-konflik di Ambon dapat dikatakan berjalan dengan relatif baik, dan secara khusus, hubungan dan interaksi antar-komunitas juga dapat dikatakan berjalan cukup baik. Membaiknya kembali hubungan tersebut diperkuat dengan kesadaran bersama akan konflik dan kerja sama antar-komunitas dalam menangani konflik/kekerasan yang muncul pasca-konflik. Namun demikian, harus diakui bahwa terdapat beberapa segmen masyarakat tertentu yang masih merasakan trauma, ketakutan, atau ketidaknyamanan ketika memasuki atau bepergian ke wilayah tertentu yang mayoritas penghuninya dahulu merupakan lawan mereka, terutama pada malam hari. Oleh karena itu, penanganan trauma dan penguatan rasa saling percaya (*trust-building*) antara komunitas memerlukan perhatian dan penanganan khusus.

Menguatnya segregasi pasca-konflik telah menyumbang dan memainkan peran tertentu dalam proses munculnya kasus-kasus kekerasan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak insiden kekerasan pasca-konflik terjadi di daerah-daerah perbatasan antara komunitas Islam dan Kristen. Beberapa unsur diidentifikasi sebagai sumber pemicu

munculnya kekerasan tersebut, dan memiliki keterkaitan dengan, atau merupakan efek tak langsung dari, segregasi. Beberapa unsur tersebut adalah intervensi pihak luar, termasuk provokasi atau adu domba antar-komunitas; disharmoni hubungan sosial antara pendatang dan pribumi; kecurigaan antarkelompok sebagai efek pasca-konflik; mudahnya daerah perbatasan menjadi *hot spot* munculnya kekerasan; mudahnya mobilisasi masyarakat dengan memanfaatkan sentimen keagamaan.

Aspek kepemimpinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kerukunan dan mencegah kekerasan pasca-konflik. Aspek ini secara umum dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu kepemimpinan tokoh agama, kepemimpinan pimpinan daerah, dan kepemimpinan tokoh adat. Partisipasi pemimpin agama di Ambon dalam upaya menjaga kerukunan dan mencegah kekerasan pasca-konflik merupakan sebuah keniscayaan, mengingat posisi mereka yang strategis di tengah masyarakat, walaupun partisipasi tersebut masih belum dapat sepenuhnya mencegah kekerasan. Dari perspektif komunitas Kristen, upaya mencegah melebarnya kekerasan sangat terbantu oleh sentralitas pemimpin gereja di mata umatnya. Hal serupa sayangnya sulit ditemukan di komunitas Muslim karena beragamnya afiliasi umat terhadap pimpinan agama dan organisasi Islam. Hal ini menyebabkan inisiatif masyarakat menjadi lebih dominan daripada inisiatif pemimpin dalam komunitas Muslim.

Para tokoh daerah yang memegang jabatan, baik secara formal maupun tidak, memiliki pengaruh yang penting di masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan perbedaan agama dengan komunitasnya tidak menghalangi mereka untuk mengerjakan tugas-tugasnya tanpa diskriminasi. Para pemimpin ini ada di kalangan komunitas Islam dan Kristen, dan secara aktif turun tangan untuk meredam konflik. Di samping itu, tokoh yang kepemimpinannya berdasarkan etnis juga berperan besar dalam memengaruhi komunitas mereka, terutama untuk kepentingan politis. Demikian halnya dengan pemimpin adat; mereka juga memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian dan mencegah kekerasan. Hal ini mereka lakukan dengan mengeluarkan maklumat dan menyosialisasikannya kepada masyarakat umum. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin adat, yaitu kurangnya legitimasi mereka di daerah-daerah yang karakteristik demografinya plural, banyaknya pemimpin adat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis sehingga tidak dapat lagi mewakili

warga adat, dan ketiadaan aturan Latupati yang mengikat semua raja sehingga membuat persoalan di masyarakat sulit diselesaikan.

Berbagai upaya masyarakat dalam mencegah kekerasan pasca-konflik mencakup upaya-upaya pada aspek sosial, budaya, agama, politik, dan ekonomi. Upaya-upaya pada aspek sosial, budaya, dan keagamaan meliputi pelibatan komunitas agama lain dalam penyelenggaraan acara keagamaan, diseminasi nilai-nilai perdamaian dalam agama lewat jalur pendidikan, pelibatan para pemuda dan para tokoh lintas agama dalam peringatan hari besar agama, penguatan peran dan inisiatif para pemuda lewat media, serta penguatan kearifan lokal untuk menyelesaikan kekerasan. Aspek politik secara umum mencakup pembagian kekuasaan secara politis. Adapun aspek ekonomi lebih banyak dilakukan melalui inisiatif masyarakat untuk membangun pasar kaget di wilayah komunitas lain untuk mendorong intensitas interaksi dan komunikasi.

Terakhir, upaya-upaya strategis untuk menangani segregasi dan kekerasan pasca-konflik juga telah dilakukan oleh berbagai lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Inisiatif lembaga-lembaga tersebut biasanya didasarkan pada orientasi masing-masing lembaga, yang dapat dibedakan menjadi inisiatif bidang keagamaan, sosial-pendidikan, dan ekonomi. Lembaga-lembaga keagamaan, baik Islam maupun Kristen, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gereja Protestan Maluku (GPM), dan Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM), banyak menekankan pesan-pesan perdamaian dan de-radikalisasi dalam ceramah-ceramah, khotbah-khotbah, serta berbagai kegiatan keagamaan mereka. Inisiatif di bidang sosial-pendidikan mencakup pengumpulan raja-raja dari Majelis Latupati untuk mendiskusikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar kejadian 11 September 2011 tidak meluas, rekrutmen para aktivis perdamaian untuk meminimalkan ketegangan di daerah perbatasan, advokasi anggaran yang berperspektif gender dan perlindungan anak, pendampingan untuk kegiatan-kegiatan penyembuhan trauma akibat konflik, pendampingan untuk para pelaku kekerasan, serta pendirian *Peace Goes to School*, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan lain-lain. Adapun aspek ekonomi lebih berfokus pada pemanfaatan kerja sama dengan lembaga asing untuk mengembangkan daerah yang tersegregasi, seperti penguatan usaha kecil kaum perempuan melalui penyaluran kredit.



# Pendahuluan

## A. LATAR BELAKANG

Kekerasan berkepanjangan berskala besar di masa transisi dari era Orde Baru ke era Reformasi telah berkurang, namun sampai sekarang potensi konflik masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Banyak permasalahan yang sebelumnya memicu konflik besar masih berpotensi menyebabkan timbulnya kembali kekerasan di daerah pasca-konflik. Di samping itu, bentuk-bentuk lain konflik yang bersifat episodik—sengketa tanah dan sumber daya alam, pemilihan kepala daerah (pilkada), serta premanisme—masih terus terjadi di berbagai provinsi, baik yang sebelumnya dilanda konflik besar maupun tidak. Oleh karena itu, masyarakat pasca-konflik Indonesia sangat rentan terhadap munculnya kembali kekerasan, bahkan ketika perdamaian telah dibangun. Sebagaimana ditegaskan oleh Collier, Hoeffler, dan Soderbom (2006), dalam masyarakat pasca-konflik kekerasan sering terjadi kembali dengan rata-rata 40% dari keseluruhan risiko terjadinya konflik dalam satu dekade. Estimasi tersebut bahkan lebih tinggi dari risiko konflik yang umumnya dihadapi oleh negara miskin. Dengan demikian, dapat dibayangkan seberapa besar potensi kekerasan yang akan muncul kembali di wilayah pasca-konflik di Indonesia.<sup>1</sup>

Tumbangnya Orde Baru (ORBA), yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, telah menciptakan suatu momen historis yang disebut Bertrand (2008) “*critical juncture*”, di mana konflik kekerasan muncul dan berkembang secara dramatis dan hampir bersamaan di berbagai wilayah Indonesia (Bertrand, 2004). Konflik kekerasan muncul pertama kali antara orang Dayak dan migran Madura pada Desember 1996. Pada awal proses demokratisasi, berbagai konflik kekerasan muncul di beberapa wilayah Indonesia dengan ritme eskalasi cukup cepat, yaitu di Aceh, Papua, Timor Timur, Maluku,<sup>2</sup> Kalimantan Tengah, dan Sulawesi.<sup>3</sup> Hampir semua konflik tersebut

1 Collier, Hoeffler, dan Soderbom, 2006.

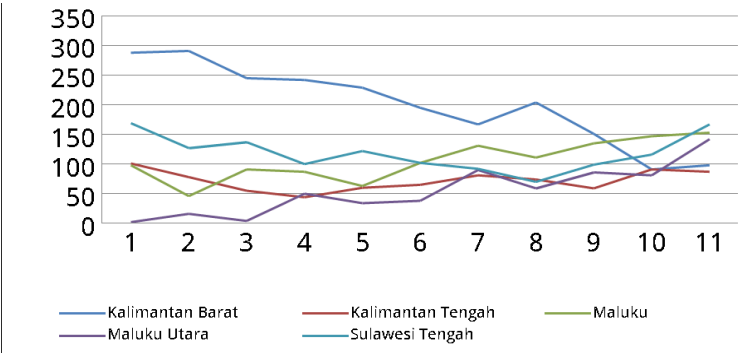
2 Untuk informasi sekilas tentang konflik Ambon, lihat Kotak 1.

3 Bertrand 2008, halaman 425.

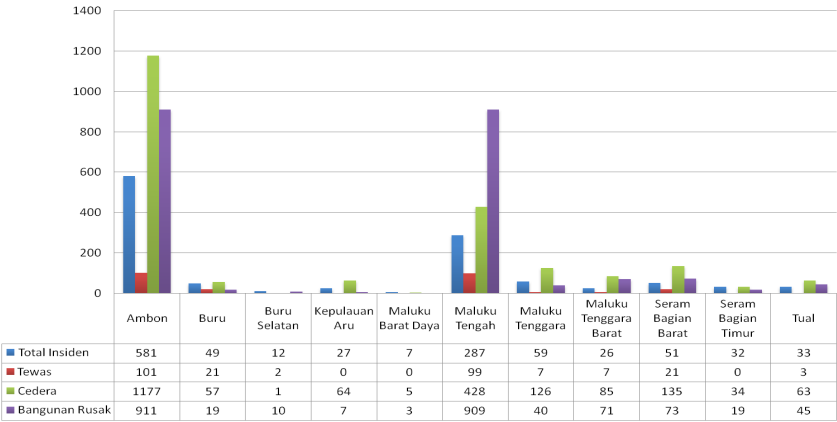
mengalami deeskalasi atau telah diselesaikan secara signifikan pada akhir 2002, kecuali konflik Aceh.

Di antara lima provinsi yang pernah mengalami konflik komunal—Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah—Provinsi Maluku cenderung memiliki intensitas konflik kekerasan yang cukup tinggi. Tren konflik kekerasan di provinsi tersebut cenderung naik selama 2002-2012 (lihat Figur 1).

Figur 1: Tren Konflik Kekerasan di Lima Provinsi Pasca-Konflik Periode 2002-2012



Figur 2: Konflik Kekerasan per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku



Data ViCIS-NVMS menunjukkan besarnya akumulasi kekerasan di seluruh kabupaten di Provinsi Maluku bervariasi. Dari Figur

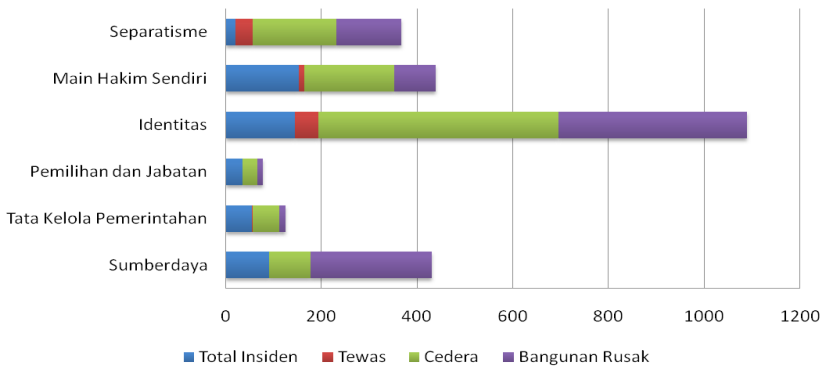
## KOTAK 1. SEKILAS KONFLIK AMBON DAN PENYELESAIANNYA

Dalam konteks konflik Ambon, para peneliti sepakat bahwa konflik tersebut adalah konflik agama atau konflik yang bernuansa agama, yaitu konflik antara umat Islam dan Kristen (Sihbudi, 2001; Klinken, 2001; Wilson, 2008; Barron, Azca, & Susdinarjanti, 2012; Wisudo, 2010). Konflik Ambon diperkirakan muncul pada 19 Januari 1999, disinyalir berawal dari kasus penusukan seorang sopir transportasi umum yang dilakukan oleh seorang preman asal Makassar yang tidak mau membayar ongkos pada akhir bulan Ramadhan. Pada saat itu juga konflik antara orang asli Ambon dengan BBM (Bugis, Buton, dan Makasar) menjadi konflik antara Kristen dengan Islam. Dampaknya begitu hebat. Diperkirakan dalam dua minggu berlangsungnya ratusan orang terbunuh dan puluhan ribu menjadi pengungsi, roda perekonomian terhenti, toko-toko dan rumah-rumah warga BBM dibakar habis. Dalam dua tahun konflik 3.000 orang meninggal dan hampir 400.000 orang Maluku diungsikan (Sihbudi, 2001, h. 39).

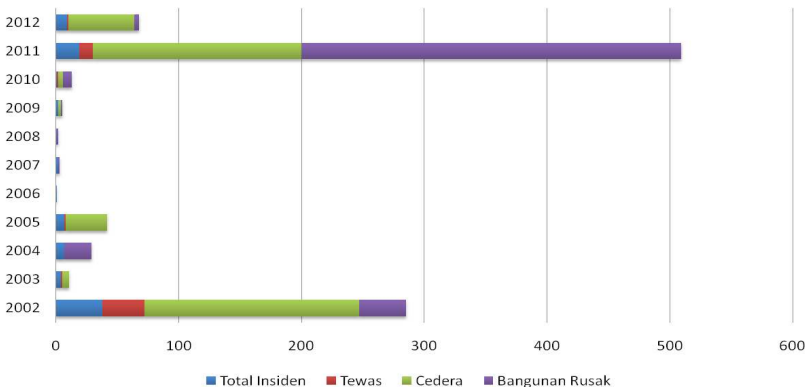
Konflik tersebut secara prinsipil telah diselesaikan dengan pendekatan dialog dan menghasilkan Perjanjian Damai Malino II yang ditandatangani pada 12 Februari 2002. Perjanjian tersebut merupakan bentuk nyata penghentian konflik dan kekerasan yang telah terjadi di Ambon selama kurang lebih empat tahun (1999-2002). Secara garis besar Perjanjian Damai Malino II yang berisikan 11 butir kesepakatan ini menyerukan penghentian berbagai bentuk kekerasan, pengembalian pengungsi, pembentukan tim investigasi, pelarangan separatisme, dan pelaksanaan rehabilitasi pasca-konflik. Untuk mempercepat pembangunan pasca-konflik tersebut, pemerintah pusat kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca-Konflik. Secara umum, visi dari Inpres ini adalah melakukan rehabilitasi secara menyeluruh dalam berbagai bidang dan mengharmoniskan kembali berbagai kelompok masyarakat yang bertikai.

2 di atas terlihat bahwa Kota Ambon masih menjadi wilayah dengan akumulasi angka konflik kekerasan tertinggi pada periode Februari 2002 hingga Desember 2012. Jika dibandingkan dengan total insiden kekerasan di Provinsi Maluku, maka persentase kekerasan yang terjadi di Kota Ambon lebih dominan dibandingkan daerah-daerah lain, yaitu 50% insiden kekerasan; 38% tewas; 54% cedera; 43% bangunan rusak. Dari total jumlah insiden kekerasan di Kota Ambon, data menunjukkan ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan (lihat Figur 3).

Figur 3: Tipe Kekerasan di Kota Ambon Periode Februari 2002-Desember 2012



Figur 4: Total Insiden Kekerasan Antar-Agama Periode Februari 2002-Desember 2012



Berdasarkan Figur 3 di atas, kekerasan terkait identitas masih tetap dominan, meski kesepakatan damai antarkelompok yang bertikai saat konflik besar telah tercapai di awal tahun 2002. Bila ditilik dari perspektif identitas, maka satu aspek yang kerap melahirkan kekerasan antarkelompok adalah agama. Data 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan antar-penganut agama masih merupakan konflik dengan angka yang tinggi (Figur 4).

Data di bawah menunjukkan bahwa kekerasan antar-agama meningkat tajam tahun 2011 setelah sebelumnya secara relatif berada pada tingkat yang rendah.

Becermin pada data di atas, faktor identitas masih menjadi unsur signifikan yang dapat memengaruhi munculnya kekerasan di Ambon. Penguatan identitas ini dirasakan semakin nyata apabila dilihat dari fenomena segregasi—baik secara fisik maupun sosial—antara pihak-pihak yang berlainan identitas, misalnya melalui penetapan batas daerah milik suatu kelompok atau relokasi tempat tinggal salah satu pihak yang sebelumnya terlibat pertikaian. Meski segregasi di antara kelompok-kelompok di Ambon sudah ada secara historis, namun fenomena yang sering muncul adalah tidak hanya menguatnya segregasi historis tersebut, tetapi juga munculnya segregasi baru yang ditengarai sebagai akibat kebijakan pemerintah dan upaya penyelesaian konflik. Proses relokasi yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani pengungsi pasca-konflik 1999 telah menciptakan akibat yang tidak direncanakan (*unintended consequence*), yaitu munculnya konsentrasi-konsentrasi komunitas baru yang terpisah satu sama lain. Keberadaan segregasi ini merupakan fenomena yang menimbulkan cukup banyak pertanyaan, terutama bila dikaitkan dengan kondisi pasca-konflik dan hubungannya dengan kekerasan yang muncul kembali.

Oleh karena itu, tim Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) dari The Habibie Center melihat bahwa masalah segregasi yang terjadi di Ambon merupakan sebuah kasus yang layak dipelajari, mengingat status Ambon sebagai salah satu daerah yang pernah mengalami konflik besar. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan:

1. mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses terbentuknya segregasi di Ambon pasca-konflik;
2. mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah terhadap segregasi pasca-konflik di Ambon;

3. menjelaskan efek segregasi terhadap timbulnya kekerasan di Ambon pasca-konflik;
4. memahami keikutsertaan lembaga-lembaga dalam mengatasi dampak segregasi terkait kekerasan di Ambon.

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua: manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis:
  - a. Secara umum, penelitian ini akan menjadi tambahan literatur yang penting dan/atau mengisi kekosongan literatur mengenai kajian segregasi di Indonesia.
  - b. Secara khusus, penelitian ini akan memberikan atau menawarkan perspektif khusus dalam kajian segregasi, yaitu pasca-konflik, atau akibat dari kebijakan rekonstruksi pembangunan pasca-konflik.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Tersedianya informasi mengenai segregasi, proses kemunculan dan dampaknya terhadap konflik kekerasan yang muncul kembali pasca-konflik, serta keterlibatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun nasional.
  - b. Tersedianya masukan dan rekomendasi mengenai perlunya perubahan kebijakan dalam mengatasi segregasi dan dampaknya terhadap munculnya kekerasan pasca-konflik.
  - c. Tersedianya referensi bagi agensi pembangunan, para pengambil kebijakan, LSM, pemerintah lokal dan pusat, serta para *stakeholder* pembangunan lainnya yang bekerja untuk pembangunan dan penanganan konflik di Ambon.

## B. KONSEP DAN KAJIAN LITERATUR

### 1. KONSEP SEGREGASI

Segregasi dapat dimaknai sebagai terkotak-kotaknya masyarakat berdasarkan identitas kelompok, misalnya etnisitas, agama, asal geografis, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut merupakan unsur-unsur pemisah<sup>4</sup> yang umum ditemui dalam sosiokultural masyarakat, baik yang sebelumnya mengalami konflik dan kekerasan maupun tidak.

---

<sup>4</sup> Unsur pemisah (dan unsur mempersatu) merupakan konsep yang dipinjam dari Bakhtin (1984) tentang *centrifugal* dan *centripetal forces of narratives*.

Fenomena segregasi juga merupakan eksres dari terganggunya stabilitas komunitas (*societal stability*) yang tidak terlepas dari dominasi dan peminggiran suatu kelompok masyarakat, misalnya dalam upaya mengakses sumber daya. Relasi kekuasaan antara kelompok masyarakat dengan kelekatan kultural dan struktural ini kemudian menegaskan keberadaan fenomena segregasi/pemisahan (lihat Qadeer, 2003; Reskin & Bielby, 2005).

Segregasi dapat terjadi secara sukarela (*voluntary*) maupun terpaksa (*forced*). Segregasi jenis pertama terjadi saat masyarakat cenderung memilih untuk bertempat tinggal di antara orang-orang yang memiliki identitas kesukuan, agama, atau geografis yang sama dengan mereka. Untuk kasus Indonesia, daerah kantong (*enclave*) berdasarkan identitas di atas banyak terdapat di berbagai wilayah, misalnya Kampung Jawa, Kampung Melayu, Kampung Arab, Pecinan, dan lain-lain (lihat Chang, 2002; Kosasih, 2010). Segregasi jenis kedua dapat terjadi, misalnya akibat kebijakan pemerintah<sup>5</sup> yang sengaja membangun *enclave* di daerah tujuan transmigrasi di Kalimantan dan Sumatra untuk penduduk asal Jawa dan Bali yang mengikuti program tersebut.

Segregasi juga terus bergerak dalam kerangka formasi sosial masyarakat. Artinya, fenomena segregasi tidak statis, namun dapat memiliki dinamikanya sendiri. Faktor historis juga dapat memperkuat atau memperlemah segregasi, selain adanya tekanan internal dan eksternal yang kemudian dapat mengubah wujud segregasi dalam formasi sosial masyarakat, seperti adanya konflik sosial, bencana alam, dan lain-lain (Djajadi, 2004).

Segregasi dapat mengambil dua bentuk, yaitu segregasi ruang (*spatial segregation*) dan segregasi sosial (*social segregation*) (Barbra, 2009). Meskipun kedua bentuk segregasi tersebut dapat dilihat secara terpisah, ada banyak kasus di mana yang terjadi adalah kombinasi keduanya (*socio-spatial segregation*). Menurut Barbra, segregasi ruang dan kontrol tak seimbang atas *landscape* merupakan refleksi dari pembuatan jarak sosial karena, misalnya, budaya yang dipersepsikan berbeda. Jarak sosial ini sendiri merupakan upaya yang dilakukan secara sukarela atau terpaksa untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing kelompok ataupun pihak penguasa. Contoh klasik

---

5 Alasan dan konsekuensi segregasi akibat kebijakan pemerintah di negara lain, misalnya Belanda dan Namibia, dapat dilihat pada Barbra (2009).

dari segregasi terpaksa dengan bentuk sosio-spasial dapat dilihat pada pembuatan reservasi khusus penduduk asli Amerika dan penempatan orang-orang Maluku, mantan serdadu Tentara Kerajaan Hindia Belanda (Koninklijk Nederlands Indisch Leger/KNIL), serta pendukung Belanda di negara Belanda. Sedangkan segregasi sukarela dengan bentuk sosio-spasial dapat dilihat pada lokasi tinggal komunitas Amish di Amerika Serikat.

Selain pendekatan segregasi yang bersifat fisik-spasial dan sosial tersebut, terdapat pendekatan segregasi yang lebih psikologis sifatnya, yaitu segregasi yang berupa peta pemikiran terkait wilayah permukiman. Konsep dan/atau pemetaan segregasi ini sering disebut “*segregation in mind*” (*perceived segregation*). Dalam konteks Ambon, misalnya, sejak masa lalu *negeri* Batu Merah atau Waihaong selalu dipersepsikan sebagai wilayah *Salam* (Islam), padahal di situ bermukim pula warga masyarakat lain yang agamanya berbeda. Adapun Karang Panjang atau Kudamati, misalnya, dipersepsikan sebagai wilayah *Sarani* (Kristen), meskipun di tempat itu hidup pula warga-warga dengan agama yang berbeda. Kendati demikian, pola-pola segregasi seperti ini tidak serta-merta mengancam integrasi sosial, karena relatif masih terkelola melalui berbagai katup pengaman (*safety valve*) berupa institusi-institusi lokal yang telah ikut membantu meminimalkan potensi-potensi konflik akibat perbedaan yang ada.<sup>6</sup>

Untuk kasus Indonesia fenomena pengelompokan masyarakat ke dalam satu wilayah merupakan salah satu ekses konflik—terlihat, misalnya, pada pergeseran konfigurasi permukiman yang cenderung mengelompok di suatu wilayah yang memiliki kesamaan identitas, seperti pengelompokan permukiman Muslim dan Nasrani yang terjadi di Maluku Utara pasca-konflik (Rozi et al., 2006). Tak hanya itu, pasar sebagai tempat interaksi beragam komunitas pun terkena dampak pemisahan kelompok-kelompok yang berkonflik, seperti Pasar Jailolo yang sesaat setelah konflik berakhir praktis didominasi oleh komunitas Nasrani (Rozi et al.). Di samping itu, dalam kondisi yang belum kondusif di masa pasca-konflik, hampir semua desa di Kecamatan Tobelo Utara telah mengalami segregasi hampir di segala sektor kehidupan, termasuk pasar dan sekolah (lihat Djana et al., 2004).

---

6 T. D. Pariela, makalah tanggapan dalam Semi-Lokakarya SNPK-THC, Ambon, 23 Oktober 2013.



Konflik juga menyebabkan penguatan segregasi yang sebelumnya telah terjadi. Misalnya, penguatan segregasi berdasarkan etnis dan agama setelah konflik terjadi di daerah Poso (Diprose, 2007) dan penguatan eksklusivitas wilayah berdasarkan identitas kelompok oleh masyarakat dengan membangun barikade untuk memisahkan wilayah mereka dengan wilayah lain di Ambon (Pariella, 2007). Selain itu, imbas dari konflik di daerah lain karena masuknya para pengungsi (*internally displaced persons/IDP*) dapat memicu terjadinya segregasi yang sebelumnya tidak terlalu tampak, seperti kedatangan para pengungsi Timor Timur di daerah Nusa Tenggara Timur (Sunarto, Nathan, & Hadi, 2005).

Meskipun sudah disebutkan bahwa untuk alasan tertentu segregasi pasca-konflik harus dilakukan dalam rangka deeskalasi kekerasan,<sup>7</sup> namun pada saat yang bersamaan segregasi juga menimbulkan efek negatif. Misalnya, upaya mendukung pembangunan yang damai dan adil kerap terhalang oleh adanya segregasi pasca-konflik (Hadi, 2005). Aparat pemerintah juga mengalami kesulitan dalam mencari daerah “netral” (Mawdsley, Tanuhandaru, & Holman, 2002) untuk mendiskusikan, misalnya, program pembangunan. Oleh karena itu, segregasi juga dapat menghambat upaya-upaya intervensi yang dilakukan pemerintah untuk membangun perdamaian di daerah pasca-konflik.

Studi literatur tentang segregasi di atas memberikan gambaran tentang beberapa hal. *Pertama*, stabilitas komunitas dapat terganggu, salah satunya karena konflik. Pemulihan stabilitas ini sendiri memerlukan waktu lama, terutama di masa pasca-konflik. Apalagi bila terdapat tekanan internal dan eksternal yang menghambat proses stabilisasi tersebut. *Kedua*, segregasi dapat terjadi karena paksaan (*forced*) maupun sukarela (*voluntary*), di mana kebijakan pemerintah di masa lalu dan sekarang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya segregasi. Bila dihubungkan dengan kondisi pasca-konflik, maka penelitian ini mencoba berfokus pada *forced segregation*. *Ketiga*, segregasi ruang dan sosial serta kombinasi keduanya merupakan hal yang umum ditemui dalam upaya melihat bentuk-bentuk segregasi. Untuk itu, segregasi sosio-spasial dalam kondisi pasca-konflik menjadi fokus utama pene-

---

7 Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa segregasi pasca konflik untuk de-eskalasi kekerasan tidak menyelesaikan akar permasalahan konflik dan hanya merupakan penghentian kekerasan secara temporal.

litian ini, terutama apabila dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang mendasari terjadinya segregasi tersebut dan bagaimana segregasi tersebut berhubungan dengan timbulnya (kembali) kekerasan di antara pihak-pihak yang sebelumnya bertikai.

## 2. SEGREGASI DAN KEKERASAN DI WILAYAH PASCA-KONFLIK

Meskipun sering dipertanyakan, segregasi etnis dapat menurunkan intensitas kekerasan yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang pernah bertikai (Weidmann & Salehyan, 2010). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penciptaan partisi, atau segregasi secara fisik, antara kelompok-kelompok etnis adalah cara terbaik untuk membangun perdamaian (lihat Chapman & Roeder, 2007; Kaufmann, 1996; Sambanis, 2000). Hal ini perlu dilakukan karena ketika identitas semakin menguat akibat kekerasan, kelompok-kelompok yang bertikai tidak akan mudah untuk saling percaya dan hidup berdampingan secara damai. Dengan adanya segregasi kontak antarkelompok tersebut dapat diminimalkan dan *enclave* yang mandiri dapat dibangun. Sebaliknya, lemahnya segregasi dapat meningkatkan kontak, kompetisi, dan frekuensi kekerasan antarkelompok yang pernah bertikai (Olzak, Shanahan, & McEneaney, 1996).

Untuk kasus Indonesia, penciptaan partisi atau segregasi secara fisik dilakukan untuk mencegah berlanjutnya kekerasan sehingga salah satu dari pihak yang bertikai harus direlokasi ke wilayah lain. Contohnya, dalam kasus konflik etnis di Kalimantan Barat masyarakat etnis Madura terpaksa harus pindah dan menetap di daerah lain untuk menghindari kekerasan yang terjadi terhadap mereka. Dalam hal ini, warga Madura harus tersegregasi secara geografis dan mendiami wilayah yang khusus ditentukan untuk mereka. Karena rendahnya intensitas interaksi dengan kelompok lain, para pengungsi yang direlokasi cenderung terhindar dari kemungkinan munculnya kerusuhan baru (Kusdijono, 2006).

Namun demikian, efek yang berkebalikan dengan temuan di atas diperoleh dari laporan International Contact Group (2012). ICG melaporkan bahwa dalam kasus Ambon absennya perhatian terhadap akar sistemik kekerasan, salah satunya segregasi, dapat menyebabkan kekerasan terjadi dengan sangat mudah. Pernyataan ini didukung oleh fakta di lapangan yang menunjukkan telah terjadi beberapa kali insiden kekerasan antarkelompok di Ambon. Sebagai contoh, kekerasan

antarkelompok yang terjadi saat kirab obor memperingati hari ulang tahun Pattimura ke-193 pada Mei 2012. Insiden ini menunjukkan bahwa segregasi tidak mengurangi tingkat kekerasan, lantaran intensitas interaksi antarkelompok masih tinggi mengingat kondisi geografis dan demografis Maluku.

Paparan di atas menunjukkan bahwa meskipun segregasi dapat menurunkan tingkat kekerasan, tidak berarti bahwa kekerasan dapat dihindari sepenuhnya. Studi-studi sebelumnya menunjukkan hubungan yang positif dan negatif antara segregasi dan kekerasan di wilayah pasca-konflik. Dapat disimpulkan, keberadaan segregasi di daerah pasca-konflik menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut masih rentan terhadap terjadinya kekerasan yang merupakan akibat dari residu konflik sebelumnya ataupun potensi konflik baru. Oleh karena itu, langkah-langkah pengelolaan kekerasan di daerah segregasi pasca-konflik merupakan masalah yang harus dicermati, terutama bila dikaitkan dengan upaya intervensi kebijakan yang merupakan bagian penting dalam mendorong proses rekonsiliasi di daerah-daerah konflik.

### 3. SEGREGASI DAN KEBIJAKAN REKONSTRUKSI PASCA-KONFLIK PEMERINTAH

Masyarakat yang berada dalam situasi pasca-konflik menghadapi dua tantangan besar, yaitu pemulihan ekonomi yang telah rusak akibat konflik dan pengurangan risiko konflik untuk mengatasi kerapuhan perdamaian pasca-konflik yang dapat menyebabkan kembalinya kekerasan (Collier, Hoeffler, & Söderbom, 2006). Pemulihan ekonomi melalui program bantuan dan reformasi kebijakan telah banyak dilakukan. Namun demikian, pelaksanaannya harus didukung oleh pengurangan risiko konflik karena absennya kekerasan menjadi titik penting dalam membangun upaya perdamaian (Holtzman, Elwan, & Scott, 1998). Oleh karena itu, kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut menjadi sangat strategis. Misalnya, implementasi penertiban (*policing*) yang tepat waktu dan efektif memberikan dampak yang besar terhadap menurunnya kekerasan dalam jangka waktu yang lama (Weidmann & Salehyan, 2010). Kapasitas pemerintah sendiri dapat dilihat dalam tiga kategori: kapasitas militer, kapasitas birokratis/administratif, serta koherensi dan kualitas kelembagaan politik (Hendrix, 2010). Mengingat luasnya

kategori tersebut, penelitian ini hanya akan berfokus pada kapasitas birokratis/administratif, terutama dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi dampak segregasi di beberapa daerah pasca-konflik di Indonesia; dua di antaranya adalah kebijakan pemekaran dan relokasi pengungsi. Sebagai contoh, pada 1999 pemerintah menyetujui pembentukan dua kabupaten baru, Bengkayang dan Landak, dari dua kabupaten induk masing-masing, yaitu Sambas dan Pontianak. Pertimbangan utama atas pemekaran kabupaten ini didasarkan pada faktor etnisitas, meskipun asumsi ini ditolak pemerintah. Namun demikian, fakta demografis menunjukkan bahwa pemekaran ini merupakan salah satu langkah mengatasi konflik dengan melakukan upaya segregasi: dua kabupaten baru merupakan daerah etnis Dayak, sedangkan dua kabupaten induk merupakan daerah Melayu. Kini Bengkayang dan Landak, yang dulu merupakan daerah-daerah rawan konflik, menjadi daerah-daerah tanpa gejolak (Tasanaldy, 2007). Dalam hal ini, program pemekaran wilayah oleh pemerintah secara sadar diambil dengan mengabaikan faktor reintegrasi. Implikasinya, proses rekonsiliasi dan reintegrasi yang disponsori negara tidak terjadi karena justru kebijakan pemerintah malah menghalangi proses-proses tersebut. Kendati demikian, kebijakan ini kemudian terbukti berhasil menciptakan suasana tenang di daerah yang dulunya rawan konflik etnis (Tasanaldy, 2007).

Selain itu, pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 Tahun 2001 bersama pemerintah daerah Kalimantan Barat melalui Tim Gabungan Penanggulangan Pengungsi Pasca Kerusuhan Sosial Sambas (TGPPPKSS) mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi pengungsi Madura akibat kekerasan komunal di Kalimantan Barat. Pelaksanaan kebijakan ini ternyata menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan setidaknya karena dua hal: kebijakan tersebut terumuskan dengan kurang baik dan di antara lembaga-lembaga pelaksana kebijakan terjadi kurang koordinasi (Susetyo, 2003). Akibatnya, kualitas infrastruktur (misalnya, jalan dan rumah) yang rendah serta akses para pengungsi terhadap sumber daya (misalnya, kualitas lahan dan jenis tanah) yang terbatas menyebabkan tujuan kebijakan *forced segregation* tersebut tidak tercapai (Kusdijono, 2006). Meskipun segregasi ruang dalam kebijakan

tersebut telah mencegah terlibatnya para pengungsi dalam kekerasan baru karena rendahnya tingkat interaksi dengan masyarakat luar, namun segregasi sosialnya menyebabkan para pengungsi Madura tersebut tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam upaya-upaya pembangunan.

Dalam konteks Maluku dan Maluku Utara, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menggarisbawahi perlunya rehabilitasi menyeluruh di wilayah pasca-konflik. Pendekatan kesejahteraan rakyat dapat dilihat di bagian pertimbangan Inpres yang secara jelas mengedepankan upaya harmonisasi hubungan sosial antarkelompok yang dahulu pernah bertikai. Kebijakan yang dimaksud di atas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca-Konflik. Dengan kata lain, Inpres tersebut menjadi basis legal dilaksanakannya rekonstruksi pembangunan pasca-konflik di Ambon, dan secara umum di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Menurut Bappenas (2010), kondisi yang kondusif telah tercipta di Maluku dan Maluku Utara. Di samping itu, Inpres tersebut dianggap penting untuk pemulihan perdamaian dengan “meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan di daerah, pelaksanaan rehabilitasi serta upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat” (h. II. 6-9). Menurut Bappenas (2009), dalam membangun kembali kepercayaan di antara kelompok yang bertikai, pemerintah melakukan “upaya pendampingan terhadap lembaga-lembaga sosial budaya di daerah konflik Poso, Maluku, dan Maluku Utara” (h. 02-10). Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan kalangan LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, serta perguruan tinggi.

Namun demikian, ada beberapa kekhawatiran yang muncul di lapangan. Santoso (2006) melaporkan bahwa salah satu kekhawatiran tersebut dipicu oleh selesainya bantuan dana dari Inpres, sementara kondisi di lapangan masih belum kondusif sehingga masalah pengungsi terabaikan dan dapat memicu konflik baru. Distribusi dana ini—atau dalam skala yang lebih besar, kontrol penghasilan per kapita (lihat Fearon & Laitin, 2003)—memiliki sumbangsih terhadap rendahnya potensi kekerasan sipil di daerah-daerah dengan penduduk dari beragam etnis dan agama. Selain itu, Koordinator Koalisi Pengungsi Maluku (KPM) Pieter Pattywaellapia (dikutip dalam Santoso, 2006) menyebutkan bahwa proses-proses reintegrasi sosial di antara

masyarakat yang tersegregasi saat konflik terjadi masih belum berhasil dipulihkan karena permasalahan transparansi pemerintah daerah setempat.

Selanjutnya, pembauran masyarakat yang merupakan tanda-tanda perbaikan sosial, ekonomi, dan hubungan masyarakat menjadi sebuah tantangan bagi pemangku kebijakan dan lembaga-lembaga pemerintah maupun nonpemerintah dalam upaya mereka mempertahankan proses pemulihan pasca-konflik di tengah segregasi, terutama berdasarkan kajian yang dilakukan di wilayah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara (Huber et al., 2004). Aspek ketidaksetaraan horizontal (*horizontal inequality*) dan eksklusi sosial/politik (*social/political exclusion*) dalam memperoleh akses, baik di bidang pekerjaan, pendidikan, maupun partisipasi politik, juga erat kaitannya dengan pemulihan relasi sosial yang terhambat oleh segregasi (Diprose, 2009). Di samping itu, kesadaran pihak-pihak yang bertikai untuk merevitalisasi atau melembagakan kembali nilai-nilai adat mereka yang terlupakan saat konflik dapat mendorong proses rekonsiliasi, terutama bagi mereka yang mengalami *forced segregation* dan relokasi akibat kekerasan di Ambon (Adam, 2008).

Berdasarkan temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait penyelesaian konflik yang memunculkan segregasi di antara pihak-pihak yang bertikai menunjukkan hasil yang beragam dan cenderung jauh dari semangat dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut. Beberapa studi di atas memang disertai riset evaluatif terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, namun tidak secara khusus menekankan pada aspek segregasi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang berujung pada segregasi, terutama bila dikaitkan dengan kekerasan yang masih dapat terjadi di daerah pasca-konflik.

Selain itu, secara teoretis pertanyaan yang kemudian muncul adalah, sampai kapan Ambon dianggap sebagai daerah pasca-konflik? Adakah rentang waktu atau indikator-indikator tertentu di mana Ambon tak lagi mesti disebut daerah pasca-konflik? Untuk lepas dari status pasca-konflik dan masuk ke tahap “normalisasi” (*normalization*), suatu daerah harus mencapai tiga kondisi/indikator: (1) intervensi/campur tangan dari pihak luar tidak lagi dibutuhkan; (2) proses pemerintahan (*governance*) dan aktivitas ekonomi secara umum sudah

berjalan secara mandiri; (3) relasi internal dan eksternal sudah berjalan seperti biasa (normal) berdasarkan norma, adat-istiadat, dan kebiasaan seperti sedia kala. Setiap daerah pasca-konflik memiliki dinamika dan kapasitas yang berbeda-beda untuk mencapai ketiga indikator tersebut—dapat saja suatu daerah relatif cepat mencapainya, sementara daerah lain sangat lambat. Dengan demikian, dalam konteks ini, batasan/rentang waktu tertentu tidak menjadi pijakan.<sup>8</sup>

Merujuk pada ketiga indikator tersebut, berdasarkan temuan lapangan kami, Ambon belum sepenuhnya lepas dari status pasca-konflik karena beberapa alasan. Di antaranya adalah masih adanya intervensi pihak luar termasuk dalam penyelesaian hak-hak pengungsi yang belum sepenuhnya selesai—ditandai oleh keberadaan tentara BKO, rencana penambahan tentara BKO oleh Pemprov Maluku, dsb.—meskipun secara keseluruhan intervensi tersebut relatif berkurang. Di samping itu, walaupun secara umum relasi internal sudah berjalan relatif baik, masih terdapat segmen masyarakat tertentu yang merasa tidak aman/nyaman untuk bepergian ke daerah tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Satu hal yang cukup menggembirakan adalah proses pemerintahan daerah dan aktivitas ekonomi dapat dikatakan telah berjalan relatif baik. Dengan demikian, masih cukup beralasan untuk menggunakan konsep pasca-konflik dalam penelitian ini.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. PENDEKATAN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer pada prinsipnya dikumpulkan dengan memakai teknik wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dan observasi. Wawancara digunakan untuk membangun hubungan dan pengertian dengan para responden sehingga dapat berfokus pada pengungkapan perspektif mereka sendiri atas apa yang mereka alami (Denzin, 2001; Wiseman & Aaron, 2001; dan Beale, Cole, Hillege, McMaster, & Nagy, 2004; Patton 2002). Tipologi dan calon responden wawancara dapat dilihat dari penjelasan di bagian “Strategi Sampling”. Data wawancara akan ditranskripsi sesuai

---

8 Lihat Center for Strategic and International Studies (CSIS) and the Association of the United States Army (AUSA) (Mei 2012).

dengan format yang ada di Lampiran 1 “Form Interview Transcript”. Penelitian ini mengadopsi beberapa rekomendasi dari Kumar (1989), terutama berkenaan dengan pembangunan kerangka konseptual, penyusunan panduan wawancara, dan pemilihan informan kunci. Panduan pertanyaan umum untuk wawancara dapat dilihat di Lampiran 2.

Penelitian ini juga menggunakan *focus group discussion* (FGD) dalam mengumpulkan data. FGD merupakan wawancara terbuka (*open-ended*) dengan sekelompok informan (berjumlah lima sampai delapan orang) di mana para informan tersebut diberi kesempatan untuk memberikan masukan mereka atas permasalahan terfokus yang diberikan oleh peneliti (Patton, 2002). Menurut Kumar (1987), FGD ini berguna dalam pengumpulan data untuk tujuan *assessment* sebuah inovasi, *monitoring* dan *evaluating*, serta menginterpretasi data kuantitatif yang tersedia.

Adapun metode observasi dalam pengumpulan data didasarkan pada dimensi perspektif Patton (2002), yang mencakup (1) peran pengamat sebagai pemerhati (*spectator*); (2) pendekatan orang luar (*ethic*) yang dominan; (3) Pengamatan sendiri dan berkelompok; (4) observasi tertutup (*covert*) terhadap objek pengamatan; (5) Pengamatan tunggal dan pendek; (6) observasi sempit yang dilakukan hanya pada elemen tertentu dalam perilaku interaksi. Kegiatan observasi dilakukan terhadap interaksi yang berlangsung di tempat-tempat tertentu, seperti pasar dan tempat ibadah, *event* keagamaan, *event* sosial budaya, keberadaan *enclave*, dan lain-lain. Data direkam dalam bentuk jurnal harian (*field notes*) yang diisi oleh peneliti setiap kali melakukan observasi.

Terakhir, data sekunder digali dari berbagai sumber, termasuk dokumen, laporan, publikasi akademis, majalah, dan surat kabar baik cetak maupun *online*. Data sekunder tersebut dikumpulkan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dan menjadi tambahan informasi dalam memformulasikan pertanyaan serta membuka jalan bagi upaya-upaya penambahan data (Patton, 2002). Lebih jauh, Altheide (2000) mengemukakan bahwa analisis dokumen ditujukan untuk mencari dan menjelaskan sebuah kejadian dengan maksud mencari arti, pola, dan proses dari kejadian tersebut.

## 2. STRATEGI SAMPLING

Untuk mendapatkan dan menentukan para informan, strategi sampling yang digunakan adalah *purposive* dan *snowball sampling*. Pe-



manfaat *purposive sampling* akan banyak digunakan dalam tahap awal pengumpulan data di lapangan. Apabila *rapport* telah terbangun dengan para responden awal, maka teknik *snowball sampling* akan dimanfaatkan untuk mencari responden lain berdasarkan rekomendasi responden terdahulu. Informan kunci (*key informant*) sendiri akan diambil dari perwakilan unsur-unsur yang dianggap berhubungan dengan topik penelitian. Secara umum, informan kunci untuk penelitian ini diambil dari tiga tingkatan:

- Makro, direpresentasikan oleh pejabat yang mewakili pemerintah pusat dan daerah.
- Meso, direpresentasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang beroperasi di daerah-daerah penelitian, misalnya lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi berbasis kemasyarakatan, Dinas Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota.
- Mikro, direpresentasikan oleh tokoh dan wakil masyarakat berdasarkan etnisitas, gender, agama, dan lain-lain; serta wakil dari kelompok akar rumput, misalnya kepala suku, pemimpin agama, pemimpin pemuda, aktivis gender.

Secara khusus, informan kunci akan diseleksi berdasarkan keterwakilan berbagai unsur masyarakat Ambon dengan mendasarkan pada kebutuhan data yang tertera dalam tiap-tiap pertanyaan penelitian sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1: Daftar Pertanyaan Penelitian dan Informan Potensial

No	Pertanyaan Penelitian	Informan Kunci	Output
1	Bagaimana segregasi muncul/tumbuh pasca-perdamaian di Ambon?	Akademisi lokal; penggiat LSM terkait isu sosial, khususnya perdamaian; tokoh agama; tokoh adat; aktor konflik (penggerak dan korban konflik terdahulu); pengungsi	- <i>mapping</i> segregasi - <i>cause analysis</i> munculnya segregasi pasca-konflik
2	Apa dampak kebijakan rekonstruksi pembangunan pasca-konflik terhadap muncul dan menguatnya segregasi di Ambon?	Unsur pemerintahan (wali kota, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Agama, Dinas Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll.); unsur keamanan (TNI dan Kepolisian, preman); unsur legislasi daerah; unsur pergerakan (aktivis sosial-politik dan gender); unsur ekonomi (pedagang dan pebisnis); unsur masyarakat pengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, dll.	- evaluasi terhadap kebijakan - identifikasi <i>stakeholder</i>

No	Pertanyaan Penelitian	Informan Kunci	Output
3	Bagaimana hubungan antara segregasi dan timbulnya kekerasan di Ambon pasca-konflik?	Akademisi lokal; unsur keamanan; unsur adat; unsur agama; unsur pemuda	<i>problem analysis</i>
4	Bagaimana peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga kemasyarakatan dalam menangani segregasi dan dampaknya terhadap munculnya konflik kekerasan di Ambon?	Unsur keagamaan (FKUB, ormas Islam, ormas Kristen, dll.); unsur masyarakat sipil (penggiat LSM terkait isu sosial, khususnya perdamaian); unsur pemuda (tokoh pemuda, karang taruna, dll.)	- data partisipasi LSM - strategi penanganan segregasi dan dampaknya

Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung dari 10 Desember sampai 18 Desember 2012. Tahap kedua dilakukan pada 13 Mei sampai 23 Mei 2013. Dari kedua tahap pengumpulan data tersebut, jumlah keseluruhan responden adalah 74 orang.

# Gambaran Umum Kota Ambon

## A. GAMBARAN DEMOGRAFIS KOTA AMBON

### 1. GAMBARAN WILAYAH KOTA AMBON

Secara geografis, Kota Ambon terletak di sebagian besar wilayah Kepulauan Ambon dengan luas keseluruhan 377 Km<sup>2</sup> sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1979. Luas daratan Kota Ambon adalah 359,45 Km<sup>2</sup> berdasarkan Survey Tata Guna Tanah Tahun 1980. Jika dilihat ciri khas topografi Kota Ambon, komposisi wilayahnya terdiri atas perbukitan (73%) dan dataran rendah (17%).

Figur 5: Sekilas Kota Ambon yang Didominasi oleh Perbukitan



Jika dilihat dari segi administrasi, Kota Ambon merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku sejak ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku tahun 1958.<sup>1</sup> Oleh karenanya, pusat-pusat birokrasi pun berada di Kota Ambon, seperti kantor gubernur dan dinas-dinas terkait di level provinsi, kantor DPRD Provinsi Maluku, dan juga markas besar

---

<sup>1</sup> Penetapan Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku didasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Keberadaan pusat-pusat kekuasaan ini menjadikan Kota Ambon wilayah yang strategis untuk melakukan koordinasi pemerintahan dan pembuatan kebijakan di Provinsi Maluku. Pasca-konflik komunal 1999-2002, kantor-kantor dan pusat-pusat pemerintahan yang dahulu porak-poranda sudah diperbaiki. Tak hanya itu, kondisi keamanan juga relatif sudah kondusif sehingga mendorong kegiatan-kegiatan pemerintahan di ibu kota Provinsi Maluku ini kembali normal.

Figur 6: Balai Kota, Salah Satu Pusat Pemerintahan di Kota Ambon



Kota Ambon terdiri atas lima kecamatan, yakni Kecamatan Sirimau, Nusaniwe, Teluk Ambon, Teluk Ambon Baguala, dan Leitimur Selatan. Terdapat pula 50 kelurahan/desa yang terbagi ke dalam lima kecamatan tersebut (lihat Tabel 2).

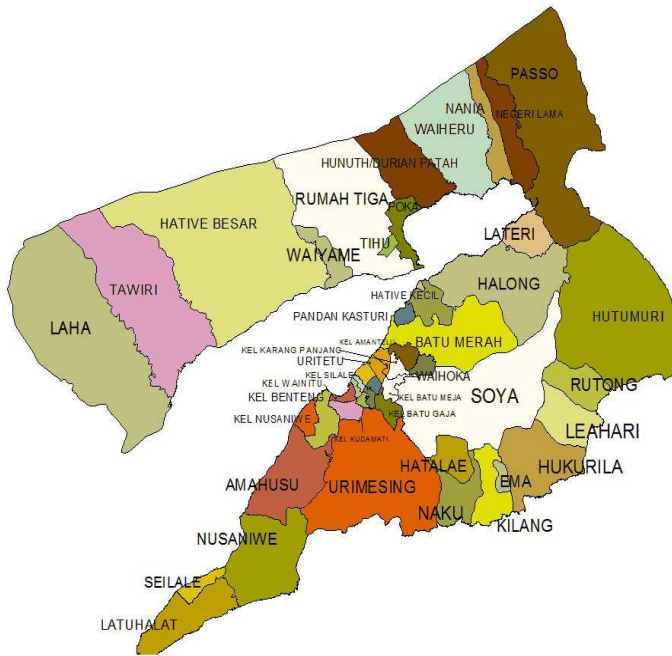
Tabel 2: Kecamatan serta Desa dan Kelurahan di Kota Ambon<sup>2</sup>

Kecamatan	Desa	Kelurahan
Sirimau	4	10
Nusaniwe	5	8
Teluk Ambon	7	1
Teluk Ambon Baguala	6	1
Leitimur Selatan	8	-

*Sumber: BPS Kota Ambon 2012*

<sup>2</sup> Komposisi ini berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon No. 2 Tahun 2006.

Figur 7: Peta Kota Ambon



Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Sirimau merupakan wilayah yang memiliki desa/kelurahan paling banyak jika dibandingkan kecamatan lain. Kecamatan tersebut juga merupakan ibu kota dari Kota Ambon. Adapun keberadaan desa-desa di Kota Ambon cenderung dominan di Kecamatan Teluk Ambon, Teluk Ambon Baguala, dan Leitimur Selatan.<sup>3</sup> Penyebaran serta lokasi kecamatan dan desa-desa di kota Ambon tersebut dapat dilihat secara lebih jelas dalam peta Kota Ambon di atas (Figur 7).

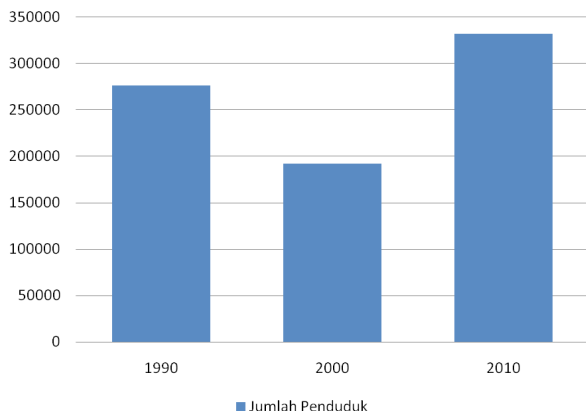
## 2. GAMBARAN KEPENDUDUKAN KOTA AMBON

Dalam tiga dekade terakhir pertumbuhan penduduk Kota Ambon memang mengalami tren yang fluktuatif (Figur 8). Pada 1990 pendu-

<sup>3</sup> Bagi masyarakat Kota Ambon, desa atau biasa disebut *negeri* merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan hukum adat yang memiliki batas wilayah dan kewenangan yang otonom serta dipimpin langsung oleh seorang raja atau Latupati.

duk Kota Ambon sebanyak 275.888 jiwa. Jumlah ini menurun pada 2000 menjadi sekitar 191.561 jiwa, dan meningkat lagi pada 2010 menjadi 331.254 jiwa. Tren ini tidak terlepas dari pecahnya konflik komunal pada 1999-2002 yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang dan puluhan ribu warga harus mengungsi (lihat Figur 8).<sup>4</sup>

Figur 8: Jumlah Penduduk Kota Ambon Periode 1990-2010



*Sumber: BPS Kota Ambon 2012*

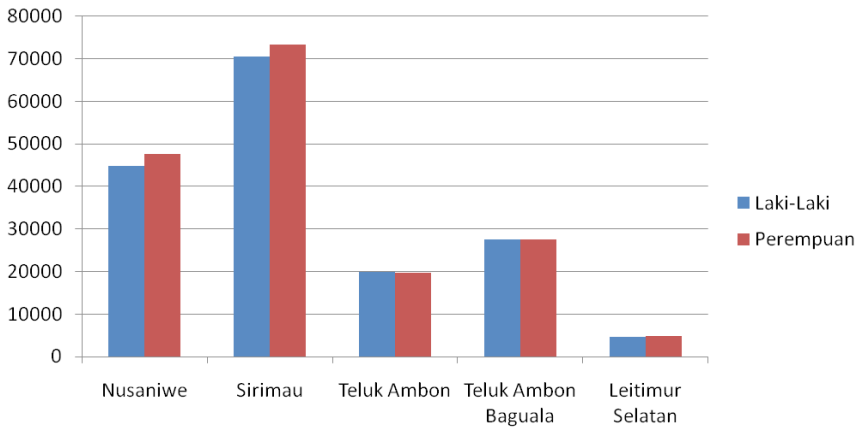
Hampir satu dekade pasca-konflik komunal, pertumbuhan penduduk Kota Ambon cenderung meningkat. Data sensus BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Ambon mencapai 5,65%, per tahun tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku. Pertumbuhan penduduk ini berasal dari laju urbanisasi yang cenderung meningkat dan mulai kembalinya warga yang dahulu mengungsi ke Kota Ambon.

Jika dilihat persebaran penduduk Kota Ambon, Kecamatan Sirimau menjadi wilayah terpadat, diikuti oleh Kecamatan Nusaniwe, Teluk Ambon Baguala, Teluk Ambon, dan Leitimur Selatan (Figur 9).

Sedangkan untuk desa (negeri adat) atau kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Batu Merah di Kecamatan Sirimau, Desa Passo di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kelurahan Kudamati dan Benteng di Kecamatan Nusaniwe.

<sup>4</sup> Konflik menyebabkan sekitar 1.413 korban tewas dan puluhan ribu warga harus mengungsi ke luar Ambon, Maluku. Lihat Barron et al. (2012).

Figur 9: Komposisi Penduduk Kota Ambon Tahun 2012



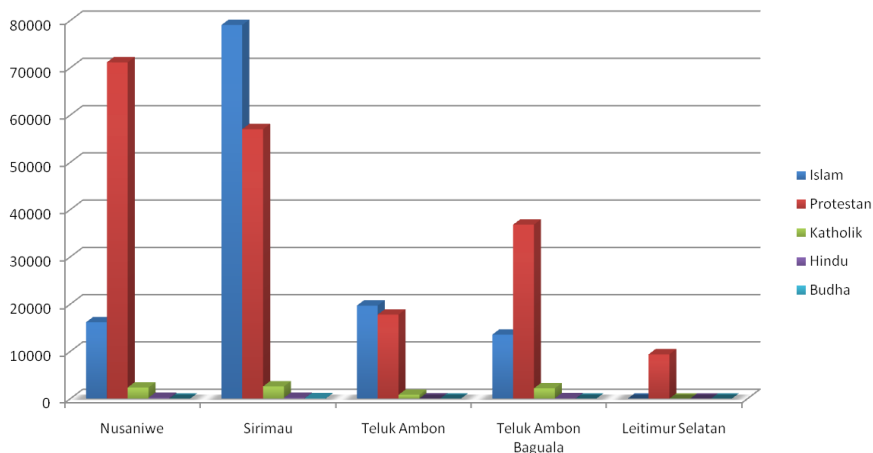
*Sumber: BPS Kota Ambon 2012*

Kepadatan penduduk di beberapa wilayah (kecamatan atau desa/kelurahan) dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, kepadatan penduduk di Kecamatan Sirimau terjadi karena wilayah tersebut merupakan pusat kota di mana banyak terdapat pasar, perkantoran, dan juga fasilitas umum lainnya. Selain itu, kepadatan penduduk di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh konflik masa lalu. Misalnya, kepadatan penduduk Desa Batu Merah dipengaruhi oleh banyaknya lokasi-lokasi pengungsi Muslim yang hijrah dari wilayah dalam dan luar Ambon karena faktor keamanan dan trauma konflik komunal masa lalu. Hal yang sama juga didapati di Desa Passo dan Kelurahan Kudamati yang menjadi tujuan lokasi menetap bagi komunitas Kristen dari dalam atau luar Ambon yang dahulu mengungsi saat konflik komunal terjadi.

Pertumbuhan penduduk Kota Ambon tidak terlepas dari kembali hidupnya pusat-pusat kegiatan masyarakat. Hal ini bisa dilihat di beberapa pusat ekonomi, seperti Pasar Mardika dan deretan rumah toko (ruko) di Jalan A. Y. Patty. Selain itu, keberadaan pusat ekonomi baru, seperti kawasan Ambon City Center dan Terminal Bus Transit di Desa Passo, menjadi salah satu faktor pendorong pesatnya laju perekonomian yang berimbas pada meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Ambon. Situasi yang relatif kondusif pasca-konflik juga mendorong berjalannya proses pendidikan. Universitas Pattimura menjadi magnet bagi masyarakat dalam atau luar Ambon untuk mengakses pendidikan

tinggi. Hal-hal tersebut menjadikan Kota Ambon lebih diuntungkan dibandingkan wilayah lain.

Figur 10: Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Tiap Kecamatan di Kota Ambon Tahun 2010



*Sumber: BPS Sensus Penduduk 2010*

Dilihat dari segi agama, penduduk Kota Ambon terdiri atas penganut Protestan (59%), Islam (39%), Katolik (2%), Hindu (0,13%), dan Budha (0,04%).<sup>5</sup> Komposisi penduduk berdasarkan agama di Kota Ambon tidak mengalami perubahan signifikan dalam hal persentase jika dibandingkan dengan komposisi penduduk pada periode konflik komunal yang lalu. Dua komunitas besar, yakni Protestan/Kristen dan Muslim, masih dominan di Kota Ambon. Persebaran penduduk berdasarkan agama ini juga dapat dilihat berdasarkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Ambon (Figur 10).

Berdasarkan gambar di atas, pola persebaran penduduk berdasarkan agama memang cenderung memperlihatkan konsentrasi warga di kecamatan-kecamatan tertentu. Misalnya, warga Muslim cenderung bermukim di Kecamatan Sirimau, Teluk Ambon, dan Nusaniwe; sedangkan warga Kristen mendominasi Kecamatan Nusaniwe, Teluk Ambon Baguala, dan Leitimur Selatan.

<sup>5</sup> Sensus Penduduk 2010.



## B. SITUASI TERKINI KOTA AMBON

### 1. SITUASI SOSIAL

Kondisi sosial masyarakat Kota Ambon saat ini memang tidak dapat dilepaskan dari pengalaman konflik komunal lalu. Persoalan ketidakpercayaan dalam hubungan sosial masyarakat menjadi hal yang sulit dihilangkan, baik pada komunitas Kristen terhadap Muslim atau sebaliknya, sebagaimana paparan salah satu informan:<sup>6</sup>

... *katong* bersaudara Muslim masih tinggal di sebelah, *katong* Kristen masih hidup di sebelah. [...] kita hidup dalam bingkai *Pela Gandong*, hidup dalam bingkai orang bersaudara, tapi dibatasi dalam tembok ketidakpercayaan.

Salah satu wujud ketidakpercayaan ini terlihat jelas pada tindakan masyarakat yang cenderung memilih tinggal di lokasi permukiman dengan komunitas (agama) seiman. Tak hanya itu, trauma konflik menjadi penguat adanya sekat-sekat antar-komunitas. Kondisi ini kian memburuk ketika kekerasan yang bernuansa agama kembali terjadi, seperti kerusuhan 11 September 2011 dan bentrok Pawai Obor Patti-mura 15 Mei 2012. Insiden-insiden semacam itu kerap menjadi pemicu menguatnya kembali rasa saling tidak percaya di antara komunitas Muslim dan Kristen.

Kendati demikian, kondisi ketidakpercayaan itu bisa juga berlaku cair. Misalnya, dalam pelaksanaan *Musabaqah Tilawatil Quran* (MTQ) Nasional yang menunjukkan adanya solidaritas antarwarga di Kota Ambon. Rasa saling percaya dan saling membantu antar-komunitas yang berbeda agama sangat terlihat dalam kegiatan tersebut.<sup>7</sup> Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta menghilangkan pengalaman traumatis yang melekat pada masyarakat Ambon, khususnya pada para korban konflik komunal di masa lalu.

Di sisi lain, ketidakpastian proses penegakan hukum kerap menjadi pemicu keresahan masyarakat Kota Ambon. Kematian sopir angkot jurusan Kudamati pada tanggal 15 Desember 2011, misalnya, masih belum menemui titik terang meski telah ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Sampai saat ini pihak kepolisian belum menemukan pelaku pembunuhan tersebut. Implikasinya, sejak insiden itu para sopir dan pemilik angkot jurusan Kudamati yang biasa melewati jalan

6 Wawancara dengan salah satu aktor penggerak komunitas Kristen, 17 Desember 2012.

7 Wawancara dengan beberapa informan di Kota Ambon, Ambon, 14-16 Desember 2012.

raya Waihaong sepakat untuk tidak melewati daerah tersebut sampai polisi berhasil menemukan pelaku pembunuhan itu.<sup>8</sup> Akibatnya, jalur transportasi umum Waihaong–Silale menuju Benteng–Kudamati, Nusaniwe, terganggu hingga saat ini.

Kondisi sosial lain yang menonjol di Kota Ambon terkait dengan pengungsi konflik komunal yang lalu. Proses penanganan pengungsi yang dianggap belum tuntas memunculkan berbagai permasalahan lanjutan. Misalnya, pengungsi di Warasia yang tinggal di tanah milik keluarga Hatala. Persoalan muncul ketika pemilik tanah hendak mengeksekusi tanah yang ditempati para pengungsi tersebut, sehingga mereka terancam tidak memiliki tempat tinggal. Selain itu, persoalan identitas kependudukan yang belum jelas juga menjadi kendala bagi para pengungsi, terutama ketika mereka hendak mengakses Kredit Usaha Rakyat yang menuntut kelengkapan identitas sebagai warga negara.<sup>9</sup>

## 2. SITUASI POLITIK

Peta politik di Kota Ambon tidak bisa dilepaskan dari momentum Reformasi 1998. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, konstelasi partai politik yang menguasai peta kekuasaan di Kota Ambon juga mengalami perubahan. Partai-partai berhaluan sekuler menjadi penguasa di berbagai pemilu maupun pemilihan wali kota Ambon. Selain itu, PDI Perjuangan (PDI-P) sebagai partai yang identik dengan simbol perlawanan terhadap Orde Baru muncul sebagai aktor politik yang mempunyai pengaruh besar. Keberadaan PDI-P di Kota Ambon memiliki hubungan erat dengan komunitas Kristen di wilayah tersebut. Bahkan, beberapa pengurus maupun anggota partai tersebut merupakan fungsionaris Gereja Protestan Maluku (GPM) di Kota Ambon (Klinken, 2007). Gambar berikut menunjukkan secara eksplisit hubungan kuat antara PDI-P dan Kristen (Figur 11 hal 137).

Lebih lanjut, peta politik di Kota Ambon yang terlihat dalam komposisi kursi di DPRD menunjukkan bahwa partai-partai sekuler masih mendominasi. PDI-P dan Partai Golkar masih menjadi dua partai yang dominan dalam perebutan kursi di DPRD pada tiap pemilihan umum (Tabel 3).

---

8 Sopir tersebut diduga ditusuk hingga tewas di daerah Waihaong. Provokasi yang muncul kemudian adalah bahwa sopir Kristen asal Kudamati tersebut dibunuh oleh warga Waihaong yang dominan Muslim (wawancara dengan informan, Ambon, 14 Desember 2012).

9 Wawancara dengan tokoh organisasi pengusaha muda Maluku, Ambon, 13 Desember 2012.

Tabel 3: Komposisi Partai Politik di DPRD Kota Ambon (1999-2009)

Pemilu 1999		Pemilu 2004		Pemilu 2009	
Partai Politik	Jumlah Kursi DPRD Kota Ambon	Partai Politik	Jumlah Kursi DPRD Kota Ambon	Partai Politik	Jumlah Kursi DPRD Kota Ambon
PDI-P	16	PDI-P	8	PDI-P	5
Golkar	6	Golkar	6	Golkar	5
PPP	6	PKS	4	PKS	3
Fraksi ABRI	4	Partai Demokrat	3	Partai Demokrat	3
PDBK	1	PDS	3	PDS	1
PKP	1	PPP	2	PPP	3

*Sumber: Elaborasi dari berbagai sumber*

Selain konstelasi partai politik, pelaksanaan Pilkada Gubernur Maluku juga mewarnai dinamika politik di Kota Ambon. Hal ini mulai terlihat menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur Maluku pada bulan Juni 2013. Di sepanjang jalan, mulai dari Bandar Udara Pattimura hingga Desa Latuhalat di ujung Kota Ambon, sejumlah spanduk dan baliho bakal calon gubernur atau wakil gubernur telah terpasang. Di daerah Sirimau yang merupakan pusat Kota Ambon semarak pilkada juga ditandai dengan pernyataan-pernyataan tokoh masyarakat maupun anggota partai politik. Bahkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy ikut serta mendukung salah satu bakal calon melalui baliho dan spanduk yang terpasang di pinggir jalan Kota Ambon.

Isu yang ditawarkan oleh para bakal calon tersebut di antaranya peningkatan kesejahteraan, distribusi pembangunan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan transportasi.<sup>10</sup> Selain itu, isu keamanan tetap didengungkan oleh para calon lewat berbagai media kampanye, seperti spanduk dan koran lokal. Isu kebersamaan dan solidaritas juga dimunculkan dalam berbagai pernyataan para bakal calon, seperti *tagline* calon petahana Said Assegaf-Zeth Sahuburua: “Maluku untuk Semua” (Figur 12 hal 137).<sup>11</sup>

Konfigurasi bakal calon gubernur juga masih kental dengan semangat perimbangan kekuatan antara Muslim dan Kristen.<sup>12</sup> Ham-

10 Dikutip dari penyampaian visi dan misi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dalam acara debat kandidat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti), 21 Mei 2013

11 Pranala <http://www.siwalimanews.com>, 20 Februari 2013

12 Perimbangan kekuatan atau *power sharing* antara komunitas Muslim dan Kristen terutama dalam posisi/jabatan strategis di bidang politik, ekonomi, dan sosial di Maluku menjadi fenomena yang mengemuka pasca-konflik.

pir setiap pasangan bakal calon memasang kandidat gubernur dari komunitas Kristen dan wakil gubernur dari komunitas Muslim atau sebaliknya. Pola ini memang menjadi tren di pilkada tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Maluku.<sup>13</sup> Seperti pada Pilkada Gubernur 2008 di mana keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur selalu Kristen–Muslim atau sebaliknya. Perimbangan ini juga memberikan satu pemahaman pada beberapa kalangan masyarakat bahwa sesudah dua periode Gubernur Maluku senantiasa dari kalangan Kristen, sekarang saatnya gubernur berasal dari kalangan Muslim.<sup>14</sup> Pernyataan tersebut memang tidak mewakili masyarakat Maluku secara keseluruhan, namun memberikan penegasan bahwa perimbangan kekuatan antar-komunitas menjadi bagian integral dalam proses politik perda-maian di Maluku.

Namun demikian, pelaksanaan pesta demokrasi ini juga tidak lepas dari berbagai persoalan. Salah satunya adalah adanya ketakutan akan adanya manuver politik yang berujung pada kekerasan, seperti yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat sipil sebagai berikut:

Kita lihat potensi kekerasan menjelang Pilkada ini tetap ada, seperti konflik di Porto–Haria lalu, terus kejadian di Batu Gantung, dan masih ada yang lain. Kita juga nggak tahu apakah itu didesain menjelang Pilkada atau tidak. Tapi kita, masyarakat sipil (LSM) di sini, juga sudah bilang ke masyarakat untuk saling menjaga dan tidak mudah terprovokasi dengan SMS-SMS... karena kita di sini mudah sekali terpancing.<sup>15</sup>

Gejala yang muncul menjelang Pilkada Gubernur, khususnya di Kota Ambon, adalah maraknya forum-forum atau ikatan keluarga berdasarkan etnisitas atau wilayah tertentu. Forum tersebut biasanya melakukan aksi demonstrasi ataupun penyampaian aspirasi lewat berbagai media, seperti koran atau spanduk/baliho. Biasanya mereka dimanfaatkan oleh para bakal calon gubernur untuk menyuarakan kepentingannya sekaligus menyerang lawan-lawan politiknya.<sup>16</sup> Gesekan pun tak jarang terjadi, meski tidak berskala besar dan tidak melebar ke wilayah lain.

---

13 Lihat Tomsa (2008).

14 Wawancara dengan salah satu aktor penggerak Muslim, Ambon, 13 Desember 2012.

15 Wawancara dengan salah seorang Muslim, ketua sebuah LSM di Ambon, 15 Desember 2012.

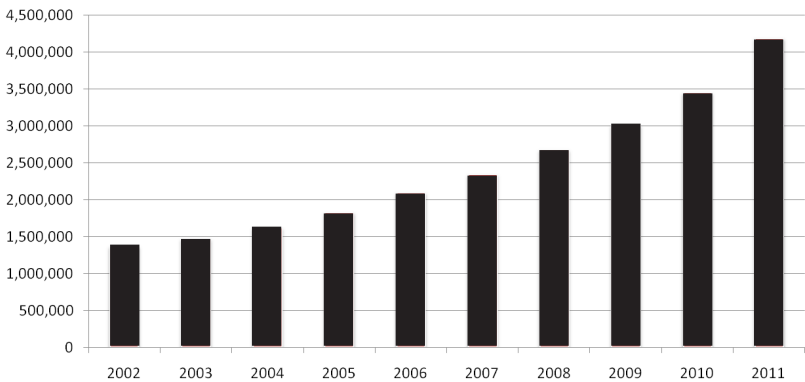
16 Wawancara dengan Direktur sebuah LSM dan tokoh gereja di Ambon, 15 Desember 2012.

### 3. SITUASI EKONOMI

Kondisi ekonomi Kota Ambon menunjukkan tren positif. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada tahun 2012, yakni sekitar 6,77%.<sup>17</sup> Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan semua kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon pasca-konflik komunal juga menunjukkan tren positif dan terus meningkat setiap tahunnya (Figur 13).

Pada tahun 2011 PDRB Kota Ambon telah mencapai Rp 4,2 triliun. Sektor jasa menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah (sekitar 27,81%) sehingga membuat laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon positif. Selanjutnya sektor perdagangan serta angkutan dan komunikasi, masing-masing menyumbang 27,38% dan 18,05% untuk besaran PDRB Kota Ambon.

Figur 13: Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon Periode 2002-2011 (dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: BPS Kota Ambon 2012

Menurut Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, pertumbuhan ekonomi yang positif di Kota Ambon disebabkan tingginya tingkat harapan hidup, yakni sekitar 73,16%, yang merupakan angka tertinggi di Provinsi Maluku. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon juga tertinggi di Provinsi Maluku, yakni 78,94%. Tren positif pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tidak terlepas dari prioritas pembangunan

<sup>17</sup> Pranala <http://www.beritadaerah.com>, 21 November 2012.

jangka pendek yang diterapkan pasca-konflik komunal (2002-2011). Pemerintah Kota Ambon memprioritaskan stabilitas keamanan sebagai bagian dari program pembangunan.<sup>18</sup> Hal ini ditujukan untuk mengembalikan rutinitas masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Menurut penuturan seorang pengusaha Ambon, kondisi ekonomi Kota Ambon sudah jauh meningkat jika dibandingkan periode awal pasca-konflik.<sup>19</sup> Hal ini terlihat dari semaraknya kegiatan perdagangan di Jalan A. Y. Patty. Bahkan menurut penuturannya, beberapa pedagang dan pemilik ruko/kios dari etnis Tionghoa juga sudah kembali melakukan kegiatan ekonomi di Ambon, seperti di Jalan A. Y. Patty dan Desa Passo. Di samping itu, warga pendatang lain seperti orang Buton, Bugis, dan Makassar (BBM), juga sudah kembali terlibat aktif dalam ekonomi informal di Kota Ambon.<sup>20</sup> Saat ini kelompok BBM mendominasi perdagangan kaki lima dan lapak-lapak di Pasar Mardi-ka, Batu Merah, serta di kawasan Ambon Plaza (Amplaz).

Geliat ekonomi Ambon tidak lepas dari pembukaan ruang-ruang ekonomi baru di berbagai kawasan, bukan hanya di kawasan Sirimau. Misalnya, pembangunan sentra perdagangan (seperti mal) di Desa Passo yang turut mewarnai distribusi lanskap ekonomi di Kota Ambon. Sejak pembangunan tersebut, daerah Passo menjadi lebih ramai karena warga yang datang tidak hanya dari Passo, tetapi juga dari wilayah lain. Awalnya mereka khawatir dengan dijadikannya wilayah tersebut sebagai ruang ekonomi baru, karena Passo pada saat konflik merupakan basis komunitas Kristen terbesar di Ambon.<sup>21</sup> Namun seiring waktu, hal tersebut tidak mengurangi niat warga dari luar Passo, terutama dari komunitas Muslim, untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi di sana.

Pembangunan ruang ekonomi baru ini juga menjadi prioritas pembangunan Kota Ambon. Sebagaimana diutarakan salah seorang pejabat bidang pembangunan Kota Ambon, salah satu prioritas pembangunan adalah mengembangkan daerah-daerah baru untuk kegiatan ekonomi, seperti pasar, ruko, juga mal.<sup>22</sup> Dalam waktu dekat ini, fokus akan dia-

---

18 Wawancara dengan seorang pejabat perencanaan pembangunan Ambon, Ambon 14 Mei 2013.

19 Wawancara dengan wakil pengusaha muda Maluku, Ambon, 13 Desember 2012.

20 Menurut seorang pejabat pemerintah Kota Ambon, warga Buton, Bugis, dan Makassar adalah salah satu sasaran kekerasan pada saat konflik komunal lalu (wawancara, Ambon, 13 Desember 2012).

21 Wawancara dengan wakil pengusaha muda Maluku, Ambon, 13 Desember 2012.

22 Wawancara dengan seorang pejabat perencanaan pembangunan Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

rahan pada pembangunan kawasan ekonomi, seperti pasar, di daerah Nusaniwe. Tidak hanya itu, pembangunan dan pemugaran berbagai prasarana pendukung, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, juga ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi di Ambon.<sup>23</sup>

Namun demikian, di balik meningkatnya geliat ekonomi Kota Ambon terdapat pula beberapa persoalan. Pengangguran menjadi persoalan besar di Kota Ambon. Menurut data BPS Kota Ambon tahun 2012, terdapat sekitar 22.738 jiwa yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran terbuka) atau sekitar 15,67% dari total angkatan kerja.<sup>24</sup> Angka ini paling besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku.

Persoalan pengangguran bukan semata permasalahan ekonomi, seperti lapangan kerja yang minim atau tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Persoalan ini penting untuk diperhatikan karena banyak anggota masyarakat yang menganggur merupakan korban konflik komunal di masa lalu. Dalam konteks ini, salah satu aktivis politik Kota Ambon mengatakan:

Banyak anak muda kita di sini yang dulu [menjadi] korban konflik; [...] orang tuanya meninggal atau [...] tidak bisa sekolah karena hidup di pengungsian. Nah mereka-mereka itu, yang sekarang sudah dewasa, susah cari kerja. Andai pun kerja, mereka melakukan pekerjaan serabutan. Dan banyak dari mereka yang mabuk-mabukan di gang-gang di kampung-kampung di sini. Mereka-mereka ini yang mudah terhasut untuk kembali konflik. Seperti pada kerusuhan September 2011, mereka-mereka ini yang berada di depan.<sup>25</sup>

Pasca-konflik komunal, Kota Ambon telah berangsur-angsur pulih. Birokrasi pemerintahan telah berjalan normal, kondisi sosial, ekonomi, dan politik pun relatif telah mengalami peningkatan. Namun di sisi lain, potret Kota Ambon juga masih menyisakan beberapa persoalan, yakni kecenderungan konsentrasi permukiman berdasarkan agama, gejala ketidakpercayaan antara komunitas Muslim dan Kristen, serta pengangguran, khususnya di kalangan pemuda. Persoalan-persoalan tersebut mempunyai potensi merusak proses konsolidasi perdamaian yang telah terbangun di Kota Ambon.

---

23 Seperti pembangunan Jembatan Merah Putih, perbaikan pasar dan terminal Mardika, dan pembangunan kawasan parkir di Sirimau.

24 Total angkatan kerja di Kota Ambon tahun 2011 mencapai 145.072 jiwa.

25 Wawancara dengan salah satu aktivis politik Kota Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

# Pengungsi, Relokasi, dan Terbentuknya Segregasi Pasca-Konflik

## A. SEJARAH SINGKAT SEGREGASI DAN POLA SEGREGASI PASCA-KONFLIK DI AMBON

### 1. SEJARAH SINGKAT SEGREGASI DI KOTA AMBON

Fenomena segregasi memang bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat Kota Ambon. Indikasi ini ditunjukkan oleh pola permukiman penduduk Kota Ambon sebelum konflik komunal, di mana sudah ada pengelompokan berdasarkan agama. Misalnya, wilayah Passo identik dengan negeri Kristen, sementara Batu Merah identik dengan negeri Muslim. Ada juga wilayah Gunung Nona yang mayoritas Kristen serta Jazirah Leihitu yang dominan Muslim. Hal ini yang juga dipertegas oleh pernyataan seorang responden:

... kalau kita bicara segregasi, itu kan bukan terjadi sekarang ini [saja], tapi dari dulu pola permukiman kita saja sudah tersegregasi. Artinya, dari dulu negeri-negeri yang Kristen sendiri, negeri-negeri yang Muslim juga sendiri.<sup>1</sup>

Jika dilihat jauh ke belakang, agama-agama tersebut, termasuk Islam, Kristen, dan Hindu, merupakan agama-agama yang dibawa ke Ambon oleh para pedagang baik dari Asia maupun Eropa yang tertarik dengan kekayaan rempah-rempah Maluku, paling tidak semenjak masa Romawi. Hanya saja, agama Hindu kemudian hanya memiliki dampak atau pengaruh yang kecil di Maluku. Adapun Islam dan Kristen tertanam secara mendalam dan memainkan peranan besar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Agama Kristen diperkirakan tiba di Maluku pada abad ke-16 dalam bentuk agama Katolik Roma yang diperkenalkan oleh Portugis. Saat Belanda mendepak Portugis

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan salah satu tokoh agama dan penggiat perdamaian Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.



pada awal abad ke-17, mereka mengubah desa-desa Katolik menjadi Protestan Reformasi Belanda.<sup>2</sup> Hanya saja perlu diketahui, sepanjang sejarahnya di Maluku kedua agama tersebut telah banyak mengalami modifikasi dengan budaya dan kearifan lokal serta adat istiadat masyarakat setempat.<sup>3</sup>

Kondisi segregasi di Maluku pun tak terlepas dari struktur masyarakat kolonial yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada saat itu.<sup>4</sup> Pemerintah kolonial Belanda memberikan kesempatan kepada orang-orang Kristen Maluku untuk memperoleh pendidikan Barat dan menjadi administrator. Dapat dikatakan, posisi Islam Ambon pada masa kolonial Belanda sedikit terdesak, sebelum kemudian muncul kembali pada saat penjajahan Jepang.<sup>5</sup> Politik diskriminasi yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial terasa dampaknya di berbagai sektor kehidupan masyarakat Ambon. Menurut seorang responden:

Kalau *basudara* Kristen di sini memang, kata opa—oma kita dulu, bahkan yang saya rasakan juga, [...] lebih mudah untuk bisa sekolah dan juga masuk ke dalam birokrasi pemerintahan dibandingkan *basudara* Muslim di sini.<sup>6</sup>

Politik diskriminasi ini mendorong munculnya anggapan bahwa komunitas Kristen lebih berpendidikan dan identik dengan birokrasi, sedangkan komunitas Muslim berposisi sebagai pedagang dan pelaku kegiatan perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari pola permukiman warga berdasarkan aktivitas keseharian mereka. Seperti diutarakan oleh salah satu informan, sebelum konflik biasanya komunitas Muslim lebih memilih tinggal di wilayah “bawah” (dekat pesisir), sementara komunitas Kristen tinggal di wilayah “atas” yang diasosiasikan dengan wilayah perbukitan.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, faktor perubahan batas turut mengubah konfigurasi kewilayahan di Kota Ambon. Lewat Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah

---

2 Bartels (2003b).

3 Bartels (2003).

4 Struktur masyarakat kolonial membagi masyarakat berdasarkan ras atau etnis tertentu. Furnivall (1957).

5 Dieter Bartels (2003); *Ibid.*

6 Wawancara dengan seorang pejabat perencanaan pembangunan Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

7 Wawancara dengan salah satu anggota penggiat LSM dan aktivis gereja, Ambon, 13 Desember 2012.

Tingkat II Ambon, wilayah Kota Ambon menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Kebijakan ini membuka ruang bagi para pendatang untuk hijrah ke Ambon. Pada era Gubernur Hasan Slamet hingga Akib Latuconsina, sekitar tahun 1980 hingga 1990-an, banyak pendatang dari Sulawesi, Jawa, dan Sumatra masuk ke Maluku, termasuk ke Kota Ambon. Kebijakan ini tidak terlepas dari program nasional transmigrasi di era Orde Baru, serta upaya pemerintah Ambon untuk menambah jumlah sumber daya manusia guna mengisi ruang-ruang sosial-ekonomi setempat. Kedua kebijakan ini mengubah dinamika masyarakat di Kota Ambon. Pusat-pusat ekonomi seperti Sirimau kemudian dipenuhi oleh para pendatang yang juga tinggal di dekat lokasi usaha mereka.

Walaupun didominasi oleh komunitas agama tertentu, beberapa wilayah masih memberi ruang bagi warga masyarakat yang berbeda agama untuk tinggal di daerah tersebut. Sebelum konflik memang tidak ditemui adanya satu daerah yang secara eksklusif ditinggali komunitas tertentu. Bahkan, di wilayah Desa/Negeri Batu Merah yang dominan Muslim masih terdapat komunitas Kristen.<sup>8</sup> Meskipun terdapat demarkasi yang jelas antara komunitas Kristen dan Muslim di Ambon, namun interaksi sosial di antara kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan ini tidak mengalami gangguan atau gesekan yang signifikan pada masa sebelum konflik. Tidak jarang ditemui adanya kerja sama antar-komunitas di dua desa/negeri untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, saat pembangunan masjid di Desa Batu Merah yang dominan Muslim, masyarakat Desa Passo yang dominan Kristen turut memberikan bantuan material dan tenaga untuk membangun masjid tersebut.<sup>9</sup> Fenomena kerja sama yang harmonis ini juga terjadi pada saat penyelenggaraan upacara adat. Seperti yang terjadi ketika Desa Laha yang dominan Muslim menyelenggarakan upacara adat untuk mengangkat raja, masyarakat Desa Amahusu yang mayoritas Kristen turut serta dalam perayaan tersebut.

Fenomena tersebut tidak terlepas dari melekatnya kultur yang telah lama dipegang masyarakat Ambon, yakni *Pela* dan *Gandong*.<sup>10</sup> Sebe-

---

8 Lihat Adam (2009).

9 Lihat Brauchler (2009).

10 *Pela* dan *Gandong* merupakan satu ikatan sosial yang didasarkan pada perjanjian serta hubungan darah di antara dua masyarakat antar desa/negeri. Menurut kepercayaan orang Ambon, *Pela* dan *Gandong* merupakan motor penggerak dalam interaksi sosial lintas batas dan agama. Lihat Bartels (1977).

lum konflik komunal lalu, instrumen kultural ini dapat menembus sekat-sekat geografis dan kepercayaan masyarakat Ambon. Meskipun tersegregasi berdasarkan desa/negeri Muslim atau Kristen, dengan keberadaan *Pela* dan *Gandong* masyarakat dapat tetap berinteraksi satu sama lain.

Bartels (2003) menambahkan bahwa konflik yang berawal pada 19 Januari 1999 tersebut telah membuat kaget banyak pihak, khususnya orang-orang Maluku sendiri, mengingat mereka memiliki tradisi *Pela* yang sudah turun-temurun. Bartels menegaskan bahwa walaupun tuduhan provokator sebagai sumber konflik disuarakan berbagai pihak, tetapi kondisi Ambon sendiri memang sudah menyediakan ruang bagi terjadinya konflik. Gejala tersebut, menurut Bartels, sudah terasa sejak 1970-an dengan banyaknya pendatang Muslim di Kota Ambon, terutama orang-orang Bugis, Buton, dan Makasar dari Sulawesi, serta semakin tajamnya polarisasi antara komunitas Muslim dan Kristen. Selain itu, konflik kekerasan tersebut juga bergandengan dengan semakin melemahnya peran *Pela*. Dalam pandangan Bartels (2003), melemahnya *Pela* dan sistem kekerabatan di Kota Ambon banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat internal, seperti Kristenisasi dan Islamisasi yang terus-menerus, serta adanya kebijakan uniformitas Indonesia yang dimulai pada tahun 1970.<sup>11</sup>

## 2. POLA SEGREGASI PASCA-KONFLIK

Kondisi demografis Kota Ambon saat ini tidak lepas dari pengalaman konflik komunal di masa lalu. Pola segregasi penduduk berdasarkan agama sangat terlihat di tingkat desa atau kelurahan. Kesamaan agama yang dianut menjadi alasan kuat penduduk untuk menetap di suatu wilayah maupun keluar dari wilayah tersebut.<sup>12</sup> Seperti yang diutarakan oleh salah satu informan berikut ini:

Akibat konflik, rumah kami rata dengan tanah. Kami harus mengungsi ke tempat pengungsian. Tapi kan tidak bisa begitu terus... Akhirnya, tahun 2005 saya pindah ke daerah Benteng (Kelurahan Benteng). Saya pindah ke sana karena *nggak* mungkin saya cari rumah di daerah yang keluarga kami terus takut karena [menjadi] minoritas.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Bartels (2003b); *Ibid*.

<sup>12</sup> Hal ini dikarenakan nuansa konflik komunal lalu kental dengan simbol-simbol agama.

<sup>13</sup> Wawancara dengan salah satu warga Kristen di Waringin, Ambon, 15 Desember 2012.

Tak hanya itu, dampak konflik mengakibatkan perubahan dalam karakteristik desa/kelurahan di Kota Ambon. Desa/kelurahan yang dahulu dihuni oleh komunitas yang heterogen secara agama, saat ini cenderung lebih homogen. Misalnya di Desa Batu Merah, yang sebelum konflik komunal banyak terdapat penduduk beragama Kristen, terutama di wilayah Batu Merah Dalam, saat ini sulit ditemukan anggota masyarakat beragama Kristen.<sup>14</sup> Hal serupa juga terjadi di Kelurahan Waihaong, di mana penduduk beragama Kristen, baik secara terpaksa maupun sukarela, harus keluar dari wilayah tersebut. Sebaliknya, komunitas Muslim juga mengalami hal serupa di beberapa wilayah. Misalnya di Kelurahan Kudamati yang sebelum konflik masih dapat ditemui penduduk Muslim, pasca-konflik komposisi penduduknya sangat didominasi oleh komunitas Kristen. Fenomena *segregation in mind*<sup>15</sup> tersebut juga cenderung terjadi di beberapa desa/kelurahan di Kota Ambon.

Segregasi penduduk berdasarkan agama di Kota Ambon tidak hanya terjadi pada level desa/kelurahan. Di Kelurahan Wainitu, khususnya di wilayah Waringin maupun Talake, penduduk Muslim maupun Kristen tinggal di dalam satu Rukun Warga (RW). Meskipun tinggal di satu wilayah, pemisahan di antara kedua komunitas juga terjadi. Misalnya di Waringin, biasanya komunitas Kristen tinggal di Rukun Tetangga (RT) 3, sedangkan komunitas Muslim di RT 4. Fenomena ini tidak terlepas dari konteks Waringin yang sebelum konflik memang merupakan wilayah kumuh dan tidak menjadi pilihan menarik bagi penduduk Kota Ambon untuk bermukim. Pasca-konflik keadaan ini berubah. Daerah tersebut lantas menjadi pilihan bermukim penduduk. Salah satu faktor yang mendasari hal ini adalah letak wilayah tersebut yang cukup strategis sehingga memudahkan akses ke pusat kota dan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, serta pasar. Di samping itu, informasi dari warga menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak didominasi oleh komunitas tertentu sehingga di sana mereka tidak merasa sebagai kaum minoritas. Wilayah ini juga biasa disebut perbatasan, karena berada di antara bagian “atas” yang merupakan

---

14 Data BPS Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa di wilayah Batu Merah saat ini hampir 99% penduduknya beragama Islam.

15 Lihat konsep “*perceived segregation/segregation in mind*” dalam T. D. Pariela, makalah tanggapan dalam Semi-Lokakarya SNPK-THC, Ambon, 23 Oktober 2013. Daerah-daerah tertentu di Ambon telah dipersepsikan sebagai daerah Muslim atau Kristen secara umum, walaupun di sana sebenarnya juga terdapat komunitas lainnya.

permukiman komunitas Kristen, seperti Kelurahan Benteng dan Kudemati, dan bagian “bawah” yang merupakan permukiman komunitas Muslim, seperti Kelurahan Waihaong dan juga Silale.

Pola segregasi penduduk di Kota Ambon juga menunjukkan adanya fenomena re-integrasi di antara penduduk dalam satu wilayah. Misalnya yang terjadi di Desa Poka dan Rumah Tiga, di mana pengungsi Kristen yang pada saat konflik keluar dari wilayahnya dapat kembali lagi. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama antara pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon yang didukung oleh tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah ini dianggap cukup berhasil;<sup>16</sup> terlihat dari tidak terdengarnya permasalahan antara komunitas Kristen dan Muslim yang tinggal di daerah tersebut hingga saat ini.<sup>17</sup> Fenomena serupa juga terjadi di Desa Latta. Para penduduk Muslim yang sebagian besarnya pendatang dari Buton, Sulawesi Tenggara, pada saat konflik harus keluar dari desa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen tersebut. Namun pada Oktober 2005, para pengungsi Buton ini dapat kembali ke desa tersebut dan membangun lagi perumahan mereka.<sup>18</sup> Fenomena lain di mana segregasi antar-komunitas relatif tak terjadi berlangsung di Desa Wayame. Pada saat konflik desa ini memang tidak mengalami gelombang besar pengungsian baik dari komunitas Muslim maupun Kristen. Hingga sekarang, komposisi penduduk Desa Wayame relatif berimbang, yakni Muslim 52% dan Kristen 48%.<sup>19</sup>

## B. PROSES RELOKASI/PERPINDAHAN

### 1. PENANGANAN, PENDATAAN, DAN VERIFIKASI PENGUNGI PASCA-KONFLIK

Seperti disebutkan di atas, Ambon merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menyimpan sejarah panjang segregasi komunitas Islam–Kristen, baik sebelum maupun sesudah konflik. Dalam kajian mengenai tumbuhnya segregasi di Ambon harus dibedakan antara segregasi yang muncul sebelum dan sesudah konflik, baik berdasar-

---

16 Repatriasi komunitas Kristen Rumah Tiga juga tidak lepas dari dukungan tokoh-tokoh adat negeri-negeri Muslim, khususnya dari wilayah jazirah Leihitu.

17 Lihat Pariela (2007).

18 Lihat Pariela (2007).

19 BPS Sensus penduduk 2010.

kan latar belakang maupun proses terbentuknya.<sup>20</sup> Segregasi yang terbentuk pasca-konflik 1999 dapat dikatakan merupakan konsekuensi yang tak terencana (*unintended consequence*) dari kebijakan relokasi pemerintah untuk menangani pengungsi pasca-konflik. Model segregasi pasca-konflik ini, dengan demikian, dapat juga disebut segregasi terencana (*intended segregation* atau *segregation by intention*).<sup>21</sup> Latar belakang konflik masa lalu yang mengiringi tumbuhnya segregasi tersebut sering kali juga memperkuat tumbuhnya sentimen dan fanatisme kelompok. Kondisi dan situasi tumbuhnya segregasi pasca-konflik juga telah menjadi dasar pertimbangan dan perhatian tersendiri dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon tahun 2006-2026.<sup>22</sup>

Secara umum, tumbuhnya segregasi pasca-konflik terkait erat dengan proses relokasi yang diinisiasi oleh pemerintah. Pada saat konflik Ambon meletus banyak warga dari komunitas Islam dan Kristen mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman. Setelah konflik mereda, berbagai tempat menjadi konsentrasi para pengungsi, seperti sekolah, masjid, gereja, Wisma Atlet Ambon, dan sebagainya. Secara keseluruhan jumlah pengungsi di Kota Ambon sendiri mencapai kurang lebih 3.824 kepala keluarga (KK).<sup>23</sup> Berdasarkan data ICG (International Crisis Group) (2002), hampir sepertiga penduduk Ambon mengungsi setelah konflik meletus tahun 1999.<sup>24</sup> Setelah konflik 1999 mereda, pemerintah mendata para pengungsi tersebut dan menawarkan beberapa opsi penyelesaian.<sup>25</sup>

Penanganan pengungsi merupakan salah satu program yang diamanatkan oleh Inpres No. 6, Tahun 2003. Melalui koordinasi Kemendiknas, masalah pengungsi diharapkan dapat selesai secepatnya. Penanganan pengungsi ini mencakup (1) identifikasi dan inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan perumahan dan permukiman yang rusak akibat konflik; (2) rehabilitasi dan pembangunan kem-

---

20 Wawancara dengan seorang penggiat LSM dan aktivis gereja Ambon, Ambon, 15 Desember 2012.

21 Baca T. D. Pariela, makalah tanggapan dalam Semi-Lokakarya, SNP-K-THC, Ambon, 23 Oktober 2013.

22 Lihat Perda Kota Ambon No. 4 Tahun 2006, halaman 13.

23 Wawancara dengan seorang pejabat kantor Dinas Sosial Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

24 Lihat Jeroen Adam (2010), halaman 403.

25 Wawancara dengan seorang penggiat HAM Maluku, Ambon, 14 Desember 2012; dan penggiat LSM, Ambon, 15 Desember 2012.

bali perumahan dan permukiman yang rusak akibat konflik; (3) pembangunan rumah pengungsi akibat konflik; (4) Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman pengungsi. Lebih dari itu, penyelesaian masalah pengungsi juga telah diamanatkan secara nyata dan tegas dalam RPJP Kota Ambon tahun 2006-2026, khususnya menyangkut hak-hak perdata mereka untuk menghindari munculnya konflik lebih lanjut.<sup>26</sup>

Kritik yang muncul kemudian, salah satunya ditujukan pada pola pendekatan pembangunan kembali rumah-rumah penduduk yang hancur atau terbakar. Pendekatan yang hanya berdasarkan pada “titik rumah” atau “titik api” dirasa tidak adil karena tipe keluarga di Ambon adalah tipe keluarga besar (*extended family*), bukan keluarga batih (*nuclear family*), di mana lebih dari satu keluarga tinggal secara bersama dalam satu rumah, khususnya dengan anak-anak mereka yang sudah menikah dan punya anak tetapi belum bisa memiliki rumah sendiri. Karena hanya keluarga induk yang diberi ganti, rumah yang sebelumnya relatif besar hanya diganti dengan rumah sederhana berukuran kurang lebih 5x6 meter tanpa dapur,<sup>27</sup> padahal ditempati oleh beberapa kepala keluarga. Dari perspektif pemerintah, kebijakan “titik api” atau “*by name by address*” tersebut diambil dengan alasan pemerataan. Kebijakan ini diberlakukan pada masa pemerintahan Gubernur Karel Albert Ralahalu (2003-2013).

Di samping itu, ada pula tuduhan tentang banyaknya orang tak jujur yang menyebabkan proses penanganan pengungsi berlarut-larut sampai 2009. Selalu saja ada yang datang dan mengaku-aku sebagai pengungsi sehingga setiap tahun jumlah pengungsi selalu bertambah.<sup>28</sup> Adapun menurut pemerintah, alasan berlarut-larutnya masalah pengungsi adalah perpindahan para pengungsi dari satu tempat ke tempat lain yang begitu dinamis. Misalnya, pengungsi awalnya pindah dari tempat A ke tempat B. Ketika didata di tempat B, ternyata mereka sudah pindah ke C. Kemungkinan lain adalah para pengungsi tersebut sedang melakukan perjalanan atau bepergian ketika pendataan dilakukan. Kasus lain, misalnya, adalah pecah KK setelah konflik. Dalam hal ini, pecahan KK yang bersangkutan mengklaim diri sebagai pengungsi, padahal awalnya yang mengungsi adalah orang tuanya. Akibat

26 Lihat Perda Ambon No. 4 Tahun 2006, halaman 16.

27 Wawancara dengan seorang tokoh pengungsi Maluku, Ambon, 14 Mei 2013.

28 Wawancara dengan seorang pejabat bidang hukum Ambon, Ambon, 22 Mei 2013.

dari kompleksitas proses pendataan ini, banyak pengungsi yang tidak terdata, sementara non-pengungsi malah masuk data dengan berbagai cara dan alasan.<sup>29</sup>

Dinamika dan berbagai masalah yang muncul dalam proses pendataan pengungsi diakui pula oleh berbagai segmen masyarakat. Masalah-masalah tersebut mencakup ketidakjujuran, *mark-up* data, data fiktif, politisasi data, dan sebagainya.<sup>30</sup> Proses pendataan pengungsi sendiri kerap mendapat kritikan, terutama setelah klaim pemerintah atas selesainya masalah pengungsi pada tahun 2009. Di antara kritik tersebut menyinyalir adanya *mark-up* data pengungsi, dari yang disepakati sekitar 30.000-an se-Provinsi Maluku, menjadi 100.000-an yang direalisasikan. Kritik lain menyangkut indikator atau batasan pengungsi—jika diklaim masalahnya sudah selesai, apakah mereka sudah pulang dan rumahnya sudah dibangun? Selain itu, masalah sosial lain terkait pengungsi juga belum terselesaikan dan dapat menjadi bom waktu, seperti persoalan hak perdata, fasilitas pendidikan dan kesehatan, penanganan masalah psikis pasca-konflik, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Pihak Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kota Ambon mengklaim persoalan atau pemenuhan hak-hak pengungsi telah selesai. Mantan Wali Kota Ambon, M. J. Papilaja, atau Pemerintah Kota Ambon saat ini, telah secara tegas melalui Surat Keputusan (SK) tersendiri menetapkan selesainya urusan pengungsi.<sup>32</sup> Lebih dari itu, berdasarkan klaim pihak Pemerintah Kota Ambon saat ini melalui Wakil Wali Kotanya, Olivia Latuconsina, penanganan pengungsi Kota Ambon sebanyak 3.824 Kepala Keluarga (KK) sudah dituntaskan pada bulan November 2009.<sup>33</sup> Namun demikian, pada kenyataannya hak-hak ribuan pengungsi masih belum terpenuhi atau tertangani. Pemerintah cenderung membiarkan dan menganggap permasalahan pengungsi selesai begitu saja, padahal ada banyak hal

29 Wawancara dengan seorang pejabat bidang hukum lainnya, Ambon, 14 Mei 2013.

30 Wawancara dengan berbagai responden, termasuk Koalisi Pengungsi Maluku, Pengungsi Lembah Argo, Dinas Sosial Propinsi Maluku, dan lain-lain, Ambon, 13-16 Mei, 2013.

31 Wawancara dengan tokoh pengungsi Maluku, Ambon, 14 Mei 2013.

32 Ambonekspres.com, 1,066 KK Pengungsi Belum Terlayani. Diambil dari <http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=46&id=40569>, pada tanggal 14 Februari 2012.

33 Siwalimanews.com, November, Penanganan Pengungsi Tuntas. Diambil dari [http://www.siwalimanews.com/post/november\\_penanganan\\_pengungsi\\_kota\\_ambon\\_tuntas](http://www.siwalimanews.com/post/november_penanganan_pengungsi_kota_ambon_tuntas), pada 14 Februari 2012.



yang masih belum terpecahkan. Misalnya, persoalan jumlah pengungsi yang tidak sedikit dan hingga kini masih menjadi perdebatan banyak pihak.<sup>34</sup>

Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) tentang penghentian urusan pengungsi tersebut merupakan hasil kesepakatan Menteri Sosial (Mensos), Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil), serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Semua bupati dan wali kota di Provinsi Maluku mendukung MoU tersebut. Pada saat itu hanya Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Wali Kota Ambon yang menegaskan tidak adanya pengungsi di daerah mereka. Konsekuensi dari kesepakatan tersebut, jika ternyata di kemudian hari terdapat pengungsi lagi, maka pengungsi tersebut akan menjadi tanggungan masing-masing kabupaten/kota. Dengan demikian, pengungsi yang bersangkutan akan menerima dana pemberdayaan dari pemerintah kabupaten/kota.<sup>35</sup>

Pasca keluarnya klaim pemerintah bahwa masalah pengungsi sudah selesai, bermunculan anggota masyarakat yang menyatakan diri sebagai korban konflik 1999 dan rumahnya terbakar tapi sama sekali belum mendapatkan hak-haknya. Banyak di antara mereka kemudian mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maluku dan Koalisi Pengungsi Maluku untuk menyampaikan tuntutan. Mediasi antara pengungsi melalui Koalisi Pengungsi Maluku dengan staf Menkokesra dan Mensos yang difasilitasi oleh Komnas HAM pusat lantas dilaksanakan pada 12 Maret 2012 di kantor Gubernur Maluku untuk membicarakan masalah data dan verifikasi. Dari mediasi tersebut, ditemukan seribu lebih pengungsi dari seluruh kabupaten/kota di Maluku yang belum mendapatkan hak-haknya. Di Ambon sendiri, sisa pengungsi yang hak-haknya belum terpenuhi tersebar di banyak desa. Data tersebut lebih banyak didasarkan pada pengaduan para pengungsi.<sup>36</sup> Hasilnya, dibentuklah Tim Verifikasi Pengungsi yang terdiri atas Koalisi Pengungsi Maluku, unsur Pemda, Jaringan Baileo Maluku, dan Komnas HAM sebagai mediator. Dasar hukum pembentukan tim verifikasi ini adalah Surat Keputusan

---

34 Wawancara dengan seorang penggiat HAM Maluku, Ambon, 14 Desember 2012.

35 Wawancara dengan seorang pejabat bidang hukum Pemerintah Kota Ambon, Ambon, 22 Mei 2013.

36 Wawancara dengan tokoh pengungsi Maluku, Ambon, 14 Mei 2013.

Gubernur Maluku No. 394 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Terpadu Verifikasi Sisa Data Pengungsi untuk Melakukan Verifikasi di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku No. 465.2/1169 tertanggal 18 Mei 2012.<sup>37</sup>

Prosedur yang ditetapkan: ketika data-data telah diverifikasi, data-data tersebut harus dilegitimasi oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tanda tangan bupati/wali kota, lalu diserahkan ke tingkat provinsi. Selanjutnya, pemerintah provinsi akan memperjuangkan anggarannya ke pemerintah pusat, walaupun pada kenyataannya kerap terdapat tarik-menarik di antara berbagai pihak dalam proses pemasukan dan pengesahan data tersebut.<sup>38</sup> Berdasarkan laporan kerja Tim Verifikasi, mekanisme kerja tim meliputi tiga tahapan, yaitu melakukan verifikasi terhadap data temuan Koalisi Pengungsi Maluku dan Komnas HAM dengan data kabupaten/kota; data hasil verifikasi pertama akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan ke empat kabupaten/kota yang telah diverifikasi bersama oleh Tim; kemudian, terhadap data hasil verifikasi lapangan akan dilakukan verifikasi dengan data SIMDA Provinsi Maluku.<sup>39</sup>

Berikut adalah data pengungsi yang tersisa sampai tahun 2012 berdasarkan hasil kerja Tim Verifikasi (Tabel 4).

Tabel 4: Rekapitulasi Hasil Verifikasi Sisa Data Pengungsi Provinsi Maluku<sup>40</sup>

No	Kabupaten/Kota	Data Awal	Data Tidak Valid	Data Valid	Keterangan
1	Kota Ambon	1.335	-	-	Belum dilakukan verifikasi
2	Maluku Tengah	1.029	557	472	-
3	Buru	363	79	271	13 KK tidak diverifikasi karena berada di Buru Selatan
4	Seram Bagian Barat	722	399	323	
5	Maluku Tenggara	67			
6	Seram Bagian Timur	125			
<b>Total</b>		3.641	1.035	1.066	

37 Laporan Tim Verifikasi Data Sisa Pengungsi Korban Konflik Sosial di Provinsi Maluku, Juni 2012.

38 Wawancara dengan tokoh pengungsi Maluku, Ambon, 14 Mei 2013.

39 Laporan Kerja Tim Verifikasi Data Sisa Pengungsi Korban Konflik Sosial di Ambon, Juni 2012. Data diperoleh dari Koalisi Pengungsi Maluku, Ambon, 14 Mei 2013.

40 Data diperoleh dari Koalisi Pengungsi Maluku, Ambon, 14 Mei 2013.

Data tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hasil kerja Tim Verifikasi masih terdapat sekitar 3.641 KK pengungsi yang hak-haknya belum terpenuhi sampai tahun 2012. Di Ambon sendiri masih terdapat sekitar 1.335 KK. Para pengungsi tersebut merasa hak-haknya belum terpenuhi sebagaimana mestinya, diperlakukan secara tidak adil, dan menganggap hak-haknya telah dirampas oleh pemerintah. Dalam kondisi psikis seperti ini segala hal dapat saja terjadi, baik yang dilakukan oleh para pengungsi tersebut ataupun pihak-pihak tertentu yang mencoba mengambil manfaat dan keuntungan dari situasi yang tidak menentu.

Kalau kasus pengungsi itu selesai, maka sedikit demi sedikit jejak rekam itu akan hilang. Tapi kalau kasus ini belum selesai, ketika disentuh orang akan bernostalgia lagi ke masa lalu—perih, sangat pahit, pedih [...]. Jadi jalan tengahnya, kondisi ini juga harus disikapi dengan baik oleh pemerintah. Harus tuntas.<sup>41</sup>

Pengabaian masalah pengungsi melalui klaim dan penerbitan Surat Keputusan (SK) tertentu tanpa melihat kondisi di lapangan hanya mengonstruksi masalah dan memunculkan potensi kekerasan baru yang siap meledak kapan saja. Di lain pihak, para pengungsi tersebut akan terus menuntut hak-hak mereka, apalagi jika mereka tahu bahwa para pengungsi lain atau pengungsi di tempat lain telah mendapatkan hak-haknya. Perasaan deprivasi relatif seperti ini, secara teoretis-analitis, sering kali menjelma menjadi salah satu sumber potensial meletusnya kekerasan. Lebih dari itu, selama penanganan masalah pengungsi belum menentu, dapat saja bermunculan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dengan membuat provokasi-provokasi demi keuntungan atau kepentingan mereka sendiri.

## 2. OPSI DAN SKEMA RELOKASI

Beberapa opsi ditawarkan oleh pemerintah sebagai bagian resolusi pengungsi pasca-konflik 1999, yaitu kembali ke tempat asal, relokasi, dan menetap di pengungsian. Di antara opsi-opsi tersebut, relokasi merupakan pilihan favorit para pengungsi saat itu. Padahal seharusnya opsi “kembali ke daerah asal” merupakan pilihan terbaik. Namun relokasi menjadi pilihan favorit karena ketiadaan konsep yang berper-

---

41 Wawancara dengan salah satu penggerak perdamaian di Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

spektif jangka panjang. Ke depan kondisi ini tentu saja bisa berdampak buruk jika tidak dikelola sejak dini. Pada umumnya, ada persoalan dalam mewujudkan negosiasi yang baik di antara *host community* dengan para pengungsi. Meskipun demikian, untuk kasus tertentu seperti di Desa Latta misalnya, terbukti para pengungsi Muslim bisa kembali dan menetap dengan damai hingga kini.<sup>42</sup>

Kebanyakan pengungsi yang merupakan minoritas di daerah asalnya lebih menyukai relokasi dengan berbagai alasan, terutama alasan terkait jaminan keamanan dan penghilangan trauma.<sup>43</sup> Sebagai contoh, pengungsi yang direlokasi di Kayu Tiga adalah komunitas Kristen yang berasal dari Batu Merah (lihat Figur 14 hal 138). Mereka memutuskan untuk tidak kembali ke Batu Merah karena di daerah tersebut mereka merupakan minoritas. Begitu juga dengan pengungsi di Kota Ambon yang berasal dari Gunung Nona. Mereka memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Gunung Nona karena merupakan minoritas di daerah tersebut.

Menariknya, masyarakat lokal sendiri membagi pengungsi menjadi tiga kategori berdasarkan respons mereka terhadap tawaran pemerintah, yaitu pengungsi yang mau direlokasi, pengungsi yang mau kembali, dan pengungsi yang pasrah.<sup>44</sup> Di sini istilah pengungsi yang pasrah lebih identik dengan mereka yang sepenuhnya memasrahkan keputusan pada pemerintah dan/atau umumnya tinggal di lahan-lahan relokasi yang kepemilikannya masih dalam sengketa.

Secara umum, skema proses relokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat menyediakan lahan dan pemerintah membangun rumah, atau sebaliknya. Mekanisme ini umum berlaku baik untuk pengungsi pasca-konflik 1999 maupun pengungsi yang diakibatkan oleh kekerasan sporadis setelah berlalunya konflik 1999, misalnya yang terjadi pada 2011 dan 2012. Relokasi di Warasia yang dibangun pada 2005 merupakan contoh bekerjanya skema pertama. Di sana pemerintah hanya membangun rumah, sementara lahan diupayakan sendiri oleh para pengungsi.<sup>45</sup> Mekanisme pertama inilah yang nampaknya banyak dipilih para pengungsi walaupun kemudian banyak di anta-

---

42 T. D. Pariela, Makalah Tanggapan dalam Semi-Lokakarya, SNPK-THC, Ambon, 23 Oktober 2013.

43 Wawancara dengan mantan Ketua Komnas HAM Maluku, Ambon, 12 Desember 2012.

44 Wawancara dengan penggiat HAM Maluku, Ambon, 12 Desember 2012, dan dengan tokoh pengungsi Maluku, Ambon, 14 Mei 2013.

45 Wawancara dengan salah pengungsi Warasia, Ambon, 15 Desember 2012.

ra mereka yang hingga kini tersangkut kasus sengketa tanah/lahan. Adapun contoh relokasi yang tanahnya disediakan oleh pemerintah adalah relokasi yang terdapat di Passo.<sup>46</sup> Selain itu, terdapat juga tanah relokasi yang merupakan pemberian cuma-cuma oleh negeri adat tertentu, misalnya di Hative Besar.<sup>47</sup> Selain kedua skema itu, banyak juga pengungsi yang pada saat konflik lari ke gunung-gunung dan menetap di sana sampai sekarang. Dengan demikian, proses relokasi para pengungsi ini lebih merupakan inisiatif sendiri, bukan berasal dari opsi yang ditawarkan pemerintah. Untuk mereka pemerintah hanya memberikan dana guna membeli tanah yang mereka tempati dan membangun rumah.<sup>48</sup>

Bagi mereka yang memilih opsi relokasi, pemerintah memberikan sejumlah dana, dengan rincian Rp 2 juta per KK untuk dana pemulangan ke tempat asal dan Rp 12 juta per KK untuk membeli bahan bangunan rumah (BBR) dan membangunnya di lahan relokasi. Dalam praktiknya, dana Rp 2 juta tersebut umumnya digunakan untuk membeli tanah di tempat relokasi. Selain itu, kerap kali dana BBR yang sampai ke tangan pengungsi bukan berjumlah Rp 12 juta—di antara mereka ada yang hanya menerima Rp 8 juta, Rp 9 juta, atau Rp 10 juta. Hal ini acap terjadi di banyak tempat.<sup>49</sup> Hal ini mengindikasikan adanya pengurangan/pemotongan di tengah jalan dalam proses pencairan dana BBR tersebut. Bahkan untuk konteks relokasi Pulau Buru di Lembah Argo, dari 202 KK, tidak ada satu pun yang menerima bantuan BBR karena berbagai alasan, meski mereka sudah mengurusnya ke pemerintah. Mereka menegaskan bahwa bantuan rumah yang mereka terima merupakan bantuan langsung dari Belanda dan bukan dari pemerintah. Alasan yang berkembang terkait hal ini, mereka tidak mendapatkan bantuan BBR karena sudah mendapatkan bantuan dari Belanda.<sup>50</sup>

Selain pengungsi Pulau Buru, pengungsi lain yang mengklaim tidak mendapatkan dana BBR adalah pengungsi di Pita Samudra (Pitas)

---

46 Wawancara dengan penggiat HAM Maluku, Ambon, 12 Desember 2012.

47 Wawancara dengan pejabat bidang perencanaan pembangunan Kota Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

48 Wawancara dengan penggiat HAM Maluku, Ambon, 12 Desember 2012; dan pejabat Dinas Sosial Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

49 Wawancara dengan salah satu pengungsi di Lemba Argo, Ambon, 13 Mei 2013.

50 *Ibid.*

(Figur 15 dan 16 hal 138-9).<sup>51</sup> Kebanyakan dari mereka merupakan pecahan KK dan masih tinggal di tempat pengungsian tersebut sampai saat ini. Mereka sebenarnya tetap mendapatkan bantuan selama periode kepemimpinan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang, tetapi tidak lagi mendapatkannya pada periode Gubernur Karel Albert Ralahalu.<sup>52</sup>

Versi lain menyebutkan bahwa bantuan BBR, yang diasumsikan bernilai Rp 12 juta tersebut, tidaklah berbentuk uang tunai, melainkan bahan-bahan material/pabrikan seperti atap seng licin, semen, tripleks, paku campuran, dan kloset. Selain itu, mereka juga mendapatkan dana Rp 1.750.000 untuk membeli kayu untuk tiang, pasir dan batu untuk fondasi, serta biaya tukang. Dana ini sebenarnya merupakan dana pemulangan pengungsi sebesar Rp 2 juta. Pemberian bantuan dalam bentuk bahan-bahan material tersebut dilakukan melalui mekanisme tender, sehingga masyarakat mendapatkannya lewat kontraktor.<sup>53</sup>

### 3. RELOKASI DAN KONSENTRASI KOMUNITAS

Relokasi dengan berbagai konsekuensi sosial dan ekonominya telah menjadi pilihan resolusi pemerintah untuk menyelesaikan masalah pengungsi pasca-konflik 1999 dan kekerasan-kekerasan yang terjadi setelahnya. Program relokasi tersebut, secara tidak disengaja atau tidak langsung, telah menciptakan konsentrasi-konsentrasi komunitas baru yang tersegregasi satu sama lain. Hal ini karena pengungsi cenderung memilih tempat relokasi yang berdekatan dengan atau berada di sekitar komunitas yang memiliki identitas sama dengan mereka. Kondisi inilah yang banyak mengundang kritik berbagai pihak terhadap strategi relokasi yang diinisiasi pemerintah.

Wujudnya seperti ini: masyarakat bermukim menurut pola-pola komunitas mereka. Yang Kristen cenderung ke Kristen, sedangkan yang Muslim cenderung ke Muslim. Itu yang pertama—wujudnya. Yang kedua, ruang-ruang publik yang tadinya itu *mixed* (bercampur), sekarang cenderung homogen. Padahal dulu heterogen. Kalau kita tidak membuka ru-

---

51 Pita Samudra adalah dua gudang barang yang sudah cukup rusak yang dimiliki oleh perusahaan Pita Samudra. Sementara ini, para pengungsi tersebut dipinjam untuk menggunakannya sebagai tempat tinggal.

52 FGD dengan para pengungsi Pita Samudra, Ambon, 16 Mei 2013.

53 Wawancara dengan seorang tokoh pengungsi Maluku, Ambon, 14 Mei 2013.

ang-ruang dialogis atau ruang interaksi publik dalam rangka membangun kohesi sosial, itu bisa mempertajam—dan menjadi potensi—konflik.<sup>54</sup>

Cuma, yang Muslim dipindahkan ke lokasi Muslim dan yang Kristen dipindahkan ke lokasi Kristen. Itu yang membuat saya sangat mengharapkan kepedulian pemerintah daerah. Seharusnya jangan dipisahkan begitu. Kita mengharapkan kita bergabung seperti semula, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pemerintah daerah bisa menempatkan aparat di masing-masing lokasi. Di sini dulu kan Muslim semua. Setelah kerusuhan terjadi, yang Muslim itu pada pindah. Yang Muslim sudah jual-jual rumah. Begitu juga yang Kristen. Jadilah terkotak-kotak.<sup>55</sup>

Pola pergerakan penduduk pasca-konflik, khususnya pasca-konflik 1999, cenderung mengarah pada pembentukan segregasi. Komunitas-komunitas yang dulunya adalah berbaur (*mixed*) dan heterogen pun kini cenderung homogen. Dengan kata lain, konflik 1999 tidak hanya mengakibatkan jatuhnya korban, tetapi juga telah mendekonstruksi tatanan masyarakat secara sosial-ekonomi dan mempertajam wajah segregasi di Ambon. Konflik tersebut juga telah menciptakan kecugraan, trauma, sentimen, dan kebencian antar-komunitas. Beberapa contoh pergerakan penduduk ini di antaranya (1) warga Muslim dari Passo (wilayah dominan Kristen) pindah ke Waeheru dan Nania (wilayah dominan Islam); (2) warga Muslim dari Soya (Kristen) pindah ke Kahena, Batu Merah (Islam); (3) warga Muslim dari Kudamati (Kristen) pindah ke berbagai tempat lain yang mayoritas penduduknya Islam; (4) warga Kristen dari Batu Merah (Islam) pindah ke Kayu Tiga (Kristen); (5) warga Kristen dari Waihaong (Islam) pindah ke berbagai tempat lain yang mayoritas penduduknya Kristen.<sup>56</sup>

Penajaman segregasi tentu saja dapat meningkatkan potensi konflik. Hal ini secara jelas dikonfirmasi oleh Wali Kota Ambon yang menegaskan bahwa “... pada waktu konflik terjadi bentuk pemisahan itu semakin tajam saja. Tapi bawaan dasarnya dari dulu memang begitu.”<sup>57</sup> Sejalan dengan pernyataan Wali Kota Ambon tersebut, kritik tajam juga disampaikan oleh seorang penggiat LSM:

54 Wawancara dengan seorang penggiat LSM Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

55 Wawancara dengan seorang tokoh perempuan Passo, Ambon, 17 Mei 2013.

56 Contoh-contoh tersebut digali dari berbagai narasumber/informan wawancara.

57 Wawancara dengan Wali Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

Tapi pemerintah *nggak* pernah melihat bahwa ada persoalan dari opsi relokasi itu. Harusnya strategi yang dilakukan oleh pemerintah [adalah] mendorong upaya-upaya untuk melakukan pencegahan [konflik] atau langkah-langkah untuk [membangun] ketahanan masyarakat. Sehingga jika opsi relokasi yang dipilih, itu harus juga didukung proses-proses pemulihan untuk membangun hubungan, komunikasi, dan menciptakan suasana yang lebih baik [dalam interaksi] lintas komunitas. Tapi yang terjadi justru [...] antar-komunitas ini masih ada rasa curiga satu dengan yang lain—mereka masih merasa curiga, trauma. Yang terjadi sekarang, interaksi yang telah terbangun ini kan hanya interaksi semu. Kapan-kapan pun jika ada konflik lagi, [masing-masing komunitas] akan menarik diri dan saling membenci lagi. [Akan tetapi,] proses pemulihan tidak ditangani secara serius dan pemerintah tidak punya pola atau strategi untuk menangani hal tersebut.<sup>58</sup>

Strategi relokasi yang digagas oleh pemerintah sebagai bagian resolusi masalah pengungsi pasca-konflik 1999 dianggap sebagai penyelesaian instan yang tidak diikuti dengan upaya-upaya penyelesaian terhadap efek yang ditimbulkan oleh proses relokasi tersebut. Proses relokasi dilihat sekadar pemindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Padahal setelah melakukan relokasi terdapat masalah yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan secepatnya, yakni penguatan dan pemulihan interaksi dan komunikasi antar-komunitas. Sayangnya, pemerintah dipandang kurang serius, bahkan tidak memiliki pola dan strategi yang jelas untuk menangani masalah tersebut.

### C. ALASAN-ALASAN RELOKASI

#### 1. KELOMPOK MINORITAS

Beberapa alasan utama mendorong para pengungsi untuk memilih relokasi daripada tinggal di pengungsian atau kembali ke daerah asal. Salah satunya terkait kondisi sosiokultural sebagai kelompok minoritas di daerah asal.<sup>59</sup> Para pengungsi Kristen cenderung memilih relokasi jika daerah asal mereka didominasi komunitas Muslim, demikian pula sebaliknya. Kondisi pasca-konflik yang masih tidak stabil membuat para pengungsi berpikir panjang dan bersikap ekstra hati-hati untuk kembali ke daerah asalnya. Resistensi para pengungsi untuk kembali

<sup>58</sup> Wawancara dengan seorang penggiat LSM Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

<sup>59</sup> Wawancara dengan seorang pejabat kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.



karena faktor minoritas sebagai sebuah komunitas di daerah asal merupakan fenomena yang sangat umum. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang responden:

Jadi, memang tergantung pada mereka (pengungsi). Saya contohkan: seperti di Batu Merah, banyak warga yang sepakat untuk relokasi dari sana. Seperti di Kayu Tiga, itu kan mereka [ber]asal dari Batu Merah. Karena mereka minoritas di sana, jadinya mereka sepakat untuk pindah/relokasi.<sup>60</sup>

## 2. KEAMANAN

Alasan kedua, yang masih terkait erat dengan situasi sebagai minoritas di daerah asal adalah rasa aman atau keamanan. Kebanyakan pengungsi memilih relokasi karena tidak adanya jaminan keamanan jika kembali ke daerah asal. Sebagai minoritas di daerah asalnya, posisi mereka sangat rentan menjadi target kekerasan oleh kelompok mayoritas. Isu minoritas–mayoritas, dalam kaitannya dengan rasa aman/keamanan, menjadi sangat relevan pada masa-masa awal de-eskalasi konflik. Seorang responden menegaskan:

Sebenarnya mereka bisa saja kembali; karena ada [pengungsi di] beberapa lokasi memilih untuk kembali ke tempat asal mereka. Misalnya, pengungsi dari Buru di Lembah Argo sudah ada beberapa yang kembali. Sebenarnya ini hanya [soal] kepastian keamanan saja dari pemerintah—apakah pemerintah bisa memastikan, ketika mereka kembali keamanannya terpenuhi? Kedua, ketika mereka kembali, apakah mereka dibenturkan dengan masalah keperdataan di sana atau tidak? Sebenarnya ada beberapa yang ingin kembali, tetapi mereka ragu apakah di sana akan aman atau tidak.<sup>61</sup>

Dengan pertimbangan keamanan, muncul kecenderungan kuat di antara para pengungsi untuk mencari tempat relokasi yang berada di daerah yang didominasi oleh komunitas yang memiliki kesamaan identitas dengan mereka. Dalam perspektif pengungsi, jaminan keamanan diperoleh dengan tinggal di daerah yang penduduknya menganut agama yang sama atau memiliki identitas komunal yang sama. Walaupun konsekuensinya, secara tidak langsung menciptakan segregasi baru atau setidaknya mempertajam segregasi yang telah ada sebelumnya.

---

60 Wawancara dengan penggiat LSM perempuan, Ambon, 15 Desember 2012.

61 Wawancara, Ambon, 14 Desember 2012.

Jadi, segregasi yang terbangun itu terkait rasa aman. Karena negara dirasakan tidak memberikan rasa aman, orang akan lebih memilih untuk tinggal di kalangan komunitasnya yang mayoritas. ... Orang lebih memilih rasa aman. Dan mereka menghindari adanya tindakan kekerasan itu kan? Nah, [karena itu] wajar-wajar saja ketika mereka tidak mau kembali ke permukiman asal. Pilihan-pilihan itu justru dipilih oleh masyarakat dengan segala risiko. Walaupun jauh, mereka akan tetap memilih untuk [mencari] rasa aman. Mereka tidak mau lagi [jika] membangun rumah dan kehidupan yang baru, lalu kembali terbakar. Itu juga kan [membuat] mereka akan merasa rugi [...]—sudah capai-capai [membangun], tapi kok bisa terbakar lagi?<sup>62</sup>

Dalam konteks ini, kemunculan segregasi pasca-konflik jelas-jelas dilatarbelakangi oleh faktor jaminan keamanan yang dianggap masih sangat rapuh sebagai akibat konflik berkepanjangan. Sekali lagi, isu mayoritas–minoritas sangat erat kaitannya dengan hal ini. Misalnya, salah satu pengungsi Kristen yang memilih Waringin sebagai tempat tinggal baru karena faktor kesamaan identitas keagamaan mengatakan bahwa “aman juga karena di sini (wilayah Batu Gantung) komunitas Kristen semua. GPM (Gereja Protestan Maluku) lewat Ketua Sinode juga yang menyuruh para pengungsi untuk ke sini.”<sup>63</sup>

Kecenderungan kuat untuk memilih daerah yang mayoritas komunitasnya memiliki kesamaan identitas tidak hanya terjadi pada proses relokasi yang dilakukan secara kolektif, tetapi juga relokasi individual. Orang-orang tersebut biasanya melakukan relokasi dengan menjual tanah/rumah di daerah asal untuk membeli tanah/rumah di lingkungan baru.<sup>64</sup> Sebagai contoh, orang-orang Kristen asal Waihaong menjual tanah/rumah mereka kemudian pindah ke daerah lain karena daerah tersebut merupakan basis komunitas Muslim. Proses perpindahan seperti ini, yang sangat marak pasca-konflik Ambon 1999, secara tidak langsung telah mengubah daerah-daerah yang dulunya relatif heterogen menjadi homogen.

Secara teoretis, kondisi tersebut dapat dipahami pula sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang sebetulnya kerap ditemukan dalam berbagai bentuk pada masyarakat yang tengah menghadapi situasi konfliktis atau tekanan. Kondisi demikian kerap kali terjadi

---

62 Wawancara dengan penggiat LSM perempuan, Ambon, 15 Desember 2012.

63 Wawancara dengan salah satu pengurus Waringin, Ambon, 15 Desember 2012.

64 Wawancara dengan penggiat LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 14 Desember 2012.

karena negara absen dalam memberikan jaminan keamanan sehingga setiap orang atau kelompok dipaksa mencari alternatif perlindungan baru. Dalam situasi di mana negara gagal atau lemah menyelenggarakan fungsinya tersebut, jaringan kesukuan dan keagamaan menjadi alternatif yang acap dipertimbangkan. Dalam kasus Liberia, Sierra Leone, dan Guinea, misalnya, ketidakpastian situasi karena negara tidak mampu menangani—bahkan terlibat dalam—konflik juga dihadapi dengan melakukan konsolidasi lintas etnis yang disebut *poro* (Sawyer, September 2004).<sup>65</sup>

### 3. GAGAL KEMBALI KE DAERAH ASAL

Tidak semua pengungsi mengikuti program relokasi. Ada juga pengungsi yang memutuskan untuk kembali ke daerah asal dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena tidak memiliki alternatif lain. Misalnya, salah seorang pengungsi Muslim di Waringin, lebih menginginkan relokasi atau pergi meninggalkan Waringin karena konflik dan kekerasan sudah terjadi berkali-kali. Namun demikian, dia tidak memiliki alternatif tempat pindah atau tidak tahu harus pindah ke mana. Alasan lain yang sering memotivasi pengungsi untuk kembali ke daerah asal adalah kepemilikan sertifikat rumah—bagi mereka yang mengungsi saat konflik dan tetap menyimpan/memiliki sertifikat rumah yang ditinggalkannya, kembali lagi ke daerah asal adalah pilihan terbaik. Sebagai contoh, saat konflik 1999 para pengungsi Mardika ditampung di beberapa tempat, misalnya di Wisma Atlet Ambon, di rumah kerabat, dan sebagainya. Setelah konflik mereda, mereka yang masih menyimpan sertifikat memutuskan untuk kembali ke Mardika.<sup>66</sup>

Alasan terakhir yang mendorong para pengungsi untuk kembali adalah ikatan historis dan kultural dengan daerah asal. Di samping karena adanya kedekatan emosional dan kultural ini, mereka merasa sangat berat untuk meninggalkan daerah asal karena di sana mereka ini biasanya juga adalah para pemilik tanah keluarga/adat. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah kemudahan akses layanan publik/trans-

---

65 T. D. Pariela, Makalah Tanggapan dalam Semi-Lokakarya SNPK-THC, Ambon, 23 Oktober 2013.

66 Wawancara dengan salah satu pengungsi Mardika, Ambon, 14 Desember 2012.

portasi di daerah asal. Persoalan akses yang lebih baik ini juga menjadi pendorong kuat bagi mereka untuk kembali lagi.<sup>67</sup>

Berdasarkan temuan di atas, dapat kita lihat banyak sekali pengungsi yang sebenarnya sudah berniat dan berusaha untuk dapat kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi, karena mediasi antara mereka dengan komunitas di daerah asal gagal, mereka akhirnya tidak bisa kembali. Terdapat tiga syarat yang harus mereka penuhi kalau mau kembali: (1) mengisi *check list*, (2) diterima oleh komunitas daerah asal, dan (3) menyatakan kesediaan untuk kembali ke daerah asal.<sup>68</sup> Dari persyaratan tersebut, penolakan oleh masyarakat di daerah asal kerap menjadi alasan utama mengapa mereka tidak dapat kembali. Penolakan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya sentimen dan prasangka etnis.

#### D. KONDISI MASYARAKAT PENGUNGS DAN RELOKASI

##### 1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGUNGS/RELOKASI

Relokasi sebagai upaya solusi masalah pengungsi pasca-konflik tidak mudah dilakukan, tidak pula steril dari berbagai macam masalah yang tidak mudah diselesaikan dalam jangka pendek, misalnya ketersediaan sumber mata pencaharian. Merelokasi pengungsi tidak cukup hanya dengan memindahkan mereka ke tempat tertentu, membangun rumah, kemudian membiarkan dan meninggalkannya begitu saja. Mereka pun butuh sarana–prasarana untuk bertahan dan melangsungkan hidup di tempat yang baru. Menurut seorang responden:

Tapi bagaimana dengan hak-hak mereka yang sudah mereka tinggalkan? [...] setelah direlokasi [pun] mereka diburu urusan-urusan yang belum selesai... Kemudian, harus mencari penghidupan baru. Bagaimana penunjang kehidupan mereka di tempat yang baru? Kalau dulu, mereka punya toko, kontrakan, becak, dan sebagainya.<sup>69</sup>

Inilah salah satu tantangan berat yang harus dihadapi para pengungsi yang menjalani relokasi. Saat pindah mereka terpaksa mening-

67 Wawancara dengan direktur LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 14 Desember 2012.

68 Wawancara dengan salah satu aktivis perdamaian Maluku, Ambon, 12 Desember 2012, dan salah satu pengungsi di Kayu Tiga, Ambon, 11 Desember 2012.

69 Wawancara dengan aktivis HAM Maluku, Ambon, 12 Desember 2012.

galkan semua sumber mata pencaharian yang sudah mapan, kemudian harus mencari mata pencaharian baru yang tidak mudah didapat. Padahal mereka membutuhkan penghidupan jangka panjang dan tidak dapat mengandalkan pemenuhan kebutuhan dari bantuan atau derma yang sifatnya temporal.<sup>70</sup> Kenyataan ini, di satu sisi mempertegas adanya kebutuhan pengungsi akan sumber mata pencaharian yang stabil dan berkelanjutan, namun di sisi lain juga mengindikasikan bahwa relokasi yang digagas pemerintah tidak lebih dari pemindahan pengungsi dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada upaya-upaya dan inisiatif berkelanjutan untuk membuat mereka mampu bertahan hidup di tempat baru.

Absennya inisiatif untuk memberdayakan para pengungsi di tempat baru terlihat sangat jelas dari lahan yang mereka tinggali, yang hanya berupa lahan sempit untuk rumah.<sup>71</sup> Bagi para pengungsi yang dulunya petani, hal ini jelas menyulitkan mengingat keterampilan yang mereka miliki hanyalah bertani. Selain itu, tersia-siakannya keterampilan bekerja ini juga disebabkan oleh pemindahan para pengungsi yang dulunya berasal dari daerah pegunungan ke daerah pesisir, dan sebaliknya. Belum pula selesai urusan hak-hak yang mereka tinggalkan untuk mengungsi, mereka pun sudah harus menghadapi kenyataan yang tidak kalah rumitnya.

Banyak korban konflik 1999 tidak punya apa-apa lagi akibat rusaknya tempat tinggal, hilangnya sumber-sumber mata pencaharian, dan terbakarnya sertifikat-sertifikat rumah mereka. Banyak pengungsi bahkan tidak tahu harus tinggal di mana dan bagaimana membangun kembali hidup mereka. Oleh karena itu, upaya-upaya pemberdayaan dan penyediaan mata pencaharian yang potensial menjadi sangat krusial. Salah satu korban konflik 1999 mengisahkan pengalamannya:

Pada 1999 itu benar-benar terpuruk—rumah dan harta benda habis, tidak bisa mencari nafkah, hidup selalu di pengungsian dengan kondisi minim. Anak-anak kita terlambat pendidikan dan masa depan mereka... Tapi ternyata konflik berulang-ulang kejadiannya. Bagaimana hidup seperti begitu? Kita terus terpuruk... Menurun pendapatan dan mental karena tinggal di lokasi seperti ini. Untungnya diberikan tinggal di sini. Kalau

---

70 Wawancara dengan salah seorang aktivis pemberdayaan pengungsi Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

71 Wawancara dengan aktivis HAM Maluku, Ambon, 14 Desember 2012.

tidak diberi kesempatan lagi, bagaimana jadinya? Mau kembali ke Mardika tidak terjamin keamanannya...<sup>72</sup>

## 2. KONDISI FISIK-KESEHATAN DAN MASALAH KEPENDUDUKAN

Selain yang disebutkan di atas, masalah-masalah lain yang muncul adalah sengketa lahan rumah mereka (akan dibahas secara khusus dalam subbab berikutnya), kondisi rumah dan tempat-tempat pengungsian yang dianggap kurang layak, dan masalah-masalah kesehatan lain, seperti atap tempat pengungsian yang bocor, becek, dan tergenang air, penyakit diare, gatal-gatal, dan sebagainya.<sup>73</sup> Dari pengamatan dapat dilihat bahwa banyak tempat pengungsian yang dianggap kurang layak, baik dari segi bangunan maupun fasilitas di dalamnya. Namun demikian, beberapa pengungsi merasa bahwa fasilitas di lokasi pengungsian mereka cukup layak dan bahkan nyaman. Menurut salah seorang responden:

Ketika masuk, kita langsung [bikin] kaveling saja. Jadi, dikaveling sendiri. Siapa yang datang terlambat berarti cari [tempat] di lantai atas. Tidak pernah ada kesulitan air karena ada sumur bornya. Begitu juga dengan lampu, ada jaringan listriknya; siang-malam menyala. Kamar mandi juga ada di setiap lantai. Di atas ada kamar mandi dua, di sini di bagian belakang itu ada beberapa kamar mandi. Ya... karena gedung pemerintahan juga, jadinya memang lengkap.<sup>74</sup>

Selain kondisi kesehatan jasmani, yang tidak kalah penting bagi pengungsi adalah kesehatan rohani. Sebagai efek dari konflik banyak pengungsi, khususnya anak-anak, mengalami trauma yang cukup mengkhawatirkan. Menurut pengakuan seorang responden:

Biasanya kita dulu yang Muslim jalan di atas (maksudnya daerah Kristen). Zamannya saya masih sekolah, masih [banyak muslim yang] jalan di atas; tapi sekarang tidak ada lagi. Yang muslim lewat wilayah muslim, yang Kristen lewat wilayah Kristen. Saya sendiri, kalau mobil Lin III (Talake) lewat di atas saja, [ada] perasaan waswas. Saya takut terganggu di kejiwaan, makanya saya tanya teman: dokter psikologi itu di mana?

---

72 Wawancara dengan salah satu pengungsi Mardika dari komunitas Kristen, Ambon, 14 Desember 2012.

73 Wawancara dengan salah satu korban kerusakan Waringin, Ambon, 12 Desember 2012.

74 *Ibid.*

Biar saya bisa konsultasi. Jangan sampai [kecemasan ini] mengganggu sampai ke jantung.<sup>75</sup>

Trauma merupakan salah satu masalah serius yang muncul sebagai dampak konflik berkepanjangan di mana-mana, begitu juga bagi banyak korban konflik Ambon 1999. lantaran konflik yang pernah terjadi, banyak pengungsi merasa khawatir dan waswas ketika melewati wilayah-wilayah yang dulunya merupakan basis lawan mereka.

Masalah berikutnya yang harus dihadapi para pengungsi adalah masalah kependudukan. Ada pengungsi yang kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah mereka direlokasi dan menemukan tempat yang baru. Kesulitan untuk mendapatkan status kependudukan itu, misalnya, dialami oleh salah seorang pengungsi Pulau Buru di Lembah Argo:

Sejak tahun 2005 kami mendapatkan KTP Ambon. Kita berupaya dengan kekuatan sendiri untuk bertemu dengan pemerintah kota [...]. Beliau hadir dan menyatakan bahwa pengungsi Buru adalah warga Kota Ambon. Saat itu terbentuk lima RT dari satu RW, dan masuk RW 13.<sup>76</sup>

Walaupun kemudian pengungsi tersebut berhasil, namun tidak mudah baginya untuk mendapatkan kembali status kependudukan itu. Padahal status kependudukan yang tidak jelas mempersulit para pengungsi untuk mengakses pelayanan publik, transportasi, perbankan, dan sebagainya.

### 3. DISTRIBUSI BANTUAN

Tidak meratanya bantuan yang diberikan juga menjadi masalah bagi para pengungsi. Banyak pengungsi yang mengaku mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi ada juga yang mengaku tidak mendapatkan bantuan sama sekali atau kalau pun ada jumlahnya sangat sedikit. Misalnya, salah satu pengungsi yang mendapatkan bantuan menceritakan, telah tiga bulan dia mendapatkan bantuan makanan, minyak tanah, mi instan, beras, dan lain-lain setiap minggu. Anak-anak juga memperoleh bantuan dana untuk orang miskin sebesar Rp 360.000

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Wawancara dengan salah satu pengungsi Pulau Buru di lokasi Lembah Argo, Ambon, 15 Desember 2012.

dan transportasi anak miskin sebesar Rp 60.000.<sup>77</sup> Adapun salah seorang pengungsi Pulau Buru di Lembah Argo menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dia hanya mendapatkan rumah bantuan dari Belanda berukuran 5x6 m.<sup>78</sup>

Sayangnya, banyak pejabat atau politisi yang datang ke lokasi hanya untuk menjadikan mereka sebagai objek kampanye politik praktis dengan cara menjanjikan bantuan yang pada kenyataannya tidak pernah datang.<sup>79</sup> Tidak hanya itu, banyak pengungsi yang bahkan menjadi objek para “calo”. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menjual nasib pengungsi untuk meraup keuntungan pribadi. Bagi orang-orang seperti ini, “memperjuangkan” nasib para pengungsi adalah ladang bisnis mereka. Menurut seorang responden:

... dalam proses penanganan pengungsi itu [ada] banyak calo, mulai dari level pemerintah sampai di komunitas. Manipulasi data yang terjadi begitu banyak, sampai ada yang masuk penjara, [baik] dari orang pemerintah maupun komunitas... Calo itu [melakukan] manipulasi data [agar] dana bantuan mereka [yang] dapat. Seperti yang terjadi pada saudara-saudara Buton yang mengungsi ke daerah Bau-Bau—pada saat mereka kembali, banyak nama mereka yang hilang dari daftar [karena telah dimanipulasi calo].<sup>80</sup>

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa oknum-oknum calo dapat saja berasal dari masyarakat biasa, komunitas tertentu, atau pejabat pemerintah setempat. Cara umum yang banyak dilakukan dalam proses “percaloan” ini adalah dengan memanipulasi data para pengungsi yang berhak mendapatkan bantuan, baik dengan cara menambahkan nama-nama fiktif dalam daftar atau menghilangkan nama tertentu dan menggantinya dengan nama orang lain. Cara lain adalah dengan meminta upah (*reward*) dalam jumlah tertentu ketika mereka berhasil membantu pemenuhan hak-hak para pengungsi.

---

77 Wawancara dengan salah satu korban kerusuhan Waringin, Ambon, 13 Desember 2012.

78 Wawancara dengan salah satu pengungsi Pulau Buru di lokasi Lembah Argo, Ambon, 15 Desember 2012.

79 *Ibid.*

80 Wawancara dengan aktivis HAM Maluku, Ambon, 14 Desember 2012.



## E. MASALAH HAK DAN KEPERDATAAN PENGUNGSI

### 1. HAK-HAK PERDATA ATAS RUMAH DAN ASET YANG DITINGGALKAN

Masalah berikutnya yang juga sangat mendesak untuk diselesaikan secepatnya adalah masalah hak-hak perdata atas rumah dan aset lain yang ditinggalkan oleh pengungsi pada saat konflik terjadi. Saat konflik meletus, banyak korban konflik yang melarikan diri atau mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap aman dengan meninggalkan rumah dan aset-aset mereka begitu saja. Begitu konflik mereda, mereka mendapati rumah-rumah mereka banyak yang hancur atau terbakar; aset-aset mereka pun hilang.<sup>81</sup>

Banyak anggota masyarakat mengklaim rumah dan asetnya hancur pada saat konflik. Kondisi ini terkait erat dengan durasi konflik yang berkepanjangan dan intensitas serta eskalasinya yang cukup tinggi. Tidak heran, akibatnya banyak sekali bangunan pribadi dan publik hancur pada saat konflik. masalah keperdataan yang tersisa pasca-konflik ini juga perlu diselesaikan secepatnya oleh pemerintah, karena jika tidak, akan mudah sekali memperkeruh dan menghambat pembangunan perdamaian di Ambon yang relatif telah berjalan baik. Oknum-oknum tertentu atau provokator sering kali muncul untuk memperkeruh situasi dengan memanfaatkan isu-isu tersebut.<sup>82</sup>

Satu hal mesti diingat, tuntutan dan permintaan ganti rugi para pengungsi lebih didasarkan pada janji-janji pemerintah yang menyatakan akan mengganti semua rumah atau aset penduduk yang rusak karena konflik. Di Kudamati yang merupakan basis komunitas Kristen, misalnya, banyak sekali warga Muslim dari Sulawesi Tenggara dan Jawa yang mengungsi keluar ketika konflik terjadi. Ketika mereka kembali, mereka pun menuntut hak-hak mereka atas rumah yang terbakar atau aset yang hilang kepada pemerintah. Kasus-kasus seperti ini sering kali menjadi tumpang tindih dengan masalah-masalah lain yang belum selesai ditangani.<sup>83</sup>

---

81 Wawancara dengan salah satu aktivis perdamaian di Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

82 Wawancara dengan sekretaris sebuah organisasi keagamaan Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

83 Wawancara dengan salah satu aktivis perdamaian di Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

## 2. SENGKETA TANAH

Masalah perdata lain yang muncul adalah sengketa antara para pengungsi dengan pemilik tanah atas lahan yang mereka tempati sebagai tempat tujuan relokasi. Sampai saat ini, lahan di beberapa wilayah relokasi masih dalam sengketa. Beberapa orang responden menerangkan:

Sampai saat ini, di daerah Amahusu ini ada sekitar 50 KK yang berasal dari Maluku Utara [dan] sampai detik ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bahkan status tanah mereka di Halmahera atau Ternate itu belum pasti. Ini sebenarnya kasus-kasus yang harus diperhatikan karena potensi konflik[nya] cukup tinggi. Di Kayu Tiga ada juga permasalahan tanah. Kemungkinan untuk digusur oleh pemilik lahan sangat tinggi. Ini membingungkan juga karena pemerintah tidak menjembatani proses penyelesaian sengketa di sana. Persoalan pasti akan terjadi. Seperti juga di Waringin, memang agak beda. Dulu Waringin digusur rata, baru dibangun kembali.<sup>84</sup>

Setelah tinggal di sini (Warasia, negeri Batu Merah), ada masalah lahan yang kami tempati ini antara pemilik dari Masawoi dan dari Hattala. PK turun, saat itu juga ada keputusan dari pengadilan bahwa Hattala yang menang dan tanah ini adalah milik Hattala, padahal saat itu [sudah ada] kesepakatan kita dengan Masawoi [yang menjual lahan dengan] harga lahan per kaveling berukuran 10x15 [m] Rp 3.500.000.<sup>85</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa sengketa lahan terjadi di beberapa tempat relokasi, antara lain Amahusu, Kayu Tiga, dan Warasia. Akibatnya, para pengungsi tersebut berpotensi digusur dari tempat-tempat relokasi. Jika hal ini terjadi, maka akan muncul rentetan masalah baru akibat rancangan dan perencanaan relokasi yang tidak matang dan terkesan tergesa-gesa. Sebagai contoh, kasus yang terjadi di Warasia. Dengan turunnya keputusan Peninjauan Kembali (PK) oleh MA yang memenangkan pihak Hattala, rumah-rumah yang berdiri di atas lahan tersebut lantas ditandai oleh pihak Hattala dengan kalimat “akan dieksekusi” (Figur 18 hal 140).

Pada kasus sengketa lahan tersebut pemerintah cenderung enggan campur tangan, terutama dalam proses penyelesaiannya. Pada kasus terakhir, yaitu kasus para pengungsi di Lembah Argo, tanah yang me-

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan ketua Komnas HAM Maluku, Ambon, 14 Desember 2012.

<sup>85</sup> Wawancara dengan salah satu pengungsi di lokasi Warasia, Ambon, 15 Desember 2012.

reka tempat masih menjadi sengketa antara pemerintah dan pihak adat yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik Keluarga Simau.<sup>86</sup> Di tengah proses sengketa seperti ini, pemerintah yang telah mengklaim tanah tersebut dengan sertifikat yang mereka miliki seharusnya dapat menyelesaikannya dengan segera, misalnya dengan menyertifikasi tanah-tanah yang telah diberikan kepada para pengungsi.

Dalam banyak kasus pemerintah dianggap kerap lepas tangan dengan dalih menyerahkan proses penyelesaiannya kepada jalur hukum. Pada kenyataannya penyelesaian melalui jalur hukum acap memenangkan pihak pemilik tanah sehingga para pengungsi hanya memiliki dua alternatif, yaitu digusur atau keluar secara sukarela, atau membeli lahan yang mereka tempati dari pihak pemenang sengketa dengan kesepakatan harga yang mungkin berbeda dengan yang dibuat sebelumnya, seperti yang terjadi di Warasia. Di Warasia terjadi saling klaim antara pihak Hattala dan Masawoi. Ketika sengketa mereka diserahkan pada jalur hukum, Hattala akhirnya memenangkan perkara, padahal para pengungsi telah membuat kesepakatan dengan pihak Masawoi sebelumnya. Selain itu, uang yang harus digunakan untuk membayar tanah ini cenderung lebih besar daripada jumlah uang pemulangan mereka ke daerah asal, yaitu Rp 2,5 juta. Akibatnya, banyak sekali pengungsi yang tidak dapat langsung menebus tanah mereka sehingga tak sedikit pula yang akhirnya membayar dengan angsuran.<sup>87</sup>

### 3. SERTIFIKASI TANAH

Sertifikasi tanah juga menjadi masalah perdata yang harus diselesaikan secepatnya. tatkala konflik terjadi, banyak bangunan rumah penduduk yang terbakar dan hanya bersisa tanah. Pada saat bersamaan, banyak sekali sertifikat-sertifikat tanah yang juga terbakar. Akibatnya, batas-batas tanah penduduk banyak yang menjadi tidak jelas dan memunculkan kasus-kasus penyerobotan serta tumpang tindih klaim atas tanah.<sup>88</sup>

Sertifikasi kembali tanah-tanah tersebut oleh pemerintah harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena proses ini dapat saja menjadi sumber konflik baru dan menjadi sarana bagi pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil manfaat demi kepentingan pribadi.

---

86 Wawancara dengan salah satu pengungsi di Lembah Argo, Ambon, 15 Desember 2012.

87 Wawancara dengan salah satu pengungsi di Kayu Tiga, Ambon, 11 Desember 2012.

88 Wawancara dengan aktivis HAM Maluku, Ambon, 14 Desember 2012.

selain itu, kondisi ini diperburuk oleh terbakarnya kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ambon tatkala konflik terjadi. Menurut seorang responden:

Di kota ini yang jadi [sumber] masalah keperdataan: data kepemilikan tanah ini ada di BPN. Ketika konflik BPN terbakar, jadi dimulai pendataan kembali. Banyak lahan masyarakat atau permukiman masyarakat yang diambil oleh tuan tanah dengan alasan dulu [masyarakat] hanya pinjam dengan hak pakai, bukan hak milik. Rumah masyarakat juga terbakar, jadi tidak bisa membuktikan hal itu [karena bukti kepemilikan turut terbakar]. Saat konflik, semua terbakar. Data-data itu tidak ada. Tuan tanah mengambilnya lagi dan menjualnya kepada orang lain. [Pengungsi] Kayu Tiga itu tidak bisa kembali lagi karena mereka juga tidak bisa membuktikan [klaim kepemilikan].<sup>89</sup>

Dalam situasi seperti ini, pemerintah tentunya diharapkan dapat melakukan mediasi guna mencapai penyelesaian. Para pengungsi yang masih memiliki sertifikat tanah dapat menjual lahan mereka, namun pengungsi yang hanya memiliki hak pakai tanah tidak dapat melakukan apa-apa karena tanahnya merupakan milik tuan tanah, seperti yang ada di Batu Merah Dalam.<sup>90</sup>

---

89 Wawancara dengan salah satu aktivis ITDM Maluku, Ambon, 11 Desember 2012.

90 *Ibid.*

# Segregasi, Relasi Antar-Komunitas, dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca-Konflik

## A. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENANGANAN SEGREGASI PASCA-KONFLIK

### 1. REKONSILIASI DAN PENGEMBALIAN TALI PERSAUDARAAN

Pada tahun-tahun awal meredanya konflik 1999, prioritas pembangunan pasca-konflik lebih difokuskan pada usaha rekonsiliasi antar-komunitas, khususnya pada masa kepemimpinan Wali Kota M. J. Papilaya (2001-2006). Program ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca-Konflik, yang salah satu instruksinya: “melakukan rehabilitasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dan mengharmoniskan kembali hubungan sosial antarkelompok masyarakat yang bertikai.” Prioritas tersebut dianggap rasional mengingat masyarakat Ambon baru saja keluar dari konflik berdarah yang telah merusak hubungan kemasyarakatan dan kebersamaan mereka. Prioritas rekonsiliasi lebih ditujukan untuk mendamaikan, menguatkan kembali tali kebersamaan, dan saling memaafkan antarsesama.

Prioritas pembangunan setelah Ambon mengalami de-eskalasi pasca-konflik 1999 disesuaikan dengan visi Wali Kota M. J. Papilaya, yaitu menciptakan Ambon yang damai dan aman,<sup>1</sup> dengan prioritas utama program pemerintah yang menjadi misinya: pembangunan infrastruktur yang telah rusak atau terbakar dan pada saat bersamaan peneguhan usaha rekonsiliasi. Usaha-usaha rekonsiliasi banyak dilakukan dengan memfasilitasi hubungan antar-komunitas melalui berbagai program dan kegiatan serta pelatihan-pelatihan praktis penciptaan perdamaian. Penekanan peningkatan kesadaran masyarakat Ambon

---

1 Wawancara dengan pejabat bidang perencanaan pembangunan Kota Ambon, Ambon, 14 Desember 2012, dan pejabat bidang tata kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

mengenai konstruksi konflik sebagai ulah pihak luar dan peningkatan persaudaraan antarsesama juga menjadi unsur penting dalam usaha rekonsiliasi tersebut. Semua upaya ini banyak dilakukan dengan pendekatan kultural.<sup>2</sup> Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa penanganan segregasi pada saat itu belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pasca-konflik di Ambon.

Baru pada tahun 2004-2005, untuk memperkuat upaya-upaya rekonsiliasi yang difokuskan pada pengembalian tali persaudaraan antar-komunitas tersebut, pembangunan pasca-konflik mulai diarahkan pada pembangunan ruang-ruang interaksi dan perjumpaan antar-komunitas yang sebelumnya telah tercerai-berai akibat konflik. Pembangunan-pembangunan fisik/infrastruktur harus dapat membantu memfasilitasi perjumpaan antar-komunitas ini.<sup>3</sup> Di sinilah prioritas pembangunan pasca-konflik mulai bergerak ke arah penanganan segregasi seiring dengan tumbuhnya kesadaran para tokoh dan pejabat Ambon mengenai semakin tajamnya segregasi yang muncul pasca-konflik. Kesadaran tersebut diperkuat oleh keyakinan bahwa upaya-upaya mempertemukan beragam komunitas di Ambon dan mengembalikan tali persaudaraan mereka hanya akan efektif jika diikuti dengan upaya-upaya pembangunan ruang-ruang interaksi atau perjumpaan antar-komunitas untuk mengurangi dampak segregasi yang memang sudah terjadi. Hal ini harus dilakukan karena sangat sulit bagi pihak-pihak terkait untuk membaurkan permukiman penduduk yang telah tersegregasi dengan berbagai rekayasa sosial dan pembangunan jangka pendek.

## 2. PEMBUKAAN PERMUKIMAN BARU YANG PLURAL DAN HETEROGEN

Prioritas pembangunan selanjutnya yang terkait dengan penanganan segregasi pasca-konflik adalah pembukaan permukiman-permukiman baru yang plural dan heterogen. Prioritas pembangunan ini telah menjadi salah satu agenda dan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon tahun 2011-2016, yang merupakan penjabaran dan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangkah Panjang (RPJP) Kota Ambon tahun 2006-2026. RPJMD tersebut menyebutkan, dalam konteks tata ruang, misalnya, pembangunan

---

2 Ibid.

3 Wawancara dengan pejabat Tata Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

kewilayahan dibagi menjadi beberapa sub-wilayah (SW) konsentrasi pembangunan, yang mencakup pusat kota dan sekitarnya (SW 1), Rumah Tiga dan sekitarnya (SW 2), Passo dan sekitarnya (SW 3), Laha/Tawiri dan sekitarnya (SW 4), dan seterusnya.<sup>4</sup> Adapun dalam RPJMD Kota Ambon tahun 2006-2011, istilah yang digunakan untuk menyebut daerah-daerah pengembangan tersebut adalah Sub-Wilayah Pusat Pertumbuhan (SWPP).<sup>5</sup>

Dalam konteks tersebut Wali Kota Ambon saat ini, Richard Louhenapessy, telah menjadikan Poka dan Passo sebagai daerah yang coba dibangun sebagai daerah permukiman baru yang plural dan multikultural. Lebih dari itu, pembangunan Poka diharapkan dapat menjadi semacam model pembangunan yang berorientasi pada de-segregasi masyarakat Ambon. Jika pembangunan Poka ini berhasil dengan efek pembangunan sosial-kemasyarakatan sesuai harapan, yaitu terjadinya de-segregasi dan/atau percampuran secara alami di antara berbagai komunitas yang berbeda, maka nantinya Poka dapat saja menjadi contoh pembangunan sosial-kemasyarakatan di Ambon.<sup>6</sup>

Selain Poka, Passo merupakan target *pilot-project* selanjutnya. Passo dianggap sebagai pintu masuk Ambon dan memiliki kedudukan cukup strategis mengingat padatnya wilayah perkotaan dan terpusatnya pembangunan infrastruktur di Sirimau.<sup>7</sup> Adanya mal-mal baru di Passo diharapkan akan dapat menjadi ruang interaksi antara komunitas Islam dan Kristen.<sup>8</sup> Passo direncanakan menjadi daerah urban baru di Ambon walaupun pada mulanya pembangunan Passo ditujukan untuk mengurangi kepadatan di tengah kota Ambon atau di Sirimau. Sebagai suatu pusat urban baru, Passo diharapkan nantinya menjadi daerah yang plural dan multikultural mengingat daerah tersebut akan menjadi semacam transit dan titik temu berbagai komunitas di Ambon. Seperti halnya Poka, jika berhasil Passo akan menjadi salah satu model penting pembangunan sosial-kemasyarakatan yang berorientasi de-segregasi.

---

4 Lihat Perda Kota Ambon No. 4 Tahun 2006, halaman 6.

5 Lihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ambon Tahun 2006-2011, halaman 4.

6 Wawancara dengan Walikota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

7 Wawancara dengan pejabat bidang perencanaan pembangunan Kota Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

8 Wawancara dengan salah satu pengusaha kontraktor di Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

### 3. BIMBINGAN ANAK-ANAK, PENANGANAN TRAUMA, DAN SARASEHAN

Prioritas pembangunan selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penanganan segregasi yang berkembang pasca-konflik, adalah pemberian bimbingan dan penyadaran kepada anak-anak atau generasi muda mengenai konflik yang telah terjadi. Secara spesifik, Dinas Sosial Kota Ambon banyak bertanggung jawab dan memberikan perhatian lebih pada program dan prioritas pembangunan ini.<sup>9</sup> Menjadikan anak-anak prioritas pemberian bimbingan pasca-konflik penting dilakukan karena banyak di antara mereka yang menyaksikan langsung berbagai pembakaran dan pembunuhan saat konflik, bahkan tidak sedikit yang anggota keluarganya ikut terbunuh. Trauma, dendam, dan memori buruk mengenai konflik dapat terpendam dalam benak mereka. Oleh karena ini, program ini mungkin dapat meringankan beban psikologis dan trauma serta menetralkan dendam yang mungkin masih ada. Jika dilakukan secara bersamaan dengan anak-anak dari komunitas lain, maka di samping mengurangi dampak psikologis, bimbingan tersebut juga dapat menjadi investasi di bidang sosial. Dengan demikian, proses de-segregasi masyarakat Ambon ke depan pun sudah dimulai dan penyatuan komunitas lewat generasi muda dapat pula digalakkan.

Berbagai usulan muncul dari masyarakat Ambon terkait pembangunan pasca-konflik yang harus menjadi prioritas. Salah satunya, pemulihan kembali kepercayaan antarmasyarakat dan penanganan trauma. Kedua hal tersebut tidak mudah dan tidak dapat dilakukan secara instan. Menurut seorang responden:

Jadi, begini: yang pertama perlu kita lihat dulu adalah proses *recovery* kepercayaan orang Maluku. Itu harus menjadi *concern* pemerintah. Kalau dilihat dari begitu lama proses kerusakan dibanding dengan waktu penyembuhan sekarang ini, maka itu tidak berbanding lurus. Tetapi sekarang dia berbanding lurus, bahkan [ada] kemajuan. *Kan* tidak mungkin dalam waktu kurang dari 10 tahun orang sudah kembali kepercayaan dirinya. Dan ini ada program *recovery* tentang trauma masa lalu, kemudian program *recovery* ekonomi, dan sekarang penataan pembangunan. Ini semuanya proses [yang] signifikan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Wawancara dengan pejabat bidang sosial Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

<sup>10</sup> Wawancara dengan salah satu anggota Tim 20 Wayame, Ambon, 14 Desember 2012.



Pemulihan kembali ekonomi dan infrastruktur memang sangat penting dan mendesak untuk membuat jalannya roda kehidupan masyarakat Ambon kembali lancar dan maju. Namun tanpa pemulihan mental, pembangunan kepercayaan, dan penanganan trauma, masyarakat Ambon akan kehilangan fondasi penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi dan fisik lain yang berkesinambungan. Pembangunan ekonomi hanya dapat dilakukan dengan baik jika kondisi sosial-kemasyarakatan kuat dan stabil; dan di balik stabilitas sosial dan kemasyarakatan ini adalah rasa saling percaya dan menghargai antar-komunitas di Ambon.<sup>11</sup>

Sarasehan yang bersifat formal-seremonial digelar dengan tujuan utama mempertemukan kembali komunitas yang berbeda dalam sebuah perkumpulan, diskusi, dan makan bersama. Di samping itu, tujuan lain acara tersebut adalah untuk mencairkan ketegangan dan trauma sebagai efek dari konflik, serta membangun kembali tali persaudaraan antar-komunitas. Oleh karena itu, materi utamanya lebih difokuskan pada peningkatan kesadaran ikatan budaya masyarakat Ambon yang disebut *Pela Gandong*.

#### 4. KESERASIAN SOSIAL

Program pembangunan lain yang berkenaan dengan penanganan segregasi pasca-konflik adalah Keserasian Sosial. Program ini ditujukan lebih untuk meningkatkan kebersamaan dan penyatuan dua komunitas—Muslim dan Kristen—lewat berbagai segmen dan aktivitas kemasyarakatan. Secara lebih khusus, program ini ditujukan untuk mencegah potensi-potensi konflik sosial yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Hasil yang hendak dicapai adalah terwujudnya integrasi sosial—penerimaan sosial dalam tatanan hidup berdampingan secara damai melalui sistem dan mekanisme kerukunan sosial di antara kelompok masyarakat yang bertikai.<sup>12</sup> Keserasian Sosial dapat pula dimaknai sebagai keseimbangan sosial, di mana anggota-anggota dari kedua komunitas secara bersama-sama menduduki atau menjabat suatu posisi, dan melakukan suatu aktivitas sosial bersama. Program Keserasian Sosial yang telah dilakukan tersebut sepertinya lebih difokuskan pada daerah-daerah rawan konflik, khususnya daerah-daerah perbatasan di antara dua komu-

11 Wawancara dengan tokoh pemuda KNPI Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

12 Lihat Juknis Bantuan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, 2012.

nitasi yang tersegregasi, daerah-daerah yang mengalami bencana sosial, dan daerah-daerah konsentrasi korban bencana sosial.<sup>13</sup>

Bentuk kegiatan dari Program Keresasian Sosial sejauh ini, khususnya yang bergulir pada tahun 2006, berupa pembangunan infrastruktur-infrastruktur secara bersama-sama dan menggunakannya secara bersama-sama pula. Namun demikian, sebagian masyarakat mengkritisi program tersebut sebagai program yang hanya berorientasi pada proyek. Akibatnya, efek dan kontribusinya terhadap pembangunan kebersamaan selama ini belum benar-benar terasa. Menurut seorang responden:

... memang [program pembangunan] ini sulit juga karena pemerintah juga masih mencari format yang lebih jitu... misal: Inpres. [Program] Keresasian Sosial itu[lah] yang saya bilang tadi: berorientasi proyek. Jadi, memang tidak menyentuh [masyarakat]. Menurut saya gagal. Menurut saya [program] kayak inpres itu [hanya] menjadi penghasilan tambahan buat pejabat, baik di birokrasi, DPRD, dan juga pengusahnya. Aspek *recovery*-nya diabaikan.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, pada tahun 2007 banyak dilakukan pembangunan jalan setapak untuk digunakan bersama oleh komunitas yang berbeda, pembangunan gedung pertemuan di lokasi yang rawan konflik, dan sebagainya.<sup>15</sup> Akan tetapi, banyak di antara jalan setapak yang telah dibangun tersebut rusak karena kurang pemeliharaan, misalnya jalan setapak yang dibangun di Kahena (lihat Figur 19 hal 140).

Jalan setapak di Kahena dibangun pada tahun 2005. Setelah selesai, jalan tersebut sayangnya hanya dimanfaatkan oleh satu komunitas saja, komunitas Muslim. Selain jalan setapak, infrastruktur lain yang juga dibangun adalah bak penampungan air minum. Kini bak air minum itu juga sudah rusak, bocor, dan akhirnya tidak digunakan lagi sehingga programnya sia-sia (Figur 20 hal 141).<sup>16</sup>

Dalam kasus Kahena, seorang pendamping Program Keresasian Sosial bernama Syakir Kaliki ditunjuk begitu saja oleh Ketua RW setempat. Kaliki kemudian menjelaskan kepada warga bahwa dia mendapatkan dana dari pemerintah untuk menjalankan program-program tersebut. Dana itu pun dia kelola sendiri tanpa keterlibatan dan peng-

13 Ibid.

14 Wawancara dengan salah satu aktivis perdamaian di Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

15 Wawancara dengan pejabat bidang sosial Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

16 Wawancara dengan salah satu pelaksana program dan penerima manfaat dari Program Keresasian Sosial di Kahena, Ambon, 22 Mei 2013.

awasan masyarakat sehingga pertanggungjawabannya tidak transparan. Masyarakat yang berpartisipasi hanya menerima gaji dari Kaliki. Akhirnya, yang bersangkutan menjadi salah seorang tersangka penyelewengan dana tersebut.<sup>17</sup>

Pada hakikatnya, pelaksanaan Program Keresasian Sosial di Ambon terbagi dalam dua tahapan, yaitu program yang digulirkan tahun 2006 dan 2013. Contoh-contoh yang disebutkan di atas dan berbagai permasalahan yang mengikutinya merupakan bagian dari Program Keresasian Sosial tahun 2006. Dalam hal pengajuan program dan prosedur pencairan dana, terdapat perbedaan mencolok antara kedua tahapan tersebut. Terkait pengajuan program, Program Keresasian Sosial tahun 2006 lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah/lokal, sedangkan pada tahun 2013 inisiatif program merupakan usulan/proposal dari masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. Oleh sebab itu, Program Keresasian Sosial tahun 2013 dianggap lebih “berbasis masyarakat”. Terkait prosedur pencairan dana, pada tahun 2006 pencairan dana dilakukan melalui pihak ketiga atau kontraktor. Adapun pada tahun 2013, dana program langsung diserahkan kepada desa penerima.<sup>18</sup>

Lebih lanjut, dalam program tahun 2013, masyarakat membentuk forum-forum untuk mengelola program sehingga dananya pun ditransfer langsung ke rekening forum-forum tersebut. Di Provinsi Maluku terdapat 15 desa yang menerima bantuan dana Program Keresasian Sosial: 5 di Kabupaten Maluku Tenggara, 5 di Kabupaten Seram Bagian Barat, dan 5 di Kota Ambon. Untuk Kota Ambon, desa penerimanya adalah Latuhalat, Hative Besar, Poka, Silale, dan Batu Merah. Kegiatan di Latuhalat adalah pembangunan sarana air bersih dan jalan, di Silale pembangunan sarana air bersih, di Batu Merah pembangunan gorong-gorong dan sarana resapan air, sementara di Hative Besar pembangunan gedung serba guna untuk digunakan sebagai tempat pertemuan dua komunitas. Pemilihan kelima desa tersebut lebih didasarkan pada posisi mereka sebagai tempat pengungsian. Dari kelima desa tersebut, hanya Hative Besar yang terdiri atas dua komunitas yang berbeda.<sup>19</sup> Secara geografis, Latuhalat dan Silale adalah dua

---

17 Ibid.

18 Wawancara dengan pejabat bidang sosial Provinsi Maluku, Ambon, 14 Mei 2013. Lihat juga Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keresasian Sosial Berbasis Masyarakat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, 2012.

19 Ibid.

negeri Kristen di wilayah Nusaniwe yang jauh sekali dari perbatasan dengan komunitas Muslim. Adapun Batu Merah dan Poka merupakan negeri Muslim yang memiliki kedekatan dengan komunitas Kristen. Hative Besar juga merupakan daerah dominan Kristen yang diapit oleh dua desa: Tawiri (Kristen) dan Wayame (campuran). Dengan mempertimbangkan posisi geografis tersebut, efektivitas program ini bagi pencapaian integrasi sosial dapat dievaluasi.

Meskipun demikian, kritik lain juga banyak ditujukan terhadap ketidaksesuaian antara realisasi program dengan semangat dan motivasi program yang sebenarnya, yaitu reintegrasi sosial. Program Kesenjangan Sosial, yang pada awalnya bernama Program Reintegrasi Sosial, cenderung memilih bentuk-bentuk kegiatan yang dirancang untuk masing-masing komunitas daripada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh komunitas-komunitas yang berbeda. Idealnya, bentuk kegiatan tersebut seharusnya diimplementasikan di perbatasan Desa Batu Merah–Mardika, perbatasan Air Salobar–Pohon Mangga, perbatasan Poka–Rumah Tiga, Latta, dan lain-lain,<sup>20</sup> di mana interaksi antar-komunitas lebih kerap terjadi.

##### 5. PEMBANGUNAN HUBUNGAN ORANG *BASUDARA* (BERSAUDARA)<sup>21</sup>

Terkait prioritas RPJMD saat ini (2011-2016) tentang penanganan segregasi pasca-konflik, Pemerintah Kota Ambon lebih memfokuskan pada peningkatan hubungan *orang basudara* (bersaudara). Hubungan *orang basudara* merupakan salah satu warisan kearifan lokal masyarakat Ambon yang perlu dijaga. Program ini tentunya merupakan implementasi dari salah satu amanat Inpres No. 6 Tahun 2003, yaitu “revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial-budaya.” Secara khusus, Pemerintah Kota Ambon memanfaatkan dunia pendidikan sebagai tempat yang strategis untuk pengembangan program lewat rancangan kurikulum *orang basudara*, di mana muatan-muatannya digali dari berbagai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Ambon.<sup>22</sup>

20 Wawancara dengan tokoh Pengungsi Maluku, Ambon, 14 Mei 2013.

21 Orang Basudara merupakan salah satu tradisi yang dipegang oleh masyarakat Ambon mengenai pola hubungan yang harmonis dan damai antar-komunitas yang berbeda, khususnya antara komunitas Islam dan Kristen yang memiliki nenek moyang sama. Lihat [http://www.siwalimanews.com/post/wagub\\_jaga\\_soliditas\\_dan\\_solidaritas](http://www.siwalimanews.com/post/wagub_jaga_soliditas_dan_solidaritas).

22 Wawancara dengan pejabat bidang perencanaan pembangunan Kota Kota Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

Lebih jauh, Program *Orang Basudara* telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam RPJP Kota Ambon 2006-2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon No. 4 Tahun 2006. Pendekatan ini disebut pendekatan kultural dalam pembangunan jangka panjang Ambon. Berbagai upaya pembangunan diharapkan dapat memperkuat rasa “keambonan manusia Ambon,” di mana karakteristik masyarakat Ambon dicirikan oleh berbagai perbedaan agama dan budaya namun tetap damai karena kuatnya rasa aman dan kebersamaan. Pada konsep kultural *Ambon Manise* terdapat cermin sosiokultural berupa hubungan dan interaksi yang harmonis antar-komunitas yang berbeda, yang secara umum terekspresikan dalam pola relasi *Pela Gandong*.<sup>23</sup>

Program *Orang Basudara* secara eksplisit turut membentuk visi dan misi RPJMD Kota Ambon (2011-2016) yang diwujudkan dalam kurikulum-kurikulum pendidikan pasca-konflik yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak. Harapannya adalah agar anak-anak tersebut mampu mengatasi pengalaman-pengalaman buruk mereka saat konflik dan dapat tumbuh dengan lebih baik. Dalam muatan kurikulum tersebut disisipkan unsur-unsur budaya dan/atau kearifan lokal, seperti *Kalesang* (peduli pada lingkungan), *Pela Gandong*, dan sebagainya.<sup>24</sup> Di Universitas Pattimura (Unpatti), misalnya, dikenalkan mata kuliah berjudul “Kebudayaan Maluku”. Dalam mata kuliah tersebut banyak diulas budaya dan kearifan lokal Maluku, seperti konsep kekeluargaan, yang bertujuan menjaga dan menciptakan hubungan harmonis antar-komunitas. Munculnya mata kuliah tersebut merupakan tindak lanjut dari lokakarya tahun 2002 di Unpatti.<sup>25</sup>

Dalam konteks kurikulum untuk anak-anak, telah diterbitkan satu buku oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon yang berjudul *Kurikulum Pendidikan Orang Basudara Maluku: Buku Ajar Guru*. Buku dengan pendekatan psikososial tersebut merupakan hasil kerja sama dengan *The United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan *Peace through Development United Nations Development Programme* (UNDP). Kritik yang muncul kemudian adalah buku tersebut lebih mirip buku panduan/modul yang menggunakan pendekatan psikoanalisis untuk

23 Lihat Perda Kota Ambon, No. 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon (RPJP) Tahun 2006-2026.

24 Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 14 Mei 2013.

25 Wawancara dengan dekan salah satu fakultas di Unpatti, Ambon, 14 Mei 2013.

mendidik dan memberikan *treatment* kepada anak-anak di daerah pasca-konflik. Di dalamnya hampir tidak ditemukan muatan-muatan lokal-kultural Maluku dan/atau kearifan lokal Maluku, karena lebih banyak bermuatan pengetahuan umum yang dapat dipakai di daerah mana saja yang pernah mengalami konflik.<sup>26</sup> Padahal idealnya, kurikulum tersebut merupakan kombinasi antara budaya/kearifan lokal dengan nilai-nilai universal.<sup>27</sup>

Model Pendidikan *Orang Basudara* pernah dipraktikkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah. Dipilihnya kedua sekolah tersebut karena guru-gurunya tergolong berbaur. Sayangnya, uji coba tersebut dihentikan. Kelemahan program disinyalir karena tidak adanya pelatihan khusus untuk guru-guru yang akan mengajarkan kurikulum tersebut. Pendidikan *Orang Basudara* itu sendiri sudah dirancang sejak tahun 2005 dan dibantu oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA).<sup>28</sup> Perspektif lain menyebutkan bahwa sebenarnya guru-guru sudah diberikan pelatihan khusus, khususnya di sekolah-sekolah percontohan. Hanya saja, pemerintah tidak melanjutkannya dengan berbagai alasan, antara lain belum adanya *budget* khusus untuk membayar guru-guru tersebut.<sup>29</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa kurikulum Pendidikan *Orang Basudara* sudah disusun lewat program dari UNICEF dan Sekolah Ramah Anak lewat *Save the Children*, namun belum dipakai/diimplementasikan secara baik di sekolah-sekolah.<sup>30</sup>

Studi mengenai kurikulum *Orang Basudara* ini, misalnya, secara khusus dan mendalam telah dilakukan oleh Alpha Amirrachman (2012). Proses desentralisasi telah menghidupkan kembali adat dan kearifan lokal di Ambon yang juga menjadi salah satu cara untuk menguatkan perdamaian di Ambon pasca-konflik. Namun demikian, penghidupan kembali adat dan kearifan lokal tersebut menuai dilema; pada satu sisi, telah memperkuat identitas dan struktur politik lokal; pada sisi lain, telah menciptakan konflik dan eksklusivitas terhadap kelompok migran di Ambon, khususnya Buton, Bugis, dan Makassar. Dalam konteks ini, penghidupan kembali *Pela* dan kurikulum *Orang Basudara*

26 Lihat Kurikulum Pendidikan Orang Basudara Maluku: Buku Ajar Maluku, Psikoanalisis. September 2009. Ambon: Dinas Pendidikan Kota Ambon.

27 Wawancara dengan tokoh kerja sama antar-umat beragama Maluku, Ambon, 14 Mei 2013.

28 Ibid.

29 Wawancara dengan ketua Litbang GPM, Ambon, 5 September 2013.

30 FGD, Ambon, 23 Oktober 2013.

diyakini akan menciptakan potensi ketegangan antara penduduk lokal (asli Ambon) dan pendatang/migran.<sup>31</sup>

Salah satu kritik Amirrachman terhadap konsep dan praksis Pendidikan *Orang Basudara* adalah penekanannya yang berlebih pada lokalitas ke-Ambon-an dan kurang memberi perhatian pada kaum migran yang telah lama menetap di Ambon. Dengan kata lain, Pendidikan *Orang Basudara* justru berpeluang menyebabkan eksklusi terhadap warga Ambon yang berasal dari luar Maluku.

## B. REALISASI PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM PENANGANAN SEGREGASI PASCA-KONFLIK

### 1. PROGRAM-PROGRAM YANG SUDAH TEREALISASI

Di antara prioritas-prioritas pembangunan di atas, yang dianggap telah berhasil terlaksana adalah rekonsiliasi dan pengembalian tali persaudaraan, pembentukan sarasehan antar-umat beragama, bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak, keserasian sosial, dan pembangunan kembali Lapangan Mardika. Untuk mengukur tingkat kesuksesan program tersebut tentu diperlukan evaluasi khusus dengan berbagai indikator dan/atau pengukuran yang valid dan fokus pada salah satu program pembangunan yang dianggap strategis. Namun demikian, secara kualitatif sementara pihak berpendapat bahwa pembangunan pasca-konflik relatif sukses meskipun ada kekurangan dan masalah yang mengikuti. Menurut seorang responden:

Soal kebocoran [anggaran ada] di mana-mana. Kita harus bisa membuktikan bahwa memang ada kebocoran. [Tetapi] kita tidak bisa membuktikan tanpa ada indikator lain [untuk] mengukur keberhasilan [program] pasca-konflik [tersebut]. Ini sesuai dengan kenyataan yang ada.<sup>32</sup>

*Pertama*, pembangunan kembali Lapangan Mardika sebagai salah satu program yang telah terealisasi dianggap penting karena merupakan salah satu ruang terbuka yang strategis untuk interaksi antar-komunitas. Selain itu, berbagai pusat pasar murah juga banyak dibangun di Kota Ambon. Pengaktifan pasar-pasar ini secara umum bertujuan untuk menarik beragam komunitas untuk datang dan menjalin komunikasi serta interaksi melalui proses jual beli. Pembangunan pasar-pasar

31 Amirrachman (2012), halaman 80.

32 Wawancara dengan tokoh pemuda Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

murah ini merupakan sebuah terobosan yang berefek luas terhadap pembangunan kembali tali persaudaraan, di tengah miskinnya keberadaan program penanganan segregasi yang kreatif, terutama jika dilakukan secara konsisten dan merata di Kota Ambon.

Di balik suksesnya pembangunan kembali Lapangan Mardika, beberapa kalangan masyarakat Ambon menyayangkan lapangan menjadi satu-satunya ruang terbuka yang ada saat ini.<sup>33</sup> Padahal dalam masyarakat yang tersegregasi diperlukan banyak ruang publik untuk interaksi antar-komunitas sebagai solusi strategis. Secara umum, Pemerintah Kota Ambon diharapkan dapat memperbanyak ruang terbuka dan membangunnya secara lebih kreatif. Ruang terbuka yang netral harus dibangun khususnya di daerah-daerah perbatasan antar-komunitas atau daerah-daerah rawan konflik. Dengan demikian, pembangunan Lapangan Mardika harus menjadi awal dan bukan akhir dari pembangunan ruang-ruang terbuka di Kota Ambon.

Program pembangunan *kedua* yang dianggap sudah terealisasi adalah pembangunan sekolah-sekolah di perbatasan, seperti SMPN 2, SD Latihan, dan lain-lain. Sekolah-sekolah ini dirancang sebagai sekolah bersama antar-komunitas, bukan sekolah-sekolah seperti sebelumnya yang berkonsentrasi untuk komunitas tertentu saja. Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan banyak sekali sekolah di Ambon yang tersegregasi, baik di antara para guru maupun muridnya. Saat konflik terjadi beberapa guru sekolah dari komunitas tertentu dititipkan ke sekolah lain demi alasan keamanan.<sup>34</sup>

Selain itu, kebijakan rayonisasi sekolah dianggap mendukung penguatan segregasi pendidikan. Di SMA Negeri 1, misalnya, terdapat banyak sekali pelajar Muslim walaupun sekarang semakin sedikit. Segregasi permukiman berdasarkan agama juga dipertegas dengan adanya rayonisasi pendidikan yang tidak memungkinkan banyak anak Muslim bersekolah di wilayah yang didominasi Kristen, atau sebaliknya. Segregasi ini terjadi, terutama karena dorongan dari kebijakan-kebijakan pembangunan fasilitas secara terpisah untuk dua komunitas yang pernah bertikai. Sebagai contoh, dalam kasus konflik siswa dari Desa Porto dan Haria di SMU Kota Saparua, yang kemudian berimbas pada ketegangan di antara kedua desa bertetangga ini, pemerintah kabupa-

---

33 Wawancara dengan penggiat komunikasi antar-umat beragama Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

34 Ibid.



ten memutuskan untuk membangun dua buah SMU yang terpisah, masing-masing di Desa Porto dan Haria.<sup>35</sup>

Di daerah-daerah yang masyarakatnya tersegregasi secara spasial, ruang-ruang sosialnya biasanya juga akan tersegregasi secara alamiah. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk segregasi spasial ini, pembangunan sekolah-sekolah di perbatasan yang plural menjadi sangat strategis untuk mereduksi efek segregasi di ruang sosial. Selain itu, sekolah juga salah satu ruang sosial yang sangat strategis untuk mempertemukan generasi muda dari kedua komunitas, khususnya di daerah perbatasan yang sering menjadi tempat timbulnya konflik dan kekerasan. Dengan demikian, pemerintah mungkin perlu lebih konsisten lagi untuk memperbanyak pembangunan sekolah-sekolah tersebut.

Pembangunan *ketiga* pasca-konflik yang dianggap telah terealisasi adalah pemberian bimbingan psikologis untuk menangani trauma dan ketakutan yang diakibatkan oleh konflik 1999. Penanganan trauma pasca-konflik sendiri merupakan salah satu amanat penting Inpres No. 6 Tahun 2003, di bawah koordinasi Kemenko Kesra. Bimbingan kejiwaan ini secara umum dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Ambon dengan memaksimalkan fungsi Puskesmas. Pemulihan kembali mental masyarakat akibat trauma dan rusaknya kepercayaan memang menjadi perhatian tersendiri, baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum. Sebagaimana dijelaskan dalam subbab sebelumnya, pemulihan seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sayangnya, program strategis ini tidak berjalan secara konsisten karena terbatasnya jumlah dokter spesialis jiwa.<sup>36</sup> Kekurangan inilah yang banyak dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Lebih buruk lagi, *trauma center* yang telah didirikan di Kecamatan Sirimau harus ditutup karena tidak ada biaya operasional dan ahli kejiwaan. *Trauma center* tersebut hanya beroperasi sampai tahun 2004 saja.<sup>37</sup>

Perhatian pemerintah seharusnya lebih diprioritaskan pada ketersediaan ahli kejiwaan yang mencukupi. Dalam konteks penghentian operasionalisasi *trauma center* dan layanan bimbingan kejiwaan di puskesmas, pemerintah dianggap meremehkan dampak trauma yang dialami oleh masyarakat dan lebih memprioritaskan pembangunan fisik.

---

35 Wawancara dengan kepala Litbang GPM, Ambon, 5 September 2013.

36 Wawancara dengan pejabat bidang kesehatan Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

37 Wawancara dengan pejabat bidang sosial Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012; dan aktivis LSM perempuan, Ambon, 15 Desember 2012.

Padahal trauma merupakan masalah mendasar dalam setiap kondisi pasca-konflik di berbagai belahan dunia. Trauma dapat menghalangi dan menghambat terjalannya kembali komunikasi dan tali persaudaraan antar-komunitas. Pada akhirnya konseling atau bimbingan dan konsultasi psikis akibat trauma yang ditimbulkan oleh konflik Ambon 1999 cenderung lebih banyak ditangani oleh LSM. Becermin pada realitas tersebut, pemerintah sudah seharusnya lebih berinisiatif untuk menangani masalah ini daripada menyerahkannya begitu saja kepada lembaga-lembaga nonpemerintah.<sup>38</sup>

## 2. PROGRAM-PROGRAM YANG BELUM TEREALISASI

Dua program pembangunan yang sama sekali belum tersentuh, kendati sudah terdapat dalam rencana pembangunan Kota Ambon ke depan, adalah pengembangan pasar-pasar tradisional dan transportasi publik. Pembangunan kedua sektor ini dianggap strategis karena berpotensi menjadi tempat perjumpaan dan interaksi masif antar-komunitas. Kondisi ini diakui langsung oleh Wali Kota Ambon dengan menyatakan:

Memang ada beberapa titik yang belum kita sentuh [...] terutama [...] pasar dan sektor perhubungan atau transportasi. Dan ini yang kita benahi, karena kebijakan kita: kita mengambil langkah itu [harus] ada solusinya. Kalau kita bongkar [begitu] saja, itu bisa saja. Tapi itu bisa menimbulkan masalah baru... Karena begitu padatnya volume aktivitas sosial di situ, sehingga bentrok sosial sering terjadi [...]. Nah, itu masalahnya. Kebijakan saya: [...] saya dorong pemekaran pasar-pasar kecamatan. Tahun 2012 ini kita dapatkan dua atau tiga [pasar baru] supaya volume [transaksi] yang [di pasar] ini kita tarik lagi keluar dari situ.<sup>39</sup>

Program pengembangan pasar tradisional ini mesti direalisasikan secepatnya mengingat padatnya volume transaksi di pasar-pasar tersebut. Tuntutan agar pengembangan pasar-pasar baru lekas direalisasikan lebih didasari oleh dua pertimbangan penting, yaitu fungsi strategis pasar-pasar tradisional sebagai ruang interaksi antar-komunitas, serta padatnya transaksi di pasar-pasar tersebut berpotensi mengakibatkan gesekan dan bentrokan antar-komunitas.

38 Wawancara dengan seorang pejabat Dinas Kesehatan Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

39 Wawancara, Walikota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

Ada pula program yang sebenarnya sudah pernah diinisiasi, namun belum terealisasi dengan baik. Salah satunya, bimbingan untuk anak-anak. Program serupa sebenarnya pernah dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2007. Sayangnya, program tersebut lebih bersifat temporal, sporadis, dan tidak berkelanjutan. Di samping itu, rancangan dan perencanaan programnya cenderung kurang sistematis.<sup>40</sup> Bimbingan dan penyadaran anak-anak Ambon, khususnya yang telah menjadi korban konflik atau menyaksikan langsung konflik tersebut, harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif, sehingga tidak dapat diadakan secara temporal dan di lokasi tertentu saja. Pendidikan dan bimbingan anak-anak tersebut bahkan perlu dirancang secara khusus dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Melalui program ini anak-anak diharapkan dapat sungguh-sungguh memahami dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada konflik 1999.

Penyadaran dan bimbingan ini penting terutama untuk menangani perasaan dendam yang masih tersisa dalam hati anak-anak. Jika dibiarkan, anak-anak tersebut dikhawatirkan akan tumbuh dengan penuh dendam dan dapat menjadi aktor-aktor utama konflik di masa depan. Lebih dari itu, bimbingan trauma dan kurikulum perdamaian yang diberikan di sekolah-sekolah sekaligus akan turut membentuk karakter generasi masa depan Ambon yang lebih peka, toleran, dan multikultural.

Sebab [ketika terjadi] peristiwa '99 itu anak-anak yang [ada] sekarang kan masih kecil atau kira-kira usia *golden age* (1-4 tahun). Jadi, mereka tumbuh itu lebih dekat pada nilai-nilai kekerasan, bukan nilai-nilai non-kekerasan. Oleh karena itu, ke depan dan juga saat ini perlu penanaman atau pembentukan karakter supaya terjalin hubungan lintas agama atau etnis yang lebih harmonis. Itu yang kita harus bangun. Terlebih lagi [dalam] kondisi segregasi saat ini sudah tertanam nilai kekerasan [yang] didukung lagi dengan pola permukiman. Jadinya mereka tidak tahu dan [tidak] mengenal saudara-saudara mereka yang Muslim atau Kristen di sana.<sup>41</sup>

Jelas sekali bahwa kurikulum perdamaian dan persaudaraan telah menjadi perhatian dan tuntutan masyarakat umum. Sebagai tanggapan atas tuntutan tersebut, pihak Pemerintah Kota Ambon lewat Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekot) Ambon telah merancang

---

40 Wawancara dengan salah seorang imam di Wayame, Ambon, 14 Desember 2012.

41 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

RPJM terbaru yang memberikan penekanan dan prioritas pada pembuatan kurikulum *orang basudara*.<sup>42</sup> Diharapkan program tersebut dapat diimplementasikan sesegera mungkin mengingat periode pasca-konflik sudah berjalan lebih dari satu dekade.

Bimbingan dan perhatian khusus memang sudah seharusnya diberikan pada anak-anak dan generasi muda Ambon. Fenomena anak muda Ambon erat kaitannya dengan konteks dan dinamika konflik, khususnya pada anak-anak muda pengangguran. Persoalan anak muda pengangguran telah memainkan peran tersendiri dalam meletusnya konflik 1999.<sup>43</sup> Oleh karena itu, sangatlah beralasan untuk memberikan perhatian dan bimbingan khusus kepada mereka, bukan semata-mata karena banyak dari mereka mengalami trauma akibat konflik, tetapi juga karena kondisi sosial-ekonomi mereka dapat menjadi potensi munculnya kekerasan di kemudian hari.

Program penting selanjutnya yang dianggap akan banyak memberikan kontribusi positif dalam menciptakan perdamaian dan menjalin kembali tali persaudaraan antar-komunitas adalah program perekatan sosial melalui berbagai *event* keagamaan. Sayangnya, program seperti ini masih dalam tahap usulan oleh berbagai pihak dan belum menjadi prioritas pembangunan pasca-konflik.

Betul; kita butuh rekonstruksi fisik, tapi tanpa membangun perekat-perekat sosial, percuma saja. Akan habis juga [dananya]. Apakah mereka tidak membangun perekat sosial agar ada proyek lagi? Saya tidak tahu. Ini kan perbedaan cara berpikir mereka dari kita, masyarakat. Sebesar-besarnya pembinaan yang kita lakukan, keterbatasan kita hanya pada komunitas kita saja, tidak menembus komunitas yang Muslim.<sup>44</sup>

Pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan, baik secara fisik maupun psikis, juga menjadi program pasca-konflik yang dirasa penting dan mendesak untuk direalisasikan. Daerah perbatasan merupakan daerah-daerah yang sangat rawan akan munculnya kekerasan dan konflik; bukan hanya antar-komunitas yang tinggal di wilayah perbatasan tersebut, tapi juga bentrok antarkelompok di tempat lain

---

42 Wawancara dengan pejabat bidang perencanaan pembangunan Kota Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

43 Lihat Garry van Klinken (2001), halaman 1-26.

44 Wawancara dengan seorang tokoh Kristen Kota Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

yang sangat mungkin merembet hingga memicu bentrok susulan di daerah-daerah perbatasan ini.

Memang ke depannya, dalam perencanaan kota kita ini, nantinya di kawasan perbatasan itu tidak akan dibangun lagi permukiman. Seperti di perbatasan Batu Merah–Mardika; kita akan bangun areal parkir di situ atau kita bangun fasilitas umum di situ. Warganya dan tanah/rumahnya tinggal kita ganti rugi. Kita beli tanahnya, terus kita relokasi saja, kan? Karena kan daerah situ [cenderung menjadi daerah] konflik yang terburuk. Seperti [di] Hari Pattimura, itu kan [konflik] terbakar lagi di situ.<sup>45</sup>

Pernyataan di atas secara jelas mengonfirmasi dua hal: (1) rancangan pembangunan daerah perbatasan sebenarnya sudah menjadi salah satu prioritas pembangunan pasca-konflik, bahkan sudah masuk dalam *masterplan* tata kota Ambon ke depan; namun demikian, (2) prioritas tersebut masih sebatas perencanaan dan belum ada realisasi maupun implementasinya. Secara praktis, pembangunan daerah perbatasan tidak ditujukan pada pembangunan perumahan, melainkan lebih kepada pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh komunitas-komunitas yang berbeda. Fasilitas-fasilitas ini—tempat parkir, pasar-pasar tradisional/modern, puskesmas, sekolah, taman-taman kota, dan sebagainya—dapat menjadi ruang publik untuk interaksi antar-komunitas.

Pada akhirnya, diperlukan keseimbangan prioritas pembangunan pasca-konflik antara pembangunan fisik, sosial, dan mental/psikis, mengingat konflik 1999 tidak hanya berdampak pada infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial sehingga mewariskan trauma psikis. Penekanan berlebih pada satu aspek pembangunan saja hanya akan menciptakan distorsi dan pembangunan yang serba parsial di Kota Ambon.

### C. DISKRIMINASI DALAM BIDANG SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK

Masalah penting lain yang umumnya terkait segregasi adalah diskriminasi, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan kata lain, di daerah-daerah yang tersegregasi dan berkomposisi minoritas–mayoritas, fenomena diskriminasi sering kali muncul sebagai

---

45 Wawancara dengan pejabat bidang perencanaan pembangunan Kota Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

efek dari kompetisi yang cenderung sengit dalam memperoleh akses. Demikian pula dengan Ambon; sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang masyarakatnya tersegregasi, kota ini juga tak lepas dari fenomena diskriminasi.

Di Kota Ambon sendiri, diskriminasi juga terjadi dalam hal pelayanan publik, meski Pemerintah Kota Ambon sejauh ini nampaknya sudah berusaha untuk menghilangkan praktik-praktik diskriminatif tersebut. Usaha Pemerintah Kota Ambon salah satunya tercermin dalam pelayanan kesehatan, sebagaimana dinyatakan oleh seorang responden:

Pelayanan kesehatan itu tidak lihat-lihat apakah itu Muslim atau Kristen dalam memberikan [layanan] kesehatan. Itu memberikan gambaran untuk orang lain bahwa memang orang Dinas Kesehatan dalam melayani tidak melakukan pilih-pilih, meskipun dalam kerusuhan. Itu dilakukan di Puskesmas dan [...] di daerah-daerah perbatasan Islam dan Kristen. Dinas Kesehatan banyak kali mengadakan pengobatan gratis di wilayah-wilayah perbatasan Muslim–Kristen dan dihadiri orang Muslim dan Kristen.<sup>46</sup>

Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon di atas menggambarkan adanya upaya menghilangkan diskriminasi, sebagaimana pemerintah kota sendiri telah menegaskan bahwa mereka tidak melakukan pembedaan dalam memberikan pelayanan, baik kepada komunitas Islam maupun Kristen, kepada penduduk setempat maupun pengungsi. Namun demikian, diskriminasi ternyata telah terjadi dalam pemberian bantuan untuk pengungsi. Ketika banjir melanda Ambon pada Agustus 2012, misalnya, pengungsi dari komunitas tertentu merasa bantuan yang diterimanya lebih sedikit daripada bantuan yang diterima komunitas lain:

... karena kami memiliki hubungan baik, jadi kami minta agar bantuan jangan hanya masuk ke Kristen saja. Tetapi hanya sedikit saja [yang kami minta]. Baru-baru ini ada pengungsi-pengungsi dari [kalangan] Muslim mempertanyakan, kenapa pengungsi Kristen semua dapat tetapi [pengungsi] Muslim tidak dapat. Kita jelaskan bahwa betul mereka punya, tetapi kita hanya mendapat sedikit, paling-paling kasur hanya 10 buah. Sekian ratus pengungsi ini bisa berkelahi [karena pembagian bantuan

---

46 Wawancara dengan pejabat Dinas Kesehatan Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

tidak sampai ke semua orang]. Jadi, hanya kita pilih saja [penerima bantuanannya].<sup>47</sup>

Dalam kasus tersebut, nampaknya pengungsi korban banjir dari komunitas Kristen mendapatkan prioritas lebih dalam mengakses bantuan daripada pengungsi dari komunitas Islam. Dari segi nominal bantuan, pengungsi Kristen juga cenderung mendapatkan lebih banyak bantuan daripada pengungsi Muslim. Bahkan tak sedikit pengungsi Muslim yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Terjadinya diskriminasi dalam mengakses bantuan atau dalam ranah lain, apalagi jika benar dilakukan oleh aparat pemerintahan, hanya akan merusak tatanan dan harmoni sosial yang telah dibangun begitu lama di Ambon.

Beberapa kasus diskriminasi lain berkaitan dengan masalah perekonomian, misalnya dalam proses tender proyek dan perdagangan. Terdapat sejumlah kasus di mana etnis atau kelompok tertentu lebih diprioritaskan ketimbang yang lain. Komunitas Tionghoa, misalnya, dianggap banyak mendapat keistimewaan karena memberikan “uang pelicin” dalam jumlah tertentu kepada oknum birokrasi.<sup>48</sup> Adapun di sektor ekonomi kecil, misalnya di Pasar Velentin yang merupakan pasar relokasi pengungsi, para pedagang kecil berpendapat bahwa pemerintah daerah lebih memperhatikan para pedagang yang ada di Pasar Mardika dengan membuatkan lapak-lapak yang lebih layak. Lapak pedagang di Pasar Mardika dibuat dari kayu, sedangkan di Pasar Velentin dari bambu. Itu pun, renovasinya baru dilakukan setelah para pedagang Pasar Velentin meminta berkali-kali pada pemerintah. Akibatnya, mereka merasa orang Maluku asli yang merupakan mayoritas pedagang di Pasar Valentin tersebut dipinggirkan.<sup>49</sup> Dari contoh-contoh kasus ini kita melihat, diskriminasi dalam bidang ekonomi, dan mungkin juga dalam bidang-bidang lain, sering kali bertautan dengan isu etnisitas, terutama bila distribusi sumber daya ekonomi dilakukan melalui jalur etnis tertentu.<sup>50</sup>

Beberapa kasus diskriminasi juga terjadi di ranah sosial-politik, misalnya terkait beberapa posisi sosial-politik atau birokrasi pemerintahan. Dalam kasus-kasus ini orang yang berasal dari komunitas tertentu

---

47 Wawancara dengan tokoh organisasi Islam Kota Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

48 Wawancara dengan salah satu pengusaha muda Ambon, Ambon, 22 Mei 2013.

49 FGD dengan beberapa pedagang di Pasar Valentin, Ambon, 22 Mei 2013.

50 Lihat Fearon dan Laitin (1996).

kerap diberi prioritas lebih daripada yang lain. Seorang responden di Unpatti, misalnya, menyatakan:

Rekrutmen dosen itu terkadang dua atau tiga hari jelang tes baru diumumkan. Sekarang ini [rekrutmen] kayaknya mau meledak lagi nih karena [ada] sertifikasi dosen. Banyak dosen Muslim, termasuk saya, itu datanya dikaburkan. Saya, sejak awal pengangkatan hingga saat ini, tidak melalaikan tugas saya untuk mengamalkan Tri Dharma perguruan tinggi. Sudah sekian puluh tahun saya mengajar. Kenapa orang yang baru dua tahun mengajar, langsung dikasih serdos? Apa salah kami? Kalau di Unpatti itu, dekannya cuma satu yang Muslim—dari delapan fakultas; sembilan sama kedokteran. Satu itu, [dekan] FISIP; [kemudian] Pak Madubun dan Pak Udin, dan PR 3 (Pembantu Rektor 3). ... Kehidupan segregatif di luar itu sudah terbawa ke dalam [kampus]—simbolik dari luar sudah masuk ke dalam.<sup>51</sup>

Keterangan di atas menggambarkan kasus diskriminasi yang terjadi dalam rekrutmen pegawai birokrasi dan dosen di Unpatti. Dalam kasus ini, komunitas Kristen sepertinya lebih diprioritaskan dalam mengisi jabatan-jabatan struktural dan fungsional di Unpatti. Begitu juga dalam kenaikan pangkat dan sertifikasi dosen. Para dosen dari komunitas Kristen lebih diutamakan, padahal mereka yang berasal dari komunitas Muslim merasa telah memenuhi persyaratan dan lebih berhak atas suatu jabatan atau status. Jika dicermati, diskriminasi dan segregasi di ranah pendidikan di Unpatti tersebut merupakan refleksi dari segregasi yang telah tertanam dalam masyarakat Ambon secara umum. Dengan kata lain, segregasi spasial yang terjadi di Ambon telah pula masuk dalam wilayah sosial.

Masih berkenaan dengan kehidupan sosial-pendidikan di Unpatti sebagai kasus, diskriminasi ternyata tidak hanya terjadi dalam hal rekrutmen dan kenaikan pangkat, tetapi juga dalam pemberian beasiswa. Nilai nominal beasiswa yang diterima mahasiswa Kristen cenderung lebih besar daripada yang diterima mahasiswa Muslim. Dalam kasus ini, mahasiswa Kristen bisa memperoleh beasiswa senilai Rp 7 juta, sedangkan mahasiswa Muslim hanya memperoleh Rp 3 juta. Begitu juga dalam proses pencairannya; beasiswa untuk para mahasiswa Kristen cenderung dicairkan lebih dahulu ketimbang beasiswa ma-

---

51 Wawancara dengan salah satu akademisi Unpatti Ambon; dan dengan penggerak perdamaian di Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.



hasiswa Muslim. Beberapa contoh di atas menggambarkan kondisi di mana akses segregasi dalam masyarakat Ambon telah merambah dunia sosial-pendidikan dalam bentuk kasus-kasus diskriminasi terkait pelayanan dan akses publik.<sup>52</sup>

Kendati demikian, fenomena diskriminasi di Unpatti tersebut dibantah oleh beberapa pihak, khususnya pimpinan universitas. Dalam hal kuota penerimaan mahasiswa, misalnya, dianggap wajar jika kebanyakan mahasiswa yang diterima berlatar belakang Kristen karena jumlah calon mahasiswa Kristen yang mendaftar juga lebih banyak daripada calon mahasiswa Muslim. Rasio seperti ini juga kerap berlaku di tingkat fakultas. Menurut para pihak yang membantah adanya diskriminasi ini, tidak ada prioritas yang diberikan untuk mahasiswa dari komunitas tertentu karena proses penerimaan sudah pula dilakukan melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) serta melalui jalur mandiri, dan bukan berdasarkan proporsi.<sup>53</sup>

Akan tetapi, ada pula temuan menarik lain di institusi pendidikan tinggi ini, yakni munculnya perubahan positif pasca-konflik yang berkaitan dengan keterbukaan di ranah akademis. Sebelum konflik, sebagaimana yang diakui dan dirasakan sendiri oleh salah satu pimpinan di Unpatti, kadang terjadi diskriminasi dalam pemberian nilai, serta dipersulitnya prosedur untuk mendapatkan pelayanan birokrasi bagi mahasiswa yang berasal dari komunitas tertentu. Terkait hal ini, konflik 1999 telah memberikan pembelajaran tersendiri, menumbuhkan keterbukaan, dan memunculkan tekanan terhadap pihak universitas agar menghindari hal-hal yang bersifat diskriminatif dan koruptif.<sup>54</sup>

Dalam konteks pengisian jabatan-jabatan strategis di Unpatti, sering kali terdapat semacam kesepakatan tidak tertulis di kalangan pimpinan untuk berbagi jabatan. Misalnya, jika rektor beragama Kristen, maka beberapa wakilnya harus Muslim. Fenomena semacam ini terjadi sejak pemilihan rektor tahun 2003. Begitu pula dalam hal rekrutmen dosen. Pasca-konflik 1999, sistem rekrutmen telah diperbaiki dan jauh lebih transparan. Meski berdasarkan pengakuan salah seorang mantan pimpinan Unpatti yang berasal dari komunitas Muslim, orang-orang

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Wawancara dengan salah seorang pimpinan Unpatti, Ambon, 16 Mei 2013.

<sup>54</sup> Ibid.; dan dengan tokoh pemuda Islam Ambon, Ambon, 15 Mei 2013; dengan dekan salah satu fakultas di Unpatti, Ambon, 15 Mei 2013.

dari komunitas Muslim lebih cenderung melamar pekerjaan sebagai pegawai pemerintahan daripada sebagai dosen.<sup>55</sup> Pasca-konflik pemberian beasiswa juga lebih terbuka dan kompetitif. Banyak yang gagal mendapatkan beasiswa lebih karena terkendala kemampuan berbahasa Inggris dan potensi akademik, bukan karena prioritas atau diskriminasi. Walaupun diskriminasi terjadi, itu lebih bersifat kasuistik.<sup>56</sup>

Tuntutan perimbangan antar-komunitas, terutama terkait bentuk perimbangan tersebut, bahkan sempat mengemuka dalam proses pembicaraan Perjanjian Malino II. Sebagian pihak sempat mengajukan skema perimbangan yang bersifat “sama rata”, 50-50. Namun banyak pihak yang menolak model perimbangan (*power sharing*) tersebut karena berpotensi mengabaikan faktor-faktor kualitas, kemampuan, dan profesionalitas individu. Jika tuntutan “sama rata” terlalu dituruti, seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan bisa saja ditempatkan di posisi tertentu demi memenuhi tuntutan kuota tersebut. Oleh karena itu, perimbangan yang kemudian dianggap adil adalah yang bersifat proporsional, yakni yang memperhatikan kemampuan dan keterampilan individu.<sup>57</sup>

#### D. HUBUNGAN ANTAR-KOMUNITAS SESUDAH KONFLIK

##### 1. MEMBAIKNYA KEMBALI HUBUNGAN ANTARMASYARAKAT

Sampai saat ini kondisi dan situasi pasca-konflik di Ambon dapat dikatakan berjalan baik. Kehidupan sudah berjalan normal, masyarakat sudah kembali ke kehidupan dan aktivitas semula, komunikasi dan interaksi antar-komunitas pun berjalan relatif cukup baik. Kendati belum semua, namun banyak juga anggota masyarakat yang sudah membaur kembali setelah sebelumnya terpisah-pisah akibat konflik berkepanjangan.<sup>58</sup> Membaiknya kembali situasi Kota Ambon, yang sempat mengalami distorsi sosial dan pelemahan kohesi antar-komunitas, telah menjadi salah satu perhatian dan pertimbangan penting dalam RPJP Kota Ambon tahun 2006-2026.<sup>59</sup>

55 Ibid.; dan dengan salah seorang pemimpin keagamaan Katolik, Ambon, 13 Mei 2013.

56 Wawancara dengan dekan salah satu fakultas di Unpatti, Ambon, 15 Mei 2013.

57 Wawancara dengan salah seorang pimpinan Unpatti, Ambon, 16 Mei 2013, dan dengan salah seorang pemimpin keagamaan Katolik, Ambon, 13 Mei 2013.

58 Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

59 Lihat Perda Kota Ambon No. 4 Tahun 2006.

Namun demikian, kendati interaksi dan hubungan antar-komunitas di Ambon sudah kembali normal, harus diakui bahwa segmen-segmen masyarakat tertentu masih merasakan trauma, ketakutan, ketidaknyamanan, dan lain-lain. Masih ada beberapa masalah yang muncul sebagai akibat dari konflik tersebut dan butuh waktu cukup lama untuk menyelesaikannya. Stigma antar-komunitas, sebagaimana yang direpresentasikan dengan label *Acang* (Hasan) untuk orang-orang Islam dan *Obet* (Robert) untuk orang-orang Kristen, merupakan salah satu masalah yang muncul pasca-konflik.<sup>60</sup> Seorang responden mengungkapkan:

Tetapi saat ini masih ada persoalan di hati yang paling dalam, khususnya untuk kalangan *grass root*. Misalnya, untuk kalangan orang tua-tua masih ada [yang] sering mengatakan, “Itu siapa? *Acang* atau *Obet*?” Kenapa masih menggunakan kata-kata seperti itu? *Acang* (Hasan) itu Islam dan *Obet* (Robert) itu Kristen. Ini satu stigma/cap yang dibuat oleh Polri. Pada saat itu Polri meminta Franky Sahilatua menciptakan sebuah lagu dan lagu itu diikuti dengan video klip di mana seorang anak Islam dan Kristen berada di suatu tempat yang sudah hancur, kemudian berteriak: “... *Acang* ... *Obet* ...” Nah, dari situ stigma tentang Muslim dan Kristen masih ada hingga saat ini dengan sebutan *Acang* dan *Obet*. Tetapi di kalangan kita yang sudah paham betul, maka sering dibuat bercanda, seperti: “Eh, *Acang* masuk sini, atau *Obet* masuk sini, eh.”

Secara umum, trauma akibat konflik masih cukup kentara; sentimen dan kecurigaan antar-komunitas pun masih dirasakan oleh berbagai segmen masyarakat. Salah satu akibatnya, ketika bepergian banyak orang memilih mencari jalan alternatif untuk menghindari keharusan melintas di daerah komunitas lain. Sebagai contoh, orang-orang Kristen yang mau melintasi Air Salobar untuk mencapai wilayah Kristen yang berada di seberang daerah tersebut harus menempuh jalur laut dengan menggunakan *speed boat*. Untuk orang-orang Air Salobar sendiri, jika hendak ke Masjid Al Fatah yang terletak di dalam kota, misalnya, juga harus menggunakan *speed boat* karena enggan melintasi daerah tetangga mereka yang Kristen. Demikian pula dengan orang-orang Kristen Amahusu; mereka harus menggunakan *speed boat* untuk mencapai Benteng atau memutar gunung untuk menuju pusat Kota Ambon.<sup>61</sup> Fenomena ini terutama disebabkan oleh kecurigaan

60 Wawancara dengan aktivis HAM Maluku dan dengan ketua Dinkes Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

61 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku, Ambon, 12 Desember 2012.

dan sentimen yang terbangun akibat konflik 1999, dan ternyata tidak mudah hilang begitu saja. Setelah kerusuhan 11 September 2011 terjadi, misalnya, fenomena “hindar-menghindar” dalam melakukan perjalanan ini muncul kembali. Lantaran masih adanya sentimen dan kecurigaan pula, tidak sedikit hubungan yang sebelum konflik terjalin baik, menjadi benar-benar putus pasca-konflik.

[Dulu] yang Kristen kalau pas kita Lebaran mereka datang, silaturahmi ke kita... Kan saya punya teman banyak di atas (di lingkungan Kristen)—malah mereka bawa kue-kue. Terus nanti [...] kalau mereka *Natalan* kita ke sana silaturahmi bawa kue. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi [silaturahmi]... Sudah putus... Dulu kalau Natal mereka ajak kita ikut *Natalan* bersama. Biasanya ada drama dari komunitas Muslim, kita ikut. Itu sebelum tahun 1999. Jadi, kita berpartisipasi. Kalau Lebaran kita undang [mereka] lagi. [Sekarang] mereka sering lewat di sini, tapi tegur sapa itu tidak ada lagi.<sup>62</sup>

Meski tak dimungkiri bahwa di banyak tempat di Ambon hubungan antar-komunitas secara umum sudah membaik, namun kasus seperti yang diceritakan seorang responden di atas bisa jadi juga dialami oleh banyak masyarakat Ambon. Dua komunitas yang dulunya bahu-membahu dan kerap bekerja sama di berbagai *event* keagamaan, sekarang bahkan sudah tidak lagi saling sapa dan seolah tidak saling mengenal.

## 2. MENGUATNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN KONFLIK

Membaiknya kembali hubungan antar-komunitas diikuti semakin menguatnya kesadaran masyarakat untuk tidak mau lagi terlibat dalam konflik. Masyarakat telah banyak belajar 1999 bahwa konflik 1999 hanya membawa kesengsaraan dan kehancuran untuk masyarakat Maluku, khususnya Ambon. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas keagamaan, terutama khotbah, dakwah, ceramah-ceramah keagamaan, baik dari komunitas Islam maupun Kristen, yang berisi himbauan untuk tidak mudah terprovokasi dan terjerumus lagi ke dalam konflik komunal.<sup>63</sup>

62 Wawancara dengan salah seorang pengungsi kerusuhan Waringin, Ambon, 12 Desember 2012

63 Wawancara dengan pimpinan bidang keagamaan Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

Lebih dari itu, masyarakat Ambon bahkan semakin menyadari bahwa konflik 1999 bukanlah kehendak mereka. Masyarakat Ambon sekarang, terutama masyarakat adatnya, sadar bahwa mereka adalah komunitas bersaudara sejak dahulu kala. Konflik tersebut, bagi mereka, merupakan rekayasa orang luar. Seorang responden menyatakan:

Menurut saya, pasca-konflik itu memang kita, sesama bersaudara di sini, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya intervensi atau pengaruh dari luar masuk. Jadi, kalau kita lihat saja di negeri-negeri, mereka biasanya akan kembali kalau mereka memang punya *petuanan* (wilayah adat). Walaupun memang mereka beberapa kali mengalami konflik. Yang sudah dibangun lalu terbakar lagi. Namun memang mereka kembali karena itu merupakan negeri adat. Yang jadi persoalan memang di daerah urban, karena memang daerah itu kan penduduknya sudah bercampur. Kalau kita, sesama orang Ambon, sudah tidak ada masalah lagi.<sup>64</sup>

Anggapan bahwa konflik 1999 merupakan konstruksi dan kepentingan pihak-pihak luar membuat keinginan untuk berkonflik perlahan menghilang dari pikiran masyarakat Ambon. Pasca-konflik orang-orang Ambon benar-benar cenderung kembali ke daerah asal karena dua hal, yaitu rasa persaudaraan atau ikatan adat dan tidak adanya keinginan di antara mereka untuk berkonflik lagi.

Bahwa pasca-konflik sekarang ketahanan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya telah teruji, yakni ketika terjadi kekerasan mereka dengan mudah melokalisir dan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Kendati kekerasan-kekerasan yang terjadi pasca-konflik sering kali juga dihubung-hubungkan kembali dengan isu dan sentimen keagamaan oleh pihak-pihak tertentu, namun bentuk-bentuk konflik tersebut selalu terjadi hanya dalam waktu singkat dan di lokasi tertentu saja.<sup>65</sup> Proses perdamaian pasca-konflik 1999 telah membuat masyarakat Ambon makin matang dan kuat dalam menghadapi setiap kekerasan yang muncul; seperti yang terjadi di Waringin pada 11 September 2011 dan saat Pawai Obor 25 Mei 2012, di mana kekerasan dengan cepat dilokalisir dan diselesaikan.

Lebih dari itu, di daerah-daerah perbatasan seperti Waringin dan Mardika, yang kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan dan kon-

---

64 Wawancara dengan pejabat bidang perencanaan pembangunan Kota Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

65 Wawancara dengan pejabat bidang keagamaan Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

flik antar-komunitas, masyarakatnya sudah berkomitmen untuk dapat tinggal bersama secara damai.<sup>66</sup> Masyarakat Waringin yang dulu mengungsi akibat konflik 1999 sekarang sudah banyak yang berbaur dengan anggota komunitas lain dan tinggal bersama secara damai.

### 3. KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI ANTAR-KOMUNITAS

Kerja sama dan komunikasi antar-komunitas dalam menangani kekerasan yang muncul pasca-konflik 1999 merupakan fakta penting lain yang menunjukkan semakin membaik dan menguatnya hubungan antar-komunitas pasca-konflik. Komunikasi dan kerja sama banyak dijalin oleh para pimpinan komunitas tersebut, misalnya antara pendeta dengan ulama, antara Sinode GPM dengan MUI baik di provinsi maupun kota, dsb.<sup>67</sup> Ketika kekerasan muncul pasca-konflik, para tokoh kedua komunitas tersebut selalu turun ke lapangan, menjalin komunikasi, dan memberikan penjelasan pada umat masing-masing agar tidak mudah terprovokasi atau terlibat dalam kekerasan apa pun.

Ketahanan sosial masyarakat yang semakin menguat, komunikasi dan kerja sama antar-umat yang juga kian baik, memang sudah seharusnya diikuti dengan pengaktifan kembali nilai-nilai tradisional dan kebersamaan, misalnya dengan saling bantu dalam membangun rumah ibadah dan menghidupkan kembali *Pela Gandong*.<sup>68</sup> Nilai-nilai dan khazanah kultural tersebut harus dihidupkan kembali sebagai penangkal segala potensi kekerasan yang masih dapat mengancam masyarakat Ambon. Pengaktifan *Pela Gandong* dan pengajaran sejarah budaya kebersamaan antar-komunitas juga sangat penting dalam rangka penguatan generasi muda Ambon, yang bisa saja lupa atau bahkan tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Sampai saat ini, kerja sama dan komunikasi paling nyata antar-komunitas pasca-konflik tercermin dalam pelaksanaan berbagai *event* keagamaan, seperti Idul Fitri, Natal, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), dan lain-lain. Menurut seorang responden:

Seperti pengalaman saya di Silo: setiap tahun pada saat Natal, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Maluku menjaga keamanan di

66 Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

67 Wawancara dengan tokoh pimpinan gereja Kristen Kota Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

68 Wawancara dengan tokoh pimpinan gereja Kristen Kota Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

Gereja Silo. Setiap [kali ada] kebaktian/ibadah saat itu, mereka jaga gereja dengan pakai kopiah, baju koko. Itu kondisi yang sangat indah. Sebaliknya juga begitu; ketika salat Ied, kami dari Angkatan Muda GPM juga menjaga keamanan masjid-masjid, seperti di [Masjid] Al Fatah atau [Masjid] Jami. Tapi untuk gereja, yang sering dijaga setiap tahun itu [adalah] Gereja Silo, Gereja Maranatha, Gereja Sidang Jemaat Allah Fildelfia, sama Gereja Bethlehem. Empat ini yang rutin setiap tahun dijaga komunitas Muslim.<sup>69</sup>

Di samping bekerja sama mengamankan *event* keagamaan, para pemuda dari kedua komunitas secara konsisten juga melakukan aktivitas-aktivitas kreatif dan menarik untuk menjaga perdamaian di Ambon dengan memanfaatkan media-media sosial, seperti mengadakan gerakan “Kopi Badati”. Melalui gerakan tersebut mereka mengumpulkan anak-anak muda Kristen–Muslim untuk melakukan gerakan kebersamaan, misalnya dengan memberikan kopi dan teh ke pos-pos yang dibangun di wilayah perbatasan. Mereka melakukan itu untuk membangun komunikasi atau berdiskusi dengan petugas keamanan dan rekan-rekan dari komunitas lain di wilayah perbatasan.<sup>70</sup> Di balik kegiatan “Kopi Badati” ini terdapat sebuah nilai penting yang dipromosikan, yaitu persatuan dan kesadaran generasi muda antar-komunitas untuk bersama-sama menjaga Ambon agar tetap damai.

#### 4. BEBERAPA HAMBATAN INTERAKSI ANTAR-KOMUNITAS

Hubungan dan interaksi antar-komunitas sejauh ini memang sudah berjalan cukup baik. Namun demikian, beberapa masalah yang merupakan akibat langsung dari konflik masih memerlukan penanganan serius dan sistematis. Jika tidak ditangani, masalah-masalah tersebut dapat saja mengganggu pembangunan perdamaian yang sedang berjalan atau bahkan merusak hubungan dan interaksi antar-komunitas yang sudah berjalan cukup baik.

Masalah yang dimaksud, *pertama* adalah trauma dan pudarnya rasa saling percaya (*trust*). Dalam konteks ini seorang penggiat perdamaian di Ambon, misalnya, menegaskan bahwa “sebelum konflik kan tidak ada [masalah *trust*]—semua saling percaya. Nah, ketidakpercayaan itu muncul setelah konflik terjadi. Tapi [mengatasinya] membutuhkan

69 Wawancara dengan aktivis perdamaian Maluku; dan dengan tokoh gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

70 Ibid.

waktu, kan? Kita tidak bisa hanya omong.”<sup>71</sup> Seorang responden lain mengungkapkan:

Kalau kami ke wilayah komunitas Kristen tidak terlalu takut lagi, tapi tidak bisa lama. Itu juga siang hari saja. Waktu 15 Mei kemarin kami takut dan jaga-jaga atau waspada, tapi tidak keluar Waringin karena *katong* pikir ada aparat jaga di pos. Tapi perasaan *katong* juga tidak tenang karena merasa aparat bukan jaminan.<sup>72</sup>

Kisah tersebut menggambarkan rasa curiga dan ketidakpercayaan yang masih ada dalam diri anggota masyarakat. Masalah inilah yang harus segera mendapat perhatian karena konflik 1999 benar-benar telah mengakibatkan rusaknya rasa saling percaya dan menimbulkan rasa saling curiga antar-komunitas, meski perspektif lain meyakini bahwa pudarnya kesaling-percaya tersebut telah mulai terjadi bertahun-tahun sebelum konflik meletus pada 1999.<sup>73</sup>

Masalah *kedua* yang secara serius perlu diperhatikan demi menjaga hubungan dan interaksi antar-komunitas adalah tuntutan akan perlakuan adil pemerintah kepada kedua komunitas.<sup>74</sup> Oleh karena, terdapat segmen-segmen masyarakat tertentu yang sampai saat ini masih merasakan diskriminasi dan tidak adanya perimbangan di antara kedua komunitas.<sup>75</sup>

Masalah *ketiga* yang juga berpotensi merusak hubungan dan komunikasi antar-komunitas yang sudah terjalin baik adalah tidak tuntasnya penyelesaian hukum kekerasan-kekerasan yang muncul pasca-konflik. Padahal ketidakpastian hukum semacam ini dapat mengakibatkan saling curiga dan tuduh-menuduh antar-sesama atau antar-komunitas. Banyak kalangan masih cenderung berpikir, kalau kejadiannya menimpa orang Islam, maka pihak Kristenlah pelakunya, begitu juga sebaliknya.<sup>76</sup> Untuk menghindari saling sangka tersebut, pengungkapan setiap kasus secara tuntas oleh aparat keamanan merupakan langkah krusial untuk menjernihkan masalah yang sesungguhnya serta menghilangkan saling curiga dan saling tuduh antar-komunitas.

71 Wawancara dengan seorang penggiat perdamaian di Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

72 Wawancara dengan salah seorang korban kerusuhan Waringin, Ambon, 13 Desember 2012.

73 Wawancara dengan Kepala Litbang GPM, Ambon, 5 September 2013.

74 Wawancara dengan tokoh Litbang Gereja Kristen Maluku, Ambon, 13 Desember 2012.

75 Wawancara dengan salah seorang imam di Wayame, Ambon, 14 Desember 2012.

76 Wawancara dengan seorang lurah, Ambon, 12 Desember 2012.



## 5. DEKONSTRUKSI SOSIAL-EKONOMI PASCA-KONFLIK

Di samping masalah-masalah yang dapat menjadi penghambat terjalannya hubungan baik antarmasyarakat di atas, pasca-konflik 1999 muncul beberapa hal yang menarik, yaitu dekonstruksi struktur sosial-ekonomi masyarakat Ambon. Sebelum konflik 1999, orang Kristen tidak tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan nonformal dan lebih condong pada pekerjaan formal saja, misalnya menjadi pegawai negeri sipil (PNS), pejabat, atau pegawai perkantoran. Adapun komunitas Islam cenderung memilih pekerjaan di sektor nonformal atau swasta, seperti menjadi pedagang, penarik becak, atau pengojek. Akan tetapi, setelah konflik 1999 terjadi pergeseran di kalangan komunitas Kristen; kini mereka tidak sanggup lagi untuk bekerja di sektor nonformal, seperti menjadi penarik becak, pedagang di pasar, buruh, pembantu, tukang batu, dan sebagainya.<sup>77</sup>

Kendati demikian, perbedaan identitas masih dapat dilihat di antara para pekerja nonformal dari komunitas yang berbeda ini. Misalnya, penarik becak dari komunitas Kristen dan Islam dapat dibedakan berdasarkan bentuk fisik dan kelengkapan becaknya. Becak orang-orang Islam cenderung kelihatan bagus, rapi, dan terpelihara dengan baik. Biasanya becak mereka dilengkapi dengan *spakbor* roda belakang. Adapun becak orang-orang Kristen cenderung apa adanya, tidak terawat dengan baik, dan biasanya tanpa *spakbor* belakang (Figur 21 hal 141).<sup>78</sup> Akan tetapi, kian hari ciri fisik becak sebagai penanda identitas penariknya kian tak relevan karena penarik becak dari satu komunitas bisa saja menarik becak dengan ciri yang sebelumnya identik dengan becak komunitas lain.<sup>79</sup>

Perubahan preferensi mata pencaharian komunitas Kristen ini juga diceritakan oleh seorang responden:

Contohnya tadi: warga Kristen, saya bilang, semula bertindak sebagai *Ambenaar*. Sekarang berubah. Dulu mana lihat orang Kristen bawa becak? Tidak ada. Mana lihat orang Kristen jual di pasar? Tidak ada. Mana yang duduk-duduk? Tidak ada. Kalaupun ada, cuma orang dari negeri saya—dari pegunungan. Ibu-ibu yang pakai keranjang, yang disebut bakul, di kepala, baru [sekarang] berjalan jualan dari rumah ke rumah. Kalau

77 Wawancara dengan seorang pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012; dan dengan salah seorang pengusaha kontraktor Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

78 Ibid.

79 Wawancara dengan seorang penarik becak Muslim asal Buton, Ambon 15 Mei 2013.

dulu-dulu, di pasar tidak ada. Tapi sekarang seluruh tatanan kehidupan kita berubah. Banyak sekarang orang Kristen berjualan di pasar. Banyak [orang Kristen yang menjadi tukang] becak juga, ... [tukang] ojek juga.<sup>80</sup>

Setelah konflik, dinamika hubungan antara komunitas Muslim dan Kristen berkenaan dengan pekerjaan juga mengalami perubahan. Selama konflik faktor kesamaan agama menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam rekrutmen di suatu bidang pekerjaan. Namun sekarang, mayoritas anggota masyarakat sudah mulai lebih memperhatikan aspek profesionalisme daripada identitas seseorang berdasarkan asal komunitasnya.<sup>81</sup>

#### E. PERASAAN AMAN: BERBAGAI PERSPEKTIF SEGMENT MASYARAKAT

##### 1. PERSPEKTIF IBU-IBU

Secara umum, kebanyakan kaum ibu baik yang mengungsi maupun tidak, yang sudah direlokasi maupun belum, menyatakan bahwa kini mereka merasa aman untuk bepergian ke berbagai tempat di Ambon. Menurut mereka tidak ada masalah bagi ibu-ibu dari komunitas Muslim untuk pergi ke wilayah-wilayah Kristen; begitu pula sebaliknya.<sup>82</sup> Namun demikian, harus diakui masih terdapat segmen masyarakat tertentu yang sejauh ini tetap merasa tidak aman dan trauma untuk datang ke daerah tertentu, khususnya ibu-ibu yang kini tinggal di wilayah relokasi. Sebagai contoh, ibu-ibu di Kayu Tiga, yang mayoritas adalah pengungsi Kristen, menegaskan bahwa mereka masih takut untuk pergi ke Batu Merah dan Kebun Cengkeh, yang didominasi oleh komunitas Muslim. Salah seorang responden menyatakan:

Sampai saat ini [saya] masih merasa tidak nyaman karena kalau umpamanya ada orang meninggal di Kayu Tiga di sini, kemudian saya tanya pemakaman di mana, kalau di jawab pemakaman di Benteng saya pergi, tapi kalau bilang pemakaman di Kebun Cengkeh saya tidak pergi... Tapi sekarang saya sudah berani sama-sama orang berduka pergi [ke] pema-

80 Wawancara dengan seorang pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

81 Wawancara dengan tokoh pengusaha muda Maluku, Ambon, 13 Desember 2012.

82 FGD dengan ibu-ibu di Latta, Ambon, 16 Mei 2013; dengan ibu-ibu pengungsi di Pita Samudra, Ambon, 16 Mei 2013; wawancara dengan seorang istri imam masjid, Ambon, 21 Mei 2013; dan dengan ibu-ibu di Kayu Tiga, 20 Mei 2013.

kaman di Kebun Cengkeh. Tapi kalau kita dapat undangan dari Batu Merah, misalnya, saya tidak akan pergi walaupun siang, apalagi malam.<sup>83</sup>

Ibu-ibu lain dari komunitas Kristen menegaskan bahwa mereka berani ke Kebun Cengkeh kalau bersama-sama. Namun demikian, mereka sama sekali takut untuk pergi ke Batu Merah, baik siang maupun malam. Selain tempat-tempat tersebut, tempat lain yang bagi mereka tidak aman untuk didatangi adalah Kairatu, Seram Bagian Barat, di mana mereka harus melewati Liang, lokasi dermaga feri yang mayoritas penduduknya Muslim. Perasaan demikian berasal dari pengalaman konflik 1999 dan trauma yang ditimbulkannya.<sup>84</sup>

Berbeda dengan ibu-ibu di relokasi Kayu Tiga, ibu-ibu Muslim di Latta yang sempat mengungsi saat konflik 1999 memutuskan untuk kembali ke Latta yang didominasi dan dikelilingi permukiman Kristen. Modal sosial berupa rasa saling percaya (*trust*) dengan komunitas Kristen di daerahnya membuat mereka mau kembali. Mereka menegaskan bahwa mereka memiliki hubungan persaudaraan antar-komunitas yang kuat sebagaimana telah diajarkan secara turun-temurun di Latta. Bahkan komunitas Muslim tersebut sengaja untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen agar ada perasaan menyatu dan saling memahami.<sup>85</sup>

## 2. PERSPEKTIF MAHASISWA/PELAJAR

Mahasiswa/pelajar secara umum menegaskan bahwa mereka merasa aman untuk bepergian ke beberapa tempat di Ambon yang mayoritas didiami oleh komunitas yang berbeda dengan mereka. Akan tetapi, sebagian mahasiswa/pelajar merasa tidak aman untuk bepergian ke tempat tertentu atau pada jam-jam tertentu. Kondisi serupa dengan perspektif kaum ibu tersebut banyak dibentuk oleh perasaan trauma akibat konflik 1999 yang belum sepenuhnya hilang.<sup>86</sup> Mahasiswa Muslim, misalnya, menegaskan bahwa sejak 2006 mereka sering datang ke daerah Kudamati yang merupakan daerah Kristen untuk menjalin kerja sama dengan mahasiswa dari organisasi Kristen.<sup>87</sup>

---

83 FGD dengan ibu-ibu di Kayu Tiga, Ambon, 20 Mei 2013.

84 Ibid.

85 FGD dengan ibu-ibu di Latta, Ambon, 16 Mei 2013.

86 FGD dengan mahasiswa Unpatti, Ambon, 15 Mei 2013; dan wawancara dengan seorang tokoh organisasi mahasiswa Islam, Ambon, 15 Mei 2013.

87 FGD dengan mahasiswa/anggota organisasi mahasiswa Islam, Ambon, 15 Mei 2013.

Namun demikian, mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di perbatasan memiliki pengalaman dan perasaan yang berbeda mengingat seringnya mereka melihat dan mengalami kekerasan atau konflik. Mahasiswa Muslim yang tinggal di perbatasan, misalnya, menegaskan bahwa mereka merasa takut kalau masuk wilayah Kristen pada malam hari. Rasa takut tersebut sering kali diperkuat oleh kesadaran bahwa identifikasi keanggotaan komunitas tertentu mudah dilakukan oleh siapa saja dengan hanya memperhatikan model berpakaian, bahasa, dan alamat rumah. Kondisi tersebut juga terjadi pada mahasiswa Kristen yang tinggal di perbatasan.<sup>88</sup>

### 3. PERSPEKTIF TUKANG BECAK/OJEK

Baik tukang ojek maupun becak secara umum menegaskan bahwa mereka merasa aman-aman saja memasuki berbagai wilayah di Ambon, khususnya saat mereka beroperasi atau bekerja. Hanya di wilayah-wilayah tertentu saja, banyak di antara mereka yang masih merasa takut untuk memasukinya pada malam hari. Misalnya, tukang ojek dari komunitas Muslim akan menghindari Kudamati dan Batu Gantung pada malam hari, dan lebih cenderung beroperasi di dalam Kota Ambon saja.<sup>89</sup>

Kalau siang sebenarnya nggak [takut]. Kalau malam mending saya menolak. Istilahnya, kita menolak untuk mawas dirilah [agar] tidak terjadi apa-apa dengan diri kita. Kalau ke daerah perbatasannya saja [saya] bersedia. Karena kita lihat: daerah mana yang paling rawan, jangan kita masuki. Kan saya bisa bilang sama penumpang saya hanya bisa mengantarkan sampai di sini saja. Saya nggak bisa mengantarkan ke sana.<sup>90</sup>

Adapun tukang ojek Kristen cenderung merasa aman kalau beroperasi di daerah-daerah Kristen, dan menghindari beroperasi di daerah Kebun Cengkeh dan Batu Merah pada malam hari. Di samping daerah tersebut, daerah lain yang sering kali dihindari oleh tukang ojek Kristen adalah Air Besar, Waihaong, dan STAIN. Namun demikian, beberapa tukang ojek merasa cukup aman pergi ke Waihaong. Dengan kata

---

88 Wawancara dengan salah satu aktivis mahasiswa di wilayah Ahuru, Ambon, 14 Mei 2013.

89 Wawancara dengan pengojek di Waringin, Ambon, 20 Mei 2013, dan Waihaong, Ambon, 15 Mei 2013.

90 Wawancara dengan pengojek, Waihaong, Ambon, 15 Mei 2013.

lain, setiap pengojek memiliki komunitasnya masing-masing—pengojek Islam di daerah Islam dan pengojek Kristen di daerah Kristen.<sup>91</sup>

Sorotan khusus banyak ditujukan ke daerah Kudamati. Kalangan sopir angkot, pengojek, atau penarik becak Kristen menganggap Kudamati sebagai daerah paling aman bagi mereka, setelah Batu Gantung dan Mangga Dua.<sup>92</sup> Di lain pihak, bagi mereka Batu Merah merupakan daerah yang harus dihindari, bukan hanya karena daerah tersebut merupakan konsentrasi komunitas Muslim, tetapi juga karena di sana kasus-kasus kriminal sangat marak. Banyak pengangguran di daerah tersebut, juga banyak pemudanya yang suka mabuk-mabukan sehingga menjadikan para pekerja nonformal tersebut merasa tidak aman.<sup>93</sup>

#### 4. PERSPEKTIF PEDAGANG KECIL

Secara umum, pedagang kaki lima merasa aman berjualan di mana saja, walau dalam kondisi dan tempat tertentu mereka merasa tidak aman untuk berdagang. Rasa tidak aman tersebut berasal dari trauma akibat pengalaman konflik atau kekerasan, sehingga para pedagang kaki lima ini cenderung merasa aman berdagang di wilayah komunitas mereka. Dengan kata lain, pedagang Muslim merasa lebih aman berdagang di wilayah/pasar yang pedagangnya mayoritas Muslim; demikian halnya dengan para pedagang Kristen.<sup>94</sup>

Pedagang Kristen di Pasar Valentin (Figur 22 hal 142), misalnya, yang pindah dari Pasar Mardika dan Batu Meja karena konflik 1999, merasa tidak nyaman dan aman untuk kembali ke Pasar Mardika yang didominasi pedagang dari komunitas Muslim (Figur 23 hal 142). Banyak di antara mereka yang mengaku masih trauma dan takut terjebak lagi dalam kerusuhan yang sama. Namun, pergi ke Pasar Mardika tidak menjadi masalah bagi mereka sepanjang mereka hanya berbelanja dan tidak berjualan.<sup>95</sup> Adapun pedagang yang berjualan di daerah Waringin merasa aman hanya karena di wilayah tersebut terdapat pos keamanan dengan penjagaan 24 jam oleh 4 batalion.<sup>96</sup>

91 FGD dengan para pengojek Kristen di Tanah Tinggi, Ambon, 16 Mei 2013.

92 Wawancara dengan sopir angkot di Kudamati, Ambon, 16 Mei 2013.

93 Wawancara dengan sopir angkot di Waihaong, Ambon, 15 Mei 2013.

94 FGD dengan para pedagang di Pasar Mardika, Ambon, 22 Mei 2013; wawancara dengan pedagang di Waringin, Ambon, 14 Mei 2013; dan FGD dengan pedagang di Pasar Valentin, Ambon, 21 Mei 2013.

95 FGD dengan pedagang di Pasar Valentin, Ambon, 21 Mei 2013.

96 Wawancara dengan pedagang kaki lima di Waringin, Ambon, 14 Mei 2013.

## 5. PERSPEKTIF PENGUSAHA

Bagi kalangan pengusaha, situasi keamanan tidak menjadi masalah. Mereka merasa aman dan nyaman untuk melakukan transaksi di mana pun dengan siapa pun. Kondisi tersebut dianggap sangat jauh berbeda dengan saat konflik atau masa-masa awal pasca-konflik.<sup>97</sup> Persoalan sebenarnya yang dirasakan oleh pengusaha, khususnya pengusaha kontraktor, adalah transparansi sistem tender dalam setiap proyek yang ada di Ambon. Praktik-praktik koruptif disinyalir masih berlaku dengan memberikan prioritas kepada kalangan tertentu.<sup>98</sup>

Rasa aman tersebut mencakup beberapa transaksi pengusaha Muslim yang dilakukan di daerah-daerah Kristen, dan sebaliknya. Sebagai contoh, seorang pengusaha muda Muslim di Ambon dengan lancar dan nyaman melakukan beberapa transaksi bisnis di daerah Maluku Tenggara dan Kisar, Maluku Tenggara Barat, yang dianggap merupakan daerah Kristen.<sup>99</sup>

## F. FAKTOR PEMERSATU DAN PEMECAH

### 1. FAKTOR PEMERSATU

Ambon dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang diwarnai dengan kentalnya segregasi. Namun demikian, terdapat beberapa aspek atau faktor yang sejauh ini dianggap berperan penting dalam menjaga perdamaian di Ambon. Faktor utama yang sudah diketahui secara luas adalah nilai budaya yang disebut *Pela Gandong*. Berkat sistem persaudaraan ini masyarakat Maluku, khususnya Ambon, hidup secara damai dan bersaudara selama bertahun-tahun. Setelah konflik terjadi pada 1999, kebutuhan untuk menghidupkan kembali *Pela* dan *Biking Panas Pela*<sup>100</sup> semakin mendesak. Melalui budaya persaudaraan tersebut, hubungan harmonis antar-komunitas diharapkan dapat diwujudkan secara cepat dan baik pasca-konflik 1999. Senada dengan pernyataan tersebut, salah seorang responden menegaskan bahwa “kita hidup dalam kerangka *Pela* di Ambon, tapi masih dibatasi dalam tem-

97 Wawancara dengan salah satu pengusaha Ambon, Ambon, 20 Mei 2013.

98 Wawancara dengan salah satu pengusaha muda Ambon, Ambon, 22 Mei 2013.

99 Ibid.

100 Biking Panas Pela (*heating up Pela*) adalah *event*/seremoni yang diadakan secara periodik untuk menjaga Pela tersebut tetap hidup. Seremoni atau pesta antar dua komunitas yang memiliki Pela tersebut biasanya diikuti dengan pembaharuan sumpah, bernyanyi, menari, dan sebagainya. Lihat Bartels (1977), hal 3.

bok ketidakpercayaan.... Kita ini orang bersaudara. Di Maluku ada Islam–Kristen, tapi ada ‘*salam–sarani*’; artinya *salam* itu Muslim, *sarani* itu Kristen.”<sup>101</sup>

Selain itu, kepercayaan yang besar terhadap *Pela* sebagai ikatan persaudaraan antar-komunitas di Ambon membuat sebagian besar masyarakat Ambon yakin bahwa konflik yang terjadi pada 1999 hanyalah konstruksi pihak luar yang bermaksud merusak Ambon.<sup>102</sup> Keyakinan akan kekuatan *Pela* ini juga menggiring masyarakat pada satu titik keyakinan lain bahwa sumber konflik 1999 tidak berhubungan dengan relasi internal antar-komunitas di Ambon. Oleh karena itu, *Pela* merupakan sumber utama hilangnya prasangka antar-komunitas.

Namun demikian, meski ada kepercayaan umum bahwa konflik 1999 merupakan konstruksi pihak tertentu dari luar Ambon, perhatian tetap diberikan pada absennya *Biking Panas Pela* dalam tahun-tahun terakhir menjelang konflik 1999. *Biking Panas Pela* biasanya dilaksanakan lima tahun sekali. Misalnya, ketika satu desa Muslim dan satu desa Kristen mempunyai hubungan *Pela*, maka suatu waktu warga Muslim akan berkunjung ke tetangga Kristen mereka. Kemudian, lima tahun berikutnya warga Kristen berganti mengunjungi desa Muslim. Dalam kesempatan itu diadakan pesta besar-besaran, makan bersama, dan sebagainya.<sup>103</sup> *Biking Panas Pela* merupakan upaya menjaga dan melestarikan adat dan tali persaudaraan di antara mereka. Terjadinya konflik 1999 dapat juga diasumsikan sebagai titik balik munculnya kembali kesadaran masyarakat Ambon untuk memulai lagi *event* rutin tersebut. Bahkan beberapa responden menegaskan bahwa kekuatan masyarakat Ambon untuk meresolusi dan membangun perdamaian adalah dengan pendekatan budaya atau *Pela Gandong*.<sup>104</sup>

Akan tetapi, posisi istimewa *Pela* dalam konstruksi perdamaian dan persaudaraan antar-komunitas di Ambon ini oleh beberapa pihak juga dianggap kontraproduktif, bahkan negatif. Alasannya, *Pela* dapat menjadi alasan bagi komunitas tertentu untuk membantu komunitas

---

101 Wawancara dengan salah seorang aktivis pemberdayaan pengungsi Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

102 Wawancara dengan salah satu korban konflik yang mengungsi dari Pulau Buru ke lokasi Lembah Argo, Ambon, 15 Desember 2012, dan dengan pengusaha kontraktor dan tokoh organisasi pengusaha muda Maluku, Ambon, 13 Desember 2012.

103 Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

104 Wawancara dengan salah seorang anggota Tim 20 Wayame dan akademisi Unpatti, 14 Desember 2012.

yang memiliki ikatan *Pela* dengannya ketika komunitas tersebut sedang berkonflik dengan komunitas lain.<sup>105</sup> Bentrokan pada akhir 2012 antara warga Desa Hualoy dan Desa Kamariang di wilayah Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, mungkin dapat menjadi salah satu contoh. Warga Sepa yang memiliki *Pela* dengan warga Kamariang diundang untuk menghadiri pelantikan Raja Desa Kamariang. Untuk datang ke Kamariang, warga Sepa harus melintasi Desa Hualoy. Belum jelas benar sebab terjadinya bentrokan antara warga Sepa dan Hualoy yang menewaskan lima warga Sepa, warga Kamariang yang merasa memiliki *Pela* dengan Sepa serta-merta membantu warga Sepa dalam bentrok tersebut.<sup>106</sup>

Faktor pemersatu lain yang juga penting adalah kerja sama dan tolong-menolong antar-umat dalam pelaksanaan berbagai *event* keagamaan. Kebersamaan dalam melaksanakan berbagai *event* tersebut merupakan salah satu sarana yang ampuh dan praktis untuk mempertahankan dan menjaga perdamaian di Ambon. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan MTQ pada tahun 2012 di Ambon, para perempuan pelwata (pelayan wanita) GPM merancang bakti sosial bersama dengan perempuan Muslim. Di wilayah-wilayah Kristen, seperti Galala, komunitas Kristen juga membuat lampion-lampion bergambar bintang dan bulan. Mereka juga memasang baliho-baliho, misalnya dengan tulisan “Sukses MTQ Nasional.” Begitu juga komunitas Islam, setiap akhir tahun memasang baliho “Selamat Natal dan Tahun Baru.”<sup>107</sup> Kerja sama antara komunitas Islam dan Kristen dalam pelaksanaan MTQ yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juni 2012<sup>108</sup> ini menjadi semacam titik penting kebangkitan kembali persaudaraan antar-komunitas yang sempat rusak akibat konflik berdarah 1999.

Faktor pemersatu terakhir dapat dirujuk pada munculnya pandangan pluralisme dan keterbukaan masyarakat. Munculnya segmen khusus masyarakat Ambon yang sadar akan pentingnya pluralisme dan toleransi atas perbedaan agama, terutama dari kalangan tokoh

---

105 Wawancara dengan seorang pejabat kepolisian Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012

106 Kompasiana.com, “Bentrok Maluku, 5 Tewas,” diambil dari: <http://regional.kompasiana.com/2012/12/30/bentrok-maluku5-warga-tewas-520821.html>, diakses 14 Februari 2013.

107 Wawancara dengan salah satu pengungsi di Kayu Tiga, Ambon, 11 Desember 2012; dan dengan seorang aktivis perdamaian Maluku, Ambon, 11 Desember 2012.

108 Lihat Antaraneews.com, 8 Juni 2012 (<http://www.antaraneews.com/berita/314891/presiden-buka-mtq-nasional-di-ambon>).



komunitas Islam ataupun Kristen, sangat membantu proses menjaga dan mengawal persaudaraan dan perdamaian antar-umat beragama di Ambon.<sup>109</sup> Pluralisme dan multikulturalisme dapat menjadi senjata ampuh dalam menjaga harmoni masyarakat yang heterogen dan memiliki tingkat segregasi cukup tinggi. Pemahaman tersebut pun dapat mulai dikembangkan secara serius dan konsisten dalam kurikulum sekolah dan pendidikan tinggi di Ambon.

## 2. FAKTOR PEMECAH

Selain beberapa faktor pemersatu, terdapat juga beberapa faktor penting yang sering kali dianggap sebagai biang konflik/bentrok atau sumber pemecah-belah antar-komunitas di Ambon. Salah satu yang penting adalah provokasi oleh pihak tertentu yang memanfaatkan sensitivitas isu dan simbol-simbol agama untuk membuat komunitas-komunitas tersebut saling bentrok atau berkonflik. Upaya-upaya provokasi ke masyarakat memang sering menjadi perdebatan karena sulitnya aparat keamanan menangkap para provokator. Tujuan provokasi relatif jelas: mengadu domba dan membenturkan kedua komunitas yang berbeda agar terjadi konflik/bentrok.<sup>110</sup> Tetapi kepentingan para provokator tersebut dapat bermacam-macam dan sulit diungkap. Di luar semua perdebatan, provokasi jelas menjadi pemicu meletusnya konflik 1999 dan, dalam beberapa kejadian, kekerasan yang muncul pasca-konflik. Menurut seorang responden:

Memang waktu 11 September 2011 itu banyak isu-isu yang dihubungkan ke masalah agama, di mana agama dijadikan sebagai pemicu konflik antarmasyarakat. Pemahaman itu yang harus kita kembalikan kepada kehidupan *orang basudara* antara orang Islam dan Kristen. Orang Kristen dan Islam di Maluku ini sebenarnya satu, semua bersaudara. Cuma, dengan adanya provokasi-provokasi yang memasukkan unsur agama, [orang jadi mudah berkonflik]. Jadi, Latupati mencoba untuk memperkuat tatanan adat sebagai *orang basudara*. Jangan termakan isu-isu yang tidak benar.<sup>111</sup>

---

109 Wawancara dengan pejabat kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

110 Wawancara dengan pejabat kepolisian Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012; Lihat juga pembahasan tentang provokasi dalam konflik Ambon dalam Barron, Azca, dan Susdinarjanti (2012).

111 Wawancara dengan seorang tokoh adat, Ambon, 14 Desember 2012.

Pernyataan di atas mengungkapkan adanya provokasi yang membawa sentimen dan fanatisme kelompok ketika terjadi kerusuhan di Waringin pada 11 September 2011. Hal serupa juga terjadi dalam konflik 1999.<sup>112</sup>

Faktor lain yang dianggap dapat memecah-belah komunitas, bahkan berpotensi menimbulkan bentrok antar-komunitas, adalah tidak adanya penghormatan terhadap adat-istiadat lokal yang selama bertahun-tahun telah berperan menjaga kerukunan dan perdamaian antar-komunitas. Adat-istiadat seperti ini secara khusus merujuk pada pembangunan rumah-rumah ibadah secara bersama-sama, serta perizinan yang diberikan oleh komunitas tertentu terhadap komunitas lain dalam mendirikan rumah ibadahnya.

Kesalahan kita dan pemerintah itu adalah *social engineering*. Dahulu, kalau kita bangun masjid, kita sepakat untuk sama-sama bangun masjid. Gereja juga seperti itu. Sama-sama saling membantu. Tapi sekarang tiba-tiba saya lihat ada masjid-masjid di wilayah-wilayah yang [penghuninya] Kristen semua. Tiba-tiba ada masjid yang dibangun berseberangan dengan Gereja Silo dan sebagainya. Orang Kristen tidak merasa memiliki masjid itu lagi. [Padahal] kan semua masjid yang sudah ada, tidak ada yang tidak ditangani oleh orang Kristen. Arsitektur Masjid Raya saja *kan* [dirancang oleh] orang Kristen.<sup>113</sup>

Filosofi penting di balik adat-istiadat membangun rumah ibadah secara bersama-sama adalah rasa saling memiliki terhadap rumah ibadah yang dibangun tersebut. Dengan demikian, masjid bukan hanya menjadi milik orang Islam, tetapi juga orang Kristen karena mereka ikut membangunnya. Rasa saling memiliki inilah yang dapat menjadi fondasi untuk saling menjaga dan menghormati antar-komunitas. Absennya penghormatan terhadap nilai-nilai dan adat-istiadat luhur tersebut secara jelas menghilangkan rasa saling memiliki, lantas rasa kebersamaan dan persaudaraan. Sejalan dengan pernyataan di atas, seorang responden menyatakan bahwa komunitas Musim “mendirikan masjid, tetapi tidak ada masyarakat Muslim di situ. [...] Ini juga harus diperhatikan. Karena ketika membangun rumah-rumah ibadah tetapi

---

112 Wawancara dengan aktivis HAM Ambon, Ambon 14 Desember 2012.

113 Wawancara dengan penggiat kerja sama antar umat beragama Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

tidak mengembalikan [kebersamaan] masyarakat, ini juga bisa menjadi potensi konflik.”<sup>114</sup>

Faktor terakhir yang sering kali juga dianggap dapat memecah-belah komunitas adalah tumbuhnya radikalisme dan kuatnya simbolisasi agama di Ambon. Radikalisasi pemahaman keagamaan seperti ini cenderung berlawanan dengan pemahaman lain yang menjadi faktor pemersatu masyarakat Ambon, yaitu pluralisme dan multikulturalisme.

Kalau di Maluku yang kita kritik adalah [pandangan] bahwa kita belum menjadi Islam kalau belum menjadi Arab. Begitu juga orang Kristen, merasa belum menjadi Kristen kalau belum menjadi orang Belanda atau menjadi orang Barat. Dan itu benturan identitasnya sudah sangat hebat. Islam kultural itu sudah mulai tergeser... Simbol-simbol itu begitu kuat. Yang satu sangat menonjolkan jilbabnya dan yang lain menonjolkan *shalom*-nya. Itu seperti *hitting religion*, “Ini agamaku dan itu agamamu, mari kita bertarung mana yang lebih kuat!” Wilayah Islam itu, satu dinamakan wilayah PLO dan [yang Kristen] wilayah Israel. Kalau kamu masuk ke wilayah Islam, selalu ada tulisan selamat datang di wilayah PLO. Dan itu banyak terjadi sebelum konflik.<sup>115</sup>

Arabisasi Islam dan Westernisasi Kristen bukan hanya menghilangkan kultur keagamaan tradisional masyarakat Ambon, tetapi juga menyebabkan bentrokan identitas di antara kedua komunitas kian menajam. Arabisasi dan Westernisasi kedua agama tersebut sangat terlihat dari semakin menguatnya penggunaan dan pengeksposan simbol-simbol keagamaan dalam ranah publik. Akibatnya, keberagaman secara kultural masyarakat Maluku menjadi terpinggirkan, potensi konflik pun semakin menguat. Apalagi jika diikuti dengan kompetisi penguatan simbol-simbol keagamaan di ruang-ruang publik.

---

114 Wawancara dengan aktivis HAM Ambon, Ambon 14 Desember 2012.

115 Wawancara dengan penggiat kerja sama antar umat beragama Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

# Segregasi, Kekerasan, dan Peran Aparat Keamanan serta Kepemimpinan Pasca-Konflik

## A. SEGREGASI DAN MUNCULNYA KEKERASAN PASCA-KONFLIK

### 1. LATAR BELAKANG SEGREGASI

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, satu fakta yang dianggap telah menjadi pengetahuan umum adalah bahwa Maluku, termasuk Ambon, secara historis memang merupakan daerah yang tersegregasi. Secara etno-religius, ada kelompok Protestan dan Katolik Belanda, kelompok Kristen dan Katolik Maluku asli, kelompok Cina, kelompok Arab, kelompok Islam Maluku asli, dan kelompok Islam pendatang dari daerah lain di Indonesia. Secara geografis kelompok-kelompok ini ikut tersegregasi dan bermukim di daerah di mana mereka sama secara etnis dan religius. Akhirnya, pembentukan desa dengan identifikasi kelompok agama tertentu menjadi bagian yang tak terelakkan dan diterima sebagai sebuah keniscayaan, sehingga desa-desa Muslim dan desa-desa Kristen bertebaran di wilayah Ambon.<sup>1</sup> Di bawah ini adalah visualisasi segregasi Kota Ambon dalam bentuk peta. Angka yang merepresentasikan warna masing-masing merupakan *range* jumlah penduduk Islam atau Kristen yang tinggal di daerah tersebut. Semakin kuat kedua warna tersebut (hijau dan merah), tampak semakin padat dan terkonsentrasi penduduk kedua komunitas dalam wilayah/desa tersebut (lihat Figur 24 hal 143).

Segregasi spasial ini diperparah oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memberikan akses pendidikan hanya kepada kelompok Kristen dan Katolik Maluku. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan tenaga-tenaga pegawai negeri lokal guna membantu pekerjaan admi-

---

1 Wawancara dengan Wali Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

nistrasi dan keamanan. Dari sini lahirlah kelas *ambtenaar*, di mana kelompok Kristen dan Katolik Maluku asli identik dengan profesi pegawai negeri dan tentara.<sup>2</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa sebenarnya banyak juga tokoh Muslim yang saat itu mendapatkan pendidikan dari Belanda, misalnya Abdullah Solisa (Opa Dullah). Selain itu, banyak Muslim juga cenderung menghindari pendidikan Belanda karena kurikulumnya tidak memuat pendidikan agama dan bahasa Arab. Namun demikian, kondisi tersebut berbalik pada masa penjajahan Jepang, di mana komunitas Muslim lebih banyak mendapat keistimewaan.<sup>3</sup>

Di masa kolonial Belanda kelompok non-Protestan dan non-Katolik di Maluku tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Akibatnya, segregasi sosial menjadi konsekuensinya karena akses terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kolonial lebih banyak ditujukan kepada keluarga-keluarga *ambtenaar*. Warisan dari kelas *ambtenaar* ini menyebabkan konsekuensi tersendiri pada pilihan pekerjaan, meskipun Maluku sudah menjadi bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran kalau orang Kristen hanya mau bekerja di sektor formal saja, khususnya pegawai negeri sipil.<sup>4</sup>

Seusai masa revolusi kemerdekaan Indonesia, sejumlah anggota kelompok Kristen dan Katolik yang berafiliasi kepada Belanda bermigrasi ke Belanda. Namun demikian, komunitas yang tersegregasi secara sosio-spasial tetap bertahan. Kontrak sosial antar-komunitas pun terjadi, di mana nilai-nilai persaudaraan *Pela Gandong* menjadi norma yang menyatukan identitas mereka sebagai orang Maluku. Menurut seorang responden:

Sebelum konflik, pemukiman di Maluku ini memang sudah terpisah, tidak ada yang bercampur. Jadi, misalnya Desa Tial, Tulehu, Tengah-Tengah, Waai. Ada campuran itu di kota-kota. Pada masa [kolonial] Belanda itu, bagi yang mau masuk Kristen, mereka terpisah sendiri, misalnya di Waai atau Hulaliu.... Sejak dulu seperti itu, sedangkan di kota bercampur.<sup>5</sup>

Secara administratif, beberapa peraturan pemerintah semakin memperl lemah ketahanan kultural masyarakat Maluku, seperti Undang-Un-

2 Wawancara dengan penggiat kerja sama antar-umat beragama Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

3 Wawancara dengan kepala Litbang GPM, Ambon, 5 September 2013.

4 Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

5 Wawancara dengan seorang tokoh organisasi Islam Maluku, Ambon, 17 Desember 2012.

dang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Meskipun isinya mengakomodasi dan mengindahkan keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku, pada praktiknya UU tersebut dianggap menghancurkan keanekaragaman karena penekanannya pada penyeragaman sistem desa.<sup>6</sup> Akibatnya, masyarakat dengan sistem negeri di bawah raja-raja secara administratif tidak lagi mendapat ruang yang luas sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka di mata masyarakat sebelum UU tersebut diterbitkan.<sup>7</sup>

Segregasi damai tanpa kekerasan yang sudah berakar, di mana masyarakat antar-komunitas hidup berdampingan,<sup>8</sup> akhirnya mengarah ke hal yang destruktif ketika konflik besar terjadi di Maluku tahun 1999-2003. Komunitas-komunitas memperkuat identitas etno-religius mereka, terutama saat pihak-pihak luar Maluku juga terlibat dalam konflik kekerasan tersebut. Konflik besar ini berimbas hampir ke seluruh segi kehidupan dan mengubah tatanan kehidupan masyarakat Maluku, baik yang berlatar Islam maupun Kristen. Sebelum konflik, semua komunitas saling percaya. Namun kemudian, konflik mengubah itu semua dan menyebabkan meluasnya ketidakpercayaan antarkelompok.<sup>9</sup>

Setelah Perjanjian Damai Malino ditandatangani, perdamaian negatif<sup>10</sup> dapat terjadi meskipun komunikasi dan interaksi antarkelompok masih belum dilakukan secara intensif.<sup>11</sup> Seiring berjalannya waktu, interaksi antarkelompok mulai intensif dan kepercayaan mulai dibangun kembali dengan memanfaatkan momen hari besar atau aktivitas reguler keagamaan.<sup>12</sup> Di samping itu, dalam aktivitas sehari-hari, seperti

---

6 Wawancara dengan seorang penggiat kerja sama antar umat beragama Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

7 Padahal apabila dilihat dari pengalaman konflik, para anggota kelompok di negeri-negeri biasanya akan kembali kalau mereka memiliki petuanan. Akibatnya, walaupun beberapa kali mengalami konflik di mana harta dan rumah mereka dibakar beberapa kali, mereka tetap akan kembali karena itu merupakan negeri adat mereka.

8 Wawancara dengan aktivis HAM Maluku, Ambon, 12 Desember 2012, dan dengan salah satu penggiat perdamaian di Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

9 Wawancara dengan salah satu aktivis pemberdayaan pengungsi di Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

10 Konsep perdamaian "Negatif" ini merujuk pada gagasan Galtung (1972), yang berarti perdamaian hanya sebatas absennya kekerasan.

11 Wawancara dengan salah satu pengungsi di Waringin akibat kerusakan 11 September 2011, Ambon, 15 Desember 2012.

12 Wawancara dengan salah satu Pengungsi di Waringin akibat kerusakan 11 September 2011, Ambon, 12 Desember 2012.

dalam kegiatan ekonomi, mereka sudah berbaur.<sup>13</sup> Kendati demikian, kekerasan pasca-konflik masih kerap terjadi. Hal ini diperburuk oleh tidak tuntasnya pengungkapan kasus-kasus kekerasan oleh pihak berwenang. Menurut seorang responden:

... menurut saya, persoalan itu bukan [konflik] Islam–Kristen, tetapi hanya [ulah] oknum. Tetapi karena pengungkapannya tidak tuntas, akhirnya digeneralisir. Orang berpikir bahwa kalau kejadiannya menimpa orang Islam, maka [orang] Kristen yang bikin [ulah]. Kalau kejadiannya di Kristen, [...] yang melakukannya jangan-jangan Muslim. Itu terjadi karena kejadian itu tidak terungkap. Mau dibilang kriminal murni; lalu pelakunya siapa? Mungkin itu jadi masalah bagi masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. SEGREGASI PASCA-KONFLIK DAN KEKERASAN YANG MUNCUL

Mengingat segregasi menjadi lebih kuat saat dan pasca-konflik, keadaan ini membuat kekerasan rentan terjadi. Seperti dijelaskan di atas, pengalaman di masa konflik terulang kembali saat kekerasan antar-komunitas terjadi lagi. Seorang responden menyatakan:

Tapi saat konflik dulu, komunitas Muslim memang tidak keluar dan tetap bertahan di situ, dan mereka membuat suatu kekuatan di situ (Air Salobar). Jadi, mereka itu berada di tengah-tengah komunitas Kristen. Ketika konflik terjadi orang-orang Kristen yang mau melintasi Air Salobar itu harus melintasi jalur laut melalui *speed boat* untuk ke wilayah Kristen yang bersebelahan dengan Air Salobar. Untuk orang-orang Air Salobar yang tidak keluar, jika mereka ingin ke dalam kota, seperti ke Masjid Al Fatah itu, juga harus melalui laut dengan *speed boat* karena tidak bisa melintasi daerah tetangga mereka yang Kristen. Nah, ketika konflik-konflik terjadi, seperti [konflik] 11 September [2011] itu juga kondisinya seperti kondisi saat konflik '99 dulu. Saat itu (11 September 2011) perbatasan itu dijaga oleh TNI. Jadi, orang Muslim di Air Salobar harus menggunakan *speed boat* untuk ke belakang Masjid Al Fatah, sedangkan orang Kristen di Amahusu juga harus menggunakan *speed boat* untuk ke daerah Benteng situ. Atau mereka harus memutar ke belakang gunung sana untuk menuju ke dalam kota Ambon sini.<sup>15</sup>

Sementara itu, kekerasan yang terjadi pasca-konflik didorong oleh adanya beberapa persoalan yang muncul kemudian. Misalnya, pemba-

13 Wawancara dengan pejabat bidang kesehatan Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

14 Wawancara dengan seorang lurah di Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

15 Wawancara dengan salah satu penggiat perdamaian di Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

ngunan yang tidak merata antara daerah satu komunitas dengan komunitas lain.<sup>16</sup> Oleh karena itu, tidak dapat dihindarkan adanya tuntutan untuk mendapatkan perlakuan yang sama, misalnya pembangunan fasilitas untuk satu komunitas harus diiringi dengan pembangunan fasilitas serupa untuk komunitas lain. Apabila tidak diperhatikan, maka masalah seperti ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan.<sup>17</sup> Lebih lanjut, di Kota Ambon sendiri ada wilayah persinggungan yang dapat menimbulkan konflik, terutama di daerah yang penduduknya secara etnis sudah heterogen, seperti Batu Merah, sehingga potensi konflik sulit dideteksi.<sup>18</sup>

Sekali lagi, menguatnya segregasi pasca-konflik telah menyumbang dan memainkan peran tertentu dalam memunculkan kasus-kasus kekerasan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak insiden kekerasan pasca-konflik terjadi di daerah-daerah perbatasan di antara wilayah komunitas Islam dan Kristen. Berikut peta yang menunjukkan keterkaitan antara segregasi dan insiden kekerasan yang muncul pasca-konflik.

Menurut para responden, ada beberapa hal yang dapat memicu timbulnya kekerasan. *Pertama*, adanya intervensi dari luar yang mengadu domba masyarakat.<sup>19</sup> Provokasi oleh pihak-pihak luar sering kali dapat memicu terjadinya kekerasan. Meskipun demikian, berkat jalinan komunikasi yang dibangun, dalam beberapa kasus upaya-upaya provokasi ini dapat ditangani.

*Kedua*, hubungan antara masyarakat lokal dengan pendatang yang kurang harmonis, terutama di daerah urban. Seorang responden menyatakan:

Yang [jadi] persoalan memang di daerah urban karena... penduduknya sudah bercampur,... bukan asli lagi orang Ambon. Kalau kita sesama orang Ambon sudah tidak ada masalah lagi. Tapi memang pendatang, baik itu dari sekitar Provinsi Maluku atau dari luar, [yang masih bermasalah]. Di pusat-pusat kota, seperti Sirimau, Nusaniwe, [itu banyak pendatangnya]. Seperti kita lihat di Batu Merah, itu juga sudah bercampur.<sup>20</sup>

16 Wawancara dengan salah satu imam di Wayame, Ambon, 14 Desember 2012.

17 Wawancara dengan salah satu anggota Tim 20 Wayame, Ambon, 14 Desember 2012.

18 Wawancara dengan seorang tokoh Kristen Kota Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

19 Wawancara dengan pejabat bidang perencanaan pembangunan Kota Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

20 Ibid.



Upaya untuk melindungi kepentingan masing-masing, baik sosial, ekonomi, maupun politik, dapat menyebabkan terjadi benturan antara kelompok.

*Ketiga*, kecurigaan yang terus dipelihara terhadap kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini dalam beberapa kasus langsung menimbulkan kekerasan tanpa upaya terlebih dahulu untuk mengklarifikasi kebenaran sebuah kabar. Salah seorang responden menyatakan:

Jadi, hubungan di sana (Waringin) memang sudah saling curiga, tidak seperti yang dulu lagi. Karena yang Muslim beranggapan bahwa orang Kristen yang membakar rumah. Harus, memang itu difasilitasi juga. Ibu-ibu di sana juga sudah mengusulkan adanya dialog di antara mereka agar ada ketahanan diri dan rasa keamanan serta komunikasi atau interaksi.<sup>21</sup>

*Keempat*, masalah perbatasan yang masih menyimpan potensi kekerasan. Salah seorang responden menyatakan:

Perbatasan ya tetap perbatasan dan sudah sering ribut. Hanya disentuh sedikit saja, langsung ribut ulang. Apalagi bukan hanya korban harta benda, tapi juga korban nyawa. Yang melakukan pembakaran bukan saja [warga] yang [tinggal] di situ, tapi juga sesama Muslim dari luar.<sup>22</sup>

*Kelima*, mudahnya massa dimobilisasi. Dalam beberapa kasus, mobilisasi massa yang mudah dapat meningkatkan potensi kekerasan meskipun massa tidak terlalu paha apa penyebab sesuatu kejadian. Hal ini merupakan efek dari segregasi; meskipun akhir-akhir ini, dengan semakin menguatnya ketahanan masyarakat, proses mobilisasi menjadi sangat terukur sehingga konflik tidak menyebar ke wilayah-wilayah lain.<sup>23</sup>

### 3. PERISTIWA KEKERASAN PASCA-KONFLIK

Secara umum, kekerasan terjadi beberapa kali di Ambon pasca-konflik. Di antara kekerasan tersebut, ada tiga peristiwa kekerasan besar yang menyebabkan tingginya korban dan kerusakan, yaitu kekerasan pada 25 April 2004, 11 September 2011, dan 15 Mei 2012. Namun

---

21 Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012.

22 Wawancara dengan seorang pengungsi Kristen Mardika, korban dari Kerusuhan 11 September 2011, Ambon, 14 Desember 2012.

23 Wawancara dengan seorang tokoh gereja Kristen Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

demikian, penjelasan ringkas hanya akan diberikan terhadap dua kasus terakhir dengan mempertimbangkan aktualitasnya.

*a. Peristiwa 11 September 2011*

Kekerasan antar-kelompok yang terjadi pada 11 September 2011 dipicu oleh kesalahpahaman. Menurut laporan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ambon dan Pulau-Pulau Lease, peristiwa berawal dari kematian Darwis Saiman, penarik ojek warga Waihaong. Lebih lanjut dilaporkan bahwa:

Darwis mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Gunung Nona pada Sabtu malam dan ditolong keluarga Tatuhey yang membawanya ke rumah sakit, namun korban meninggal dalam perjalanan.<sup>24</sup>

Kejadian tersebut sesuai dengan kronologi peristiwa yang dilaporkan oleh pihak Markas Besar Kepolisian.<sup>25</sup>

Kematian Darwis kemudian memunculkan kecurigaan dan dugaan di antara kelompok masyarakat bahwa korban yang merupakan seorang Muslim dibunuh oleh orang-orang Kristen. Akibat adanya dugaan dan kecurigaan ini, kekerasan pun pecah di antara kelompok Muslim dan Kristen. Menurut laporan pihak kepolisian, dalam insiden tersebut 3 orang meninggal dunia,<sup>26</sup> 24 orang luka berat, dan 65 orang luka ringan.<sup>27</sup> Laporan lain juga menyebutkan, rumah-rumah warga di daerah Waringin dan Mardika dibakar.<sup>28</sup> Terkait pembakaran rumah-rumah milik warga ini, seorang responden menerangkan:

Mardika itu seperti *katong* bilang “sumbu,” setiap kali konflik selalu terbakar. Kalau komunitas Muslim di tempat lain terbakar dan tidak bisa dibalas di situ, maka pembalasannya di Mardika supaya berim-

---

24 Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Marinus Djati Antara.com, 11 September 2011 (<http://www.antaranews.com/berita/275130/gubernur-maluku-pastikan-ambon-sudah-tenang>).

25 Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, 11 September 2011 (<http://regional.kompas.com/read/2011/09/11/19145665/Kronologi.Kerusuhan.Ambon>).

26 Kemudian dilaporkan menjadi tujuh orang tewas (<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2011-09-14/korban-tewas-kerusuhan-ambon-menjadi-7-orang/93306>).

27 Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Anton Bachrul Alam, 12 September 2011 (<http://news.okezone.com/read/2011/09/12/340/501602/korban-kerusuhan-ambon-tewas-akibat-luka-tembak>).

28 <http://news.okezone.com/read/2011/09/12/340/501614/seratusan-rumah-hangus-warga-ambon-mengungsi>; dan wawancara dengan seorang lurah, 15 Mei 2013.

bang. Mardika ini sama dengan Waringin, sama-sama perbatasan. Bila terjadi bentrok di mana saja, maka dua lokasi ini menjadi tempat pembalasan.<sup>29</sup>

Menurut salah seorang responden yang merupakan pejabat tingkat kelurahan, beberapa langkah penanganan dilakukan oleh berbagai pihak terkait:

Waktu itu kejadiannya malam, di sini. Pada tanggal 12 kita tidak bisa masuk, lalu kita [adakan] pertemuan dengan gubernur dan seluruh *stakeholder*, baik kota dan provinsi. Kemudian tanggal 13 saya masuk, padahal mereka paling benci orang Kudamati karena selalu jadi sorotan.<sup>30</sup>

Dari segi penanganan dan pencegahan kekerasan pasca-konflik 11 September 2011, seorang responden menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan:

Setelah kerusuhan 11 September 2011, kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Biar setelah kerusuhan, komunitasnya tetap campur. Sebenarnya di dalam tidak ada masalah. Mungkin pada saat konflik saja masing-masing kembali ke komunitasnya. Biasanya masalahnya dari luar. Terakhir yang kita lakukan adalah pembangunan pos permanen. Selama ini memang ada pos-pos BKO, tetapi pakai rumah penduduk. Tetapi karena sudah empat kali kejadian, ada keresahan dari masyarakat juga. Polres sebenarnya dekat, [tapi] pada konflik kemarin ada ketidakpercayaan masyarakat kepada Polres sehingga yang terjadi sekarang adalah [dibutuhkannya] pos TNI. Setelah kejadian 11 September sudah ada pos permanen. Jadi, sekarang sudah mulai ada rasa aman.

#### *b. Peristiwa 15 Mei 2012*

Kekerasan pada 15 Mei 2012 terjadi saat peringatan Hari Pahlawan Nasional Thomas Matulesy alias Pattimura. Bentrokan terjadi sekitar pukul 05.30 WIT.<sup>31</sup> Peristiwa ini bermula ketika warga Desa Batu Merah secara estafet membawa obor dari tempat pembakaran obor di Saniri, Desa Tuhahan, Saparua, Maluku Tengah, ke Kota Ambon. Namun, satu kilometer dari perbatasan Desa Batu Merah–Mardika, sekelompok pemuda Mardika mencegat rombongan pembawa obor

29 Wawancara dengan Pengungsi Kristen Mardika menyoal kerusuhan 11 September 2011.

30 Wawancara dengan seorang lurah, 15 Mei 2013.

31 Laporan Merdeka.com (<http://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-rumah-dibakar-dalam-kerusuhan-di-ambon.html>)

dan meminta mereka supaya menyerahkan obor itu untuk dibawa oleh para pemuda Mardika ke Pattimura Park. Peristiwa pencegahan ini akhirnya berujung pada kekerasan antarkelompok pemuda,<sup>32</sup> yang mengakibatkan 3 rumah dan 5 sepeda motor terbakar.<sup>33</sup> Menurut laporan Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kekerasan tersebut mengakibatkan 34 orang harus dirawat inap dan 44 dirawat jalan.<sup>34</sup>

Menurut seorang responden, kekerasan 15 Mei 2012 menyiratkan beberapa masalah yang masih belum terselesaikan di masyarakat:

... memang ada persoalan yang tidak tuntas di masyarakat tentang konteks sejarah, karena ada perbedaan antara sejarah tertulis dengan sejarah tutur di masyarakat. Pemerintah tidak menyelesaikan secara tuntas, sehingga ini terus berlarut-larut di masyarakat.... Soal klaim apakah Pattimura itu Kristen atau Islam. Selama ini kan wacana-wacana pelurusan sejarah ini selalu diabaikan oleh pemerintah.<sup>35</sup>

Persoalan sejarah yang tidak tuntas ini, bersama dengan masalah sosial lain antara kelompok masyarakat Ambon pasca-konflik besar, dapat menjadi pemicu munculnya kekerasan antarkelompok. Peristiwa serupa juga pernah terjadi sebelumnya di antara dua kelompok lain, namun tidak berujung pada kekerasan.

Memang ada info dari teman-teman bahwa Mardika mau ambil obor. Itu dari dulu. Pernah, Suli tidak mau berikan obor kepada Passo dan suruh Passo mundur, tapi Passo tidak mau. Raja Passo berkata: "*Ngapa-in* saya harus mundur? Tapi kalau Suli mau bawa obor sampai Ambon silakan saja, tapi tidak ada satu orang pun yang pulang." Itu *kan* kacau juga. Mau tidak mau obor harus diserahkan. Setiap tahun begitu masalahnya.<sup>36</sup>

Seperti juga peristiwa kekerasan sebelumnya, beberapa pihak menilai bahwa kekerasan tersebut merupakan buah rekayasa pihak tertentu

---

32 Laporan Tempo.co (<http://www.tempo.co/read/news/2012/05/15/058403959/Sekelompok-Pemuda-Dicegat-Kota-Ambon-Tegang>)

33 Kabid Humas Polda Maluku AKBP Johanis Huwae (<http://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-rumah-dibakar-dalam-kerusuhan-di-ambon.html>).

34 <http://penanggulangankrisis.depkes.go.id/article/view/6/1630/KONFLIK-SOSIAL-DI-DE-LI-SERDANG.htm>.

35 Wawancara dengan seorang aktivis Perdamaian, Ambon, 15 Mei 2013.

36 Wawancara dengan seorang lurah, 15 Mei 2013.

yang memiliki agenda untuk membuat Ambon tidak aman. Seorang responden menyatakan:

Peristiwa itu sengaja dimainkan oleh orang-orang tertentu; bahwa orang Mardika mau ambil obor itu. Konotasinya, Mardika itu Kristen dan Batu Merah itu Muslim. Sejak saya kecil obor itu masuk di kota Ambon tidak pernah orang Mardika yang bawa, tapi obor dibawa masuk kota oleh [orang] Batu Merah. Bukan saja karena desa adat, tapi petuahnya sudah ada, obor dibawa dari Tulehu sampai Ambon melewati desa apa itu, dia (orang Batu Merah) yang bawa.... Tidak ada juga informasi dari *stakeholder* lain, tentara dan polisi, tentang kejadian itu. Ini kan dimainkan oleh pihak tertentu. Yang bisa tahu hanya intel. Kalau kita tak mungkin tahu. Sebetulnya, bukannya kacau di Batu Merah atau Mardika, tetapi di Galala dan Hatiwe Kecil sana. Ketika polisi semua lari ke sana, maka kacaunya di sini.<sup>37</sup>

### *c. Tanggapan atas Kedua Peristiwa Kekerasan*

Menanggapi kedua kejadian kekerasan di atas, seorang responden menyatakan kecurigaannya bahwa semua itu direkayasa supaya terjadi. Menurutnya:

Itu ada kelompok yang bermain, tapi mesti dibuktikan keberadaan mereka saat itu. Seperti pasca-11 September, terjadi beberapa kali pelemparan bom di beberapa tempat. Itu juga ada kelompok yang bermain. Kemudian juga pelemparan granat di Hari Pattimura 15 Mei. [Ketika] orangnya ditangkap, baru ketahuan bahwa kelompok Wakano–Manuputy yang ditangkap di Latu–Hualoy itu yang bermain. Mereka itu produk dari Poso. Dan ada juga kelompok yang lain lagi. Selain itu juga, diseminasi informasi dengan rumus rotasi dan lain-lain menjadi bagian dari faktor segregasi.<sup>38</sup>

Kecurigaan di atas juga didukung oleh pendapat beberapa responden yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut merupakan rekayasa kelompok luar yang ingin membuat Ambon terlihat tidak aman. Hal ini, menurut seorang responden, dapat dilihat dari tindakan dan motif ekonomi yang dilakukan sekelompok orang agar konflik tetap terpelihara:

---

37 Wawancara dengan seorang lurah, 15 Mei 2013.

38 Wawancara dengan tokoh gereja Kristen Maluku, 13 Desember 2012.

... seperti beredar foto yang sengaja disebar agar bisa konflik lagi. Orang bisa menggunakan konflik sebagai lahan bisnis... [...] Imbasnya adalah masyarakat.<sup>39</sup>

Kedua kasus di atas juga menunjukkan bahwa Ambon masih rentan terhadap timbulnya kekerasan yang kadang-kadang dipicu oleh berita yang tidak jelas dan persoalan kecil antarkelompok yang kemudian bereskalasi menjadi peristiwa kekerasan besar yang memakan korban jiwa dan harta.

## B. PERAN APARAT KEAMANAN DALAM MENANGANI KEKERASAN PASCA-KONFLIK

### 1. PERAN APARAT DALAM KERUSUHAN 11 SEPTEMBER 2011

Meskipun aparat keamanan telah berjaga, namun kebakaran tetap saja terjadi di Waringin. Beberapa anggota masyarakat sudah melaporkan pembakaran dan secara proaktif meminta pengamanan dari pihak keamanan, tapi tidak segera direspons.<sup>40</sup> Berikut kesaksian salah seorang responden:

Dekat [desa] Air Mata Cina. Semua itu lokasinya sama. Itu dekat Polres; mulai dari situ Waringin terbakar. Sebelum itu sudah ada ibu-ibu yang minta bantuan ke Polres untuk melakukan pengamanan, tapi tidak dilakukan. Alasannya, semua pasukan sudah dikirim ke SBB untuk pengamanan pelantikan bupati. Di situ ada mes tentara, mereka juga minta [pengamanan], tetapi jawabannya: belum ada koordinasi. *Range* waktu antara siang habis zuhur, sampai jam 4 terbakar, jam 6 baru pasukan turun. Itu sudah selesai [kerusuhan]. Malamnya Mardika. Ada salah satu teman, namanya Stanley, sampai dengan rumahnya terbakar, dia masih menelepon kita. Dia pergi ke Polda berkali-kali, meminta pengamanan karena Waringin sudah terbakar. Kebiasaan kan kedua tempat ini saja yang dijadikan sasaran. Berkali-kali dia minta, tetapi tidak ada aparat yang datang. Sampai subuh [masih] terbakar.<sup>41</sup>

Tidak adanya respons dari aparat keamanan terkait kekerasan dan pembakaran yang dilakukan sekelompok orang membuat masyarakat tidak percaya terhadap aparat. Ironisnya, lokasi pembakaran dekat

39 Wawancara seorang anggota Tim 20 Desa Wayame, 13 Desember 2012

40 Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012; dan dengan salah satu pengungsi Waringin Muslim, Ambon, 12 Desember 2012.

41 Wawancara dengan aktivis HAM Maluku, Ambon, 14 Desember 2012.

sekali dengan kantor Polres sehingga memunculkan persepsi di masyarakat bahwa ada atau tidaknya aparat tidak berkontribusi apa-apa terhadap pencegahan kekerasan. Di samping itu, muncul pula tuduhan adanya pembiaran atas kekerasan tersebut, entah dengan tidak bekerjanya pihak intelijen atau memang aparat tidak melakukan tindakan apa-apa.<sup>42</sup>

Menurut beberapa responden, alasan yang dikemukakan pihak aparat kepada masyarakat atas kelambanan mereka adalah karena perlunya proses koordinasi di antara pihak-pihak penjaga keamanan. Koordinasi mereka memakan waktu lama dan akhirnya banyak merugikan masyarakat, karena pada saat aparat keamanan datang keadaan sudah terlambat, korban sudah jatuh, harta benda pun sudah dirusak.<sup>43</sup> Dalam beberapa kasus para anggota keamanan bahkan banyak yang meninggalkan pos penjagaan justru di saat kekerasan mulai pecah.<sup>44</sup>

Tidak heran jika kemudian banyak pihak yang menyalahkan aparat keamanan atas terjadinya kekerasan. Seorang pejabat Pemerintah Kota Ambon, misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa kesalahan besar ada di pihak Kepolisian sehingga insiden 11 September 2011 terjadi.<sup>45</sup> Hal ini terlihat dari perbedaan antara pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dengan fakta yang dipegang oleh masyarakat, misalnya tentang penyebab kematian seorang korban kekerasan.<sup>46</sup> Oleh karena itu, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan—dalam hal ini Kepolisian—pun tak dapat dihindari.<sup>47</sup> Faktor lain yang membuat rendah kepercayaan masyarakat adalah kekeliruan pihak kepolisian dalam melakukan upaya-upaya antisipasi kekerasan. Hal ini terjadi karena Polda dianggap tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang anatomi konflik Ambon sehingga tidak dapat mengidentifikasi daerah mana yang sangat rawan kekerasan dan harus

---

42 Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012; dengan tokoh gereja Kristen Maluku, Ambon, 13 Desember 2012; dan dengan salah satu akademisi Ambon dan penggiat perdamaian, Ambon, 13 Desember 2012.

43 Wawancara dengan salah satu pengungsi Waringin Muslim, Ambon, 12 Desember 2012, dan dengan Pengungsi Kristen Mardika, korban dari Kerusuhan 11 September 2011, Ambon, 15 Desember 2012. 44 Wawancara dengan Pengungsi Kristen Mardika, korban dari Kerusuhan 11 September 2011, Ambon, 14 Desember 2012.

45 Wawancara dengan pejabat senior Pemerintah Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

46 Ibid.

47 Wawancara dengan salah satu pengungsi Waringin Muslim, Ambon, 13 Desember 2012.

disekat.<sup>48</sup> Di samping itu, aparat keamanan dinilai tidak mengambil tindakan efektif dalam mencegah kekerasan sebagaimana yang mereka lakukan pada masa konflik besar, seperti meminimalkan mobilisasi massa untuk mencegah terjadinya bentrok antar-kelompok.<sup>49</sup>

Meskipun terdapat banyak kritik atas respons aparat keamanan, tetap ada seorang responden yang memberikan apresiasi atas aksi tanggap cepat aparat dalam menyelesaikan kekerasan, apalagi mengingat Ambon adalah daerah pasca-konflik.<sup>50</sup> Antisipasi aparat keamanan yang cepat atas kekerasan dapat mengatasi persoalan-persoalan lama yang coba diungkit lagi oleh kelompok tertentu yang hendak mengobarkan konflik.<sup>51</sup>

## 2. PENUGASAN APARAT

Salah satu hal yang patut menjadi perhatian dalam penanganan kekerasan adalah adanya penerimaan terhadap pihak keamanan tertentu ketimbang pihak keamanan yang lain. Dalam beberapa kasus pihak kepolisian kurang diterima dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga TNI-lah yang akhirnya diterjunkan.<sup>52</sup> Ada anggapan di sebagian kalangan masyarakat bahwa TNI dapat bertindak cepat karena tanggapnya Panglima Daerah Militer terdahulu dalam menyikapi laporan masyarakat.<sup>53</sup>

Kendati demikian, dalam beberapa kasus pengiriman anggota-anggota TNI tidak dapat diterima karena masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) yang merupakan tugas kepolisian. Di samping itu, daerah mereka bukan daerah darurat militer sehingga keterlibatan TNI tidak dibenarkan.<sup>54</sup> Namun demikian, beberapa anggota masyarakat lain tidak menolak adanya BKO pihak TNI, karena hal ini dapat mengatasi masalah ketiadaan personel yang menjadi alasan pihak Kepolisian

---

48 Wawancara dengan salah satu pengungsi Waringin Muslim, Ambon, 13 Desember 2012.

49 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku, 15 Desember 2012; dan dengan tokoh gereja Kristen Maluku, , Ambon, 15 Desember 2012

50 Wawancara dengan tokoh organisasi pemuda, Ambon, 12 Desember 2012.

51 Wawancara dengan salah satu penggerak perdamaian, Ambon, 12 Desember 2012.

52 Wawancara dengan salah satu pengungsi Waringin Muslim, Ambon, 13 Desember 2012.

53 Ibid.

54 Wawancara dengan seorang lurah, Ambon, 12 Desember 2012.



tidak dapat merespons laporan masyarakat.<sup>55</sup> Berkenaan dengan BKO, salah seorang responden menyatakan:

Kalau BKO di sini dikomando dari Kodam. Di sini sudah terbagi sektor, jadi kalau ada konflik masing-masing [pasukan] sudah *stand by* di sektor masing-masing. BKO di Waringin itu menjaga sampai radius 500 meter saja. Di Talake juga cuma diamankan di sekitar situ saja. Sementara [daerah] di belakang Waringin diamankan Kavaleri. Kalau ada massa berkumpul *beta* (saya) hubungi RT, tokoh agama di situ, menanyakan massa itu dari mana. Kalau massa dari Waringin maka tokoh masyarakat, RT, turun. Tetapi kalau massa dari luar, maka dikasih keluar sama aparat di situ dengan koordinasi dengan tokoh dan RT di situ.

Penunjukan BKO dari TNI untuk pengamanan serta kerja sama dengan tokoh di tingkat rendah dianggap cukup efisien dalam mengatasi timbulnya masalah kekerasan. Meskipun mulai dipertanyakan keberadaannya, TNI yang di-BKO-kan masih tetap diperlukan untuk menanggapi persoalan keamanan mengingat cepatnya informasi beredar di masyarakat.<sup>56</sup> Sementara itu, Pangdam sendiri menyatakan bahwa BKO masih diperlukan karena beberapa alasan, yaitu (1) lokasi konflik berada di pulau terluar, (2) keberadaan aparat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, (3) adanya permintaan bupati atau pmda setempat, dan (4) agar prajurit bisa mengenal budaya lokal daerah lain.<sup>57</sup> Namun demikian, kehadiran BKO TNI justru menimbulkan kesan bahwa daerah tersebut masih belum aman.<sup>58</sup> Bahkan beberapa pihak sampai mempertanyakan keberadaan BKO karena menduga Kota Ambon memang dipersepsikan dan dikondisikan untuk tidak aman agar BKO tetap diperlukan.<sup>59</sup> Tuduhan adanya pengondisian ini dibantah oleh seorang pejabat militer di Ambon karena menurutnya keberadaan BKO di Ambon dan Maluku secara umum didasari amanat dan permintaan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>60</sup>

Meskipun keberadaan BKO masih dianggap perlu, salah seorang responden menyatakan:

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Wawancara dengan tokoh adat Latupati, Ambon, 14 Desember 2012.

<sup>57</sup> Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

<sup>58</sup> Wawancara dengan pengungsi Kristen Mardika, korban Kerusuhan 11 September 2011, Ambon, 14 Desember 2012.

<sup>59</sup> Wawancara dengan salah seorang pimpinan Unpatti, 16 Mei 2013.

<sup>60</sup> Wawancara dengan pejabat militer Maluku, 17 Mei 2013.

Pada saat bentrok itu tentara yang masuk, namun yang BKO, tapi ternyata walau dijaga ada juga rumah terbakar. Kami juga bisa bilang, aparat ini juga [punya] proyek atau bagaimana? Kita kan mau aman dan hidup, mengapa harus ribut terus? BKO selalu tidak bertindak dengan alasan belum ada perintah. Jadi, kalau ada ribut mereka *stand-by* saja. Tapi kalau sudah terbakar mereka masih tunggu komando, ya terbakar terus. Aparat BKO menyuruh kita mundur, tahu-tahu asap naik di sana, rumah kami terbakar. Maunya kita saat itu harus ada blokade atau pencegahan terhadap orang yang masuk. Itu terjadi bukan hanya malam, tapi terjadi juga di pagi hari terang. Kalau kami disuruh mundur, maka rumah kami ada yang rusak atau terbakar. Dan itu terjadi berulang-ulang pada 1999, 25 April 2004, 11 September 2011, dan 15 Mei 2012.<sup>61</sup>

Beberapa kritik secara umum juga dialamatkan kepada pihak TNI. Dalam beberapa kasus, aparat TNI dianggap tidak melakukan apa-apa ketika kekerasan terjadi. Menurut responden, para anggota TNI tersebut hanya memberikan himbauan dan membuat dokumentasi atas kekerasan yang terjadi. Dalam satu kasus diceritakan bagaimana para anggota TNI yang melewati daerah yang sedang dilanda kekerasan tertawa-tawa saat melihat anggota masyarakat lari menyelamatkan diri.<sup>62</sup> Kritik lain yang muncul berkenaan dengan keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan terhadap rumah warga sipil, seperti yang terjadi di Poka.<sup>63</sup> Munculnya pandangan-pandangan negatif ini tak lepas dari anggapan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan Ambon tidak tepat karena di Ambon tidak terdapat gerakan separatis bersenjata seperti di Papua, misalnya.<sup>64</sup>

### 3. KETERLIBATAN DAN KEBERPIHAKAN PARA APARAT

Tuduhan atas keterlibatan aparat dalam menyulut kekerasan cukup tersebar di antara anggota masyarakat dan memiliki sejarah panjang dalam dinamika konflik di Ambon. Beberapa studi akademis menunjukkan bahwa aparat keamanan dari kedua komunitas diindikasikan terlibat dan/atau memainkan peran tertentu dalam memperkeruh konflik komunal tersebut. Sayangnya, sampai saat ini masalah tersebut

---

61 Wawancara dengan Pengungsi Kristen Mardika, korban dari Kerusuhan 11 September 2011, Ambon, 14 Desember 2012.

62 Wawancara dengan salah satu pengungsi Waringin Muslim, Ambon, 13 Desember 2012.

63 Wawancara dengan aktivis HAM Maluku, Ambon, 14 Desember 2012.

64 Wawancara dengan salah satu aktivis pemberdayaan pengungsi Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

tidak pernah ditangani dan tidak pernah dijalankan proses hukum terhadap mereka yang terlibat.<sup>65</sup>

Kecurigaan masyarakat atas keterlibatan dan keberpihakan pihak keamanan dalam konflik dan kekerasan ini juga dilatarbelakangi oleh sejarah konflik dan kekerasan yang terjadi di Maluku. Seorang responden menyatakan:

Yang tentara datang saat konflik besar, terindikasi membantu yang Muslim. Yang Brimob datang, terindikasi membantu yang Kristen. Yang waktu [kerusuhan] lalu itu [demikianlah keadaannya]. Jadi, tidak heran kalau orang Kristen sangat benci TNI dan orang Muslim sangat benci Brimob.<sup>66</sup>

Klaim tersebut didukung oleh pernyataan seorang responden lain yang menyatakan bahwa dia lebih percaya kepada Brimob daripada TNI karena dia kebetulan berasal dari komunitas Kristen.<sup>67</sup> Beberapa responden yang berstatus pengungsi juga menyatakan dengan tegas, bahwa “[pada] setiap peristiwa di Mardika, aparat keamanan selalu memihak, polisi maupun tentara. Saat kejadian kami disuruh mundur sedang mereka dibiarkan maju.”<sup>68</sup>

Sebagai daerah pasca-konflik, Ambon merupakan daerah yang rawan kekerasan sehingga pengerahan pasukan menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Apabila pengerahan pasukan ini diorganisir dalam sebuah operasi, maka implikasi finansialnya nyata—setiap personel keamanan yang diturunkan akan mendapat tambahan penghasilan yang dananya diambil dari kas daerah. Demikianlah yang diyakini sebagian kalangan, sebagaimana seorang responden menyatakan:

Jadi seperti pengondisian... supaya ada operasi. Ada operasi [berarti] ada duit. Itu cara mencari duit di Ambon... [Seperti] Operasi Mutiara [untuk tujuan] pemulihan. Dari mulai April sampai Mei... Operasi Mutiara [itu diadakan, sehingga] ada helikopter di mana-mana. Karena, ada operasi ada duit. Lalu duit itu diambil dari uang daerah—daerah kan bayar untuk aparat... Tujuh miliar juga untuk Operasi Mutiara. Lalu anggota itu

---

65 Lihat Azca (2006); Suaedy (2000).

66 Wawancara dengan seorang pejabat senior Pemerintah Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

67 Wawancara dengan seorang penarik becak Kristen, 22 Mei 2013.

68 Wawancara dengan Pengungsi Kristen Mardika, korban Kerusuhan 11 September 2011, Ambon, 14 Desember 2012.

dapat 50 ribu saja, kali berapa anggota polisi. Kalau cuma untuk tanggal 25 April, ya sudah; habis uang daerah untuk bayar uang operasi saja.<sup>69</sup>

Dengan demikian, tidak mengherankan jika seorang pejabat di Ambon mengemukakan adanya anggapan bahwa pihak keamanan ingin konflik makin membesar untuk mencari keuntungan pribadi.<sup>70</sup> Keberadaan konflik dapat memberikan kesempatan kepada aparat keamanan untuk memperoleh keuntungan finansial melalui kegiatan-kegiatan pengawalan dan penyelamatan yang membutuhkan dana besar.<sup>71</sup> Motivasi pihak keamanan memelihara konflik untuk tujuan finansial ini menjadi keprihatinan semua pihak, karena hal ini pada akhirnya membebani keuangan daerah sehingga tidak dapat lagi membiayai kegiatan pembangunan pasca-konflik.<sup>72</sup>

#### 4. EVALUASI TERHADAP KINERJA APARAT DALAM PROSES PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS KEKERASAN

Salah satu hal yang menjadi sorotan masyarakat adalah kinerja aparat dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Ambon. Selama ini masyarakat hanya mendapat informasi bahwa sebuah kasus tengah diusut, namun tindak lanjut penyidikan yang berakhir di pengadilan hampir tidak pernah terjadi.<sup>73</sup> Menurut seorang responden, tidak tuntasnya pengusutan dikarenakan:

Katanya ada juga pertimbangan bahwa kalau [pelakunya] ditangkap, maka persoalan akan melebar. Tapi kalau tidak ditangkap, maka persoalan seperti ini akan terjadi terus karena tidak ada pelajaran. Padahal tindakan itu menyebabkan berapa banyak orang yang sengsara.<sup>74</sup>

Tidak selesainya pengungkapan kasus-kasus kekerasan disinyalir merupakan akibat dari keberpihakan aparat keamanan. Menurut salah seorang responden:

Pihak Polres juga pernah mengatakan, baru-baru ini, sangat sulit menyelesaikan konflik yang ada di Ambon. Karena mereka berpihak pada

---

69 Ibid.

70 Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

71 Wawancara dengan aktivis HAM Maluku, Ambon, 12 Desember 2012.

72 Wawancara dengan salah satu aktivis pemberdayaan pengungsi Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

73 Wawancara dengan tokoh organisasi Islam Maluku, Ambon, 17 Desember 2012.

74 Ibid.

salah satu komponen atau komunitas, baik Islam atau Kristen. Polisinya yang dianggap seperti itu oleh masyarakat. Karena kami pernah bertaunya kepada Polisi sebelum kejadian Waringin, seperti kasus Unpatti dan Batu Gantung, dan mereka jawab sulit untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus itu.<sup>75</sup>

Seorang responden lain juga menerangkan peran para aparat penegak hukum dan keamanan:

Ya kita mau bilang apa ya? Semua penyelesaian juga tidak jelas. Kalau saya mau bilang, penyelesaian seperti apa yang harus dilakukan? Kita itu sudah ketemu sama Dandim, Kapolres, dan juga Kapolda, [melaporkan] soal sopir Kudamati yang mati di sini itu. Kita kan juga dituduh; katanya masyarakat Waihaong yang bunuh itu sopir. Kalau memang benar pembunuhnya orang Waihaong, saya yang akan paling depan untuk membantu menyerahkan orangnya. Itu yang saya bilang pas pertemuan sama aparat. Saya bilang juga, "Bapak-Bapak kan punya intelijen banyak, saya persilakan masuk untuk cari tahu siapa yang bunuh." Tapi sampai sekarang buktinya apa? Tidak ada kan yang terungkap.... Saya kan pernah usul ke Kapolres pada saat masuk sini, saya bilang, "Kalau untuk normalisasi jalur, harus sangat hati-hati, Pak." Pas itu ada pernah kejadian angkot Kudamati masuk sini, langsung dikejar sama masyarakat di sini. Jadi memang harus hati-hati. Tapi *insyaallah* saya jamin, kebetulan kan sekarang Wakapolda-nya orang Waihaong, mungkin bisa, mungkin bisa buat normalisasi jalur itu.<sup>76</sup>

Dari perspektif pihak kepolisian sendiri, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan menemui banyak kendala. Untuk pencegahan, meskipun polisi sudah melakukan penyekatan terhadap arus massa, perkelahian antarkelompok tetap dapat membesar dan berakhir pada pembakaran. Hal ini sebagian disebabkan oleh trauma-trauma lama yang muncul kembali.<sup>77</sup> Untuk pengungkapan kasus-kasus kekerasan, seorang responden menyatakan:

Kalau soal melempar-lempar itu kan massa [yang melakukan]. Dari sisi hukumnya kan kita terkendala dengan pernyataan saksi. Biasanya saksi yang kita tanya itu nggak mau ngomong. Jadi kalau kasusnya terkait massa, kita biasanya pakai pasal yang terberat untuk menjeratnya, seperti apa

75 Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012.

76 Wawancara dengan salah satu sopir angkot Waihaong (Lin 3), Ambon, 15 Mei 2013.

77 Wawancara dengan seorang pejabat Polres Ambon dan P. Lease, 23 Mei 2013

yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Tapi kan yang kita butuhkan saksi, untuk [mengungkap] kasus yang melibatkan massa. Tapi kalau di sini memang orang-orangnya tidak mau terlibat kalau sudah berurusan dengan polisi. Jadi susah juga kan, [penyelesaiannya]? Kalau kasus-kasus seperti itu kan kedua belah pihak suka saling klaim bahwa dia yang salah, saya yang betul, atau sebaliknya. Atau saksi yang kita tanya sebenarnya ada di lokasi tapi pas kita tanya bilang nggak tahu. Memang kita harus melakukan upaya penekanan agar kasus itu bisa diproses. Memang baku lempar itu hal yang biasa kalau di Ambon sini, tapi kita memang lihat akibat yang ditimbulkan—apakah [kerugian] materi atau jiwa?—itu yang akan kita jerat.<sup>78</sup>

Responden tersebut menyatakan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengungkapan kasus-kasus kekerasan, terutama dalam memberikan kesaksian, sangat menyulitkan gerak para penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus tersebut, meski telah dilakukan pemeriksaan awal. Para penegak hukum sendiri sadar bahwa apabila mereka tidak melakukan upaya penyelidikan, mereka akan mendapat keluhan dari masyarakat.

Seperti kasus 11 September 2011, kan pelakunya massa. Tapi seperti saya bilang tadi, kita sebenarnya sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan awal, karena kan kita juga takut dikomplain tidak melakukan respons.... Kita sudah periksa beberapa saksi, tapi kebanyakan mereka bilang tidak tahu. Padahal kita juga mau memeriksa saksi-saksi di tempat yang mereka merasa aman, jika dibandingkan datang ke kantor polisi. Tapi itu tadi; mereka bilang tidak tahu dan saling menyalahkan antarpihak.<sup>79</sup>

Dari pernyataan para responden dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama antara aparat penegak hukum dan warga masyarakat mutlak diperlukan untuk pengungkapan kasus-kasus kekerasan. Namun kerja sama ini masih menemui banyak kendala. Oleh karena itu, pendekatan lebih intensif oleh lembaga penegak hukum agaknya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan.

##### 5. MASALAH PEMBANGUNAN POS PERBATASAN DAN TENTARA BKO

Terkait pembangunan daerah perbatasan, pembangunan pos-pos keamanan permanen di daerah-daerah tersebut juga menjadi agenda

---

78 Ibid.

79 Ibid.

penting. Pembangunan pos-pos keamanan di daerah perbatasan, yang selalu identik dengan kekerasan dan konflik tersebut, diharapkan dapat secara konsisten mencegah dan mereduksi potensi konflik. Namun lebih dari itu, jika benar-benar terjadinya kekerasan dan konflik di perbatasan ingin dicegah, pembangunan daerah tersebut sudah seharusnya tidak berfokus hanya pada aspek fasilitas publik dan pos keamanan semata, tetapi juga aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena, masalah ekonomi kerap menjadi salah satu bagian penting dari lingkaran akar konflik.<sup>80</sup> Kendati demikian, pembangunan pos-pos keamanan ini masih memunculkan perdebatan tersendiri di antara kelompok-kelompok masyarakat Ambon.

Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah perbatasan, misalnya Waringin, cenderung menginginkan adanya pos-pos permanen dengan beberapa tentara BKO di sana. Bahkan dalam konteks Waringin, masyarakat secara swadaya memperluas dan membangun pos tersebut. Lebih dari itu, mereka juga menegaskan bahwa mereka lebih menginginkan dan memercayai tentara BKO daripada polisi.<sup>81</sup> Kepercayaan lebih kepada tentara daripada polisi juga didapati pada penduduk Waihaong. Tentara dianggap lebih terorganisir, cepat, dan tanggap dalam menangani kasus-kasus kekerasan di Ambon.<sup>82</sup>

Namun demikian, dalam konteks kerusuhan 11 September 2011 sebagian masyarakat yang tinggal di Waringin justru berpandangan sebaliknya. Keberadaan BKO tidak memberikan banyak kontribusi—mereka hampir tak memberikan bantuan dan hanya melihat saja.<sup>83</sup> Ketika kekerasan itu pecah, Gubernur Maluku pun mengumpulkan segenap *stakeholder* dan memutuskan untuk membangun pos-pos di perbatasan. Namun demikian, terdapat beberapa masalah yang akan muncul jika pos-pos tersebut jadi dibangun. Pertama, masalah dana pembangunan untuk pos-pos tersebut. Kedua, pro dan kontra terkait pembangunan tersebut di antara elemen-elemen masyarakat. Ketiga, persoalan-persoalan terkait asal personel BKO yang mayoritas dari Jawa dan Sumatra.

---

80 Wawancara dengan salah satu pengungsi Kristen Mardika pada kerusuhan 11 September 2011, Ambon, 14 Desember 2012.

81 Wawancara dengan penduduk dan pedagang kaki lima di Waringin, Ambon, 20 Mei 2013.

82 Wawancara dengan pengojek dan pedagang kaki lima di Waihaong, Ambon, 15 Mei 2013.

83 Wawancara dengan salah satu mahasiswa dan aktivis di daerah perbatasan, Ambon, 14 Mei 2013.

Segmen masyarakat Ambon lainnya, khususnya akademisi, meyakini bahwa keberadaan tentara BKO tidak akan membuat kondisi Ambon aman dan kondusif, tetapi hanya akan menciptakan situasi kacau. Mereka berpandangan, masyarakat tidak membutuhkan tentara BKO, meski pihak militer merasa masyarakat masih membutuhkan keberadaan mereka. Tugas pengamanan seharusnya diberikan kepada polisi dan bukan tentara, yang lebih tepat diperuntukkan untuk kondisi perang. Selain itu, serupa dengan pandangan sebelumnya, tentara yang berasal dari luar Ambon juga acap dianggap membawa ajaran, ideologi, dan perilaku yang berbeda dengan masyarakat Ambon. Dengan kata lain, kekhawatiran-kekhawatiran ini pada dasarnya juga muncul karena banyaknya tentara yang tidak memahami karakter masyarakat Ambon.<sup>84</sup>

Adapun keberpihakan masyarakat kepada tentara BKO, sebagaimana dalam konteks Desa Waai, lebih dikarenakan kedekatan tentara BKO dengan masyarakat. Mereka cenderung membangun pos-posnya di tengah-tengah masyarakat, ikut membantu membangun rumah ibadah, gotong-royong, dsb. Sedangkan keberadaan kantor polisi relatif lebih jauh. Dalam kasus ini, persoalan terletak lebih pada pembangunan infrastruktur dan pendekatan para personel keamanan dalam menjalin keakraban dengan masyarakat.

Komnas HAM Maluku telah mengadakan semacam diskusi publik pada 2011 mengenai isu penambahan tentara BKO yang melibatkan hampir semua lapisan masyarakat. Kesimpulan diskusi tersebut menegaskan, sebagaimana yang disampaikan oleh ketuanya, Ot Lawalata, bahwa penambahan tentara BKO oleh Pemprov Maluku tidak dikehendaki oleh masyarakat karena keberadaan tentara BKO dianggap hanya akan membuat trauma masyarakat terpelihara. Selain itu, penambahan tentara BKO akan mengesankan bahwa Maluku tidak aman, nyaman, dan damai. Bukan hanya peserta diskusi tersebut, DPRD Maluku juga telah menyuarakan penolakannya terhadap penambahan tentara BKO. Bagi DPRD Maluku, penambahan tentara BKO akan membuat Maluku semakin menyeramkan.<sup>85</sup>

---

84 Wawancara dengan salah seorang pimpinan Unpatti, Ambon, 16 Mei 2013.

85 Siwalima.com., "Gubernur Diminta Batalkan Rencana Tambah TNI BKO," 11 Oktober 2011. Diambil dari [http://www.siwalimanews.com/post/gubernur\\_diminta\\_batalkan\\_rencana\\_tambah\\_tni\\_bko](http://www.siwalimanews.com/post/gubernur_diminta_batalkan_rencana_tambah_tni_bko), pada 25 November 2013.



### C. FAKTOR KEPEMIMPINAN, KERUKUNAN, DAN KEKERASAN PASCA-KONFLIK

Aspek kepemimpinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kerukunan dan mencegah kekerasan pasca-konflik. Secara umum, kepemimpinan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kepemimpinan tokoh agama, kepemimpinan tokoh pimpinan daerah, dan kepemimpinan tokoh adat.

#### 1. KEPEMIMPINAN TOKOH-TOKOH AGAMA

Partisipasi pemimpin agama dalam upaya menjaga kerukunan dan mencegah kekerasan pasca-konflik di Ambon merupakan sebuah keniscayaan, mengingat posisi mereka yang strategis di tengah masyarakat. Meskipun demikian, partisipasi tersebut masih belum dapat mencegah kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban.<sup>86</sup> Bagi komunitas Kristen, upaya pencegahan terhadap melebarnya kekerasan sangat terbantu oleh sentralitas pemimpin gereja terhadap umatnya. Seorang responden menyatakan:

Komando di kita kepada anak-anak masih bisa didengar. Saya berdialog dengan teman-teman Muslim, mereka punya keterbatasan ketokohan untuk menguasai [massa]... berbeda dengan kita. Beberapa kejadian itu bisa besar kalau kita tidak mengajak mereka untuk tidak terpancing, [dan] kita serahkan kepada proses hukum yang berlangsung. Misalnya 15 Mei, itu kan korban terbanyak dari pihak kita. Itu sebenarnya sudah ada reaksi besar, tapi kami bilang, "Jangan! Kalau kita terpancing maka kita kalah lagi dari seluruh proses yang telah kita lakukan. Orang yang bermain akan senang." [Pada] kejadian sopir angkot Kudamati yang ditikam itu, paginya sudah mau [ada] reaksi besar [dari komunitas Kristen]. Tapi kami bilang, "Kalau kita masuk, maka kita gagal lagi. Orang yang bermain akan senang sebab dia tahu cara pancingnya." Belum tentu orang Islam yang melakukan penikaman, belum tentu yang melempar bom itu orang Islam, tapi ada orang entah dia Kristen atau siapa yang dipakai dengan uang supaya kita bentur. Jumlah massa yang besar dari atas (daerah Kristen) saat 15 Mei itu [merupakan] reaksi saja—kadang-kadang hanya pergi lihat, lalu [tampak] seperti konsentrasi massa.<sup>87</sup>

86 Wawancara dengan seorang pengungsi Kristen Mardika, korban dari Kerusuhan 11 September 2011, Ambon, 14 Desember 2012.

87 Wawancara dengan tokoh gereja Kristen Maluku, Ambon, 17 Desember 2012.

Sentralitas peran pemimpin gereja menjadi sangat strategis karena dengannya, pimpinan Sinode dapat lebih efektif dalam menjalin komunikasi dengan massa ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan, misalnya, untuk merespons peristiwa kekerasan yang terjadi. Seorang responden menyatakan:

Pendeta dan majelis itu turun ke jemaat. Ini menurut pengalaman saya; pas ada konflik itu kita komunikasikan ke Ketua Gereja, “Pak, di sini ada kumpulan dan mobilisasi massa.” Nah, Ketua yang komunikasikan ke Sinode. Misalkan, “Pak, di sini ada pelemparan.” Itu yang biasa kita komunikasi. Kita jemaat tidak bisa komunikasi dengan aparat atau Kapolda atau Kapolres, jadi kita komunikasikan ke Ketua Majelis Jemaat atau Ketua Sinode GPM. Baru Ketua Sinode yang komunikasikan ke Kapolda, Pangdam, atau Danrem. Nah, pasca-11 September (2011) itu kan ada juga kejadian di Air Mata Cina di mana rumah-rumah saudara Muslim terbakar, kira-kira di bulan Oktober 2011. Nah, di situ kita komunikasikan langsung ke Ketua Gereja.<sup>88</sup>

Mengingat besarnya massa dan jemaat Kristen di Maluku yang berada di bawah koordinasi gereja, maka himbauan dari pimpinan gereja biasanya sangat berpengaruh.<sup>89</sup> Alasan kepatuhan ini didasari oleh dua hal; selain karena pendeta dipandang sebagai tokoh yang menyampaikan firman kepada jemaat, mereka juga senantiasa memberikan pelayanan kepada umat, misalnya dengan mengunjungi anggota jemaat yang tengah menghadapi masalah keluarga, mendoakan, dan memberi penguatan. Oleh karena itu, ketika seorang pendeta mengatakan sesuatu, perkataannya akan didengar dan diikuti jemaat.<sup>90</sup> Menurut klaim salah seorang responden, sebagai contoh, kalau saja pimpinan gereja tidak turun menenangkan massa pasca-bentrokan 15 Mei, maka konflik yang besar akan terjadi lagi di Ambon. Hal ini terjadi karena jemaat gereja memiliki fanatisme yang tinggi dan akar yang kuat pada komunitas gereja.<sup>91</sup>

Dalam membangun komunikasi dengan anggota komunitas yang tidak aktif ke gereja dan sangat rentan melakukan tindak kekerasan,

---

88 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

89 Ibid.; Ibid.

90 Wawancara dengan tokoh gereja Kristen Maluku, Ambon, 17 Desember 2012.

91 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

para pemuka agama Kristen juga mengupayakan pendekatan. Seorang responden menyatakan:

Tidak semua umat Kristen rajin ke gereja dan tidak semua umat Muslim rajin ke masjid. Saya katakan kepada teman-teman pendeta bahwa orang-orang ini harus tetap dirangkul dan diajak untuk beribadah. Mereka kadang ke gereja, tapi bila terjadi sesuatu respons mereka lebih dari yang lain—seakan-akan ingin membela gereja, padahal membela gereja bukan dengan cara itu. Membela agama [itu] dengan menghidupkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan Tuhan tidak butuh dibela. Memang tugas kita berat untuk itu, [untuk memberikan penyadaran] kepada mereka yang ada di jalan-jalan.<sup>92</sup>

Pengaruh pemimpin gereja atas jemaatnya diakui sebagai suatu hal yang sangat menguntungkan dalam upaya koordinasi guna mencegah kekerasan. Hal serupa sayangnya sulit terbangun di komunitas Muslim, karena beragamnya afiliasi umat terhadap pimpinan agama Islam dan organisasi. Hal ini menyebabkan inisiatif masyarakat menjadi lebih dominan dalam komunitas Muslim.<sup>93</sup> Namun demikian, para pemimpin agama Islam juga melakukan upaya meredam gejolak dan mencegah kekerasan. Menurut seorang responden:

Kalau posisi kami waktu itu tetap mendinginkan umat [agar] jangan terpancing—artinya, melalui suara mimbar agama, bahasa televisi, koran, maupun lewat kesempatan-kesempatan yang lain seperti nasihat-nasihat perkawinan, acara hajatan di masyarakat.<sup>94</sup>

Di samping pendekatan melalui forum-forum informal, pendekatan formal melalui jalur pendidikan juga dilakukan. Tujuan utamanya adalah meredam emosi para pemuda yang mudah tersulut. Jalur pendidikan menjadi bagian yang paling strategis karena juga berperan dalam menyiapkan generasi muda yang dapat membangun daerah di masa depan.<sup>95</sup>

Kerja sama para pemimpin agama juga mutlak perlu dilakukan untuk menjalin komunikasi antar-komunitas. Namun demikian, beberapa responden menyayangkan berkurangnya pertemuan antar-pemimpin agama yang dahulu sering dilakukan, padahal para pemimpin ini

92 Wawancara dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 17 Desember 2012.

93 Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012.

94 Wawancara dengan pejabat bidang keagamaan Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

95 Wawancara dengan tokoh organisasi Islam Maluku, Ambon, 17 Desember 2012.

memiliki peran strategis dalam memberikan arahan kepada komunitas masing-masing.<sup>96</sup> Walaupun ada, forum tersebut biasanya disponsori oleh pemerintah daerah.<sup>97</sup> Oleh karena itu, pengaktifan kembali forum dialog baik dengan dukungan pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat mesti kembali digalakkan.

Forum antar-tokoh agama juga harus diikuti dengan kerja sama formal antar-lembaga agama. Keterlibatan organisasi keagamaan dapat membantu sosialisasi nilai-nilai perdamaian kepada beragam umat yang memiliki afiliasi organisasi keagamaan yang berbeda-beda. Namun demikian, upaya membangun relasi antar-institusi ini tidak dengan sendirinya mudah. Seorang responden menyatakan:

Kita bisa membangun relasi institusi dengan MUI. [Untuk] relasi individu saya bisa kontak tokoh-tokoh Muslim untuk itu... Secara institusi MUI dan gereja berbeda. MUI bukan lembaga struktur yang ada sampai di bawah. Kalau gereja dari sinode bicara sampai ke jemaat-jemaat tetap satu [suara], begitu juga Katolik. Sehingga proses di Lata berjalan bagus. Berbeda dengan di Batu Merah; siapa yang bisa dipegang?<sup>98</sup>

Seorang responden lain menyebutkan, kesulitan MUI untuk ikut serta dalam membangun perdamaian dikarenakan MUI tidak punya struktur atau perangkat sampai ke level bawah.<sup>99</sup> Di samping itu, persoalan lain yang menjadi penghambat gerak MUI dalam membangun dialog antarkelompok agama adalah sikapnya yang mengharamkan pluralisme. Namun demikian, menurut responden tersebut, tema-tema khotbah untuk MUI tetap disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya menjembatani perbedaan agar perdamaian tetap terjaga. Sementara itu untuk gerakan sosial, masih menurut responden yang sama, yang patut mendapat perhatian adalah Muhammadiyah karena mereka mapan dalam hal pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA.<sup>100</sup>

Untuk kalangan muda, seorang tokoh Muslim menyatakan perlunya melakukan pembinaan akhlak untuk mencegah kekerasan berulang kembali. Pembinaan tersebut berisi materi mengenai perdamaian,

96 Wawancara dengan salah satu pengungsi Waringin Muslim, Ambon, 13 Desember 2012.

97 Wawancara dengan seorang lurah, Ambon, 12 Desember 2012.

98 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan Sekretaris tokoh gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

99 Wawancara dengan salah satu dosen IAIN, Ambon, 14 Mei 2013.

100 Wawancara dengan salah satu Dosen IAIN, Ambon, 14 Mei 2013.

akhlak, dan akidah. Di samping itu, perlu juga dibangun kesadaran untuk melokalisir suatu peristiwa kekerasan agar pemuda dari daerah lain tidak ikut terlibat dalam kekerasan tersebut.<sup>101</sup> Adapun menurut responden lain, pelibatan senior dalam kelompok pemuda yang bertikai diperlukan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan.<sup>102</sup> Hal ini karena:

... senior mempunyai pendekatan emosional dengan para junior dan proses itu pasti terjadi. Cuma, argumentasi yang disampaikan senior itu, walaupun bisa terakomodir, tergantung apa muatannya. Kalau itu baik kita terima, karena tidak mungkin senior mengatakan hantam saja. Kalau kepentingannya baik dan bisa diakomodasi, kemudian kita duduk sama-sama lalu kita diskusikan dan kita putuskan bersama dan selesai.<sup>103</sup>

Dari temuan di atas, tidak dapat dimungkiri bahwa para pemimpin agama masih memegang peran penting dalam menjaga perdamaian dan mencegah kekerasan antar-komunitas terjadi kembali. Hal ini juga tercermin dari pengalaman seorang responden ketika terjadi peristiwa 11 September 2011. Responden tersebut menceritakan:

Hari pertama itu kita mengungsi di masjid [...] dekat rumah. Terus ada warga di luar Ahuru yang punya rumah besar. Akhirnya kita tinggal di sana selama tiga hari. Kita kembali itu pada saat Bapak Raja Batu Merah naik ke Petra ketemu dengan pendeta, terus mereka buat informasi melalui *toa* gereja agar masyarakat tidak terprovokasi dan itu juga dilakukan oleh imam masjid di sana. Setelah itu baru kita kembali ke rumah masing-masing.<sup>104</sup>

## 2. KEPEMIMPINAN TOKOH-TOKOH PIMPINAN DAERAH DAN ADAT

Para tokoh daerah yang memegang jabatan, baik secara formal maupun tidak, memiliki pengaruh penting di tengah masyarakatnya. Bahkan perbedaan agama antara pemimpin dan masyarakatnya juga tidak menghalangi mereka untuk mengerjakan tugas-tugasnya tanpa diskriminasi.<sup>105</sup> Para pemimpin ini ada di kalangan komunitas Islam

---

101 Wawancara dengan imam masjid di Kebun Cengkeh, 21 Mei 2013.

102 Wawancara dengan para pengurus dan anggota organisasi mahasiswa Islam Ambon, Ambon 15 Mei 2013.

103 Ibid.

104 Wawancara dengan salah satu mahasiswa dan aktivis masyarakat, Ambon, 14 Mei 2013.

105 Wawancara dengan salah satu pengurus Waringin Muslim, Ambon, 13 Desember 2012.

dan Kristen, dan secara aktif turun tangan dalam upaya meredam konflik.<sup>106</sup>

Sebagai contoh, salah seorang pejabat Kota Ambon tidak segan turun ke lapangan untuk menenangkan warganya, meskipun secara terbuka menyatakan ketakutannya menjadi korban salah tembak aparat.<sup>107</sup> Di samping itu, tokoh komunitas berbasis etnis juga memiliki peran besar dalam memengaruhi komunitasnya, terutama untuk kepentingan politis. Hal ini dapat dilihat pada tokoh-tokoh masyarakat pendatang yang diuntungkan karena mempunyai komunitas yang jumlah anggotanya besar, seperti di wilayah Waiheru, Waihaong, Talake, Batu Merah, Wara, dan Ahuru.<sup>108</sup>

Seorang responden menyampaikan pendapatnya tentang bergesernya pandangan masyarakat Ambon tentang lembaga adat. Menurutnya:

Secara umum [keikutsertaan lembaga adat] masih menjadi ujian karena kepemimpinan adat tidak cukup efektif untuk mengatasi berbagai konflik internal. Ini menandakan bahwa sebetulnya sudah ada pergeseran jauh dalam sistem orientasi kepemimpinan dalam masyarakat. Jadi, masyarakat sekarang sebetulnya menghayati multi-nilai dan multi-identitas. Terbukti, berbagai konflik lokal yang dipersepsi sebagai antardesa/antarkampung, lembaga adatnya pun tidak berkhasiat menuntaskannya, [sehingga] membutuhkan aparat keamanan, membutuhkan pemerintah daerah. Tapi ini mencerminkan bahwa masyarakat sudah berubah dan mereka tidak patuh kepada lembaga adatnya.<sup>109</sup>

Di samping itu, isu-isu adat kerap juga dipakai oleh para elite politik untuk mendapatkan legitimasi sebagai wakil yang hendak memperjuangkan kepentingan kelompok adat tertentu, meskipun hal ini sebenarnya sekadar manuver agar mereka terpilih sebagai pejabat publik atau anggota perwakilan rakyat saat pemilu. Di samping itu, pihak pemangku adat juga kadang-kadang disinyalir memiliki motif ekonomi dalam upaya penyelesaian adat atas konflik-konflik yang terjadi antar-kelompok masyarakat adat.<sup>110</sup>

---

106 Wawancara dengan salah satu tokoh pemuda Ambon, 17 Desember 2012.

107 Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

108 Wawancara dengan para penggiat perdamaian Maluku, Ambon, 11 Desember 2012.

109 Wawancara dengan salah satu dosen FISIP Unpatti, Ambon, 14 Mei 2013.

110 Ibid.

Mengingat aspek sosiologis masyarakat Maluku yang masih memegang ikatan kultural, pemimpin adat juga memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian dan mencegah kekerasan.<sup>111</sup> Hal ini mereka lakukan dengan mengeluarkan maklumat dan menyosialisasikannya kepada masyarakat umum. Di samping itu, menurut seorang responden:

Kita melakukan koordinasi dengan Pak Wali Kota untuk pertemuan... Memang di sini juga ada MUI, Sinode GPM, Katolik, tapi memang fungsinya lain-lain. Mereka kasih himbauan ke umatnya di gereja, di mesjid, tapi kita ini [lembaga] adat, termasuk raja. Tokoh agama kalau dari Kristen itu pendeta dan dari Islam itu imam dan kita musyawarah dan langsung kasih pengumuman ke masyarakat.... Jadi, kemarin itu kita lebih banyak berperan [meskipun] memang mereka ikut berperan juga... Mereka memang ada himbauan-himbauan juga, tapi yang sampai ke akar rumput yang di bawah ini kan kita—Latupati—itu... Kita sendiri, Latupati ini, sampai ke bawah. Termasuk saudara-saudara kita dari daerah lain; sebenarnya mereka ada di sini juga harus tunduk pada budaya adat kita setempat.<sup>112</sup>

Salah satu sumber kekuatan tokoh dan lembaga adat adalah mudahnya konsolidasi sehingga desa-desa adat lebih mudah ditangani.<sup>113</sup> Kendati demikian, meski memiliki peran yang besar, para pemimpin adat tetap harus menghadapi beberapa tantangan. *Pertama*, kurangnya legitimasi mereka di daerah-daerah yang karakteristik demografisnya plural. Seorang responden menyatakan:

Di Kota Ambon ini wilayah persinggungan itu bisa saja menimbulkan konflik, karena kalau di negeri-negeri adat itu mudah sekali untuk mengorganisir mereka, tapi Kota Ambon [...] penduduknya sudah bercampur, sehingga kita tidak bisa mendeteksi lagi. Contohnya Batu Merah. Saya berkomunikasi dengan Raja Batu Merah, “Pak, ini ada hal yang perlu ditangani.” Tapi jawab Bapak Raja, “Pak, masyarakat di kawasan Mardika (pasar) ke bawah itu sudah tidak bisa kita kuasai lagi karena bukan masyarakat asli Batu Merah.”<sup>114</sup>

111 Wawancara dengan salah satu aktivis perdamaian Ambon, Ambon, 13 Desember 2012; dan dengan pejabat Polres Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

112 Wawancara dengan tokoh adat Majelis Latupati, Ambon, 14 Desember 2012.

113 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan Sekretaris tokoh gereja Kristen Maluku, 15 Desember 2012.

114 Ibid.; Ibid.

Legitimasi yang lemah di daerah heterogen membuat para pemimpin adat harus bekerja keras dalam meyakinkan warga bahwa adat lokal adalah hal yang perlu diperhitungkan dalam penyelesaian konflik. Persoalan legitimasi juga disebabkan oleh lemahnya karisma raja-raja di antara warganya sendiri, sehingga keputusan yang mereka ambil dapat saja mendapat tentangan dan resistensi. Lebih dari itu, para raja bahkan tidak kebal dari upaya kekerasan yang dilakukan rakyat terhadap mereka. Dalam beberapa kasus, para raja akhirnya harus tunduk pada kemauan rakyatnya.<sup>115</sup>

*Kedua*, banyak pemimpin adat yang disinyalir terlibat kegiatan-kegiatan politik praktis sehingga tidak dapat lagi mewakili warga adat. Hal ini, menurut seorang responden, akan berdampak pada kelangsungan pengaruh mereka di masyarakat:

Ini yang saya selalu ingin katakan dengan raja-raja (Latupati): suara mereka itu didengar. Cuma saya takut kalau mereka itu lebih banyak bermain dalam politik. Saya bilang usia kalian cuma 10 tahun saja. Energi otonomi daerah ini efeknya sangat negatif untuk para raja-raja. Mereka dibawa dalam suatu energi, yaitu dalam permainan politik yang tidak baik. Mereka terlibat semua dalam panggung kekuasaan.<sup>116</sup>

Tentu patut disayangkan apabila para raja hanya memikirkan kepentingan sesaat dan mengabaikan konsekuensi negatif dari pilihan mereka ketika terlibat dalam kegiatan politik praktis.

*Ketiga*, ketiadaan aturan Latupati yang mengikat semua raja membuat persoalan di masyarakat sulit diselesaikan. Dalam hal ini, Latupati hanya menjadi sebuah lembaga yang tidak dapat mengimplementasikan sebuah keputusan untuk menangani konflik di masyarakat. Di samping itu, munculnya kecurigaan masyarakat atas partisipasi seorang raja negeri lain dalam menyelesaikan masalah mereka masih terjadi.<sup>117</sup> Seorang responden menyatakan:

Lembaga adat itu, menurut saya, hanya memiliki sebuah wawasan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Karena kalau Latupati sebagai sebuah lembaga adat [menaungi] semua raja-raja, harusnya mereka juga

---

115 Wawancara dengan pejabat Polres Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

116 Wawancara dengan akademisi Wayame, Ambon, 14 Desember 2012.

117 Wawancara dengan pejabat Polres Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.



memiliki aturan Latupati yang mengikat kepada semua raja-raja. Tetapi kalau tidak ada aturan, ya hanya sebuah lembaga yang dibentuk saja.<sup>118</sup>

Mengingat besarnya peran dan tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin adat, maka upaya kerja sama di antara mereka dan upaya menjalin interaksi dengan rakyat menjadi hal yang harus dilakukan. Dengan demikian, posisi mereka di masyarakat dapat terjaga dalam rangka memelihara keharmonisan masyarakat berdasarkan pendekatan kultural dan personal.

---

118 Ibid.

# Peran Berbagai Unsur Masyarakat dalam Menangani Segregasi dan Kekerasan Pasca-Konflik

## A. BERBAGAI UPAYA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN PASCA-KONFLIK

Kontribusi masyarakat merupakan bagian krusial dalam upaya pencegahan kekerasan pasca-konflik. Secara umum upaya-upaya tersebut telah dilakukan, baik melalui aspek sosial, budaya, agama, politik, maupun ekonomi.

### 1. ASPEK SOSIAL, KULTURAL, DAN RELIGIUS

Upaya persuasi untuk mendukung perdamaian lewat jalur agama telah banyak dilakukan; tidak hanya oleh para tokoh agama, tapi juga pemerintah dan tokoh masyarakat. Ada beberapa program yang dijalankan. Misalnya, pelibatan komunitas agama lain dalam penyelenggaraan acara keagamaan, seperti pelibatan komunitas Muslim dalam kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) dan Natal atau pelibatan komunitas Kristen dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Lebaran.<sup>1</sup>

Di samping itu, nilai-nilai perdamaian dalam agama juga didiseminasikan lewat jalur pendidikan. Pesan perdamaian dalam agama disebarkan beriringan dengan upaya mengikis paham-paham radikal yang beredar di antara para pemuda.<sup>2</sup> Penggunaan jalur pendidikan ini dinilai cukup efektif meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menangkal upaya-upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

---

<sup>1</sup> Ibid.

<sup>2</sup> Wawancara dengan salah satu aktivis pemberdayaan pengungsi dan aktivis perdamaian di Ambon, Ambon, 17 Desember 2012, dan dengan Kepala Kementerian Agama Kota Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

Dalam setiap kegiatan hari besar keagamaan kerja sama antar-komunitas dilakukan untuk menjaga keamanan pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh responden berikut:

Biasanya begitu; kalau menjelang hari-hari keagamaan itu kita pakai remaja masjid, tapi juga tokoh-tokoh muda Muslim. Kita satu jalan. Dan seperti biasanya, nanti menjelang Natal dan tahun baru mereka juga yang nanti membantu untuk mengawal atau menjaga titik-titik tertentu, termasuk gereja. Remaja masjid sudah siap. Kalau misalnya kemarin lebaran, waktu mereka salat Ied, wilayah di seputaran lokasi salat Ied itu kan dijaga oleh anggota muda GPM. Memang ada polisi dan tentara juga, tapi juga diawasi bersama dengan anggota muda GPM. Dan ini terus kita bangun, komunitas ini.<sup>3</sup>

Contoh riil yang saya gambarkan: seperti tradisinya orang Muslim di Ambon ini, ketika malam takbir menjelang Idul Fitri, ternyata tidak hanya diikuti oleh masyarakat muslim. Masyarakat nonmuslim, khususnya Kristen, juga ikut di dalamnya, ikut bergembira ria. Entah didorong oleh rasa ingin bersuka cita atau mungkin adanya hubungan adat *Pela Gandong*, kita tidak tahu. Tapi itu bukan isapan jempol, itu nyata. Kemudian ketika Natal tahun kemarin (2011), saya sudah di sini, itu juga demikian. OKP-OKP Islam semuanya bersatu padu untuk bekerja sama menjaga kegiatan *basudara* yang Kristen. Seperti kebaktian di gereja-gereja; yang melakukan pengamanan, di samping aparat keamanan, kita ajak OKP-OKP itu. Mereka mau dengan suka cita.<sup>4</sup>

Selain pelibatan para pemuda, peringatan hari besar keagamaan juga diikuti oleh para tokoh dan pimpinan daerah yang menggunakan momen tersebut untuk menjalin silaturahmi dengan para pemimpin agama yang merayakan hari besar tersebut. Sebagaimana contoh, ketika Idul Fitri Wali Kota Ambon beserta jajaran pemerintahan kota dan masyarakat luas berkunjung ke komunitas Muslim. Begitu juga ketika Natal.<sup>5</sup>

Sejauh ini pelibatan berbagai pihak dengan memanfaatkan aspek keagamaan dapat membangun pengertian di antara komunitas Islam dan Kristen akan pentingnya menjaga perdamaian. Sayangnya, forum dialog dan komunikasi yang sudah diadakan selama beberapa tahun harus dihentikan karena terhentinya aliran dana yang disediakan oleh

3 Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

4 Wawancara dengan pejabat Polres Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

5 Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

United Nations Development Programme (UNDP). Akibatnya, hingga kini dialog antar-umat beragama belum terjadi lagi.<sup>6</sup>

Di samping itu, aspek kultural juga dikedepankan dalam menjaga perdamaian. Sebagai contoh, seorang responden menyatakan:

Sudah ada upaya. Baru-baru ini malah dari Pak Gubernur meminta supaya *Pela Gandong* diaktifkan kembali dengan cara *panas Pela*. Sudah ada beberapa *panas Pela*. Hanya ada beberapa saran juga. *Panas Pela* itu hanya untuk penduduk lokal, padahal pada saat ini pendatang sudah begitu banyak. Ini juga harus dipertimbangkan. Jangan hanya *panas Pela* untuk penduduk lokal; [untuk] pendatang bagaimana? Ini juga sedang dicarikan jalan supaya mereka menjadi satu himpunan.<sup>7</sup>

Upaya-upaya memelihara perdamaian melalui pendekatan kultural perlu lebih didukung karena dapat menjadi landasan bagi penyelesaian persoalan yang muncul di masyarakat. Hal ini didukung oleh adanya kesadaran masyarakat bahwa konflik hanya akan membawa kerugian. Selain itu, pengalaman pahit akibat konflik juga membuat masyarakat lebih sadar akan upaya-upaya provokasi sehingga secara sadar ikut serta dalam pencegahan kekerasan.<sup>8</sup> Kesadaran bahwa seluruh anggota masyarakat pada hakikatnya bersaudara pun membuat komunikasi di antara mereka tidak putus, meski pernah mengalami konflik.<sup>9</sup> Seorang responden menyatakan:

Tapi ada kesadaran kolektif orang Maluku, orang Ambon, untuk menyelesaikan konflik itu. Dari pasca-konflik dan timbulnya kesadaran ini, orang Maluku sebetulnya sadar bahwa ternyata kejadian konflik ini tidak punya makna apa-apa. Kita tidak tahu apa tujuannya. Akhirnya masyarakat sadar, dan ditunjang oleh pemerintah daerah serta *stakeholder* yang ada di Maluku secara perlahan-lahan menyelesaikan konflik ini.<sup>10</sup>

Berdasarkan temuan-temuan di atas, terlihat bahwa sebenarnya masyarakat Ambon telah memiliki modal dasar yang kuat untuk meningkatkan kondisi damai dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat umum akan kerugian akibat konflik dan kekerasan, serta

---

6 Wawancara dengan tokoh organisasi Islam Maluku, Ambon, 17 Desember 2012.

7 Wawancara dengan tokoh organisasi Islam Maluku, Ambon, 17 Desember 2012.

8 Wawancara dengan salah satu aktivis pemberdayaan pengungsi dan aktivis perdamaian di Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

9 Wawancara dengan seorang pejabat Dinkes Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

10 Wawancara dengan tokoh organisasi pemuda Ambon, Ambon, 12 Desember 2012.

keterlibatan elemen-elemen masyarakat dalam mencegahnya, menyiratkan harapan akan terbangunnya ketahanan masyarakat yang lebih kuat lagi. Dalam beberapa kasus, masyarakat secara aktif melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi potensi kekerasan. Misalnya, masyarakat Pohon Pule menjaga perbatasan wilayah mereka dan memeriksa orang luar yang akan masuk ke sana.<sup>11</sup>

Peran dari tokoh masyarakat juga sangat penting dalam mencegah para pemuda terlibat dalam kekerasan. Seorang responden menyatakan:

Kita saling menjaga dan terbuka, dan keseimbangan ini yang dipakai terus. Kita anjurkan kepada anak-anak muda, kalau mau hidup seperti pengungsi silakan pergi ikut konflik. Tapi kalau masih mau hidup baik dan tidur di kasur dan rumah, maka mari kita jaga keamanan. Kalau terjadi apa-apa di sini saling memberikan informasi. Kita orang tua di sini, kalau ada kekacauan, kita berikan pembinaan. Kalau mabuk-mabukan, diserahkan ke aparat keamanan. Baik itu terjadi di Muslim maupun di Kristen.<sup>12</sup>

Bermula dari inisiatif sebagian kaum muda, upaya-upaya pencegahan kekerasan juga dilakukan melalui dunia maya. Gerakan di dunia virtual ini dilanjutkan dengan gerakan nyata untuk mendukung upaya membangun perdamaian dan mencegah kekerasan. Mengenai gerakan pemuda anti-kekerasan ini, salah seorang responden menyatakan:

... banyak itu yang sekarang memang mengedepankan kebersamaan... lewat *website*, *Facebook*, dan lain-lain. Contohnya, [melalui] gerakan “kopi badati” mereka kumpulan anak-anak muda Kristen–Muslim yang melakukan gerakan kebersamaan, seperti lewat memberikan kopi dan teh ke pos-pos yang dibangun di wilayah perbatasan. Mereka melakukan itu untuk membangun komunikasi atau berdiskusi dengan petugas keamanan dan juga teman-teman dari Muslim ataupun Kristen di wilayah perbatasan. Di media sosial itu juga ada kampanye dari muda sampai tua, seperti kampanye “Ayo Stop Kekerasan!”<sup>13</sup>

---

11 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

12 Wawancara dengan salah satu imam masjid di Wayame, Ambon, 14 Desember 2012.

13 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

Agaknya, penggunaan berbagai media virtual dapat dijadikan sarana efektif dalam menggalang dukungan untuk memperkuat perdamaian dan mencegah kekerasan. Dalam hal ini, keterlibatan aktif para pemuda merupakan kabar baik, sehingga inisiatif-inisiatif mereka tersebut harus didukung oleh semua pihak. Upaya-upaya ini dapat menjadi pertanda masih adanya optimisme generasi muda untuk menciptakan kembali Ambon yang penuh damai.

## 2. ASPEK POLITIK

Pendekatan lain untuk membangun dan memelihara perdamaian adalah dengan melakukan pembagian kekuasaan di ranah politik. Pendekatan ini mendapat dukungan dari masyarakat, karena pembagian kekuasaan dirasa perlu untuk dilakukan agar setiap komunitas memiliki representasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Seorang responden mengakui bahwa langkah tersebut bertujuan:

... untuk mengatur kestabilan ini. Tidak mutlak. Memang tidak diatur dan sebetulnya ini semacam ada sebuah perjanjian yang sebetulnya sama sekali kita tidak pernah berjanji. Artinya, kita tidak pernah berjanji bahwa kalau maju, [yang menjadi] pusat Pilkada harus [tokoh] Islam dan Kristen. Kita tidak pernah berjanji. Tapi itu realitas. Jadi, semacam ada perjanjian yang sebetulnya kita tidak pernah berjanji, tapi itu terjadi. Kalau berani maju di [Pilkada] Ambon [dengan membawa] satu komunitas saja, tidak mungkin dapat.<sup>14</sup>

Dilihat dari proses dan hasil pemilihan kepala daerah di Ambon, kesepakatan tidak tertulis ini mampu menciptakan suasana yang kondusif secara politis. Dengan demikian, masyarakat dapat memercayai bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah akan bersifat inklusif dan tidak memprioritaskan kelompok tertentu saja. Namun demikian, komposisi pimpinan yang berasal dari komunitas berbeda juga dapat berakibat negatif apabila secara politis mereka harus pecah dalam pemilihan kepala daerah. Dalam beberapa kasus, para wakil komunitas mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan bersaing dengan kandidat petahana. Meskipun begitu, apabila kesepakatan atas pembagian kekuasaan di antara calon-calon pimpinan yang mewakili komunitas-komunitas yang berbeda dapat dijaga, maka dampak negatif dari perpecahan ini dapat dihindarkan.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

Kendati demikian, persaingan politik tetap berpotensi menyebabkan konflik karena mereka membawa nama kelompok, kolektivitas, dan kultur komunal ke dalam persaingan perebutan kekuasaan. Praktik politik ini yang sekarang cukup mewarnai dinamika sosial-politik di Kota Ambon.<sup>15</sup> Persaingan di tingkat elite ini pada akhirnya berimbas ke tingkat akar rumput, terutama ketika para elite yang bersaing tersebut mulai mengerahkan massa.

### 3. ASPEK EKONOMI

Upaya membangun perdamaian secara tidak langsung juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Mengingat masyarakat dari komunitas tertentu masih merasa takut untuk pergi ke pasar yang didominasi komunitas lain, keberadaan pasar kaget telah menjadi solusi alternatif untuk persoalan tersebut. Untuk mendekatkan barang dagangannya kepada konsumen, para pedagang pun membuat terobosan dengan membangun pasar kaget yang berlokasi di daerah komunitas lain. Secara tidak langsung hal ini mendorong kian intensifnya interaksi dan dialog antara pedagang dan masyarakat yang berasal dari komunitas yang berbeda. Seorang responden menceritakan:

... ada pasar kaget khusus [...] dibentuk di daerah-daerah perbatasan, misalnya. Secara umum kita mau bilang bahwa... yang menguasai pasar kan saudara-saudara kita yang Muslim, pada saat kerusuhan itu, tetapi yang banyak datang membeli ke situ bukan warga Muslim. Karena mereka semua berjualan, siapa yang mau beli? [...] Yang biasa membeli itu warga kita, warga Kristen. Oleh karena itu, kita kan takut masuk ke dalam pasar yang sekarang—Pasar Mardika, Pasar Gotong-Royong. Kita takut masuk ke situ, sehingga penjual ini mendekatkan barang-barang dagangan itu dengan pemukiman Kristen. Maka muncullah yang disebut dengan pasar perdamaian. Aman. [...] Pasar Bakubae... Kenapa disebut Pasar Bakubae? Karena di situ pertemuan awam antara pedagang yang notabene mayoritas beragama Muslim dengan pembeli yang notabene mayoritas beragama Kristen.<sup>16</sup>

Dari keterangan di atas kita melihat bagaimana aspek ekonomi yang bersentuhan langsung dengan harkat hidup orang banyak telah mendorong anggota-anggota masyarakat untuk menerima kenyataan

---

15 Wawancara dengan salah satu Dosen FISIP Unpatti, Ambon, 14 Mei 2013.

16 Wawancara dengan pejabat senior Kota Ambon, Ambon, 13 Desember 2012.

bahwa mereka saling membutuhkan, sehingga pada gilirannya, hal ini juga berperan signifikan dalam proses membangun kembali perdamaian dan persaudaraan.

Berdasarkan observasi lapangan pada Mei 2013 dapat dilaporkan bahwa di pasar Kota Ambon, meskipun ada pengelompokan-pengelompokan pedagang berdasarkan komunitasnya, tapi proses transaksi ekonomi berjalan dengan baik. Salah seorang responden menerangkan fenomena perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca-konflik sebagai berikut:

... ibu-ibu Kristen dulu tidak berjualan di pasar, yang berjualan hanya [ibu-ibu] Islam.... Demikian pula toko-toko; sebelumnya terkonsentrasi di daerah pelabuhan sana. Tapi sesudah kerusuhan, toko dan pusat ekonomi banyak mulai muncul di daerah Kristen.... Awalnya adalah [sebagai] dampak konflik—saat itu muncul pasar kaget. Orang Kristen butuh sayur, ikan, dan lain-lain, sedang orang Islam tidak bisa menjual ke daerah Kristen. Ibu-ibu berinisiatif mengambil ikan dari Islam untuk jual di sini, sedangkan sayur dia bawa ke ibu-ibu Islam untuk dijual di sana. Lama-lama dia terbiasa sehingga berubah profesi. Memang mula-mula keadaan terpaksa atau lihat peluang. Lama-lama jadi kebiasaan terus. Seperti pasar kaget minta digusur mereka *ndak* mau karena sudah nyaman dan untung, padahal dulunya tidak pernah jualan itu, termasuk jual-jual minyak bensin di pinggir jalan. Tidak ada kegiatan lain untuk dapat uang [sehingga mereka tetap berjualan]—yang dijual kebutuhan pokok, dan dapat uang dari itu, [sehingga] lama-lama menjadi bagian dari hidupnya.<sup>17</sup>

#### B. BERBAGAI UPAYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LSM MENANGANI SEGREGASI DAN KEKERASAN PASCA-KONFLIK

Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan masyarakat umum memainkan peran strategis dalam upaya menekan dampak segregasi dan intensitas kekerasan. Untuk menyelesaikan masalah segregasi beberapa lembaga melakukan inisiatif-inisiatif berdasarkan orientasi kegiatan lembaga-lembaga tersebut. Dapat dikatakan, inisiatif-inisiatif ini merupakan reaksi terhadap inisiatif-inisiatif elite yang ternyata tidak efektif karena biasanya hanya melibatkan orang-orang di lingkungan mereka saja.<sup>18</sup> Inisiatif biasanya diambil berdasarkan analisis lapangan

<sup>17</sup> Wawancara dengan tokoh Katolik Maluku, Ambon, 13 Mei 2013.

<sup>18</sup> Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012.



Figur 11: Salah Satu Pangkalan Ojek Komunitas Kristen yang Dicat dengan Lambang PDI Perjuangan



Figur 12: Perang Antar-Baliho di Ambon Menjelang Pemilu



Figur 14: Kondisi Relokasi Pengungsi di Kayu Tiga



Figur 15: Kondisi Pengungsian Pita Samudra (Bagian Depan)



Figur 16: Kondisi Pengungsian Pita Samudra (Bagian Dalam)



Figur 17: Lokasi Relokasi Pengungsi dari Pulau Buru di Lembah Argo

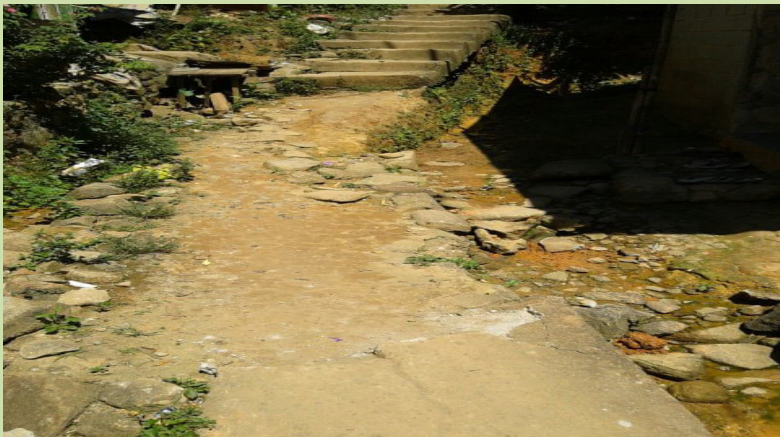




Figur 18: Lahan Relokasi Pengungsi di Warasia yang akan Dieksekusi oleh Hattala



Figur 19: Jalan Setapak di Kahena yang Telah Rusak, Hasil Program Keserasian Sosial



Figur 20: Bak Air Minum di Kahena yang Tidak Berfungsi Lagi, Hasil Program Keserasian Sosial



Figur 21: Kondisi dan Ciri Becak Milik Komunitas Kristen



Figur 22: Kondisi Pasar Valentin yang Tampak Sepi<sup>1</sup>

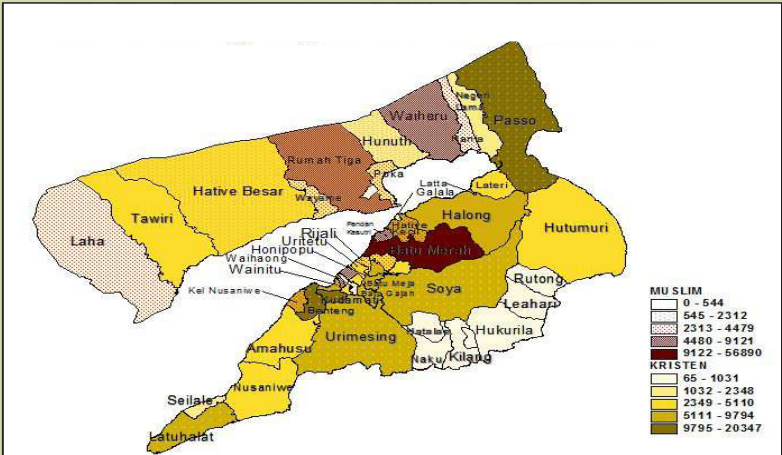
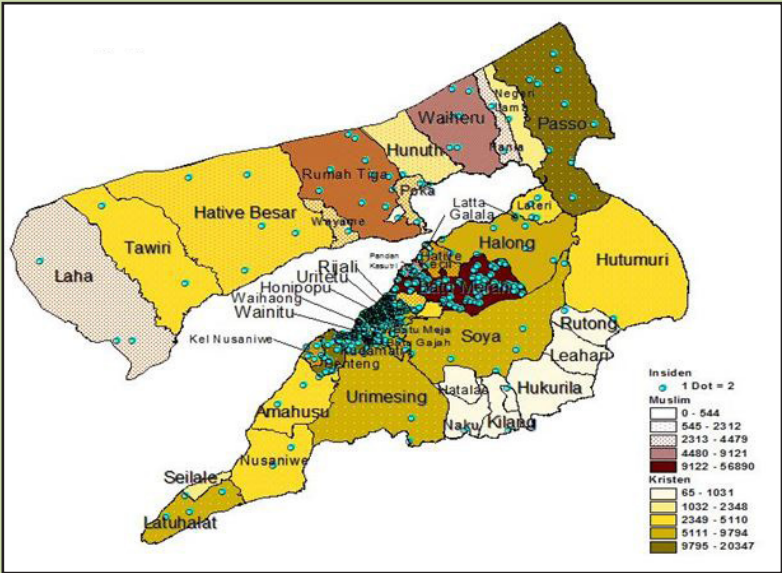


Figur 23: Pasar Mardika yang Selalu Ramai Sepanjang Hari



<sup>1</sup> Lihat BeritaMaluku.com, “Sepi Pembeli, Pasar Valentin Ambon tidak Layak,” diambil dari <http://www.beritamaluku.com/2013/03/sepi-pembeli-pasar-valentine-tidak.html>

Figur 24: Peta Segregasi di Ambon





Figur 25: Ucapan Sukses MTQ Ambon 2012 dari Komunitas Kristen di Amahusu





tentang apakah suatu daerah memerlukan intervensi melalui pendekatan agama, pendekatan sosial, pendekatan yang melibatkan kaum perempuan, atau pendekatan lain, karena karakteristik tiap-tiap daerah berbeda-beda.<sup>19</sup> Berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara, secara umum inisiatif-inisiatif tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu keagamaan, sosial/pendidikan, dan ekonomi.

#### 1. KEAGAMAAN

Berkenaan dengan peran lembaga keagamaan, beberapa responden yang mewakili lembaga-lembaga keagamaan Islam dan Kristen menyampaikan pesan-pesan perdamaian dalam ceramah dan khotbah mereka. “Intervensi” ke dalam materi-materi khotbah tersebut biasanya mereka lakukan setiap dua bulan sekali.<sup>20</sup> Untuk kelompok Kristen, ketika ketegangan terjadi, maka khotbah yang disampaikan akan memuat tema-tema perdamaian, cinta kasih, mengasihi musuh sebagaimana diajarkan Yesus, dan memberikan pipi kanan ketika pipi kiri kena tampar.<sup>21</sup>

Untuk kalangan Islam, intervensi sedikit lebih sulit untuk dilakukan. Hal ini terjadi karena lembaga-lembaga dan tempat-tempat ibadah Islam tidak berada dalam satu struktur hierarkis sehingga intervensi melalui satu komando lebih sulit dilakukan. Independensi tiap-tiap masjid dan lembaga ini membuat para aktivis keagamaan Islam harus bekerja lebih keras. Untuk daerah yang baru saja dilanda konflik kekerasan, mereka melakukan intervensi melalui koordinasi dengan para pejabat pemerintahan Kota Ambon. Mereka juga kadang-kadang melakukan pengecekan ke seluruh masjid di Ambon dan berusaha mengganti ustaz yang biasanya keras dalam berkhotbah.<sup>22</sup>

Pada komunitas Muslim, lemahnya konsolidasi dalam penyatuan dan penyebaran pesan perdamaian tidak lepas dari kurang solidnya ikatan masyarakat terhadap organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Komunitas Muslim di Ambon cenderung merujukkan dirinya kepada NU atau Muhammadi-

---

19 Ibid.

20 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

21 Wawancara dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ketua Klasis GPM Ambon, Ambon, 17 Desember 2012.

22 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

yah hanya secara sosio-historis. Artinya, mereka akan mengidentifikasi diri sebagai orang NU atau Muhammadiyah jika hal tersebut berkaitan dengan keluarganya yang memang berlatar belakang NU atau Muhammadiyah; atau jika yang tengah dibicarakan adalah persoalan adat istiadat atau ritual keagamaan tertentu, seperti *tahlilan*, *Qunut*, dsb. Jika berkaitan dengan masalah politik, mereka bisa saja merujukkan dirinya pada NU atau Muhammadiyah atau tidak kepada keduanya sama sekali, melainkan pada kelompok adat, organisasi kemasyarakatan lain, bahkan partai politik.<sup>23</sup>

Dalam upaya menekan dampak segregasi dan kekerasan, organisasi-organisasi keagamaan berupaya menciptakan ruang-ruang interaksi melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, misalnya dialog, kerja bakti, atau kegiatan kesehatan. Seorang responden memberikan sebuah contoh kegiatan:

Pada setiap hari menjelang lebaran itu, dalam bulan puasa itu, biasanya seminggu lakukan batal bersama (buka puasa bersama) antara jemaat Silo dengan masyarakat sekitar. Ini kita lakukan rutin setiap tahun. Jadi, kita kerja sama dengan tokoh-tokoh Muslim di belakang Gereja Silo untuk melakukan kegiatan itu. Kita rutin siapkan dana untuk itu. Nah, sebelum acara buka puasa itu, sekitar jam 5 atau paling lambat setengah 6, kita lakukan diskusi tentang kondisi masyarakat atau apa ada masalah yang terjadi di sekitar kita.<sup>24</sup>

Kegiatan “batal bersama” ini dilaksanakan untuk meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat Muslim yang tinggal di sekitar gereja. Hal ini dilakukan karena secara historis daerah tersebut merupakan daerah yang heterogen, meski konflik telah mengakibatkan kondisi demografis masyarakat mengalami segregasi. Kegiatan lainnya adalah kerja bakti membersihkan lokasi pemakaman dan pemberian bantuan untuk korban bencana banjir yang terjadi pada 1 Agustus 2012.

Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah seminar yang mengundang tokoh-tokoh agama lain untuk memberikan pemahaman tentang perspektif agama mereka. Hal ini dilaksanakan sebagai cara untuk melunturkan stereotip negatif yang dilekatkan oleh pengikut satu

---

23 Wawancara dengan anggota Litbang Gereja Kristen, Ambon, 13 Desember 2012.

24 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

agama terhadap pengikut agama lain. Seorang responden memberikan contoh:

Nah, [kegiatan] yang terbaru itu kita lakukan tanggal 4 Desember, [...] kita membuat seminar di Silo dengan tema “Menegal Islam yang Humanis dan Damai.” Di situ kita mengundang salah satu ahli fikih di IAIN Ambon [untuk] memberikan pencerahan Islam yang humanis itu seperti apa, Islam yang damai itu seperti apa. Supaya tidak ada orang yang menganggap bahwa Islam itu identik dengan teroris atau gerakan radikal. Tapi kita juga [tidak] bisa menafikan [bahwa] di [kalangan] Kristen di sini juga ada indikasi seperti itu, seperti radikal. Semua kaget lewat ceramah itu bahwa Islam yang benar itu yang seperti ini.<sup>25</sup>

Kegiatan mengundang tokoh agama lain menjadi sangat strategis dalam upaya membangun perdamaian karena dapat menumbuhkan cara pandang yang lebih menyeluruh dan sesuai akal sehat ketika mengidentifikasi dan mendeskripsikan kelompok lain yang berbeda agama. Dengan demikian, diharapkan ruang interaksi dan diskusi yang sehat dapat tercipta di antara kelompok masyarakat yang tersegregasi akibat konflik.

Lembaga-lembaga keagamaan juga melakukan beberapa terobosan untuk mengurangi dampak segregasi. Salah seorang responden mendeskripsikan kegiatan yang mereka lakukan:

Ada program “Pertemuan Anak Maluku”; dulu mereka main sama-sama tanpa membedakan agama, sekarang karena kondisi mereka main di masing-masing komunitas. [Oleh karena itu,] sekarang kita ajak mereka untuk main bersama [lagi]. Yang muslim belajar tentang gereja tempat ibadah teman Kristen dan yang Kristen belajar tentang masjid tempat ibadah teman Muslim.<sup>26</sup>

Di tingkat internal, lembaga-lembaga keagamaan juga melaksanakan inisiatif-inisiatif yang berguna untuk mengurangi dampak segregasi, kendati upaya ini masih bersifat lokal dan menyesuaikan kebutuhan. Sebagai contoh, di beberapa gereja penanaman nilai-nilai pluralisme tidak menjadi prioritas karena jemaatnya tinggal di daerah mayoritas Kristen. Penanaman nilai-nilai pluralisme ini hanya dilakukan pada jemaat yang menjadi warga minoritas di tengah-tengah masyarakat

---

<sup>25</sup> Ibid.; Ibid.

<sup>26</sup> Wawancara dengan seorang tokoh senior Gereja Kristen Maluku, Ambon, 17 Desember 2012.

Muslim.<sup>27</sup> Meskipun demikian, untuk tujuan jangka panjang penanaman nilai-nilai ini tetap perlu dilakukan bagi mereka yang tinggal bersama komunitasnya yang merupakan mayoritas di suatu daerah. Tujuannya, untuk menanamkan empati kepada para anggota komunitas tersebut terhadap komunitas lain sebagai langkah antisipasi jika suatu saat gesekan terjadi.

Inisiatif lain dijalankan dengan menggelar kegiatan bagi para remaja yang rentan terhadap ajakan untuk melakukan kekerasan. Contohnya, Gereja Silo membuat sebuah kegiatan yang disebut “Pekan Kreativitas Remaja”. Dalam kegiatan ini, bukan hanya remaja Kristen yang coba dilibatkan, tetapi juga para remaja Muslim.<sup>28</sup> Di samping itu, untuk remaja Kristen sendiri gereja telah melakukan langkah-langkah pendekatan internal dengan:

... memberikan “Katekisasi” atau pengajaran untuk remaja menuju dewasa. Nah, di sana untuk konteks Silo kita coba memberikan materi yang tidak hanya persoalan keagamaan yang diberikan oleh pendeta, tapi juga konteks sosial lain, seperti tindakan anti-kekerasan maupun materi tentang HAM. Nah, di situ yang memberikan pengajaran orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Walaupun memang porsinya lebih banyak pengajaran/materi tentang pendidikan agama Kristen. Tapi memang kita buka ruang untuk pemahaman dan pendidikan yang sesuai dengan konteks Silo dan Ambon, Maluku, secara keseluruhan.<sup>29</sup>

## 2. SOSIAL/PENDIDIKAN

Beberapa inisiatif melalui bidang sosial dan pendidikan telah dilakukan oleh beberapa pihak untuk menekan dampak segregasi sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat. Di wilayah segregasi, terutama daerah perbatasan, memang terdapat keperluan untuk menambah jumlah aktivis perdamaian agar mereka dapat bekerja secara kolektif sehingga lebih efektif.<sup>30</sup>

Berkenaan dengan konflik kekerasan pada 11 September 2011, inisiatif lain juga dilakukan oleh salah satu lembaga di Ambon dalam rangka mengumpulkan raja-raja di Majelis Latupati untuk mendis-

---

27 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

28 Ibid.; Ibid.

29 Ibid.; Ibid.

30 Wawancara dengan tokoh Litbang Gereja Kristen Maluku, Ambon, 13 Desember 2012.

kusikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar konflik tersebut tidak meluas. Pertemuan ini didukung oleh pihak pemerintah daerah, dan membuahkan langkah konkret berupa:

... *road show* ke daerah-daerah yang terbakar dengan menggunakan bus Damri. Kita ke Talake, kita juga ke pasar, ke pelabuhan, terus kita ke Leihitu, jalan bersama raja-raja. Nah, kita itu kampanye damai. Kita juga bawa maklumat Latupati di hari Jumat untuk mimbar Jumat (untuk kelompok Muslim), dan di gereja pada ibadah Minggu (untuk kelompok Kristen).<sup>31</sup>

Kegiatan tersebut dianggap berhasil melokalisir kekerasan sehingga tidak meluas ke daerah lain. Namun demikian satu hal menjadi catatan: dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, persoalan dana kadang-kadang menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga nonpemerintah saat ini lebih fokus pada upaya membangun inisiatif masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan serupa secara swadaya.<sup>32</sup> Hal ini juga dilakukan karena adanya kesadaran dari pihak lembaga nonpemerintah untuk menggunakan dana seminimal mungkin sehingga dapat mencegah pelaksanaan suatu program yang orientasinya kompensasi finansial. Dalam hal ini pelibatan masyarakat sangat berguna untuk menggugah kesadaran anggota-anggota masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat juga.

Inisiatif dalam hal advokasi terhadap kebijakan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah. Seorang responden menyatakan:

Bersama jaringan perempuan kita coba mengadvokasi kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan itu sudah keluar lewat perda No. 2 Tahun 2012. Itu sudah di lembar daerah. Nah, kita juga coba advokasi ke kabupaten/kota untuk bagaimana perda ini diimplementasikan. Kita juga membuat posko-posko pelayanan penanganan korban kekerasan [terhadap perempuan dan anak] bekerja sama dengan Komnas Perempuan.<sup>33</sup>

Lembaga nonpemerintah juga bekerja sama dengan Biro PP dan KB membantu merancang anggaran yang berperspektif gender. Selain itu,

---

31 Ibid.

32 Ibid.

33 Ibid.

masih ada beberapa inisiatif dan kegiatan-kegiatan lain, di antaranya advokasi terhadap akses layanan kesehatan, seperti persalinan gratis dan pelayanan posyandu, serta layanan pendidikan, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); membantu komunitas membuat proposal untuk diajukan kepada program CSR berbagai perusahaan;<sup>34</sup> melakukan pendampingan dalam kegiatan-kegiatan penyembuhan trauma akibat konflik melalui kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, seperti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia; melakukan pendampingan untuk para pelaku kekerasan dalam rangka menghilangkan perspektif kekerasan yang diindoktrinasikan oleh kelompok mereka. Sejauh ini kegiatan de-indoktrinasi ini sudah membuahkan hasil, terlihat dari perubahan perilaku para pelaku tersebut.<sup>35</sup>

Selain inisiatif-inisiatif yang dilakukan lembaga-lembaga nonpemerintah di atas, inisiatif gerakan perdamaian juga dilakukan melalui lembaga kependidikan. Terobosan-terobosan melalui jalur pendidikan menjadi sangat strategis karena ditujukan pada anak-anak dan para remaja yang sedang dalam masa formatif, sehingga ajaran-ajaran dan pengalaman-pengalaman positif dapat menjadikan mereka generasi yang menghargai perbedaan kelompok dan nilai-nilai persaudaraan lintas identitas. Misalnya, beberapa penggiat perdamaian mendirikan PAUD yang menerima anak-anak dari kelompok Muslim dan Kristen. Akan tetapi, setelah PAUD resmi sudah dibangun oleh pemerintah, murid-murid Kristennya malah pindah ke sana.<sup>36</sup> Salah seorang responden lain juga mencontohkan:

Kita membangun itu “*sister school*” yang mengadopsi *Pela Gandong* di mana siswa yang Muslim bisa juga sekolah di sekolah komunitas Kristen lewat sistem pertukaran itu. Nah, sekarang itu Wali Kota siap untuk mendukung program kita yang “*sister school*” itu. Nah, lewat program ini nantinya siswa yang Muslim dapat sekolah di Kristen dan juga sebaliknya—begitu sekitar dua atau tiga bulan. Mereka juga nggak hanya sekolah tapi juga tinggal di pemukiman Kristen atau Muslim. Nah, minimal yang kita harapkan, mereka dapat memahami bagaimana kehidupan saudara-saudara mereka di sana.<sup>37</sup>

---

34 Ibid.

35 Ibid.

36 Wawancara dengan salah satu mahasiswa dan aktivis masyarakat, Ambon, 14 Mei 2013.

37 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

Saat memperingati Hari Perdamaian tahun 2009, diadakan kegiatan *Peace Goes to School*. Kegiatan tersebut berisi pemutaran film tentang perdamaian. Kegiatan lainnya diadakan di mal Ambon Plaza untuk memberikan penguatan kepada anak-anak muda. Kegiatan tersebut juga disertai dengan selingan acara-acara musik. Namun demikian, inisiatif-inisiatif ini tidak dapat dilanjutkan karena ketiadaan penyandang dana. Oleh karena itu, peran pemerintah dan pihak sponsor mutlak diperlukan demi kelangsungan kegiatan-kegiatan positif tersebut.<sup>38</sup>

### 3. EKONOMI

Inisiatif untuk mengurangi dampak segregasi dan kekerasan melalui jalur ekonomi merupakan salah satu langkah strategis. Masyarakat sadar bahwa konflik hanya akan memperparah kualitas hidup mereka akibat meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok masyarakat yang berada di luar pusat kota jalin-menjalin komunikasi dan koordinasi untuk mencegah terjadinya kekerasan di tempat mereka.<sup>39</sup>

Demikian pula anggota-anggota masyarakat yang memiliki usaha dan sudah membangun interaksi dengan langganannya; mereka khawatir kalau konflik terjadi di daerah mereka. Karena itulah kalangan pengusaha berinisiatif menyibukkan para pemuda dengan segala kegiatan atau aktivitas ekonomi agar mereka yang sebelumnya menganggur dan kerap melakukan tindakan-tindakan negatif dapat menjadi produktif. Salah seorang responden menyatakan:

Sekarang sudah banyak yang sibuk. Yang tadinya duduk-duduk dan mabuk-mabukan di lorong-lorong sekarang sudah sibuk [bekerja sebagai pengojek]. [Saya memberikan modal] lima motor untuk anak-anak muda untuk *ngojek*. Nanti mereka yang bayar cicilannya... Di pasar, anak-anak yang tidak bekerja [kita beri pekerjaan sebagai penjaga] toko atau *counter* [sehingga] dapat mengembalikan modal awalnya [lewat] cicilan.<sup>40</sup>

Inisiatif melalui jalur ekonomi di daerah yang tersegregasi juga dilakukan dengan memanfaatkan kerja sama dengan lembaga asing. Sebagai contoh, program kerja sama antara sebuah lembaga nonpemerintah

---

38 Ibid.; Ibid.

39 Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012.

40 Wawancara dengan salah satu pengusaha kontraktor dan tokoh organisasi pengusaha muda Maluku, Ambon, 13 Desember 2012.

dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) di empat desa di Kecamatan Leihitu dan empat desa di Kecamatan Salahutu. Contoh lain, program berupa penyaluran kredit di wilayah perbatasan antara Waa, Tulehu, Suli, untuk menguatkan usaha kecil kaum perempuan. Program ini dijalankan setelah pelatihan-pelatihan diberikan kepada para peserta.<sup>41</sup>

Meskipun telah bekerja sama dengan beberapa LSM dengan melakukan kajian-kajian *peace building*,<sup>42</sup> namun pemerintah daerah dianggap masih belum berupaya maksimal dalam meredam potensi kekerasan akibat segregasi. Salah satu kritik terbesar atas program pemerintah menilai rancangannya hanya berdasarkan proyek, meski istilah yang digunakan adalah proyek berbasis masyarakat. Oleh karena dirancang berdasarkan proyek, maka kerap muncul persoalan, yaitu tidak adanya keberlanjutan begitu suatu proyek selesai, karena programnya memang tidak berangkat dari masyarakat.<sup>43</sup> Biasanya tidak ada agen yang tinggal di tengah masyarakat untuk mengawal kelangsungan program tersebut, setidaknya untuk kurun satu tahun. Di lain pihak, tidak ada jaminan bahwa wakil-wakil komunitas yang telah dilatih untuk menjadi agen perdamaian dapat menunaikan pekerjaan mereka karena adanya tekanan dari komunitas.<sup>44</sup>

Menurut seorang responden, sebuah program seharusnya dibawa ke dalam komunitas di mana seorang agen berperan sebagai organisator (*organizer*) bersama-sama dengan teman-temannya di wilayah netral. Dengan demikian, program pembangunan perdamaian (*peace building*) yang dilakukan sifatnya akan berbasis komunitas (*community based*). Untuk keperluan ini, manajemen pembiayaan, misalnya untuk konsumsi, mutlak harus dikelola dengan baik karena menyangkut “relasi keseharian yang harus dijaga”.<sup>45</sup>

Kritik lain yang diarahkan kepada pemerintah adalah seringnya mutasi di institusi-institusi yang seperti TNI, Polri, dan institusi-institusi birokrasi daerah. Hal ini tentu saja menyulitkan proses advokasi. Seorang responden menyatakan:

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan tokoh Litbang Gereja Kristen Maluku, Ambon, 13 Desember 2012.

<sup>42</sup> Wawancara dengan pejabat bidang perencanaan pembangunan Kota Ambon, Ambon, 14 Desember 2012.

<sup>43</sup> Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012.

<sup>44</sup> Wawancara dengan tokoh Litbang Gereja Kristen Maluku, Ambon, 13 Desember 2012.

<sup>45</sup> Ibid.



...ketika kita buat diskusi, ... kadang yang datang dari pimpinan birokrasi, tapi kemudian orangnya dimutasi, maka kita harus dari awal lagi. Nah, itu yang sulit. Misalkan kita sudah sering menjalin komunikasi ke Pangdam atau Kapolres, tiba-tiba mereka berganti atau berubah. Lalu juga kesulitan kita [adalah situasi] yang di sistem birokratnya.<sup>46</sup>

Hal lain yang patut diperhatikan adalah motivasi aparat pemerintah dalam mendukung proses perdamaian di daerah konflik. Proses tersebut menjadi sulit lantaran kurangnya sensitivitas aparat pada upaya-upaya membangun perdamaian karena mereka lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan masyarakat.<sup>47</sup>

Kepercayaan terhadap suatu LSM juga mesti diperhatikan selama pelaksanaan program pembangunan perdamaian. Secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSM penggiat perdamaian cukup tinggi. Hal ini karena upaya pendampingan dilakukan secara konsisten sehingga kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh LSM ditanggapi positif oleh masyarakat. Sebagai contoh, seorang responden menyatakan:

Mereka itu sudah melakukan dialog, sudah masuk–keluar rumah, sudah makan sama-sama. Tahun 2005, setelah kejadian 2004 di Waringin, kami mencoba melakukan dialog antar-komunitas di sana. Bahkan sampai bikin sekolah PAUD untuk bersama.

Dalam konteks kegiatan yang diceritakan responden di atas, masyarakat telah menerima pendampingan selama tujuh tahun sehingga kepercayaan kepada LSM terkait telah terbangun. Dengan demikian, pekerjaan LSM menjadi lebih ringan karena inisiatif untuk membangun perdamaian kemudian lebih banyak datang dari masyarakat.<sup>48</sup>

### C. PERAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH KEKERASAN DAN MENEKAN SEGREGASI

Peran perempuan sangat menonjol dalam upaya menekan segregasi dan mencegah kekerasan. Pelibatan perempuan dianggap efektif dalam proses penegakan perdamaian.<sup>49</sup> Meskipun tetap harus melibatkan la-

46 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

47 Ibid.; Ibid.

48 Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012.

49 Ibid.

ki-laki, namun peran kaum perempuan tetaplah sangat krusial karena mereka memiliki kelekatan dengan institusi keluarga. Salah satu upaya yang membutuhkan peran perempuan adalah penanganan trauma akibat konflik berkepanjangan. Untuk keperluan tersebut, diadakan kegiatan yang mempertemukan ibu-ibu dari kedua kelompok agama untuk melakukan beberapa aktivitas bersama selama dua minggu. Kegiatan lainnya, mengunjungi pengungsi dari masing-masing kelompok untuk membangun kesadaran akan penderitaan yang muncul akibat kekerasan antarkelompok.<sup>50</sup>

Seorang responden membagi pengalamannya ketika berupaya mengoptimalkan peran kaum perempuan dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian:

Kelompok ibu-ibu itu... bisa memberikan pemahaman kepada anak laki-laki mereka dan juga suami mereka untuk meredam konflik atau hendak melakukan kekerasan. Yang pernah kita lakukan, yakni pas saat konflik dan pasca selesai konflik kita melalui diskusi dan dialog ke ibu-ibu [untuk] memberikan pemahaman bahwa konflik bisa membuat ibu menjadi janda dan anak menjadi yatim piatu, terlebih ketika anggota laki-laki keluarga mereka itu [menjadi korban]. Itu yang kami lakukan dan relatif efektif untuk memberikan penyadaran dalam keluarga. Contoh: di tahun 2011 juga saya bilang ke ibu-ibu pada malam pasca-kerusuhan, himbau suami dan anak laki-laki ibu [supaya] tidak kembali ke Waringin untuk membalas karena akan mati sia-sia, karena juga kan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana.<sup>51</sup>

Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ambon 2011, anggota masyarakat banyak memperoleh selebaran gelap yang berisi desas-desus tentang kegiatan Islamisasi dan Kristenisasi di tengah masyarakat yang tersegregasi. Seorang responden menceritakan:

Diskusi selebaran itu memang dilakukan di kalangan ibu-ibu. Memang menurut saya, sangat efektif kalau kita bicara damai sama ibu-ibu. Makanya, [kepada] ibu-ibu di Waringin itu kita bilang, kita perempuan ini menjaga bahwa damai itu harus ada, tapi memang harus juga dibicarakan ke pihak laki-laki karena yang selalu melakukan mobilisasi massa itu kan laki-laki. Mana pernah ada [mobilisasi] dari kaum perempuan?<sup>52</sup>

50 Wawancara dengan ibu-ibu Kayu Tiga, 20 Mei 2013.

51 Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012.

52 Ibid.

Meskipun tidak berperan dalam mobilisasi massa, kaum perempuan setidaknya dapat mencegah anggota keluarga mereka ikut serta dalam tindak kekerasan yang dilakukan kelompoknya terhadap kelompok lain. Peran signifikan kaum perempuan itu dapat dilihat di berbagai tempat, seperti Kayu Tiga, Ahuru, THR 2, Air Besar, dan Waiheru.<sup>53</sup>

Adapun ibu-ibu pengungsi Waringin telah membuat terobosan melalui jalur pendidikan dalam upaya mereka membangun perdamaian di tempat asal. Para responden menyebutkan:

Kita di Waringin ada *play group*, di situ juga ada anak Kristen yang sekolah di situ. Jadi, [anak] Islam–Kristen yang sekolah di situ. Itu salah satu yang mau *katong* kembangkan di Waringin supaya bisa bersatu lagi, [...] agar saling percaya. Agar orang luar juga bisa lihat itu, bahwa beberapa anak Kristen sudah bisa masuk di sekolah Islam. Jadi, sudah ada yang rintis itu.<sup>54</sup>

Terobosan ini patut mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, dan khususnya untuk masalah pendanaan. Berdasarkan pengakuan para responden, dana operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dihimpun dari iuran anak dan dana bantuan Dinas Pendidikan yang tidak teratur turunnya.<sup>55</sup>

#### D. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DAN PROGRAM REKONSTRUKSI PASCA- KONFLIK: PENDEKATAN EVALUATIF

##### 1. PERSEPSI TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LAIN

Hal utama yang kerap menjadi sorotan dan sumber pertanyaan terkait kredibilitas sebuah LSM adalah persoalan terkait pencarian dan penggunaan dana untuk program-program mereka. Salah seorang responden menyatakan:

... Keberlanjutan kegiatan untuk kerja-kerja kemanusiaan ini haruslah [dilakukan oleh] mereka yang memang benar-benar sukarelawan dan memang betul-betul tidak memiliki kepentingan apa-apa. Tapi memang

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Wawancara dengan para ibu pengungsi Waringin, 14 Mei 2013.

<sup>55</sup> Ibid.

saya juga tidak menafikan bahwa lembaga itu perlu donor, perlu dana. Tapi yang sangat diperlukan itu memang jiwa-jiwa sukarela.<sup>56</sup>

Semangat *volunteerism* menurut seorang responden kini semakin hilang karena banyak LSM yang pekerjaannya berorientasi pada proyek (*project-oriented*), padahal yang diperlukan dari para aktivis perdamaian adalah dedikasi dan militansi dalam membantu masyarakat.<sup>57</sup> Menurunnya semangat *volunteerism* ini diperparah oleh banyaknya lembaga donor yang tidak segan mengucurkan dana tanpa melihat keberlanjutan suatu program ketika proyeknya sudah selesai. Hal lain yang menjadi perhatian sebagian pihak adalah lemahnya *driving force* di semua lini karena sedikit sekali orang yang dengan sukarela mau menjaga dan mengawal dinamika proses perdamaian, termasuk di lembaga keagamaan.<sup>58</sup>

Sementara itu, di kalangan LSM sendiri persoalan kredibilitas menjadi masalah yang tidak terhindarkan. Sebagai contoh, salah satu LSM yang memiliki persoalan dengan sumber pendanaan mesti menerima pelabelan berkonotasi negatif dari rekan-rekan LSM-nya. Seorang responden yang sekaligus penggiat LSM tersebut menyatakan:

Nah, kita juga di kalangan teman-teman LSM itu dicap “LSM plat merah”. Tapi saya bilang untuk kerja-kerja konflik ini kita tidak bisa menempatkan diri terus jadi oposisi. Kita juga harus lihat yang mana kita harus kritisi, yang mana kita harus dukung dan kerja sama dengan pemerintah.<sup>59</sup>

Pernyataan tersebut dengan terang menunjukkan betapa pendanaan dan anggaran merupakan persoalan yang sensitif. Terkait dengan hal ini, seorang responden menyatakan:

Saya juga harus bilang bahwa banyak teman-teman di NGO dengan banyak anggaran [harus] terbuka kepada masyarakat. [Keterbukaan] bahwa kita punya anggaran segini dan bagaimana pelibatan masyarakat, itu yang

---

56 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

57 Wawancara dengan tokoh Litbang Gereja Kristen Maluku, Ambon, 13 Desember 2012; dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

58 Ibid.

59 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

kurang. Seperti ada teman-teman [NGO yang] ketika ada dana mereka tertutup dan ketika dana habis mereka tinggalkan masyarakat. Padahal ada atau tidak ada dana pun harusnya kita melakukan rencana strategis untuk melakukan kegiatan bersama untuk membangun penguatan [solidaritas antar-komunitas]. Dan kita berharap masyarakat bisa lebih mandiri untuk mengadvokasi hak-hak mereka.

Kritik lain yang muncul menyoroti sebagian penggiat LSM yang bermotivasi mengejar keuntungan finansial melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menghantar mereka menjadi pegawai negeri sipil atau anggota partai politik. Seorang responden yang prihatin atas masalah tersebut menyatakan:

... Sekarang banyak NGO/LSM yang [dananya] memang bukan bersumber dari donor lagi, tapi mereka berorientasi [pada] apa yang bisa mereka dapat melalui pejabat atau pimpinan daerah. [Untuk mendapatkan kucuran dana] mereka biasa membentuk forum itu [atau] institusi ini. Itulah pokoknya yang ujung-ujungnya malah minta uang ke pejabat daerah. Kalau nggak dikasih dia bilang akan dibongkar atau akan didemo.<sup>60</sup>

Di samping itu, sebagian penggiat LSM juga ditengarai terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sarat akan kepentingan politik praktis. Biasanya, dengan memanfaatkan pendekatan senioritas dan etnis/keluarga mereka mengejar keuntungan finansial dari para pejabat.<sup>61</sup>

#### E. PERSEPSI ATAS PROGRAM PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN LSM-LSM

Salah satu permasalahan yang muncul akibat LSM-LSM yang lebih banyak bergelut dengan program berorientasi proyek adalah rendahnya keberlanjutan suatu program. Seorang penggiat LSM menyatakan:

Kalau NGO-nya orientasi proyek, maka saat program selesai, akan selesai juga mereka. Tapi memang kalau [untuk] programnya [mereka] berpikir sampai tahapan *sustainability*, maka mereka akan berpikir setelah program ini tidak didanai lagi, bagaimana kelanjutannya. Sehingga, kelanjutan itu bisa sampai [membangun] masyarakat [yang] bisa lebih mandiri. Jadi, [mereka bekerja] bukan karena banyak dana atau tidak.<sup>62</sup>

60 Wawancara dengan penggiat perdamaian Maluku; dan dengan tokoh Gereja Kristen Maluku, Ambon, 15 Desember 2012.

61 *Ibid.*

62 Wawancara dengan aktivis LSM perempuan dan anak-anak, Ambon, 15 Desember 2012.

Keprihatinan ini sebenarnya menyiratkan kritik besar terhadap pekerjaan dan agenda LSM-LSM penggiat perdamaian di Ambon. Seorang responden yang melakukan evaluasi atas program-program perdamaian di Ambon menyatakan, banyak di antara program-program tersebut tidak partisipatif karena ide awalnya tidak berasal dari masyarakat.<sup>63</sup> Kendati demikian, upaya-upaya pendampingan masih tetap dilakukan oleh LSM-LSM dan para penggiat perdamaian di Ambon. Pendampingan ini terutama dilakukan untuk membangun rasa percaya di antara kelompok-kelompok yang pernah terlibat konflik dan kekerasan. Menurut seorang penggiat perdamaian, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

... melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh inti yang ada di situ sendiri untuk mengajak melakukan kegiatan bersama (seperti kerja bakti). Tapi yang saya usulkan memang masalah-masalah yang ada di depan kita, seperti konflik, perdamaian, dll. Kalau saya usul yang bukan masalah yang nyata di sini, para tokoh (seperti di Gereja Petra) akan beranggapan usulan itu belum bermanfaat. Biasanya strategi saya untuk melakukan kegiatan bersama itu: kita koordinasi dengan Bapak RT, setelah itu saya melakukan pendekatan ke Bapak Pendeta di Petra.<sup>64</sup>

Salah satu kendala yang biasanya muncul saat koordinasi di lapangan adalah keengganan beberapa pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat swadaya dan tanpa dana eksternal. Kendala lain adalah sulitnya memberikan pemahaman kepada para tokoh masyarakat akan pentingnya kegiatan yang hendak dilaksanakan. Selain itu, upaya pelibatan kaum perempuan juga menemui beberapa kendala, seperti sulitnya membangun kesadaran ibu-ibu yang berpendidikan rendah karena minat mereka pun rendah, serta kesibukan para ibu yang mesti mengerjakan kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan rumah tangga, berdagang, dan lain-lain. Dihadapkan pada kendala-kendala ini, salah satu terobosan yang dicoba oleh para penggiat perdamaian adalah melakukan pendekatan melalui majelis taklim. Melalui majelis ini para suami tidak memiliki alasan untuk melarang para ibu bergabung dalam kegiatan keagamaan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Wawancara dengan salah satu mahasiswa dan aktivis masyarakat, Ambon, 14 Mei 2013.

<sup>65</sup> *Ibid.*

# Simpulan dan Rekomendasi

## A. SIMPULAN

Ambon dari dulu telah dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan ciri segregasi yang kuat, baik secara sosial maupun spasial, antara komunitas Kristen dan Islam. Ketika terjadi konflik sosial tahun 1999, penyelesaiannya dilakukan melalui kebijakan rekonstruksi pasca-konflik. Kebijakan ini memiliki akibat tidak langsung dan tidak disengaja (*unintended consequence*) berupa terciptanya segregasi sosio-spasial baru. Pola kemunculan segregasi pasca-konflik banyak bersumber dari proses pengungsian dan mekanisme penyelesaian pengungsi, khususnya relokasi.

Saat konflik sosial meletus di Ambon (1999-2002) antara komunitas Kristen dan Islam, banyak warga kedua komunitas tersebut yang mengungsi ke wilayah-wilayah yang penduduknya secara etno-religius memiliki kesamaan identitas dengan mereka. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan rasa aman. Ketika konflik mereda, orang-orang tersebut enggan kembali lagi ke daerah asalnya. Konsekuensinya, daerah-daerah yang sebelum konflik sosial 1999 relatif heterogen menjadi semakin homogen.

Selain karena mekanisme di atas, tumbuhnya segregasi pasca-konflik juga terkait erat dengan proses relokasi yang diinisiasi oleh pemerintah. Tugas berat pemerintah daerah Kota Ambon, dan secara umum pemerintah daerah Provinsi Maluku, adalah mengurus penanganan pengungsi yang sampai saat ini masih menjadi persoalan; mulai dari validitas data pengungsi, tidak adanya pemberdayaan pengungsi, tidak meratanya bantuan, kondisi fisik-kesehatan yang masih memprihatinkan, sengketa lahan yang ditinggali, masalah kependudukan, pengembalian hak-hak perdata atas aset yang ditinggalkan, sertifikasi tanah, sampai klaim pemerintah bahwa penanganan pengungsi sudah selesai pada tahun 2009.

Beberapa opsi ditawarkan oleh pemerintah sebagai solusi untuk pengungsi pasca-konflik, yaitu kembali ke tempat asal, relokasi, dan

menetap di pengungsian. Di antara opsi-opsi tersebut, relokasi merupakan pilihan kebanyakan pengungsi pada saat itu. Namun secara tidak sengaja dan tidak langsung, relokasi-relokasi tersebut telah berkontribusi pada terbangunnya konsentrasi-konsentrasi komunitas baru yang tersegregasi karena pengungsi cenderung memilih tempat relokasi yang berdekatan atau berada di sekitar komunitas yang memiliki identitas yang sama dengan mereka. Tiga alasan penting pengungsi cenderung memilih tempat-tempat relokasi seperti itu adalah identitas mereka sebagai kelompok minoritas di daerah asal, absennya jaminan keamanan jika kembali ke daerah asal, dan gagalnya proses kembali ke daerah asal.

Beberapa kebijakan lantas menjadi prioritas pemerintah daerah dalam upaya membangun kembali Ambon, baik secara fisik-infrastruktural maupun secara psikis. Di samping itu, berbagai upaya tetap dilakukan untuk menangani segregasi yang semakin berkembang pasca-konflik 1999. Di antara berbagai kebijakan dan upaya-upaya tersebut, selain penanganan pengungsi secara tuntas, adalah rekonsiliasi dan pemulihan kembali tali persaudaraan, pembukaan permukiman baru yang heterogen, penanganan trauma, bimbingan anak-anak, sarasehan, keserasian sosial, dan pembangunan kurikulum *orang basudara* (bersaudara). Banyak di antara program tersebut yang secara jelas tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ambon tahun 2006-2011 dan tahun 2011-2016 serta, khususnya, Rencana Pembangunan Jangkah Panjang (RPJP) Kota Ambon tahun 2006-2026.

Beberapa program kebijakan rekonstruksi pasca-konflik sejauh ini dapat dianggap relatif terealisasi secara *kualitatif*; antara lain, rekonsiliasi dan pengembalian tali persaudaraan baik melalui sarasehan, pelaksanaan bersama berbagai *event* keagamaan, maupun dialog dan kerja sama antar-agama; pembangunan dan pengembangan wilayah-wilayah baru yang heterogen; pembangunan ruang-ruang publik untuk pertemuan antar-komunitas, seperti pembangunan kembali Lapangan Mardika; Keserasian Sosial; pembangunan kurikulum *Orang Basudara* (bersaudara); pembangunan daerah perbatasan; penanganan trauma.

Namun demikian, selain terhadap penanganan pengungsi yang berlarut-larut, beberapa catatan kritis-evaluatif ditujukan terhadap program-program pembangunan pasca-konflik dan program lain yang belum terlaksana sama sekali. *Pertama*, Program Keserasian Sosial ta-



hun 2006 banyak mengalami kebocoran dana dan tidak sesuai dengan target masyarakat. Banyak hasil proyeknya rusak dan tidak berfungsi lagi. *Kedua*, penanganan trauma tidak berjalan maksimal, bahkan *Center for Trauma* yang sudah dibangun tidak berfungsi lagi. *Ketiga*, pembangunan ruang publik untuk pertemuan antar-komunitas hanya berfokus pada Lapangan Mardika dan hampir tidak ada pembangunan ruang publik lain. *Keempat*, pembangunan kurikulum *Orang Basudara* (bersaudara) masih pada tataran konsep/gagasan dan belum terlihat implementasinya secara nyata. *Kelima*, pembangunan/renovasi pasar-pasar tradisional belum sepenuhnya terlaksana. *Keenam*, pembangunan daerah perbatasan yang sering kali menjadi *hot spot* munculnya kekerasan sama sekali belum tergarap, baik secara ekonomi maupun sosiokultural. *Ketujuh*, bimbingan untuk anak-anak pasca-konflik cenderung bersifat sporadis-seremonial. *Kedelapan*, kurangnya frekuensi pelaksanaan bersama *event* keagamaan. Selain masalah-masalah tersebut, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada perbedaan persepsi di antara segmen-segmen masyarakat mengenai urgensi pembangunan pos-pos permanen di perbatasan dan kehadiran anggota TNI yang di-BKO-kan di Ambon.

Secara umum, kondisi dan situasi pasca-konflik di Ambon dapat dikatakan berjalan relatif baik. Secara khusus, hubungan dan interaksi antar-komunitas juga dapat dikatakan berjalan cukup baik. Membaliknya kembali hubungan tersebut diperkuat dengan tumbuhnya kesadaran bersama akan konflik di antara komunitas-komunitas yang ada, di samping kerja sama antar-komunitas tersebut dalam menangani kekerasan yang muncul pasca-konflik. Akan tetapi harus diakui, masih terdapat beberapa segmen masyarakat yang masih merasakan trauma, ketakutan, atau ketidaknyamanan untuk memasuki atau bepergian ke wilayah tertentu pada waktu tertentu, khususnya malam hari. Dalam hal ini kita melihat, hal-hal tertentu kerap kali masih menjadi tembok penghalang hubungan antar-komunitas sehingga memerlukan penanganan yang lebih intens dan serius, terutama penanganan trauma dan penguatan kesaling-percayaan (*trust-building*) antar-komunitas.

Beberapa insiden kekerasan sempat terjadi secara sporadis pasca-konflik 1999 dan melibatkan kedua komunitas, Muslim dan Kristen. Namun demikian, kejadian-kejadian tersebut dapat dilokalisir dan ditangani relatif cepat, walaupun proses hukum terhadap para pelakunya masih saja mengalami kegagalan. Menguatnya segregasi pasca-konflik

telah memainkan peran tertentu dalam proses munculnya kasus-kasus kekerasan tersebut. Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai sumber pemicu munculnya kekerasan memiliki keterkaitan dengan, atau merupakan efek tak langsung dari, segregasi. Di antara hal-hal tersebut adalah intervensi pihak luar, termasuk provokasi dan adu domba antar-komunitas, disharmoni hubungan sosial antara pendatang dan pribumi, kecurigaan antarkelompok sebagai efek pasca-konflik, mudahnya daerah perbatasan menjadi *hot spot* munculnya kekerasan, dan rentannya masyarakat untuk dimobilisasi dengan memanfaatkan sentimen keagamaan kelompok tertentu.

Peran aparat keamanan, khususnya Kepolisian, dalam mencegah dan menangani kekerasan pasca-konflik mendapat sorotan kritis-evaluatif tersendiri. Secara umum masyarakat menilai aparat keamanan cenderung tidak responsif dan lamban dalam mencegah serta menangani insiden-insiden kekerasan pasca-konflik, bahkan cenderung gagal dalam memprosesnya secara hukum. Konsekuensinya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan pun menurun, khususnya pasca-insiden 11 September 2011 yang terjadi tidak jauh dari pos penjagaan polisi. Kondisi tersebut lantas berdampak pada preferensi masyarakat terhadap aparat keamanan. Masyarakat lebih cenderung memilih keterlibatan TNI daripada polisi, karena dianggap lebih cepat dan tanggap dalam menangani kekerasan. Namun demikian, terdapat segmen masyarakat lain yang menolak keberadaan TNI/BKO di Ambon karena kekerasan yang terjadi dianggap berhubungan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) yang merupakan tugas kepolisian, bukan tugas militer. Peran dan keberadaan TNI/BKO di Ambon sejauh ini masih menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Terutama, karena adanya dugaan terkait keberpihakan dan netralitas aparat TNI dalam menangani kasus kekerasan antar-komunitas.

Beberapa upaya strategis telah dilakukan oleh masyarakat secara umum untuk mencegah dan menangani konflik atau kekerasan yang terjadi pasca-konflik. Dari aspek sosiokultural dan keagamaan, upaya tersebut mencakup pelibatan komunitas lain dalam pelaksanaan *event* atau hari besar agama tertentu, penguatan pesan perdamaian lewat pendidikan, dan pengaktifan kembali *Pela Gandong*. Dari aspek politik, upaya-upaya tersebut mencakup pembagian kekuasaan (*power-sharing*) antar-komunitas. Adapun dari aspek ekonomi, masyarakat

membuat semacam pasar di komunitas-komunitas lain, yang sangat memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi antar-komunitas tersebut. Selain itu, kepemimpinan kelompok, mencakup tokoh agama, pimpinan daerah, dan tokoh adat, juga berperan penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah kekerasan pasca-konflik.

Dalam menjaga perdamaian serta menangani kekerasan dan segregasi pasca-konflik, berbagai unsur masyarakat telah banyak berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kaum perempuan. Upaya yang dilakukan oleh berbagai lembaga kemasyarakatan, seperti MUI Ambon, Keuskupan Amboina, GPM Silo, LAP-PAN, Komnas HAM, dan lain-lain telah memberikan kontribusi dari aspek keagamaan, sosial/pendidikan, dan ekonomi. Kontribusi kaum perempuan dalam menjaga perdamaian di Ambon juga relatif menonjol, termasuk dengan membantu penanganan trauma akibat konflik berkepanjangan, mengunjungi pengungsi dari masing-masing kelompok untuk memperkuat kesadaran mengenai konflik, membangun sarana pendidikan untuk anak-anak, dan sebagainya.

Aspek kepemimpinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menjaga kerukunan dan mencegah kekerasan pasca-konflik. Aspek kepemimpinan ini secara umum dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu kepemimpinan tokoh agama, kepemimpinan pimpinan daerah, dan kepemimpinan tokoh adat. Partisipasi pemimpin agama di Ambon dalam upaya menjaga kerukunan dan mencegah kekerasan pasca-konflik merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini karena posisi mereka yang strategis di tengah masyarakat, walaupun partisipasinya masih belum dapat sepenuhnya mencegah kekerasan. Untuk komunitas Kristen, upaya pencegahan terhadap melebarinya kekerasan sangat terbantu oleh sentralitas pemimpin gereja di mata umatnya. Hal serupa sayangnya sulit terjadi di komunitas Muslim, karena beragamnya afiliasi umat terhadap pimpinan agama dan organisasi Islam. Akibatnya, dalam komunitas Muslim inisiatif masyarakat menjadi lebih dominan.

Para tokoh daerah yang memegang jabatan, baik jabatan formal maupun bukan, memiliki pengaruh penting dalam masyarakatnya. Bahkan perbedaan agama antara pemimpin dan komunitasnya tersebut tidak sampai menghalangi mereka untuk mengerjakan tugas-tugasnya tanpa diskriminasi. Para pemimpin ini ada di kalangan komunitas Is-

lam ataupun Kristen, dan secara aktif turun tangan meredam konflik. Di samping itu, tokoh dengan kepemimpinan berbasis etnis juga berperan besar dalam memengaruhi komunitas masing-masing, termasuk untuk kepentingan politis.

Adapun pemimpin adat memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian dan mencegah kekerasan, salah satunya dengan mengeluarkan maklumat dan menyosialisasikannya kepada masyarakat umum. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin adat, yaitu kurangnya legitimasi mereka di daerah-daerah yang karakteristik demografinya plural, banyaknya pemimpin adat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis sehingga tidak dapat lagi mewakili warga adat, serta ketiadaan aturan Latupati yang mengikat semua raja sehingga menyebabkan persoalan di masyarakat sulit diselesaikan.

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan dalam studi ini, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. PENANGANAN SEGREGASI PASCA-KONFLIK

- Kebijakan relokasi pasca-konflik telah secara jelas menciptakan segregasi baru dan homogenisasi daerah yang dulunya bercampur. Untuk menangani segregasi yang sudah terlanjur terjadi ini, Pemerintah Kota Ambon seharusnya menciptakan program-program rekonsiliasi yang strategis dan lebih kreatif agar kedua komunitas yang berbeda, komunitas Muslim dan Kristen, khususnya yang tinggal di wilayah relokasi/pengungsian, dapat berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain secara lebih intensif. Selain itu, pemerintah kota juga diharapkan tidak membuat program yang cenderung bersifat seremonial dan temporal semata.
- Perencanaan tata ruang atau pembangunan fisik-infrastruktur dan permukiman (*settlement*) harus sensitif terhadap de-segregasi dan konflik, serta berorientasi pada penciptaan model pembauran masyarakat (*civic-engagement model*). Kebijakan penanganan konflik yang ditawarkan oleh pemerintah daerah di masa lalu, dan akhirnya berimplikasi saat ini, memang harus di-

lihat secara proporsional karena di masa lalu pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan. Namun demikian, keterlanjuran ini bisa dan harus segera disikapi melalui rancang bangun tata ruang Kota Ambon yang baru, yang memungkinkan intensitas perjumpaan warga lintas identitas semakin tinggi. Dalam hal ini, tentu saja diperlukan kehendak baik (*good-will*), kehendak politik (*political-will*), dan keberanian untuk menemukan dan merealisasikan jalan keluar (*breakthrough*) yang berorientasi pada kepentingan hidup bersama masyarakat Ambon yang lebih aman dan nyaman di masa mendatang.

- Beberapa kebijakan penting pembangunan pasca-konflik perlu dihidupkan dan ditingkatkan kembali oleh Pemerintah Kota Ambon, meliputi (1) revitalisasi pusat penanganan trauma dan menyediakan/mendidik tenaga ahli untuk menangani trauma; (2) memperbanyak ruang-ruang publik—selain Lapangan Merdeka—untuk interaksi/komunikasi antar-komunitas (*civic-engagement*); (3) mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum *Orang Basudara* di sekolah-sekolah dengan memasukkan muatan nilai-nilai kebijakan lokal (*local wisdom*), terutama *Pela Gandong*; (4) membangun pasar-pasar tradisional untuk perjumpaan antar-komunitas dan pembangunan daerah-daerah perbatasan yang sering kali menjadi *hot spot* kekerasan; (5) meningkatkan kerja sama antar-komunitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan; (6) meningkatkan pelaksanaan *Biking Panas Pela* secara konsisten.
- Pemerintah Kota Ambon dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang kompeten, perlu melakukan kampanye media secara berkesinambungan untuk memperkenalkan dan menginstitutionalisasi simbol-simbol kebersamaan, serta mencegah penggunaan simbol-simbol yang bersifat sektarian.
- Pemerintah Kota Ambon dan lembaga-lembaga nonpemerintah dihadapkan memperbanyak kegiatan *live-in* lintas komunitas, terutama bagi siswa-siswa sekolah dan *stakeholders* lain yang berkepentingan. Dengan demikian, kegiatan tersebut bisa menumbuhkan proses de-segregasi yang diharapkan bisa mengatasi segregasi spasial.
- Di samping upaya-upaya rekonsiliasi di atas, Pemerintah Kota Ambon perlu membuat program khusus untuk menguatkan ke-

saling-percayaan (*trust-building*) antar-komunitas. Hal ini perlu dilakukan untuk menanggulangi trauma, ketakutan, atau ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian anggota masyarakat saat memasuki atau bepergian ke wilayah tertentu pada waktu tertentu. Selain itu, hal ini juga penting untuk memberikan penyeimbang bagi kecenderungan Pemerintah Kota Ambon yang lebih menekankan pembangunan fisik pasca-konflik.

- Pihak instansi terkait pendidikan dan ketenagakerjaan harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi/menghilangkan persepsi negatif berkenaan dengan diskriminasi dalam mengakses pendidikan, berbagai layanan publik, akses kesehatan, serta pekerjaan dan promosi jabatan di lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Ambon.
- Dalam konteks di atas, Pemerintah Kota Ambon perlu mempertimbangkan “perimbangan” kedua komunitas, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, dengan tetap mendahulukan prinsip kompetensi. Selain itu, Pemerintah Kota Ambon juga perlu melakukan langkah-langkah untuk menekan politik identitas para elite politik yang cenderung meningkatkan tensi dan sentimen kelompok, dan tanpa disadari membuka ruang serta peluang bagi potensi benturan antarkelompok di tingkat akar rumput (*grass-root*).
- Di masa lalu Maluku, khususnya Ambon, memiliki sejumlah tokoh yang diterima, didengar, dan dihormati oleh siapa pun. Dewasa ini Ambon kehilangan tokoh-tokoh semacam itu. Oleh karenanya, salah satu pendekatan penting untuk mengelola kehidupan masyarakat Kota Ambon yang terlanjur tersegregasi adalah mendorong proses penokohan sejumlah orang menjadi tokoh daerah.
- Pemerintah Kota Ambon perlu terus memperkuat dan meningkatkan kapasitas psikologis dan pengetahuan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah yang tersegregasi, bahwa konflik Ambon terjadi bukan karena perbedaan antara komunitas Kristen dan Islam, tetapi karena adanya intervensi kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, mereka sudah seharusnya hidup berdampingan secara damai, sebagaimana sebelum konflik 1999 terjadi.

- Mengingat strategisnya posisi lembaga-lembaga kemasyarakatan, khususnya lembaga keagamaan dan adat, dalam menjaga perdamaian di Ambon, Pemerintah Kota Ambon sudah seharusnya mengajak dan mempererat hubungan serta berkoordinasi dengan mereka dalam mengimplementasikan setiap kebijakan dan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan kedua komunitas.
- Pemerintah Kota Ambon dan Provinsi Maluku diharapkan dapat bersinergi dalam menjalankan program-program pembangunan pasca-konflik, dan bukannya berjalan sendiri-sendiri. Kondisi tersebut diperlukan untuk memaksimalkan hasil dan target pembangunan tersebut.

## 2. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGUNGSI/RELOKASI

- Pemenuhan hak-hak pengungsi yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang berlarut-larut sebaiknya diselesaikan oleh Pemerintah Kota Ambon secara bijak dan cepat. Jika tidak, kondisi tersebut dapat menjadi pemicu sengketa antarmasyarakat yang berujung pada munculnya kekerasan. Masalah tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kekacauan dan kekerasan di Ambon.
- Pemerintah Kota Ambon perlu ikut melakukan intervensi dalam proses pemberdayaan masyarakat relokasi/pengungsi serta tidak melepas begitu saja tanggung jawab terhadap mereka.
- Pemerintah Kota Ambon juga harus membantu menyelesaikan berbagai sengketa tanah terkait relokasi dan memberikan kepastian hukum tentangnya, serta tidak lagi berkecenderungan lepas tangan. Selain itu, Pemerintah Kota Ambon juga harus menyelesaikan berbagai masalah kependudukan (misalnya, masalah terkait Kartu Tanda Penduduk/KTP), sertifikasi tanah, dan pengembalian hak perdata para pengungsi atas aset yang ditinggalkan.
- Pemerintah Kota Ambon perlu mengembangkan agenda khusus yang memungkinkan pertemuan dan pembauran antara warga pengungsi dengan *host community* mereka di tempat asal. Bagi warga Muslim yang pernah bermukim di Batu Gajah, misalnya, bisa saja membuat kegiatan semisal “Batu Gajah Panggil Pulang”. Dengan demikian, keterikatan sentimen pengungsi

dengan daerah asalnya akan tetap terpelihara, meskipun saat ini di antara mereka tidak lagi menetap di satu tempat sebagai satu komunitas.

### 3. APARAT KEAMANAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PASCA-KONFLIK

- Pasukan TNI/BKO sebaiknya ditarik secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi wilayah-wilayah tertentu di Ambon. Dengan demikian, pihak kepolisian sudah harus mulai lebih dominan dan profesional dalam memegang kontrol keamanan di Kota Ambon.
- Setiap kasus kekerasan yang muncul harus diproses sampai tuntas melalui jalur hukum secara adil dan profesional. Tindakan tegas ini diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas Kota Ambon pasca-konflik dalam aspek keamanan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, aparat keamanan harus tanggap dan profesional dalam menangani setiap kasus kekerasan yang terjadi.
- Pemerintah Kota Ambon dan aparat keamanan perlu melakukan langkah-langkah preventif untuk mewaspadai dan menangani beberapa faktor yang sering kali menjadi pemicu terjadinya kekerasan, seperti intervensi pihak luar, provokasi atau adu domba antar-komunitas, disharmoni hubungan sosial antara pendatang dan pribumi, kecurigaan antarkelompok sebagai efek pasca-konflik, mudahnya daerah perbatasan menjadi tempat munculnya kekerasan, dan mudahnya mobilisasi masyarakat dengan memanfaatkan sentimen keagamaan. Dengan demikian, peran intelijen dan peringatan dini harus lebih dimantapkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kekerasan.
- Untuk mengurangi potensi kekerasan pasca-konflik, Pemerintah Kota Ambon sudah seharusnya fokus pada penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran, serta menciptakan berbagai kegiatan kepemudaan, termasuk olahraga, seni, musik, dsb.
- Mengingat daerah perbatasan kerap menjadi *hot spot* munculnya kekerasan pasca-konflik, Pemerintah Kota Ambon perlu memprioritaskan pembangunan daerah tersebut, baik pembangunan bidang sosial, pendidikan, maupun ekonomi, dengan mencipta-



kan berbagai kesempatan kerja, membangun atau memperbaiki sekolah-sekolah, dan menggelar berbagai kegiatan kepemudaan yang dapat menghubungkan pemuda antar-komunitas.

- Secara umum, untuk mengeliminasi kekerasan pasca-konflik Pemerintah Kota Ambon perlu mengembangkan mekanisme penjagaan diri (*self-defence mechanism*) yang tertanam (*built-in*) dalam struktur sosial untuk menghindarkan keterlibatan masyarakat dalam aksi-aksi kekerasan. Untuk keperluan ini Pemerintah Kota Ambon dapat memanfaatkan peran lembaga-lembaga adat dan lembaga-lembaga agama, termasuk organisasi-organisasi yang dapat menghimpun aktivitas bersama lintas identitas, seperti olahraga, musik dan kesenian pada umumnya, dan sebagainya. Selain itu, mengembangkan dialog lintas budaya juga menjadi kebutuhan yang sangat krusial.

# Daftar Pustaka

## BUKU DAN ARTIKEL

- Adam, J. (2008). "Forced Migration, Adat, and a Purified Present in Ambon, Indonesia." *Ethnology* 47(4): 209-225.
- Adam, J. (2010). "Forced Migration and the Ethno-Territorial Effects of Customary Tenure." *Jurnal Development and Change* 41(3): 401-419.
- Altheide, D. L. (2000). "Tracking Discourse and Qualitative Document Analysis." *Poetics* 27: 28-299.
- Amirrachman, A. (Ed.). (2007). *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta, Indonesia: The International Centre for Islam and Pluralism (ICIP).
- Amirrachman, A. (2012). "Peace Education in the Moluccas: Between Global Models and Local Interests." Disertasi, University of Amsterdam.
- Azca, M. N. (2006), "In Between Military and Militia: The Dynamics of the Security forces in the Communal conflict in Ambon." In *Asian Journal of Social Sciences* 34(3):431-455.
- Bakhtin, M. M. (1984). *The Dialogic Imagination* (trans. by C. Emerson & M. Holquist). Austin, TX: University of Texas Press.
- Barbra, L. (2009). "Resettling Peoples, Redressing Histories: Challenging Answers to the Land Question in Namibia and the Netherlands." *Macalester International* 22:1-25.
- Barron, P., Azca, M. N., & Susdinarjanti, T. (2012). *After the Communal War: Understanding and Addressing Post-Conflict Violence in Eastern Indonesia*. Yogyakarta: Center for Security and Peace Studies (CSPS Books).
- Bartels, D. (1977). *Pela Alliances in the Central Moluccas and in the Netherlands: A Brief Guide for Beginners*. Diambil dari <http://www.pathfinder.com/asiaweek/99/0326/nat4.html>
- Bartels, D. (2003), "The Evolution of God in the Spice Islands: the Converging and Diverging of Protestant Christianity and Islam in the Colonial and Post-Colonial Periods." Makalah dipresentasikan

- pada *The Frobenius Institute of the Johann Wolfgang Goethe University* di Frankfurt/Main, 14 Desember 2003.
- Bartels, D. (2003b). "Your God is No Longer Mine: Moslem-Christian Fratricide in the Central Moluccas (Indonesia) After a Half-Millennium of Tolerant Co-Existence and Ethnic Unity." Makalah dipresentasikan di *Konferensi tentang Maluku yang Ke-5*, di Darwin, Australia, 2003.
- Beale, B., Cole, R., Hillege, S., McMaster, R., & Nagy, S. (2004). "Impact of In-Depth Interviews on the Interviewer: Roller Coaster Ride." *Nursing and Health Sciences* 6:141-147.
- Berger-Schmitt, R (2000) *Social Cohesion as an Aspect of the Quality of Societies: Concept and Measurement, towards a European System of Social Reporting and Welfare Measurement*. A TSER-Project funded by the European Commission. Mannheim: Center for Survey Research and Methodology.
- Brinkerhoff, D. W. (2005). "Rebuilding Governance in Failed States and Post-Conflict Societies: Core Concepts and Cross-Cutting Themes." *Public Administration and Development* 25(1):3-14.
- Braithwaite, J., Braithwaite, V., Cookson, M., & Dunn, L. (2010). *Anomie and Violence Non-Truth and Reconciliation in Indonesian Peace Building*. Canberra: ANU Press.
- Buchanan, C. (Ed.). (2011). *Conflict Management in Indonesia: An analysis of the conflicts in Maluku, Papua and Poso*. Geneva, Switzerland: The Indonesian Institute of Sciences, Current Asia and the Centre for Humanitarian Dialogue.
- Chang, W. (2002). "Regarding Ethnic and Religious Conflict." In C. S. Bamualim, K. Helmanita, A. Fauzia, E. Kusnadinigrat (Eds.), *Communal conflicts in contemporary Indonesia* (pp. 33-42). Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya.
- Chapman, T., & Roeder, P. G. (2007). "Partition as a Solution to Wars of Nationalism: The Importance of Institutions." *American Political Science Review* 101(4):677-691.
- Collier, P., Hoeffler, A., & Söderbom, M. (2006). "Post-Conflict Risks." *CSAE Working Paper Series 2006-12*. Oxford, UK: Centre for the Study of African Economies, University of Oxford.
- Davidson J. S. (2003). "The Politics of Violence on an Indonesian Periphery." *Southeast Asia Research*, 11(1), 59-89.

- Denzin, N. K. (2001). The Reflexive Interview and a Performative Social Science." *Qualitative Research* 1(1):23-46.
- Diprose, R. (2007). "Passing on the Challenges or Prescribing Better Management of Diversity? Decentralization, Power-Sharing and Conflict Dynamics in Central Sulawesi, Indonesia." *CRISE Working Paper No. 38*. Paper presented at A CRISE Policy Conference, July 9-10, 2007, Oxford, UK.
- Dinas Pendidikan Kota Ambon (2009). *Kurikulum Pendidikan Orang Basudara Maluku, Buku Ajar Guru: Psikososial*. Ambon
- Diprose, R. (2009). "Inequalities and Indirect Conflict Interventions: The Evidence on Perceptions of Difference, Social Cohesion, and Sub-National Variations in Violence in Central Sulawesi, Indonesia." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 2:95-147.
- Djajadi, I. (2004). "Kekerasan Etnik dan Perdamaian Etnik: Meneleah Penyelesaian Tindak Pidana Lintas Etnik di Kalimantan Barat 1999-2003." *Jurnal Sosiologi Masyarakat* 13.
- Djana, A. et al. (2004). *Interaksi Sosial Pasca Konflik Horizontal: Studi Kasus pada Komunitas Islam-Kristen di Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara*. Makasar, Indonesia: Jurnal Pascasarjana UNHAS
- European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI). (2002). *ECRI General Policy Recommendation N°7: National Legislation to Combat Racism and Racial Discrimination*. Strasbourg, France: Author.
- Fearon, J. D., & Laitin, D. D. (2003). "Ethnicity, Insurgency and Civil War." *American Political Science Review* 97(1):75-90.
- Fearon, J. D & Laitin, D. D. (1996). "Explaining Interethnic Cooperation." *American Political Science Review* 90(4):715-735.
- Galtung, J. (1985). "Twenty-Five Years of Peace Research: Ten Challenges and Some Responses." *Journal of Peace Research* 22(2):141-158.
- Hadi, S. (2005). "Enhancing Local Governance through Decentralization Policy in Managing Conflict Affected Regions in Indonesia." In United Nations, *Decentralization: Poverty Reduction, Empowerment and Participation (Unedited Version)* (pp. 117-129). New York, NY: Author.
- Hendrix, C. (2010). "Measuring State Capacity: Theoretical and Empirical Implications for the Study of Civil Conflict." *Journal of Peace Research* 47(3):273-285.

- Holtzman, S., Elwan, A., & Scott, C. (1998). *Post-Conflict Reconstruction: The Role of the World Bank*. Washington, DC: The World Bank.
- Huber, K., Tindjabate, C., Waru, D., Watson, R., Rahmawati, A., Umrah, Y., Amaya, R., & Indriani, F. (2004). *Menuju pembangunan damai: Membangun kohesi sosial dan rekonsiliasi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara (Kajian Tematis)*. Jakarta, Indonesia: UNDP.
- Kaufmann, C. (1996). "Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars." *International Security* 20(4):136–175.
- Klinken, G. V. (2007). *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. Washington: Routledge.
- Klinken, G. V. (2001). "The Maluku Wars: Bringing Society Back in," In *Indonesia* 71:1-26.
- Kosasih, L. S. (2010). "Chinese Indonesians: Stereotyping, Discrimination and Anti-Chinese Violence in the Context of Structural Changes up to May 1998 Riots." Unpublished master's thesis, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (Eds.). (2002). *World Report on Violence and Health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
- Kumar, K. (1987). "Conducting Focus Group Interviews in Developing Countries." *A.I.D. Program Design and Evaluation Methodology Report No. 8*. Washington, D.C.: U.S. Agency for International Development.
- Kumar, K. (1989). "Conducting Key Informant Interviews in Developing Countries." *A.I.D. Program Design and Evaluation Methodology Report No. 8*. Washington, D.C.: U.S. Agency for International Development.
- Kusdijono. (2006). "Evaluasi Program Pemulihan dan Pembangunan Pengungsi Madura Pasca Kerusuhan di Kalimantan Barat: Studi Kasus di Tiga Satuan Relokasi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak." Unpublished Master's Thesis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Lambourne, W. (2004). "Post-Conflict Peace Building: Meeting Human Needs for Justice and Reconciliation." *Peace, Conflict and Development* 4:1-24.
- Mawdsley, N., Tanuhandaru, M., Holman, K. (2002). *Report of the EC Conflict Prevention Assessment Mission: Indonesia*. Brussel, Belgium: European Commission Conflict Prevention and Crisis Management Unit.

- Olzak, S., Shanahan, S., & McEneaney, E. (1996). "Poverty, Segregation, and Race Riots: 1960-1993." *American Sociological Review* 61(4):590-613.
- Pamuji M., N., Horiba, A., Miqdad, M., Gogali, M., & Sipasulta, L. (2008). *Success Story Mekanisme Komunitas dalam Penanganan dan Pencegahan Konflik: Studi Kasus di Desa Wayame (Ambon) dan Desa Tangkura (Poso)*. Jakarta: ITP-FES.
- Pariela, T. D. (2007). "Political Process, Public Policy, and Peace Building Process: Case of Ambon City, Maluku." In K. Matsui (Ed.), *Regional Development Policy and Direct Local-Head Election in Democratizing East Indonesia* (pp. 101-123). Chiba, Japan: Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods (3<sup>rd</sup> Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Qadeer, M. A. (2003). "Ethnic Segregation in a Multicultural City: The Case of Toronto, Canada. *CERIS Working Paper No. 28*. Toronto, Canada: CERIS.
- Ratnawati, T. (2006). "Antara Kekerasan dan Kontestasi Politik: Membangun Demokrasi Pasca Konflik Kasus Ambon." In T. Ratnawati & N. Kleden-Probonegoro (Eds.), *Wacana Politik dan Budaya di Masa Transisi* (pp. xxx-xxx). Jakarta: LIPI.
- Reskin, B. F., & Bielby, D. B. (2005). "A Sociological Perspective on Gender and Career Outcomes." *Journal of Economic Perspectives* 19(1):71-86.
- Rozi, S. et al. (2006). *Kekerasan Komunal: Anatomi Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar
- Sambanis, N. (2000). "Partition as a Solution to Ethnic War." *World Politics* 52:437-483.
- Sihbudi, R. (2001). *Bara dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua & Riau*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Smith, C. Q. (2005). "The Roots of Violence and Prospects for Reconciliation: A Case Study of Ethnic Conflict in Central Kalimantan, Indonesia." *Social Development Papers, Conflict Prevention and Reconstruction*, 23. Washington, DC: World Bank.
- Suaedy, A. (2000). *Luka Maluku: Militer Terlibat*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

- Sunarto, K., Nathan, M., & Hadi, S. (2005). *Overcoming Violent Conflict (Vol. 2): Peace and Development Analysis in Nusa Tenggara Timur*. Jakarta, Indonesia: UNDP
- Tadjoeddin, M. Z. (2004), "Civil Society Engagement and Communal Violence: Reflections of Various Hypotheses in the Context of Indonesia." *Politics Administration and Change* 42:1-18.
- Tanasaldy, T. (2007). "Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat." In H. S. Nordholt & G. Van Klinken (Eds.). *Politik Lokal di Indonesia* (pp. 461-490). Jakarta, Indonesia: Buku Obor & KITLV Jakarta.
- Tomsa, D. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. New York: Routledge.
- Trijono, L., & Djalong, F. D. (Eds.). (2006). *Masyarakat Sipil dan Pencegahan Konflik Bersenjata: Dari Reaktif ke Preventif (Hasil Lokakarya di Solo 1-2 Desember 2005)*. Yogyakarta, Indonesia: CSPS, UNDP, & Bappenas.
- Varshney, A., Panggabean, R., & Tadjoeddin, M. Z. (2004). "Pattern of Collective violence in Indonesia (1990-2003)." *UNSFIR Working Paper 04/03*. Jakarta, Indonesia: UNSFIR.
- Weidmann, N. B., & Salehyan, I. (2010, May 1). "Violence and Ethnic Segregation: A Computational Model Applied to Baghdad." Paper presented at *The New Faces in Political Methodology III Conference*, Pennsylvania State University.
- Wiseman, J. P., & Aaron, M. A. (2001a). "Observation." In E. Ksenych & D. Liu (Eds.), *Conflict, Order and Action: Reading in Sociology* (pp. 443-447). Toronto, Canada: Canadian Scholar's Press.
- Wisudo, B. (2010). *Bertaruh Nyawa Merajut Damai: Kisah Gerakan Peringatan Dini Konflik di Ambon*. Jakarta: Yayasan Tifa.
- Yuwono, D. B. (2008). "Wayame: Gerakan Multikultural di Tengah Konflik Ambon." *Harmoni: Jurnal Multikultural Multireligius*, 7(27).

#### DOKUMEN, LAPORAN, SURAT KABAR, DAN MAJALAH

- Ambonekspres.com, "1066 KK Pengungsi Belum Terlayani." Diakses dari <http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=46&id=40569>, pada tanggal 14 Februari 2012.
- Antaraneews.com., "Gubernur Maluku Pastikan Ambon sudah Tenang." Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/275130/gubernur-maluku-pastikan-ambon-sudah-tenang>, pada 19 Mei 2013.

- Bappenas. (2009). *Pidato Kenegaraan Tahun 2009*. Diakses dari <http://bappenas.go.id/node/42/2158/pidato-kenegaraan-tahun-2009/>, pada 5 Juni 2012.
- Bappenas. (2010). *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014*. Jakarta: Author.
- BPS Sensus Penduduk 2010.
- BPS Kota Ambon, 2012.
- BeritaMaluku.com, "Sepi Pembeli, Pasar Valentin Ambon Tidak Layak." Diakses dari <http://www.beritamaluku.com/2013/03/sepi-pembeli-pasar-valentine-tidak.html>
- Center for Strategic and International Studies (CSIS) and the Association of the United States Army (AUSA), *Task-Framework: Post Conflict Reconstruction*, Mei 2012.
- Depkes.go.id., "Kerusuhan Sosial di Kota Ambon, Maluku." Diakses dari <http://penanggulangankrisis.depkes.go.id/article/view/6/1630/KONFLIK-SOSIAL-DI-DELI-SERDANG.htm>, pada 12 Mei 2013.
- International Contact Group. (2012, February 13). *Indonesia: Cautious Calm in Ambon (Asia Briefing No. 133)*. Jakarta/Brussels: Author.
- Kementerian Sosial RI, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (2012). *Petunjuk Teknis Kekeragaman Sosial Berbasis Masyarakat*.
- Kompasiana.com, "Bentrok Maluku, 5 Tewas." Diakses dari: <http://regional.kompasiana.com/2012/12/30/bentrok-maluku5-warga-tewas--520821.html>, pada 14 Februari 2013.
- Kompas.com., "Kronologi Kerusuhan Ambon." Diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2011/09/11/19145665/Kronologi.Kerusuhan.Ambon>, pada 19 Mei 2013.
- Kompas, "Damai Tak Tergoyahkan di Wayame", 21 Mei 2004.
- Laporan Tim Verifikasi Data Sisa Pengungsi Korban Konflik Sosial di Provinsi Maluku, Juni 2012.
- Merdeka.com., "Tiga Rumah Dibakar dalam Kerusuhan di Ambon." Diakses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-rumah-dibakar-dalam-kerusuhan-di-ambon.html>, pada 18 Mei 2013.
- Okezone.com., "Korban Kerusuhan Ambon Akibat Luka Tembak." Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2011/09/12/340/501602/korban-kerusuhan-ambon-tewas-akibat-luka-tembak>, pada 17 Mei 2013.



- Okezone.com., “Seratusan Rumah Hangus, Warga Ambon Mengungsi.” Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2011/09/12/340/501614/seratusan-rumah-hangus-warga-ambon-mengungsi>, pada 19 Mei 2013.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon, No. 4 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang (RPJP) Kota Ambon, Tahun 2006-2026.*
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon No. 2 Tahun 2006.*
- Primanita, A. (2012, Januari 17). “Konflik Komunal dan Politik Mewarnai Tahun 2012-2014.” Berita Satu. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/hukum/26381-konflik-komunal-dan-politik-mewarnai-tahun-2012-2014.html>
- Radioaustralia.net.au., “Korban Tewas Kerusuhan Ambon Menjadi 7 Orang.” Diakses dari <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2011-09-14/korban-tewas-kerusuhan-ambon-menjadi-7-orang/93306>, pada 19 Mei 2013.
- Rencana Pembangunan Jangkah Menengah (RPJM) Kota Ambon, 2006-2011.*
- Santoso, A. (2006). “Ambon Ulang Tahun Damai, tapi Pengungsi Masih Terabaikan” (Warta Berita Radio Nederland Wereldomroep, 06 September 2006). Diakses 6 Juni 2012 dari <http://www.mail-archive.com/berita@listserv.rnw.nl/msg01119.html>
- Siwalimanews.com, “November, Penanganan Pengungsi Tuntas.” Diambil dari [http://www.siwalimanews.com/post/november\\_penanganan\\_pengungsi\\_kota\\_ambon\\_tuntas](http://www.siwalimanews.com/post/november_penanganan_pengungsi_kota_ambon_tuntas), pada 14 Februari 2012.
- Siwalimanews.com, “Gubernur Diminta Batalkan Rencana Tambah TNI BKO, 11 Oktober 2011.” Diambil dari [http://www.siwalimanews.com/post/gubernur\\_diminta\\_batalkan\\_rencana\\_tambah\\_tni\\_bko](http://www.siwalimanews.com/post/gubernur_diminta_batalkan_rencana_tambah_tni_bko), pada 25 November 2013.
- Tempo.co, “Sekelompok Pemuda Dicegat, Ambon Tegang.” Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/15/058403959/Sekelompok-Pemuda-Dicegat-Kota-Ambon-Tegang>, pada 17 Mei 2013.
- Undang-an-Undang No. 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

# Indeks







# Lampiran-lampiran

## LAMPIRAN 1: FORM INTERVIEW TRANSCRIPT

Interview # :  
Interviewee(s) :  
Age :  
Gender :  
Occupation :  
Affiliation :  
  
Date and time :  
Location of interview :  
Researchers :

## LAMPIRAN 2: INTERVIEW GUIDE

### PERTANYAAN PENELITIAN 1:

Bagaimana segregasi muncul/tumbuh pasca perdamaian di Ambon?

#### *Informan Terkait*

Akademisi lokal; penggiat LSM terkait isu sosial, khususnya perdamaian; tokoh agama; tokoh adat; aktor konflik (penggerak dan korban konflik dahulu)

#### *Pertanyaan Interview:*

—Untuk non-aktor konflik (Akademisi lokal; penggiat LSM terkait isu sosial, khususnya perdamaian; tokoh agama; tokoh adat)

1. Secara singkat, bisakah Anda deskripsikan peran dan posisi Anda di lembaga ini?
2. Bagaimana Anda melihat hubungan antar kelompok dan/atau komunitas sebelum dan sesudah konflik?
3. Bagaimana menurut Anda kelompok-kelompok tersebut bisa terbentuk?

4. Bagaimana Anda melihat solidaritas yang terbangun di antara anggota kelompok/komunitas?
  5. Menurut Anda, bagaimana identitas masing-masing kelompok semakin menguat dibandingkan sebelum konflik?
  6. Faktor-faktor apa saja yang menyumbang terhadap penyatuan kelompok-kelompok yang ada? Etnisitas? Agama? Geografis? Lainnya?
  7. Faktor-faktor apa saja yang menyumbang terhadap pemisahan kelompok-kelompok yang ada? Etnisitas? Agama? Geografis? Lainnya?
  8. Bagaimana pemisahan kelompok-kelompok tersebut tumbuh setelah konflik?
  9. Bagaimana Anda melihat proses pemisahan kelompok-kelompok tersebut setelah konflik?
  10. Bagaimanakah Anda menggambarkan bentuk pemisahan kelompok tersebut setelah konflik?
  11. Apa dampak dari adanya pemisahan dan perbedaan antar kelompok di daerah ini bagi layanan yang diberikan kepada mereka?
  12. Apa saja pengalaman diskriminasi yang pernah dilaporkan oleh kelompok-kelompok di daerah ini dalam bidang ekonomi? Sosial? Politik? Pendidikan? Layanan kesehatan dan lain-lain?
  13. Untuk saat ini, Bagaimana persebaran kelompok-kelompok setelah konflik secara geografis?
  14. Apa saja motivasi dan kepentingan yang mendorong keberadaan masing-masing kelompok?
- Untuk aktor konflik (penggerak, korban konflik dahulu dan/atau yang kelompoknya disegregasi)
1. Secara singkat, bisakah Anda deskripsikan peran dan posisi Anda di masyarakat/kelompok Anda?
  2. Bagaimana Anda melihat identitas kelompok Anda dalam kaitannya dengan kelompok lain?
  3. Menurut Anda, mengapa kelompok Anda dipisahkan dengan kelompok yang lain setelah konflik? Bagaimana Anda melihatnya?
  4. Apa dampak dari adanya pemisahan dan perbedaan antar kelompok di daerah ini bagi kelompok Anda?

5. Bagaimana Anda melihat proses pemisahan kelompok Anda dengan yang lain setelah konflik?
6. Bagaimanakah Anda menggambarkan bentuk pemisahan kelompok Anda dengan yang lain setelah konflik?
7. Apa dampak dari adanya pemisahan dan pembedaan antar kelompok di daerah ini bagi layanan yang diberikan kepada kelompok Anda?
8. Apa saja pengalaman diskriminasi yang pernah dialami oleh kelompok Anda? dalam bidang ekonomi? Sosial? Politik? Pendidikan? Layanan kesehatan dan lain-lain?

#### PERTANYAAN PENELITIAN 2:

Apa dampak kebijakan rekonstruksi pembangunan pasca konflik terhadap muncul dan menguatnya segregasi di Ambon?

#### *Informan Terkait:*

Unsur Pemerintahan (walikota, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Agama, Dinas Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll.); unsur keamanan (TNI dan Kepolisian, preman); unsur ekonomi (pedagang dan pebisnis); unsur masyarakat pengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, dll.

#### *Pertanyaan Interview:*

1. Secara singkat, bisakah Anda deskripsikan peran dan posisi Anda di lembaga Anda?
2. Apa saja program yang pernah dilaksanakan pasca konflik baik oleh pemerintah, LSM, atau pihak swasta/pengusaha?
3. Apa saja yang menjadi prioritas utama pembangunan di masa pasca konflik?
4. Menurut Anda apakah penetapan prioritas ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum?
5. Menurut Anda, bagaimana program-program pembangunan setelah konflik tersebut menciptakan pemisahan kelompok?
6. Bisakah Anda menggambarkan atau mencontohkan program-program pembangunan tertentu yang memberikan kontribusi pada penciptaan dan penguatan pemisahan kelompok setelah konflik?



7. Menurut Anda, mengapa pemisahan kelompok dilakukan sebagai bagian integral pembangunan pasca konflik?
8. Bagaimana Anda melihat bahwa pembangunan yang dilakukan pasca konflik hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja?
9. Apa saja program pembangunan yang sudah dilakukan tapi menurut Anda tidak kondusif dalam situasi pasca konflik?
10. Apa saja program yang semestinya harus dilakukan, tetapi tidak/belum direalisasikan?
11. Menurut Anda, di antara kelompok yang dipisahkan, mana saja yang memiliki akses lebih besar terhadap layanan dan/atau kue pembangunan pasca konflik?

#### PERTANYAAN PENELITIAN 3:

Bagaimana hubungan antara segregasi dan munculnya kekerasan di Ambon pasca konflik?

#### *Informan Terkait:*

Akademisi lokal, unsur keamanan; unsur adat; unsur agama; unsur pemuda

#### *Pertanyaan Interview:*

1. Secara singkat, bisakah Anda deskripsikan peran dan posisi Anda di lembaga Anda?
2. Bagaimana Anda menggambarkan gesekan yang terjadi antar kelompok/komunitas di daerah ini?
3. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan gesekan pasca konflik tersebut?
4. Bagaimana Anda melihat kekerasan terjadi antar kelompok di daerah ini pasca konflik?
5. Bagaimana pemisahan kelompok ini memicu kekerasan antar kelompok? Seberapa sering itu terjadi?
6. Bagaimana persaingan antar kelompok dalam mendapatkan program pembangunan?
7. Seberapa besar persaingan tersebut meningkatkan ketegangan dan bahkan kekerasan terhadap kelompok lain? Mengapa?

8. Sejauh mana pemisahan tersebut menghambat komunikasi dan interaksi antar kelompok?
9. Bagaimana Anda menggambarkan kurang atau tidak adanya komunikasi dan interaksi antar kelompok sebagai akibat kebijakan pemisahan meningkatkan ketegangan dan/atau bahkan menimbulkan kekerasan antar kelompok pasca konflik?
10. Apa peran dari masing-masing kelompok dalam menjaga ketenangan dan perdamaian di daerah ini? Bagaimana seluruh kelompok bekerja sama untuk menjaga hal tersebut?
11. Seberapa efektif peran pemimpin kelompok dalam menenangkan para anggotanya saat terjadi kekerasan antar kelompok? Bagaimana langkah-langkah yang bisanya mereka lakukan dalam menenangkan para anggotanya?
12. Seberapa percaya anggota kelompok terhadap para pemimpinnya? Faktor-faktor apa saja yang membuat mereka percaya?

#### PERTANYAAN PENELITIAN 4:

Bagaimana peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menangani segregasi dan dampaknya terhadap munculnya konflik kekerasan di Ambon?

#### *Informan Terkait*

Unsur keagamaan (FKUB, ormas Islam, dan ormas Kristen, dll.); unsur masyarakat sipil (penggiat LSM terkait isu sosial, khususnya perdamaian); unsur pemuda (tokoh pemuda, karang taruna, dll).

#### *Pertanyaan Interview:*

1. Secara singkat, bisakah Anda deskripsikan peran dan posisi Anda di lembaga Anda?
2. Seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang dianggap membantu terciptanya situasi kondusif pasca konflik? Lembaga pemerintah? Lembaga penegak hukum? LSM? Forum komunikasi?
3. Lembaga-lembaga apa saja yang aktif berperan serta dalam menciptakan situasi damai?
4. Bagaimana peran lembaga Anda tersebut dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai?

5. Bagaimana Anda menggambarkan kesiapan lembaga Anda dalam mencegah kekerasan antar kelompok di daerah ini?
6. Bagaimana cara atau metode yang digunakan atau diterapkan oleh lembaga Anda untuk mencegah dan menangani kekerasan pasca konflik tersebut?
7. Apa saja yang dilakukan oleh lembaga Anda dalam mengelola masalah pemisahan kelompok di daerah ini?
8. Bagaimana Anda melihat posisi lembaga Anda dalam mengatasi masalah yang muncul antar kelompok?
9. Menurut Anda, apa kepentingan, tujuan, dan maksud lembaga Anda tersebut dalam menangani segregasi dan kekerasan yang ditimbulkannya?
10. Sejauh ini, menurut Anda, seberapa efektif dan/atau berhasil upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga Anda dalam menangani segregasi tersebut?
11. Menurut Anda bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dipakai oleh lembaga Anda atau lembaga-lembaga lainnya dalam membantu mengatasi ketegangan dan kekerasan antar kelompok di daerah ini?
12. Sejauh mana lembaga Anda juga melibatkan peran wanita dalam menangani perbedaan dan kekerasan antar kelompok?
13. Bagaimana Anda melihat peran wanita dalam memperlebar atau menjembatani perbedaan dan kekerasan antar kelompok?

## THE HABIBIE CENTER

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga pada tahun 1999 sebagai organisasi independen, nonpemerintah dan nonprofit. Visi The Habibie Center adalah menciptakan masyarakat demokratis secara struktural berdasarkan moralitas dan integritas nilai-nilai budaya dan agama. Misi The Habibie Center adalah pertama, untuk mendirikan masyarakat demokratis secara struktural dan kultural yang mengakui, menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia, melakukan studi dan advokasi isu-isu tentang perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia dan kedua, untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan sosialisasi teknologi.

Alamat: Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan 12560, Indonesia  
Telp. 62 21 780 8125/62 21 781 7211 | Fax. 62 21 780 8125/62 21 781 7212  
E-mail: [nvms@habibiecenter.or.id](mailto:nvms@habibiecenter.or.id) | [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)  
[@habibiecenter](https://facebook.com/habibiecenter)

## SISTEM NASIONAL PEMANTAUAN KEKERASAN (SNPK)

SNPK merupakan sebuah terobosan dalam sistem informasi yang menyediakan data dan analisis tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek SNPK dipimpin oleh Kemenkokesra, dengan dukungan Bank Dunia dan The Habibie Center. Kegiatan utama SNPK adalah *pertama*, pengumpulan data secara rinci dan berkala tentang kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa kekerasan terjadi serta apa saja dampaknya. Data SNPK dikumpulkan sejak 1998 dan diperbaharui setiap bulan dan disajikan melalui portal SNPK ([www.snpk-indonesia.com](http://www.snpk-indonesia.com)); *kedua*, analisis atas data yang sudah dikumpulkan dan penelitian mengenai konflik dan kekerasan. SNPK ditujukan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan kebijakan serta program penanganan dan pencegahan kekerasan.

Hingga saat ini SNPK mencakup tiga belas wilayah, yakni: Aceh, Lampung, Jabodetabek, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat. Saat ini sedang diupayakan perluasan cakupan hingga data kekerasan dari seluruh wilayah Indonesia dapat disediakan di masa depan.